



11610

PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS INDONESIA



UNIVERSITAS INDONESIA

**LAJUR KANAN SEBUAH JALAN
DINAMIKA PEMIKIRAN DAN AKSI BINTANG BULAN
STUDI KASUS GERAKAN DARUL ISLAM 1940 – 1962**

TESIS

diajukan untuk melengkapi
persyaratan memperoleh gelar Magister Humaniora
pada Program Pascasarjana
Bidang Ilmu Pengetahuan Budaya
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia
Program Studi Ilmu Sejarah

11610

Oleh

**Bambang Imam Eka Respati Sabirin
NIM 6799040059**

**PROGRAM PASCASARJANA
ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
2003**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah diujikan pada Senin, 30 Juni 2003, pukul 11.00-13.00, dengan susunan penguji sebagai berikut:

1 Prof Dr. Ayatrohaedi
Ketua Penguji

2. Dr. Anhar Gonggong
Pembimbing/Penguji

3. Dr. Saleh A. Djamhari
Pembaca/Penguji

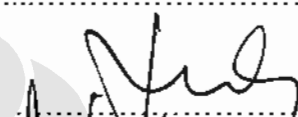
4. Prof Dr. R.Z. Leirissa
Penguji

5. Dr. Suharto
Penguji

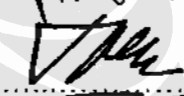
Tanda Tangan







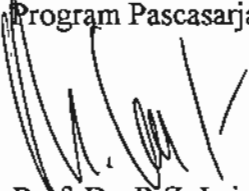




Disahkan oleh

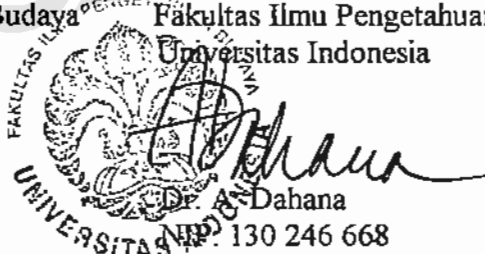
Depok, 25 JULI 2003.

Ketua Program Studi Ilmu Sejarah
Program Pascasarjana Ilmu Peng. Budaya



Prof. Dr. R.Z. Leirissa

Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia


Dr. A. Dahana
NIP. 130 246 668

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
UNIVERSITAS INDONESIA
Berikan Stempel dari
FIB
11313
Diterima 19 JUL 2003

Abstrak

Lajur Kanan Sebuah Jalan: Dinamika Pemikiran dan Aksi Bintang Bulan Studi Kasus Gerakan Darul Islam 1940 - 1962

Penelitian ini berjudul Lajur Kanan Sebuah Jalan: Dinamika Pemikiran dan Aksi Bintang Bulan, Studi Kasus Gerakan Darul Islam 1940 – 1962, yang berusaha menjelaskan dan merekonstruksi benang merah pemikiran dan aksi S.M. Kartosoewirjo, pada kurun pra-kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan.

Fokus utama dari kajian ini terletak pemikiran Soekarnadji Maridjan Kartosoewirjo dan aksi-aksinya yang melahirkan KPK PSII, Institut Suffah dan Konferensi Cisayong 1948, yang merupakan tonggak-tonggak melahirkan Negara Islam Indonesia. Sejauh mana signifikansi peristiwa tersebut dalam pengertian agama, ideologis, politik, maupun budaya.

Ruang lingkup penelitian meliputi Jawa Barat diprioritaskan di daerah Priangan Timur, dan pada kurun pra kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan dari 1940 sampai dengan 1962. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan strukturalis dengan teori *collective action* untuk membedakan penelitian yang pernah dilakukan selama ini menggunakan pendekatan politik. Sumber penelitian yang digunakan baik dari sumber primer maupun sekunder dan dimungkinkan dengan menggunakan metode wawancara (*oral history*).

Sebagai seorang prinsipalis semenjak Pra-Kemerdekaan Soekarnadji Maridjan Kartosoewirjo menyebut dirinya sebagai keluarga “Bintang-Bulan” untuk membedakan dirinya dengan kelompok Nasionalis Islami (Bulan Bintang). Tujuan penelitian ini untuk menguji sejauh mana pengaruh Pemikiran Soekarnadji Maridjan Kartosoewirjo mentransformasi dalam gerakan Darul Islam dalam hubungannya dengan tesis *collective action*. Dan manfaatnya memberikan kontribusi dalam dunia akademis dalam merekonstruksi dinamika pemikiran dan aksi yang begitu lama dan luas pengaruhnya.

Abstract

“The Right Way of Street: The Dynamic of Thinking and Action of Bintang Bulan The Case Study of The Darul Islam Movement 1940 – 1962”

This title in this writing is The Right Way of Street : The Dynamic of Thinking and Action of Bintang Bulan, The Case Study of The Darul Islam Movement 1940 -1942. which tried to clarify and reconstruct the link of idea and the action of Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, in the era of pre independent and after that. This is focused on the study of KPK-PSII, Institut Suffah and Cisayong Conference 1948. In order to find significant of the event which deals with the religion, ideology, politics and culture.

This research was including West Java especially at the resort of east Priangan, in National Revolution 1940 until 1962 . This research method used structures approach by using theory of collective action to make differentiate of the research used both primer and secunder sources and could use the oral history.

As a principalist, at the indenpenent, Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo called himself the family of “Bintang Bulan”. This is just to make the differentiate between the Islamic Nationalism family (Bulan Bintang). The purpose of this research to find of the way Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo thinking when he transforted it into The Darul Islam movement in the relationship of collective action thesis. The Benefit of it gives constribution in the academic field to reconstruct the dynamic thinking and action that was take long time and the influences extended widely.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena atas tolong dan karunia-Nya hingga akhirnya penulisan tesis ini dapat dirampungkan. Seorang teman senior penulis pernah mengatakan kepada penulis, bahwa keberhasilan menyelesaikan studi di tingkat Pascasarjana, jangan semata-mata dilihat dari hasil atau gelar yang diperolehnya. Tetapi perlu juga, diingat bagaimana perjuangan dan suka dukanya dalam proses penyelesaian studinya. Sebab di Indonesia, terlalu banyak problem-problem di luar studi – apakah itu problem pribadi, keluarga dan bahkan ekonomi – yang dapat mempengaruhi lancar tidaknya studi seseorang.

Semula penulis kurang percaya kepada pandangannya itu. Tetapi sesudah mengalaminya sendiri barulah percaya. Banyak problem yang harus diatasi sebelum akhirnya penulisan tesis ini terselesaikan. Kadang-kadang datangnya masalah itu di luar dugaan dan bertubi-tubi, sehingga memerlukan ketabahan dan kesabaran untuk mengatasinya. Disini factor “pertolongan Tuhan” juga menentukan.

Namun demikian penulisan tesis ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan banyak pihak baik individu maupun lembaga. Oleh sebab penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik yang bersifat moril maupun materil demi lancarnya penulisan tesis ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada dua orang pembimbing yakni Dr. Anhar Gonggong selaku pembimbing pertama dan Dr. Saleh A Djamhari selaku pembimbing kedua. Untuk semua itu, beliau telah memberikan bimbingan maksimal yang tulus dan sabar dan amat menggembirakan.

Prof. Dr. R. Z. Leirissa, dosen dan penguji. Beliau dengan segala keramahannya telah mengarahkan penulis secara langsung dan tak langsung untuk mencapai tahap penulisan sejarah yang baik. Hal ini penulis sadari sejak masa perkuliahan berlangsung. Terima kasih atas bimbingannya.

Terima kasih pula kepada Prof. Dr. Ayatrohaedi sebagai ketua penguji dan Dr. Suharto sebagai dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik bagi perbaikan tesis ini. Dan tak lupa kepada Kasijanto M. Hum., sekretaris program Pascasarjana program Studi Ilmu Sejarah saya ucapkan banyak terima kasih yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.

Atas kebaikan yang telah diberikan selama mengikuti perkuliahan di S2 untuk Mbak Ari, Mbak Wiwi dan Mbak Nur. Untuk teman-teman di S2 penulis pun tidak lupa mengucapkan terima kasih atas dorongan dan kritiknya terutama untuk Mbak Jenny Sista Siregar, dan Mas Didik.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Drs. H. Inggus Hasanudin M.M., yang telah memberi izin dan atas kebaikannya sehingga penulis bisa mengikuti Program Pascasarjana. Untuk teman-teman di SMUN 1 Bekasi yang telah banyak merepotkan, ucapan terima kasih tak terhingga patut penulis berikan. Demikian pula

kepada siswa-siswi angkatan 1999, 2000 dan 2001 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah banyak menyusahkan dan juga atas bantuannya penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Penyusunan tesis ini tidak akan terwujud jika tidak didukung oleh data yang memadai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada kepala-kepala perpustakaan beserta staf yang telah mengijinkan dan melayani saya dengan baik untuk menggunakan koleksinya. Perpustakaan-perpustakaan itu adalah perpustakaan Nasional, Perpustakaan Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Idhayu di Jakarta. Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia semuanya di Depok.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Kepala Sub Dinas Sejarah, Pembinaan Mental Angkatan Darat di Bandung yang telah mengijinkan saya untuk menggunakan koleksi arsip yang disimpannya. Terutama atas kebaikan dan pelayanannya kepada Pak Oding, Mas Gatok dan Mas Sulis.

Ucapan terima kasih kepada para pelaku sejarah diantaranya Lukman Dahlan, Affandi Ridhwan, Dodo Mohammad Darda, H. Maskur, Ules Suja'i, H. Sarif Muslim, Jamhur Sudrajat, Tahmid Rahmat Basuki, Toha Mahfud dan Zainal Mutaqin yang telah bersedia memberikan informasi tentang pengalaman masing-masing, khususnya aktivitasnya berkaitan dengan Darul Islam.

Tidak lupa pula ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak dan Ibu Ali beserta keluarga yang telah memberikan tempat dan kesempatan untuk berdialog sehingga tesis ini bisa diselesaikan. Kepada teman-teman di Lingkar Studi “MMS” juga tidak lupa penulis ucapkan terima kasih atas dukungan, saran dan kritiknya, yang telah membangun wacana, mentalitas dan praxis untuk lebih maju. Terima kasih atas dukungannya kepada teman-teman dekat saya, Kang Dzikri, Agus, Mas Agung, Mas Tokek, Dedi, Soffy, Iqbal, Suyatna, Mas Toyo, Harto, Ipung, Priyanto, Mbak Wiwin Andi, Fitri, Munadi dan Faisal.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih dan rasa hormat yang terdalam kepada isteri saya. Eneng dan Endah, dan anak-anak Egi, Tia, Hani, Hadi, Ari, Ina, Dina, Feli, Ami, Rani, Afifah dan Ira. Semoga segala kebbaikannya dan perhatiannya mendapat balasan yang setimpal.

Kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penulisan tesis ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR FOTO.....	xvii
CATATAN TENTANG EJAAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Pokok Bahasan.....	1
I.2. Tujuan Penelitian	10
I.3. Tinjauan Pustaka.....	11
I.4. Perumusan Masalah	16
I.5. Konsep dan Teori.....	17
I.6. Metode Penelitian.....	21
I.7. Sumber Data.....	22
I.7.1. Sumber Primer.....	23
I.7.2. Sumber Sekunder.....	24
BAB II JAWA BARAT SEBELUM REVOLUSI NASIONAL.....	24
II.1. Geografis	24
II.2. Kehidupan Politik dan Birokrasi	27
II.3. Sosial Budaya dan Ekonomi	33
II.4. Agama dan kehidupan sosial.....	40
BAB III SEKILAS BIOGRAFI SOEKARMADJI MARIDJAN KARTOSOEWIRJO.....	48
III.1. Masa muda.....	48
III.2. Aktivitas Intelektual dan Organisasi	56
III.3. Kepribadian dan Kepemimpinan	65
III.4. Kartosoewirjo dan Karya-karyanya.....	78
BAB IV AWAL PERGERAKAN ISLAM	93
IV.1. Gerakan Politik Islam	93
IV.2. Kiprah Pergerakan Islam Masa Jepang.....	114

IV.3. Kemerdekaan Indonesia.....	124
IV.4. Sikap Politisi Islam Jawa Barat.....	132
BAB V PEMIKIRAN DAN AKSI S.M. KARTOSOEWIRJO.....	146
V.1. Pemikiran Masa muda	146
V.2. Pemikiran Politik	160
V.3. Pemikiran dan Aksi Pasca Revolusi Nasional.....	171
BAB VI KONFERENSI CISAYONG 1948.....	181
VI.1 Konferensi Cisayong	181
VI.2 Pertempuran Gunung Cupu... ..	191
VI.3. Tindak lanjut Konferensi Cisayong.....	198
VI.4. Peristiwa Antralina.....	208
BAB VII NEGARA ISLAM INDONESIA.....	215
VII.1. Proklamasi Negara Islam Indonesia.....	215
VII.2 Kanun Asasy dan Kitab Undang-Undang Pidana NII.....	221
VII.3. Struktur Pemerintahan NII.....	228
VII.4. Runtuhnya Negara Islam Indonesia.....	255
BAB VIII KESIMPULAN.....	269
DAFTAR SUMBER.....	276
DAFTAR ISTILAH.....	291
LAMPIRAN.....	296
LAMPIRAN FOTO.....	353
LAMPIRAN STRUKTUR ORGANISASI.....	357
LAMPIRAN PETA.....	358
DAFTAR INFORMAN.....	359

DAFTAR SINGKATAN



AD	Angkatan Darat
AKT	Anggota Komandemen Tertinggi
ANRI	Arsip Nasional Republik Indonesia
AOI	Angkatan Oemat Islam
API	Angkatan Pemuda Indonesia
APNII	Angkatan Perang Negara Islam Indonesia
APRA	Angkatan Perang Ratu Adil
APRIS	Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
BARIS	Barisan Rakyat Islam
BFO	Bijeenkomst voor Federaal-Overleg
BKD	Badan Keamanan Desa
BKN	Barisan Keamanan Negara
BP-KNIP	Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat
BP-PSII	Barisan Penyadar Partai Sarekat Islam Indonesia
BPUPKI	Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
BSH	Barisan Sakit Hati
BTI	Barisan Tani Indonesia
DI	Darul Islam
DIV	Divisi

DMOII	Dewan Mobilisasi Oemat Islam Indonesia
DO	Daerah Operasi
ELS	Europeeche Lagere School
FDR	Front Demokrasi rakyat
GAPI	Gabungan Politik Indonesia
GKS	Gerombolan Kartosoewirjo
GPII	Gerakan Pemuda Islam Indonesia
H	Tahun Hijrah
HBS	Hogere Burgerschool
HIS	Hollandsch Inlandsche School
ISDV	Indische Sociaal-Democratische Vereniging
KD	Komandemen Daerah
KDM	Komando Distrik Militer
KK	Komandemen Kabupaten
KKt	Komandemen Ketjamatan
KMB	Konperensi Meja Bundar
KNIL	Koninklijk Nederlands Indische Lager
KNIP	Komite Nasional Indonesia Pusat
KODAM	Komando Daerah Militer
KOMPAS	Komando Pangkalan Serempat
KPK-PSII	Komite Pembela Kebenaran Partai Sarekat Islam Indonesia

KPSI	Komando Perang Seluruh Indonesia
KPW	Komando Perang Wilayah
KPWB	Komando Perang Wilayah Besar
KSKD	Kepala Staf Komandemen Daerah
KSKK	Kepala Staf Komandemen Kabupaten
KSKKt	Kepala Staf Komandemen Ketjamatan
KSU	Kepala Staf Umum
KT	Komandemen Tertinggi
KW	Komandemen Wilayah
MASYUMI	Majelis Syuro Muslimin Indonesia
MBKD	Markas Besar Komando Djawa
MBS	Medan Bakti Suci (Markas Bantala Seta)
MDPP	Markas Daerah Pertahanan Priangan
MI	Madjelis Islam
MIAI	Madjelis Islam A'laa Indonesia
MKT-APNII	Maklumat Komandemen Tertinggi APNII
MPOI	Madjlis Pertahanan Oemat Islam
MPPP	Madjlis Persatuan Perdjuangan Priangan
MULO	Meer Uitgebreid Lager Onderwijs
NIAS	Nederlands Indische Artsen School
NICA	Netherlands Indies Civil Administration
NII	Negara Islam Indonesia

NU	Nahdlatul Ulama
OKD	Organisasi Keamanan Desa
OPR	Operasi Pertahanan Rakyat
PADI	Pahlawan Darul Islam
Partindo	Partai Indonesia
PB	Pengurus Besar
PDRI	Pemerintah Darurat Republik Indonesia
Persis	Persatuan Islam
Pesindo	Pemuda Sosialis Indonesia
PETA	Pembela Tanah Air
PII	Polisi Islam Indonesia
PKI	Partai Komunis Indonesia
PMI	Pemuda Muslimin Indonesia
PNI	Partai Nasional Indonesia
Poetera	Poesat Tenaga Rakjat
PPKI	Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PPPKI	Pemufakatan Perhimpunan Perhimpunan Politik Kebangsan Indonesia
PPS	Perintah Perang Semesta
PSI	Partai Sarekat Islam
PSII	Partai Sarekat Islam Indonesia
PSHIT	Partai Sarekat Islam Hindia Timur



RAPI	Ratu Adil Persatuan Indonesia
RI	Republik Indonesia
RIS	Republik Indonesia Serikat
SI	Sarekat Islam
SKD	Sabilillah Keamanan Desa
SLW	Siliwangi
SMK	Soekarnadji Maridjan Kartosoewirjo
SOB	Staat van Oorlog en van Beleg
SR	Sunan Rahmat
STII	Sarikat Tani Islam Indonesia
SUAD	Staf Umum Angkatan Darat
SUDAM	Staf Umum Daerah Militer
TI	Tentara Islam Indonesia
TKR	Tentara Keamanan Rakyat
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TRI	Tentara Republik Indonesia
UUD 45	Undang-Undang Dasar 1945

DAFTAR LAMPIRAN

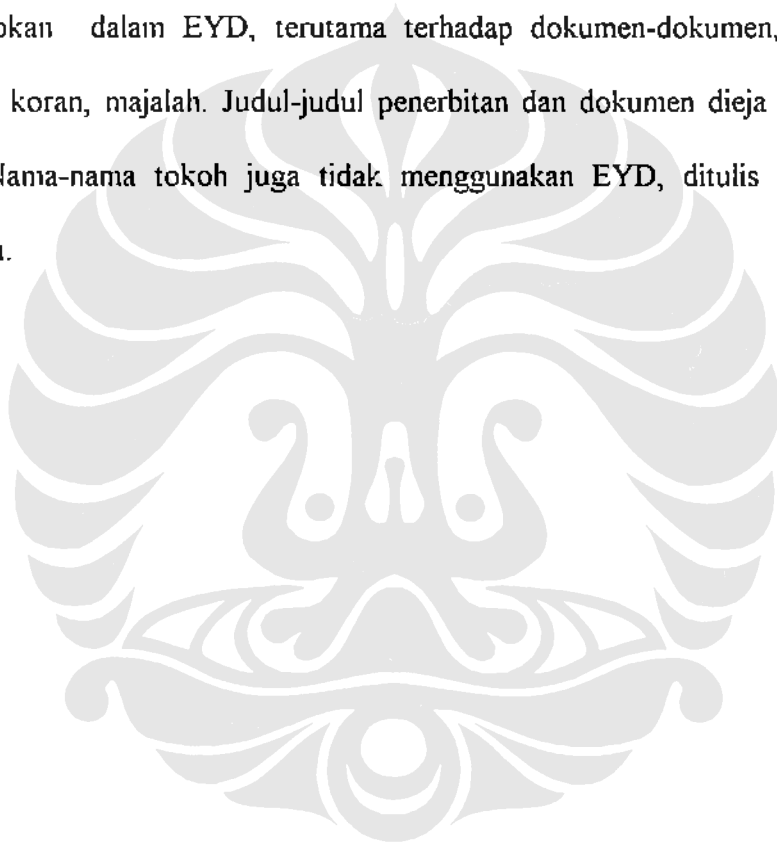
1. Keputusan Conferentie Masjumi dan Bagian-bagiannya.....	296
2. <i>Fadjar Asia</i> , tanggal 29 Januari 1929.....	300
3. Surat Dewan Pembelaan P.B. Masjumi.....	301
4. Surat P.B. Masjumi tanggal 9 April 1949.....	302
5. Keputusan Presiden RIS No. 210 Tahun 1950.....	303
6. Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No, 11/1950.....	304
7. Peraturan Panglima Tentara dan Territorium III Djawa Barat No. 25.....	305
8. Surat Madjlis Islam Pusat.....	307
9. Surat Izin Djalan.....	308
10. Surat Anwar Tjokroaminoto 30 Djuli 1948.....	309
11. Surat Perintah Perdana Menteri RI No. PM/11/50.....	310
12. Kutipan Keputusan Menteri Agama Ri No. 51/A/D/b.6.....	311
13. Statement Masjumi Tentang Peristiwa Darul Islam.....	312
14. Ikrar Bersama.....	313
15. Daftar Nana-nama sebagian Tokoh GKS yang menyerah.....	316
16. Proklamasi NII berikut penjelasannya.....	319
17. Kanun Asasy NII.....	322
18. Mendjelang Dunia Baru Darul Islam atau Negara Islam Indonesia.....	329
19. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana NII.....	342
20. Struktur organisasi NII.....	357

DAFTAR FOTO

1. Mushola yang dipakai Konferensi Cisayong 1948.....	353
2. Mushola tampak dalam.....	353
3. Gedung Madrasah Ibtidaiyah yang dipakai Konferensi Cipeundeuy.....	354
4. Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.....	354
5. Proklamasi NII 7 Agustus 1949.....	355
6. Sidang Mahadper 1962.....	355
7. Sidang Mahadper 1962.....	356
8. Warga NII 1962.....	356
9. Peta Jawa Barat.....	359

CATATAN TENTANG EJAAN

Semua istilah dalam tesis ini saya eja menurut Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) Tetapi, sebagaimana lazimnya dalam dunia akademis tidak semua istilah saya terapkan dalam EYD, terutama terhadap dokumen-dokumen, kutipan dari dokumen, koran, majalah. Judul-judul penerbitan dan dokumen dieja sesuai dengan aslinya. Nama-nama tokoh juga tidak menggunakan EYD, ditulis sesuai dengan ejaan lama.



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Pokok Bahasan

Pergerakan Darul Islam muncul semasa Revolusi Nasional 1945-1949 ketika Bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, tetapi Belanda yang pernah menjajah Indonesia tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, dengan membonceng tentara sekutu melakukan pendudukan sehingga terjadi apa yang disebut perang kemerdekaan atau Revolusi Nasional yang berkecamuk di seluruh Indonesia, sebagian daerah terjadi apa yang disebut revolusi sosial seperti yang terjadi pada peristiwa tiga daerah¹.

Munculnya gerakan Darul Islam yang kemudian berkembang menjadi Negara Islam Indonesia merupakan suatu transformasi dari Revolusi Nasional untuk mempertahankan kemerdekaan yang lahir dari kelompok sosial yang menganut agama Islam, tentunya Islam dalam pengertian Idiologi, Islam yang telah menjadi suatu mentalite bagi kelompok sosial tersebut.²

¹Anton E. Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi*, 1989, Ben Anderson. *Revolusi Pemuda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, 1988, Taufik Abdullah (Ketua Pengarah). *Denyut Nadi Revolusi Indonesia*, 1997.

²"Mentalite" yaitu "pemahaman orang tentang dirinya dan lingkungannya yang diekspresikan dalam bentuk agama, ritus, musik, busana". "Mentalite" memainkan peranan dalam memotivasi, menyahurkan dan mendominasi tindakan-tindakan agency. "Mentalite" sulit dipisahkan

Selama masa sebelum Perang, kelompok masyarakat Islam ini telah berkembang dan menginginkan bentuk ikatan masyarakat baru yang dicita-citakannya, dengan dua model perjuangan. Pertama model perjuangan kooperasi dengan cara parlementer dan yang kedua dengan model perjuangan non-kooperasi yang belakangan disebut model hijrah. Kelompok pertama adalah masyarakat muslim yang dikenal dengan kelompok "Bulan-Bintang" sedang kelompok yang kedua disebut kelompok "Bintang-Bulan".

Gerakan Darul Islam dengan tokoh sentralnya Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo merupakan gerakan yang bertujuan menciptakan masyarakat Islam dengan model hijrah.³ Pemikiran Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo diawali dengan sikap kritis terhadap lingkungan dan masyarakatnya dan hingga pemikiran

dari struktur sosial, struktur ekonomi dan struktur politik. Perlu ditambahkan, bahwa harus dibedakan antara mentalite dan "mental structure" yang juga sangat penting dalam menampilkan "agency". Dengan istilah "mental structure" itu dimaksudkan kemampuan seseorang (termasuk pelaku sejarah) untuk memonitor pemikirannya sendiri (memahami apa yang dipikirkannya), dan malah memonitor proses monitor tersebut (memahami bagaimana ia mempelajari pemikirannya sendiri). Dengan kata lain "mental structure" menyangkut kesadaran mengenai diri sendiri. Jadi "Agency" mengandung arti bahwa tindakan individu atau kelompok ('Action') adalah produk dari pemahaman yang sadar (baik ideologis maupun ilmiah) mengenai posisi sosial yang bersangkutan". "Mentalite" yang mengandung makna ("meaning") juga mencakup ideologi. R.Z. Leirissa, *Metodologi Sejarah*, 2001, hal. 47-48.

³Demikianlah ada kaum Muslim yang memperjuangkan aspirasi mereka dengan cara-cara yang legal, damai dan kompromistis, dan ada pula kaum Muslimin yang memperjuangkan interest mereka dengan cara-cara yang radikal, non-kompromistis dan, biasanya, mempergunakan saluran-saluran politik yang ilegal. Kelompok pertama umumnya "menyatu dengan perjuangan bangsa"-nya dan oleh karenanya disebut sebagai kelompok "integrasionis", sedangkan kelompok ke dua biasanya "menisahkan diri dari perjuangan kebangsaan" dan oleh karenanya disebut sebagai kelompok "isolasionis". Istilah "integrasionis" dan "isolasionis". Penulis membedakan kelompok Islam intergrasionis dengan istilah "Bulan Bintang" dan kelompok Islam yang isolasionis dengan istilah "Bintang Bulan". Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Ummat Islam Indonesia*, 1985, hal. 74-75.

politik untuk menjawab problematika masyarakat. Manifestasi dari pemikiran dan sikapnya berupa aksinya yang dilakukan oleh Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yang berawal dari Konferensi Cisayong sampai terbentuknya Negara Islam Indonesia.

Walaupun telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia, tetapi dunia belumlah mengakui kedaulatan Indonesia, sebab dunia beranggapan bahwa status Indonesia masih merupakan jajahan Belanda, walaupun rezim militer Jepang telah menyerah kepada Sekutu dalam Perang Dunia II dan tidak lagi memiliki kekuasaan atas tanah jajahannya yang direbut dari Belanda tahun 1942. Hal ini berarti kemerdekaan Indonesia akan segera diakui oleh dunia bila Belanda memang telah memerdekakan tanah jajahannya.

Maka dengan cepatlah Inggris, sekutu Belanda pada Perang Dunia II, mengirim pasukannya ke Indonesia hanya enam pekan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dengan tugas khusus melucuti senjata tentara Jepang dan mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang, untuk kemudian menyerahkannya kembali kepada para pejabat sipil Belanda.

Sementara itu, sikap pemerintah dan rakyat Indonesia sendiri tidak kompak. Di satu pihak pemerintah, yang mengetahui keadaan riil kekuatan militer Indonesia, yang mereka perkirakan tak sebanding dengan tentara Sekutu, memilih jalur perundingan diplomatik dengan pihak Belanda dan berusaha meraih simpati internasional melalui PBB. Di lain pihak kalangan militer dan politisi Indonesia

memandang strategi perundingan diplomatik ini sebagai “menjual diri kepada Belanda”, dan oleh karenanya mereka menghendaki agar Indonesia “100 % merdeka”⁴ dengan bertempur mati-matian melawan Belanda. Situasi seperti ini jelas menimbulkan ketegangan di antara kedua kubu tersebut dan, ternyata bangkitnya Darul Islam pun sebagian dimatangkan oleh situasi ini.

Demikianlah, kecaman pedas pertama dari pendukung perjuangan bersenjata diarahkan kepada hasil-hasil Perundingan November 1945 yang membatasi wilayah Indonesia hanya sebatas Sumatera dan Jawa. Tambahan lagi pada 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militernya yang pertama, semakin besarlah keyakinan para gerilyawan Indonesia akan perlunya suatu konsentrasi perlawanan semesta untuk menghadapi serbuan-serbuan Belanda itu.⁵

Akan tetapi, kalangan sipil Indonesia juga berupaya melakukan diplomasi internasional. Agresi Militer Pertama Belanda tersebut mengundang turut campurnya PBB ke dalam penyelesaian konflik Indonesia-Belanda ini, apalagi Amerika Serikat, Inggris dan Australia sendiri, sebagai sekutu terdekat Belanda, tidak menyukai gaya kekerasan yang dijalankan oleh Belanda, maka tidak kecil kemenangan diplomatik yang diraih oleh para pendukung perundingan diplomasi.⁶

Campur tangan PBB dan kecaman-kecaman Sekutu terhadap Belanda ini akhirnya menghasilkan apa yang kemudian dikenal dengan perundingan Renville.

⁴Colin Wild & Peter Carey, *Gelora Api Revolusi. Sebuah Antologi Sejarah*, 1986, hal 126, 174. Robert Bridson Crib, *Gejolak Revolusi Di Jakarta 1945-1949*. 1990, hal. 124,128.

⁵Ide Anak Agung Gde Agung, *Persetujuan Linggajati Prolog & Epilog*. 1994, hal 208. George Mc Turnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi Di Indonesia*, 1995, hal. 246-248.

Tetapi perundingan yang diselenggarakan tanggal 18 Januari 1948 dan yang mengambil nama dan sebuah kapal perang Amerika Serikat itu sangat memojokkan posisi Indonesia dalam hubungannya dengan Belanda perundingan itu memberikan pengakuan kepada Belanda atas daerah-daerah Indonesia yang telah diduduki Belanda dalam Agresi Militer pertama.⁷

Ini berarti pemerintah Indonesia menyerahkan secara gratis sisa-sisa terakhir benteng pertahanannya, untuk kemudian hanya memiliki kekuasaan daerah *de facto* sebatas Yogyakarta dan sekitar tujuh Karesidenan di sekelilingnya. Tentu saja, segera terjadi dampak yang lebih besar bagi kalangan militer, mereka harus segera mengosongkan kantong-kantong pertahanannya, untuk selanjutnya mengungsi ke ibukota Republik Indonesia, yakni Yogyakarta. Tak pelak lagi, kecaman-kecaman pedas yang dilontarkan oleh para pendukung perjuangan bersenjata segera datang bertubi-tubi. Persetujuan sebelumnya, yakni Persetujuan Linggajati, sudah amat ditentang, apalagi Renville yang jelas-jelas merugikan pihak Indonesia itu.

Lain halnya Soekarnadji Maridjan Kartosoewirjo, politisi berpengalaman di masa prakemerdekaan dan salah satu pendukung fanatik perjuangan bersenjata Indonesia dalam berhadapan dengan Belanda, menolak untuk mematuhi keputusan Persetujuan Renville.⁸

⁶Rudolf Mrazek. *Sjahrir Politik dan Pengasingan di Indonesia*, 1996, hal. 570-582.

⁷Ide Anak Agung Gde Agung, *Renville*, 1991.

⁸Dokumentasi Sedjarah Militer AD. *Darul Islami*, 1952, hal. 4, Wawancara dengan Affandi Ridhwan pada tanggal 27 Juni 2001 di Jakarta.

Dalam rangka mengkonsolidasikan kekuatannya pada tanggal 10-11 Februari 1948, Soekarmadji Maridjan. Kartosoewirjo sebagai Komisaris Masyumi Jawa Bagian Barat bersama ummat Islam Jawa Barat mengadakan Konferensi di desa Pamedusan, Kecamatan Cisayong⁹, Kabupaten Tasikmalaya, yang hadir dalam konferensi itu antara lain tokoh-tokoh Islam – Ulama dan organisasi Islam: Masyumi, GPII, GPII Poetri, Hizbullah dan Sabilillah. Dalam konferensi itu diputuskan : Membekukan Masyumi Jawa bagian Barat dan membentuk Majelis Islam (MI), dan Tentara Islam Indonesia (TII).

Konferensi Cisayong 1948 telah memilih Soekarmadji Maridjan. Kartosoewirjo sebagai Imam Majelis Islam (MI). Selanjutnya bersama-sama dengan lasykar Hizbullah dan milisi Sabilillah, ia bertahan di Gunung Cupu¹⁰ dan di pegunungan di daerah segitiga Garut, Tasikmalaya dan Ciamis untuk menghadapi serangan Pasukan Belanda. Pasukan Belanda ini memburu organisasi-organisasi yang tidak menerima persetujuan Renville terutama dari kalangan Masyumi dan kalangan Islam yang ada di daerah Priangan.

Pada waktu itu, perlawanan terhadap Belanda yang dilakukan oleh orang yang memang dikenal serba prinsipalis semenjak aktif di dalam Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dahulu ini tidaklah dianggap terlalu merisaukan, sebab umumnya orang telah faham, bahwa para pendukung perjuangan bersenjata senantiasa menolak

⁹Wawancara dengan Dodo Mohanumad Darda pada tanggal 15 September di Bandung. Menurut Dodo Mohammad Darda dihadiri pula oleh Pesindo daerah Cirebon; Peristiwa Konferensi Cisayong 1948 yang terdapat dalam dokumen, Dokumentasi Sedjarah TNI AD, 1952.

konsensus dengan pihak Belanda, apa pun, manifestasinya. Tetapi, bahwa aksi ini merupakan embrio pembentukan Negara Islam Indonesia oleh S.M. Kartosoewirjo yang merupakan problem di kemudian hari bagi Pemerintah Republik Indonesia, belumlah diperkirakan oleh para elit Pemerintah Republik Indonesia.

Demikianlah, pada bulan-bulan Februari, Maret dan Mei 1948 S.M. Kartosoewirjo mengkonsolidasikan kekuatannya, dan pada tanggal 20 Desember 1948, sehari setelah Belanda melanggar Persetujuan Renville melalui apa yang dikenal sebagai Agresi Militer kedua tanggal 19 Desember 1948, Kartosoewirjo mengklaim beberapa bagian wilayah Priangan Timur, yang sebelumnya dijadikannya basis pertahanannya itu, sebagai wilayah *de facto* kekuasaannya, dan dilanjutkan kemudian dengan Maklumat No. 5, "Maklumat Perang Suci", tanggal 20 Desember 1948 yang menyerukan agar seluruh rakyat Indonesia dan ummat Islam bangsa Indonesia khususnya untuk angkat senjata menghadapi Belanda, yang dipelopori APNII sehingga revolusi Islam selesai dan NII berdiri diseluruh Indonesia¹¹

Bila dicermati, bahwa aksi-aksi politik S.M. Kartosoewirjo pada waktu itu telah memakai atribut "Negara Islam Indonesia" (NII) dengan terang-terangan. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa S.M Kartosoewirjo telah memisahkan diri dan negara kesatuan Indonesia. Bahkan tidak berhenti di situ saja; Ia pun menunjukkan sikap tidak bersahabat terhadap Tentara Nasional. Indonesia (TNI). Hal ini terlihat

¹⁰Gunung Cupu adalah nama suatu desa yang terletak antara Tasikmalaya dan Ciamis, dan dilewati oleh sungai Citanduy.

¹¹Salinan Pedoman Dharma Bakti. Djilid 1, 1960, Maklumat No. 5, 20-12-1948. hal.10-11

sewaktu S.M. Kartosoewirjo dan Tentara Islam Indonesia (TII)-nya menyerang pasukan-pasukan TNI di desa Antralina, Kabupaten Tasikmalaya, bulan Januari 1949, ketika yang disebut belakangan ini kembali ke Markas Besarnya di Bandung setelah-ibukota Yogyakarta digempur Belanda dalam Agresi Militer Kedua.

Pada akhirnya pada saat para pemimpin Republik Indonesia waktu itu tengah bersungguh-sungguh mengupayakan suatu perundingan final internasional demi memperoleh pengakuan kedaulatan bagi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1949 ia memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia di Cisampang Desa Cidugaleun, Kecamatan Cigalontang Tasikmalaya. Meskipun pada tanggal 27 Desember 1949 Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan oleh Belanda.

Menyusul terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1950, setelah RI Yogyakarta dan RIS dibubarkan, sempat menampilkan rekan-rekan seperjuangan S.M. Kartosoewirjo, seperti Mohammad Natsir dan Dr. Soekiman, sebagai Perdana Menteri, S.M. Kartosoewirjo tidaklah berhenti meneruskan NII-nya. Bahkan meluaskan pengaruhnya ke Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh dan Kalimantan Selatan, masing-masing pada tahun 1950, 1952, 1953 dan 1954, padahal tidaklah main-main usaha M. Natsir untuk mengajaknya kembali ke pangkuan ibu pertiwi dan memperjuangkan aspirasi politiknya lewat parlemen.

Studi tentang Islam kaitannya dengan sejarah di Indonesia telah berkembang cukup pesat. Walaupun dalam beberapa kajian masih jauh dari cukup, seperti kajian

dalam bidang sejarah dibandingkan dengan tema berkaitan aspek teologis-normatif dan politik¹² Tema-tema kajian lebih banyak membahas hubungan Islam dalam konstribusinya terhadap proses terciptanya kebangsaan, persoalan-persoalan Partai Islam kaitannya dengan integrasi bangsa. Tema kajian pada pasca Kemedekaan terutama di masa Orde Baru hubungan antara Islam dan negara terutama perkembangan pemikiran politik Islam dibahas dalam tesisnya Bahtiar Effendy yang telah diterbitkan oleh Yayasan Paramadina dengan judul "*Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*"¹³ tesis utamanya terutama bagaimana Islam substantif berinteraksi dengan Negara sehingga munculnya pemikiran Islam yang akomodatif. Tema sejenis inilah yang banyak dibahas oleh para akademisi, sedangkan pemikiran Islam yang cenderung skriptualistik atau bahkan fundamentalis¹⁴ sangat langka. Apalagi pemikiran dan aksi politik dari para "kaum pemberontak" terutama gerakan Darul Islam yang berusaha menegakkan Negara Islam Indonesia, sebagaimana diungkapkan Van Dijk, kalangan

¹²G.F. Pijper, *Fragmenta Islamika: Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia Awal Abad XX*, 1987.

¹³Studi tentang Islam dan kaitannya dengan Negara dengan pendekatan historis dan hermeneutik atau interpretatif, Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, 1998.

¹⁴Walau hampir selalu inheren dengan komplotan-komplotan politik bersenjata, tetapi berbeda "fundamentalisme" Islam dengan "fundamentalisme" Kristen yang "lahir sebagai jawaban tradisional Kristen terhadap modernisme yang berusaha menyelaraskan Bible dengan kemajuan dunia modern yang terkadang melibatkan pembelaan yang tidak rasional terhadap kaidah-kaidah agama yang dianggap mendasar"; "fundamentalisme Islami" dimaksudkan sebagai "gerakan yang bertujuan kembali kepada ide-ide dan praktek-praktek dasar yang menjadi ciri Islam pada masa permulaan sejarahnya," serta gerakan yang bertujuan "menata kembali masyarakat Islam melalui penentuan kembali hukum-hukum eksternal dan norma sosial dari hakekat Islam." ; Rifyal Ka'bah, *Islam dan Fundamentalisme*, 1984. hal. 32, 35 dan S.H.Nasr, "Islam di Dunia Islam Dewasa ini", dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra, ed., *Perkembangan Moderen dalam Islam*, 1985., hal. 56-61.

akademisi jarang meminati pemberontakan DI/TII menjadi subyek penulisan¹⁵. Sedangkan tema-tema yang berkaitan dengan penulisan kalangan kelompok Bulan-Bintang atau Masyumi cukup melimpah.

Oleh karena itu, tulisan ini difokuskan pada Pemikiran dan Aksi Soekarnadji Maridjan Kartosoewirjo dikaitkan dengan Pembentukan KPK-PSII, Institut Suffah dan Peristiwa Konferensi Cisayong 1948 yang merupakan “Dinamika Pemikiran dan Aksi Bintang-Bulan”¹⁶ sehingga terbentuknya Negara Islam Indonesia.

II.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mengambil ruang lingkup daerah Priangan khususnya dan secara umum Jawa Barat. Terutama di daerah yang bergolak dan bersentuhan langsung dengan kasus Darul Islam yakni daerah Cisayong, Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Bandung, Cianjur, Garut, Majalengka, Cirebon dan Banten. Melalui seleksi sumber sejarah maka penelitian ini menfokuskan pada daerah Priangan yang dipandang representatif mewakili collective action. Daerah-daerah mana yang terjadi transisi dari tradisional ke masyarakat modern.

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika pemikiran Soekarnadji Maridjan Kartosoewirjo dan aksi gerakan Darul

¹⁵C. van Dijk, *Darul Islam sebuah Pemberontakan*. 1983, hal. xvii.

¹⁶Penulis membedakan gerakan Islam yang cenderung fundamentalis dan menggunakan cara-cara bersenjata dengan istilah “Bintang-Bulan” untuk membedakan dengan istilah “Bulan Bintang”, gerakan Islam yang menggunakan cara-cara parlementer yang diwakili oleh Nasionalis Islami terutama Masyumi. Istilah “Bintang Bulan” tersebut penulis ambil dari Maklumat No. 7 Negara Islam Indonesia yang menunjukkan Sekretariat Negara, Salinan Pedoman Dharmabakti. Djilid 1, 1960, Maklumat No. 7, 23-12-1948, hal. 20-22. Karena konsistensi strategi perjuangan Kartosoewirjo dan cenderung ke kanan, maka penulis memberi judul tesis ini “Lajur Kanan Sebuah Jalan”

Islam terutama keterkaitan Konferensi Cisayong 1948 dengan pemikiran awal dan aksi selanjutnya terutama dinamika Pemikiran S. M. Kartosoewirjo dan aksinya dalam pergerakan Darul Islam dari tahun 1940 hingga 1962¹⁷. Secara khusus bertujuan: Pertama, mengumpulkan dan menganalisa data yang berkaitan dengan Konferensi Cisayong 1948. Kedua, memperoleh gambaran yang utuh dari pemikiran dan aksi S.M. Kartosoewirjo ("Bintang-Bulan"). Ketiga, menjelaskan konteks sosial-politik meluasnya pengaruh pemberontakan Darul Islam dalam hubungannya dengan tesis *collective action*. Keempat menjelaskan lamanya pemberontakan bersenjata Darul Islam hampir 14 tahun. Kelima menemukan hubungan causal antara mentalite dan keadaan sosial-ekonomi-politik basis masyarakat yang bergolak.

1.3. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa studi awal tentang Darul Islam dan Kartosoewirjo seperti yang ditulis Pinardi,¹⁸ Hersri dan Joebaar Ayoeb,¹⁹ serta Soebardi.²⁰ Karya mendalam mengenai topik yang sama dilakukan Nazaruddin Syamsuddin,²¹ Anhar Gonggong,²²

¹⁷ Penulis mengambil tahun awal pergerakan Darul Islam dari tahun 1940, karena pada tahun tersebut terbentuknya KPK-PSII yang merupakan embrio Negara Islam Indonesia.

¹⁸ Pinardi, *Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Kisah Lahir dan Dajatnya Seorang Petualang Politik*, 1964.

¹⁹ Hersri dan Joebaar Ayoeb, "S.M. Kartosoewiryo, Orang Seiring Bertukar Jalan," *Prisma* XI, No. 5, 1982, hal. 79-96. Dalam artikel ini ketokohan Kartosoewirjo dibahas secara relatif obyektif.

²⁰ Soebardi Soebakin, "Kartosoewirjo and The Darul Islam Rebellion in Indonesia dalam *Journal of South East Asian Studies* XIV", No. 1 1983, hal. 109-133.

²¹ Nazarudin Syamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik Kasus Darul Islam Aceh*, 1990. Karya ini membahas kasus pemberontakan DI di Aceh dengan memberikan perhatian khusus pada Daud Beureuh. Dalam buku ini juga Kartosoewirjo dibahas sekilas.

²² Anhar Gonggong, *Abdul Qahhar Muzakkar, Dari Patriot hingga Pemberontakan*, 1992. Kasus Darul Islam yang dibahas dalam karya ini khusus Pemberontakan Abdul Qahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Peranan Kartosoewirjo dibahas sekilas saja.

dan Al Chaidar²³. Selama ini kajian DI dan Kartosoewirjo lebih banyak dilakukan oleh kaum *Indonesianists* asing, seperti: Karl D.Jackson²⁴, Hiroko Horikoshi,²⁵ Nieuwenhuijze,²⁶ Van Dijk,²⁷ B.J. Borland²⁸ dan Dengel²⁹.

Tulisan pertama tentang Darul Islam disusun oleh Kementerian Penerangan RI tahun 1953, berjudul *Republik Indonesia: Propinsi Djawa Barat*. Dalam buku ini mengenai Darul Islam diuraikan dalam 32 halaman, yaitu mengenai latar belakang, aktivitas gerakan, sikap pemerintah terutama militer, pendapat Joesoef Taudjiri terhadap Kartosoewirjo.³⁰ Seorang ahli Belanda pertama yang menulis tentang Darul Islam pada pertengahan tahun 1950-an C.A.O. Nieuwenhuijze dengan teori hubungan Islam dengan negara yang disebut teori dekonfesionalisasi. Ia menjelaskan tentang pergerakan Darul Islam ditinjau dari aspek pemikiran Kartosoewirjo, yang merupakan satu artikel dalam satu buku yang membahas tentang aspek Islam kaitannya dengan post-colonial.³¹

Karya tulis yang ditulis dengan tujuan bukan akademis. Karya-karya itu termasuk kajian terbaik mengenai Kartosoewirjo dan Darul Islam, meskipun ada

²³Al Chaidar, *Wacana Ideologi Negara Islam*. 1419 H.

²⁴Karl D. Jackson, *Traditional Authority, Islam and Rebellion. A Study of Indonesian Political Behaviour*. 1980.

²⁵Hiroko Horikoshi, "The Dar ul Islam Movement In West Java (1948-1962) : An Experience In The Historical Process", *Indonesia* No. 20. 1975.

²⁶C.A.O. Nieuwenhuijze, *Aspects of Islam in Post-Colonial Indonesia, Five Essays*, 1958.

²⁷C. Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. 1983.

²⁸B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, 1985.

²⁹Holk H. Dengel, *Darul Islam dan Kartosoewirjo : Angan-angan yang gagal*, 1995.

³⁰Republik Indonesia, *Propinsi Djawa Barat*, (Kementerian Penerangan, 1953), hal. 211-243

³¹C.A.O. Van Nieuwenhuijze, "The Dar ul-Islam Movement in Western Java Till 1949" . *Aspect of Islam in Post Colonial Indonesia*, 1958, hal. 168-171.

diantaranya yang ditulis sarat kepentingan politik. Karya Pinardi misalnya, yang menjelaskan pergerakan Darul Islam berdasarkan data-data dari pihak KODAM VI Siliwangi dan sebagai upaya pertama untuk menjelaskan pemberontakan Darul Islam dengan kata pengantar dari Jendral A.H. Nasution³² Tulisan lain yang mengenai Darul Islam, yang ditulis oleh Amak Sjariffudin, dengan judul bukunya "*Kisah Kartosuwirjo dan Menjerahnja*." Karya tulis ini ditulis tiga tahun setelah Kartosoewirjo dihukum mati.³³

Karya yang ditulis oleh penulis asing yang membicarakan Darul Islam dalam bentuk artikel, yang dibuat oleh Hiroko Horikoshi berjudul "*The Dar Ul-Islam In West Java (1948-62): An Experience In The Historical Process*"³⁴ dalam artikel ini dibahas dari latar belakang awal Komite Pembela Kebenaran PSII (KPK-PSII) hingga perlawanan sengit dari Kiai Joesoef Taudjiri dengan Pesantren Darussalamnya di daerah Cipari Garut. Selain itu menyoroti aspek-aspek sufistik dan tasauf dari kepribadian Kartosoewirjo. Artikel lain yang ditulis oleh Soebakin Soebardi, berjudul "*Kartosuwirjo and Darul Islam Rebellion in Indonesia*". Dalam artikel ini dibahas mengenai latar belakang gerakan Darul Islam.³⁵ Sebuah artikel yang dimuat dalam majalah Prisma, yang ditulis oleh Hersri S. dan Joebar Ajoeb, berjudul "*S.M. Kartosuwiryo, Orang Seiring Bertukar Jalan*" artikel yang cukup lengkap

³²Pinardi. *Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Kisah Lahir dan Djatuhnya Seorang Petualang Politik*. 1964.

³³Anak Sjarifuddin. *Kisah Kartosuwirjo dan Menjerahnja*, 1965

³⁴Hiroko Horikoshi. "The Dar ul Islam Movement In West Java (1948-1962) : An Experience In The Historical Process". *Indonesia* No. 20. 1975.

membahas Kartosoewirjo maupun gerakan Darul Islam.³⁶ Tulisan ini merupakan karya akademis yang relatif obyektif dalam membedah ketokohan Kartosoewirjo.

Karya akademis yang ditulis oleh penulis asing mengenai Darul Islam yang dibahas secara umum oleh C. Van Dijk, dengan judul bukunya "*Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*" yang telah diterjemahkan dan diterbitkan oleh Grafiti Pers. C. Van Dijk dalam studinya berhasil merekonstruksikan suatu gerakan bersenjata legendaris atas nama Islam, suatu counter power movement terbesar dan terlama yang lahir di Indonesia³⁷. C. Van Dijk membahas pergerakan Darul Islam Jawa Barat, Darul Islam di Jawa Tengah, Darul Islam Sulawesi Selatan, ALRI Divisi IV di Kalimantan Selatan dan gerakan Darul Islam Aceh. Van Dijk menjelaskan pemberontakan Darul Islam di seluruh Indonesia, dengan sumber-sumber sekunder ia mampu merekonstruksi gerakan Darul Islam secara sistematis. Walaupun ia mencoba mengkaitkan gerakan ini pada struktur agraris, wibawa tradisional dan masalah kedaerahan serta campur tangan ekonomi, sehingga tergambar setting sosial-ekonomi dari gerakan Darul Islam Selain itu pokok persoalan yang dibahas terkait erat dengan persoalan gerakan Darul Islam dengan lasykar-lasykar, badan-badan perjuangan selama masa revolusi nasional.

³⁵ Soebardi Soebakin, "Kartosoewirjo and The Darul Islam Rebellion in Indonesia". *Journal of South East Asian Studies* XIV, No. 1 1983, hal. 109-133.

³⁶ S. Hersri dan Joebar Ayoeb. "S.M. Kartosoewirjo, Orang Seiring Bertukar Jalan", *Prisma* XI, No. 5. 1982. hal. 79-96.

³⁷ C. Van Dijk, *Rebellion Under The Banner Of Islam: The Darul Islam In Indonesia*, 1981.

B. J. Boland dalam bukunya *"The Struggle of Islam in Modern Indonesia"*, walaupun bukan membahas kasus Darul Islam tetapi mencoba menguraikan secara tersendiri tentang Pemberontakan Darul Islam dan membuat lampiran tentang Nota Rahasia Kartosoewirjo kepada Soekarno serta Kanun Asasy Negara Islam Indonesia. Tetapi buku ini sebenarnya menjelaskan pergumulan ummat Islam dengan persoalan intergrasi bangsa dan pembentukan negara bangsa.³⁸

Lain halnya dengan Karl D. Jackson dengan judul aslinya *"Traditional Authority, Islam and Rebellion"* menfokuskan kajian pada wilayah Jawa Barat dengan metode penelitian lapangan dan wawancara terhadap mereka yang terlibat baik sebagai anggota gerakan maupun sebagai lawan. Tesisnya bahwa integrasi politik di kalangan orang Sunda (Jawa Barat) bergantung pada hubungan kewibawaan tradisional yang menjiwai kehidupan sosial masyarakat. Pemberontakan sendiri menurut Jackson bukan sebagai tujuan studinya tetapi sebagai laboratorium untuk menganalisa teori-teori yang sering diajukan, yang jarang sekali diuji dengan perilaku politik di Indonesia.³⁹

Disertasi Holk H. Dengel juga tentang *"Darul Islam dan Kartosuwirjo: Angan-angan yang gagal"* membahas gerakan DI yang lebih menfokuskan pada perjalanan karir politik Kartosoewirjo, dari sejak masa muda sampai runtuhnya

³⁸B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, 1971. hal. 54 - 75

³⁹Karl D. Jackson, *Kewibawaan Tradisional, Islam Dan pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat*, (terj.). 1990. Bandingkan dengan studi sejarah Pemberontakan yang dilakukan Anhar Gonggong dengan menggunakan pendekatan kebudayaan dan perilaku politik yang menyimpulkan causal faktornya adalah unsur budaya siri'-pessé dalam tesisnya tentang *Abdul Qahhar Mudzakar: Dari Patriot Hingga Pemberontak* yang diterbitkan Grasindo tahun 1992.

gerakan Darul Islam. Tetapi dalam kurang menjelaskan setting sosial-ekonomi daerah pemberontakan. Kelebihan dari studi ini terletak dari dokumen-dokumen baik primer maupun sekunder yang digunakan cukup lengkap.⁴⁰

Karya lain yang ditulis oleh seorang sarjana wanita Amerika, Barbara Sillars Harvey, menulis gerakan Darul Islam di Sulawesi Selatan, berjudul *"Pemberontakan Kahar Muzakar, Dari Tradisi ke DI/TII"*, yang telah diterjemahkan oleh Grafitipers.⁴¹ Buku ini memberikan gambaran tentang tradisi masyarakat Sulawesi Selatan, tetapi kurang menjelaskan hubungan antara tradisi dengan gerakan Darul Islam di Sulawesi Selatan.

Karya yang khusus membahas gerakan Darul Islam Aceh ditulis oleh Nazaruddin Sjamsuddin, dengan judul *"Pemberontakan Kaum Republik, Kasus Darul Islam Aceh"*, Tulisan ini membahas pemberontakan Kaum Ulama Aceh dan masyarakat Aceh terhadap Pemerintah Pusat dengan ikut bergabung dengan gerakan Darul Islam Kartosoewirjo.⁴² Dan lebih menfokuskan kepada ketokohan Daud Beureuh.

I.4. Perumusan Masalah

Penelitian ini berjudul "Lajur Kanan Sebuah Jalan, Dinamika Pemikiran dan Aksi Bintang-Bulan, Studi Kasus Gerakan Darul Islam 1940-1962". Dengan membatasinya wilayah Jawa Barat terutama daerah Priangan sebagai objek telaah.

⁴⁰Holk H. Dengel, *Darul Islam dan Kartosuwirjo, Angan-angan yang gagal*, 1995.

⁴¹Barbara Silars Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakar. Dari Tradisi ke DI/TII*, 1989.

⁴²Nazarudin Syamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik Kasus Darul Islam Aceh*, 1990.

Periode yang diteliti dimulai tahun 1940 sampai dengan 1962, yaitu masa pembentukan KPK-PSII sebagai cikal bakal NII hingga runtuhnya tahun 1962. Penelitian ini berupaya untuk menyingkap beberapa pertanyaan pokok.

Pertama, apakah Peristiwa Konferensi Cisayong pada tanggal 10-11 Februari 1948 dengan membentuk Majelis Islam merupakan awal mula *Collective action*, sehubungan Konferensi tersebut diwakili oleh ormas-ormas Islam se-Jawa Barat. Tetapi selanjutnya mengapa S.M. Kartosoewirjo yang diangkat Imam tidak mendapat dukungan dalam upaya mempertahankan Negara Islam Indonesia.

Kedua, faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya Konferensi Cisayong 1948, apakah terkait dengan pemikiran yang berkembang di kalangan ulama saat itu atau apakah merupakan konsistensi dari pemikiran S.M Kartosoewirjo semenjak di PSII tahun 1936.

Ketiga, mengapa S.M Kartosoewirjo memperjuangkan aspirasi politiknya dengan jalan memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mau memperjuangkannya secara parlementer ? Apakah ia selama memperjuangkan gagasannya tetap konsisten ?

1.5. Konsep dan Teori

Untuk memberikan penjelasan fenonema gerakan Darul Islam S.M. Kartosoewirjo pada masa revolusi digunakan teori aksi kolektif (*collective action*) dari Charles Tilly,⁴³ dan teori perilaku kolektif (*collective behavior*) dari Smelser.⁴⁴

⁴³Charles Tilly, *From Mobilization to Revolution*, hal. 52-97. Dalam hubungan ini ada teori yang menggunakan kata *collective* yaitu teori "*collective behavior*", yaitu teori perubahan sosial yang

Bermula dari internalisasi nilai-nilai agama dihadapkan pada realitas sosial menjadi sebuah ideologi yang kemudian menjadi gerakan sosial dan selanjutnya menjadi penantang bagi kekuasaan yang sah. Yang dimaksud dengan aksi kolektif adalah orang-orang bersama-sama berjuang untuk mencapai kepentingan bersama.⁴⁵ Menurut Tilly, situasi revolusi adalah suatu kasus khusus dari aksi kolektif dimana kelompok-kelompok yang bersaing, berjuang, untuk mendapat kedaulatan politik tertinggi atas masyarakat, dan kasus di mana kelompok-kelompok penentang berhasil, sekurang-kurangnya dalam beberapa hal tertentu, menggantikan para pemegang kekuasaan yang ada. Dalam hal ini revolusi diartikan sebagai peralihan kekuasaan dengan atau tanpa kekerasan.⁴⁶

Menurut konsepsi ini, faktor-faktor penyebab situasi revolusioner dari kedaulatan yang terpecah-pecah adalah karena adanya ancaman dari negara lain, meningkatnya kekecewaan masyarakat karena pemerintah tidak bisa memenuhi

dikembangkan oleh Neil J. Smelser. Dalam teori ini ditekankan pada nilai-nilai yang sama (common values, sedangkan pada teori collective action yang menjadi patokan adalah kepentingan bersama (common interest).

⁴⁴ Neil J. Smelser, *Theory of Collective Behavior*, 1969, hal.2, 8, 79-130. Menurut Neil Smelser bahwa gejolak sosial yang disebutnya sebagai collective behavior merupakan mobilisasi atas dasar keyakinan, yaitu keyakinan yang mendefinisikan kembali aksi sosial. Adapun komponen pokok aksi sosial, menurut Smelser adalah (1) nilai-nilai (2) norma-norma (3) mobilisasi motivasi perseorangan untuk aksi yang mengatur dalam peran-peran kolektivitas, dan (4) fasilitas situasional atau informasi, ketrampilan, alat-alat dan rintangan dalam mencapai tujuan-tujuan yang konkret. Setiap gejolak sosial, diarahkan kepada komponen-komponen tertentu aksi sosial itu, yakni ditujukan agar dapat merubah nilai-nilai, norma-norma, peranan-peranan, dan fasilitas-fasilitas.

⁴⁵ Charles Tilly, 1978. hal. 7

⁴⁶ Ibid. hal. 189-222. Revolusi juga diartikan perubahan nilai dan mitos yang dominan di dalam masyarakat, terutama menyangkut lembaga politik, struktur sosial, kegiatan dan kebijaksanaan pemerintah, yang berlangsung dengan kekerasan, mendasar dan dalam waktu yang cepat, Samuel P. Huntington, *Tertib Politik Ditengah Pergeseran Kepentingan Massa*, 2003, hal. 315.

kewajibannya, munculnya kelompok-kelompok fundamentalis, perkembangbiakan ideologi revolusioner.⁴⁷

Untuk menganalisis revolusi, Tilly membedakan dua model yang terkait yakni model polity dan model mobilisasi.⁴⁸ Dalam penelitian ini digunakan model mobilisasi. Unsur-unsur model mobilisasi adalah kepentingan (interest), organisasi (organization), mobilisasi (mobilization), kesempatan (opportunity), dan hambatan (threat).⁴⁹ Revolusi berawal dari suatu organisasi yang pada dasarnya adalah organisasi yang telah ada sebelumnya yang diperbaharui. Organisasi itu bergerak karena kepentingan-kepentingan tertentu (interest) yang ingin dicapai. Untuk berhasil organisasi itu harus memobilisasi manusia, dana dan peralatan. Selain itu suatu organisasi akan berhasil kalau sanggup mengatasi hambatan (threat) dan memiliki peluang (opportunity).

Menurut Tilly sepanjang sejarah ada tiga jenis "aksi kolektif", yakni. Competitive collective action, Reactive collective action, dan Proactive Collective action.⁵⁰ Aksi Darul Islam di Jawa Barat termasuk proactive collective action yang ditujukan dengan adanya upaya dari individu-individu dan kelompok-kelompok sosial tertentu, seperti kaum ulama dan pemuda, ormas dan partai politik untuk

⁴⁷Theda Skocpol, *Negara dan Revolusi Sosial: Suatu Analisis Komparatif Tentang Perancis, Rusia, Cina*, 1991, hal. 8-9.

⁴⁸Charles Tilly, 1978. hal. 52.

⁴⁹Ibid, hal. 54-55.

⁵⁰Charles Tilly, 1978. hal. 143-151. Proactive Collective action yaitu upaya untuk menciptakan suatu struktur sosial baru yang sebelumnya tidak ada, dengan inciptakan ideologi baru dan negara baru.

menciptakan struktur sosial baru, untuk menggantikan struktur sosial lama, yaitu struktur sosial selama revolusi nasional di transformasikan menjadi revolusi Islam

Dalam penelitian ini lingkungan sejarahnya adalah Jawa Barat khususnya, secara umum Indonesia pada saat Revolusi Fisik, Muncul sekelompok orang dibawah pimpinan S.M. Kartosoewirjo yang tergabung dalam Masyumi Daerah Priangan yang bertindak menentang kembalinya Belanda ke Indonesia akibat Perundingan dan Persetujuan Renville. Tujuan tindakan ini pada awalnya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang kemudian terjadi transformasi pemikiran dari revolusi nasional menjadi revolusi Islam, dengan berkeinginan membentuk negara baru melalui Revolusi Islam.⁵¹ Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa benih-benih pemikiran terbentuknya Negara Islam telah ada sejak Diponegoro⁵². Penulis berpendapat tidak menutup kemungkinan bahwa pemikiran yang berkembang di kalangan PSII merupakan benih-benih yang pernah dikembangkan oleh Dipenogoro dan masih menjadi wacana di kalangan para ulama. Pemikiran tentang negara Islam dengan strategi pola Sikap Hijrah ini diwakili oleh Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo sebagai faktor “emergence” ataupun “agency”.⁵³

⁵¹Menurut S.M. Kartosoewirjo tahapan revolusi terdiri dari revolusi kaumiyah, revolusi nasional dan revolusi risalah. S.M. Kartosoewirjo, *Haloean Politik Islam*, 1946.

⁵² Salch As'ad Djamlari, *Stelsel Benteng Dalam Pemberontakan Diponegoro 1827 -1830 Suatu Kajian Sejarah Perang*. 2002. hal 26, 55-59. Diponegoro bertujuan untuk menciptakan balad Islam (negara Islam) dengan strategi hijrah kultural dan perang sabil (jihad). Istilah balad sebagaimana disebutkan dalam Al Quran surat 14 ayat 35, surat 2 ayat 127 merupakan do'a Nabi Ibrahim. Konsep balad (negara) dalam Al Quran memiliki ciri-ciri: Tauhid, Yaunil Akhir, Aman dan Adil makmur

⁵³Christopher Lloyd, *The Structures of History*. 1993, hal. 180, S.M. Kartosoewirjo pertama mengungkapkan wacana tentang pemerintahan Islam dalam Fadjar Asia tanggal 23 Mei 1930. Sepuluh

1.6. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan strukturis.⁵⁴ Teori collective action ditempatkan dalam kerangka metodologi strukturis, suatu metodologi yang merupakan perpaduan antara metodologi individual dan metodologi struktural.⁵⁵ Yaitu suatu metodologi yang berusaha mengungkapkan realitas peristiwa dari sumber-sumber sejarah. Kemudian setelah data diperoleh akan terungkap fakta sejarah yang berupa interpretasi teoritis atas sumber sejarah yang tersedia (causal faktor) gerakan Darul Islam. Kemudian dilakukan observasi historis, kritik atau pengujian data, analisa data dan kemudian eksplanasi.⁵⁶

Adapun langkah-langkah penelitian ini pertama-tama yang dilakukan melalui pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan kearsipan. Sedangkan sumber-sumber sekunder didapatkan dari berbagai monograf yang membahas tema-tema yang berkaitan dengan tulisan ini, kemudian juga dari jurnal-jurnal yang diterbitkan, termasuk sumber dari disertasi yang membahas pergerakan Darul Islam pada kurun 1940 – 1962. Data yang dikumpulkan baik itu data primer dari Perpustakaan Nasional Jakarta, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta, Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat Sub Dinas Dokumen Sejarah Musium Tradisi Keuangan TNI AD di Bandung, Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan

tahun kemudian, ia merumuskan rencana pembentukan Negara Islam Indonesia dengan pembentukan KPK-PSII, sebagai embrio organ Negara Islam.

⁵⁴Ibid, hal. 187-192. R. Z. Leirissa. *Metodologi Strukturis dalam Ilmu Sejarah* (Kumpulan Karangan), 1999, hal. 48

⁵⁵Christopher Lloyd, 1990, hal. 91-100.

⁵⁶March Bloch, *Pledooi voor de geschiedenis Als Ambacht*. 1988, hal. 80.

LP3ES , Perpustakaan Idhayu di Jakarta, Perpustakaan TNI AD di Bandung, dan Koleksi-koleksi pribadi. Selain itu karena penelitian ini pada kurun Revolusi Kemerdekaan masih memungkinkan beberapa aktivis pelaku masih hidup, maka dimungkinkan untuk menggunakan metode oral history.⁵⁷

Kemudian selanjutnya dilakukan analisis data melalui metode sejarah dengan melakukan seleksi data yang ditemukan. Khusus untuk sumber dokumen melalui kritik eksternal dan internal dan sumber lisan juga harus diuji secara kritis sesuai dengan teori dan metode sejarah lisan.

Selanjutnya menggunakan pendekatan strukturalis, dalam pendekatan ini peristiwa sejarah bukan satu-satunya causal faktor dan faktor sejarah bukan hanya struktur sosial saja tetapi kedua-duanya. Dan meminjam beberapa teori ilmu sosial terutama berkaitan erat dengan perubahan sosial untuk menganalisis peristiwa yang akan direkonstruksikan.

1.7. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

1.7.1. Sumber Primer

Sumber primer yakni berupa arsip, dan dokumen resmi yang diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta, Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat, Sub Dinas Bina Dokumen Sejarah Musium Tradisi Kejuangan TNI Angkatan Darat di Bandung, Perpustakaan Nasional di Jakarta, Perpustakaan TNI

⁵⁷P. Lim Pui Huen dkk.. Ed.. *Sejarah Lisan Di Asia Tenggara: Teori dan Metode*. 2000.

AD di Bandung, Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia di Depok.

Sumber lain berupa wawancara dari pelaku sejarah melalui metode wawancara (oral history) untuk mendukung data-data diatas. Wawancara dilakukan dengan pelaku Konferensi Cisayong, aktivis Gunung Cupu (Tjupu) maupun aktivis Darul Islam. Selain itu koleksi wawancara yang terdapat di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan transkripsi maupun hasil wawancara dari Sub Dinas Bina Dokumen Sejarah dan Musium Tradisi Kejuangan TNI AD di Bandung.

Sumber pribadi yang masih dimiliki oleh aktivis Darul Islam juga penting berupa tulisan-tulisan maupun dokumen.

1.7.2. Sumber Sekunder

Sedangkan sumber-sumber sekunder didapatkan dari berbagai monografi yang membahas tema-tema yang berkaitan dengan tulisan ini, kemudian juga dari jurnal-jurnal yang diterbitkan, termasuk sumber dari disertasi yang membahas Pemberontakan Darul Islam pada kurun 1948 – 1962, surat kabar, baik dalam bentuk aslinya maupun bentuk mikrofilm yang tersimpan di Perpustakaan Nasional di Jakarta, Perpustakaan TNI AD di Bandung.

BAB II

JAWA BARAT SEBELUM REVOLUSI NASIONAL

II.1. Geografis

Sebelum membahas faktor-faktor kausal dari Peristiwa Konferensi Cisayong dan pergerakan Darul Islam. Perlu kiranya menguraikan tentang Priangan, tempat awal mula pergerakan Darul Islam. Priangan letaknya di Jawa Barat yang merupakan bagian dari daratan Pulau Jawa. Luas wilayah Jawa Barat adalah 46.890 km² atau kira-kira sepertiga bagian Pulau Jawa atau 2,46 % dari luas seluruh wilayah Indonesia.¹ Pengertian Priangan disini tidak mengacu kepada arti kesatuan administrasi yang ketat, karena telah terjadi beberapa kali reorganisasi administrasi wilayah Keresidenan Priangan.

Sebagian besar wilayah Jawa Barat merupakan daerah pegunungan. Sehubungan dengan hal itu, jumlah gunung di wilayah Jawa Barat pun cukup banyak, seluruhnya lebih dari 30 buah. Sebagian gunung-gunung itu merupakan gunung berapi, yang menjamin kesuburan wilayah itu, sebagian lagi sudah lama tidak memperlihatkan kegiatan berapi. Gunung-gunung di Jawa Barat berderet dari ujung barat ke ujung timur, sejak Gunung Krakatau, Gunung Karang (1778) dan Gunung Pulosari (1346) di Banten hingga Gunung Ciremai (3078) di Majalengka, dan Gunung Sawal (1784) di daerah perbatasan Jawa Tengah. Gunung Salak (2211) di

¹R.W. van Bemmelen. *The Geology of Indonesia*, 1949, hal.1.

daerah Bogor, Gunung Gede (2958) di daerah Sukabumi. Wilayah Priangan memiliki gunung terbesar di Jawa Barat yang terdiri dari Gunung Malabar (2321) di daerah Bandung. Gunung Cakrabuana (1721) di daerah perbatasan Sumedang, Tasikmalaya dan Garut, Gunung Cikuray (1638), Galunggung (2168), Gunung Talaga Bodas (2201), Gunung Guntur (2249), Gunung Sedakeling (1676), Gunung Karacak (1638) dan Gunung Mandalawangi (1663), Gunung Haruman (1218) di daerah Garut. Gunung Tampomas (1684), Gunung Calancang (1667) di Sumedang. Gunung Bongkok (1144) di daerah Ciamis.

Wilayah pegunungan membentuk pula banyak aliran sungai yang mengalirkan air dari dataran tinggi ke dataran rendah sampai ke laut. Sungai-sungai di Jawa Barat bermula dari wilayah pegunungan di pedalaman, kemudian mengalir melalui dataran rendah di sebelah utara dan barat serta celah-celah dataran tinggi selatan dan akhirnya bermuara di laut Jawa, Selat Sunda dan Samudra Indonesia. Sungai-sungai yang besar antara lain Cisanggarung, Cimanuk, Citarum, Ciliwung, Ciujung, Cimandiri dan Citanduy.²

Penduduk Priangan sebagian besar adalah suku Sunda yang sering disebut *urang gunung*, *wong Gunung*, atau *tiyang gunung* oleh orang yang tinggal di pesisir. Menurut statistik penduduk Priangan pada tahun 1815 berjumlah 194.048 jiwa dan pada tahun 1930 berjumlah 4.639.469 jiwa. Dalam jumlah terakhir ini termasuk orang Eropa sebanyak 27.231 jiwa.

²R.W. van Beemelen. 1949. hal. 24-25

Pada awal abad ke-19, jumlah perkebunan di Priangan meningkat sejak diberlakukannya Undang-undang Agraria tahun 1870 yang membuka pintu bagi modal swasta. Pada tahun 1902 di Jawa Barat tercatat ada 81 buah perkebunan teh di samping perkebunan kina. Perkebunan teh ada di sekitar Pangalengan dan Gunung Patuha, sedang perkebunan kina ada di Cinyuruan, Kabupaten Bandung. Disamping itu, ada perkebunan karet di Kabupaten Bandung, Tasikmalaya dan Ciamis.³

Malangbong sebuah desa yang terletak dibawah kaki gunung Cakrabuana, daerah segitiga Sumedang, Garut dan Tasikmalaya merupakan tempat yang penting dalam gerakan Darul Islam. Kegiatan KPK-PSII lebih banyak dipusatkan di Malangbong dan Institut Suffah sebuah pesantren yang merupakan tempat pengkaderan aktivis Darul Islam.⁴

³ Nina H. Lubis, *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*, 1998, hal. 26-28

⁴ Menurut mitos asal-usul menak di Malangbong berasal dari pasukan R. Surayuda yang desersi setelah ditugaskan menyerang pasukan Pangeran Diponegoro, bersamaan dengan pindahnya ibukota kabupaten Garut dari Limbangan ke Garut. Malangbong asalnya merupakan daerah kosong, sebagai daerah penyangga tiga kabupaten. Tetapi kemudian Pasukan R. Surayuda yang ditugaskan oleh kakaknya Adipati Kusumahyuda (Dalem Ageung), Bupati Sumedang (1828-1833) untuk menggempur Pasukan Diponegoro, atas permintaan pemerintah Hindia Belanda di Batavia, yang menyatakan bahwa Pangeran Diponegoro melakukan penggarongan, pemberontakan, dan yang paling menderita adalah orang-orang Islam. Kemudian berangkatlah Pasukan R. Surayuda beserta keluarganya untuk menyerang pasukan Diponegoro, sebelum sampai ke pusat P. Diponegoro, mereka berkemah dan berhasil menangkap dua orang mata-mata pasukan Pangeran Diponegoro. Tetapi ketika kedua tahanan tersebut melakukan shalat kemudian diinterogasi oleh R. Surayuda. Kedua tahanan tersebut memberikan gambaran bahwa Pangeran Diponegoro itu sedang memperjuangkan Islam dan membela rakyat. Akhirnya Pasukan R. Surayuda tidak jadi menggempur Pangeran Diponegoro dan tidak kembali ke Sumedang tetapi menetap di daerah Malangbong. Wawancara dengan Dodo Mohammad Darda pada tanggal 16 April 2002 di Malangbong.

II.2. Kehidupan Politik dan Birokrasi

Struktur pemerintahan di Jawa Barat pada masa pendudukan Jepang dan revolusi kemerdekaan, tidak banyak berubah. Waktu itu pemerintahan di Hindia Belanda dilakukan secara otokratis, birokratis dan sentralistis dengan kurang memperhatikan struktur pemerintahan tradisional.⁵

Pada masa akhir Pemerintahan Inggris, Pulau Jawa terbagi atas 16 keresidenan, salah satu diantaranya Keresidenan Priangan. Ibu kota Keresidenan Priangan adalah Cianjur. Pada tahun 1859 di Priangan mengalami reorganisasi menjadi lima kabupaten yaitu; Bandung, Cianjur, Sumedang, Limbangan, dan Sukapura. Pada tahun 1864 ibu kota Priangan dipindahkan dari Cianjur ke Bandung.

Pada tahun 1871 *Preangerstelsel* yang telah berlangsung sejak tahun 1677 dihapuskan kemudian diberlakukan *Preanger Reorganisatie*. Menurut peraturan baru itu Keresidenan Priangan dibagi menjadi sembilan afdeeling yang masing-masing dipimpin oleh seorang *asisten residen*. Afdeeling-afdeeling itu ada yang bersatu dengan kabupaten sehingga di samping ada penguasa pribumi yang disebut bupati, ada pula penguasa Hindia Belanda yang dikenal dengan asisten residen. Sebagian afdeeling berdiri sendiri terpisah dari kabupaten. Di sini yang menjadi kepala pribumi adalah *patih afdeeling*.

Pada tahun 1901 dilakukan lagi reorganisasi wilayah. Afdeeling Cicalengka dihapuskan dan wilayahnya sebagian digabungkan dengan Afdeeling Bandung,

⁵Djucal Hoesen Kocsoemahatmadja, *Perkembangan Fungsi dan Struktur Pamongpradja Ditinjau dari Segi Sejarah*, 1978, hal. 14.

sebagian lagi digabungkan dengan Afdeeling Limbangan; Afdeeling Sukapura Kolot dihapuskan dan sebagian wilayahnya digabungkan dengan Afdeeling Sukapura, sebagian lagi digabungkan dengan Afdeeling Limbangan; Afdeeling Tasikmalaya dihapuskan, wilayahnya digabungkan dengan Afdeeling Sukapura. Kemudian ibu kota Sukapura yang tadinya Manonjaya dipindahkan ke Tasikmalaya.

Pada tahun 1913, nama kabupaten Limbangan diganti menjadi Kabupaten Garut dan nama Kabupaten Sukapura diganti menjadi Kabupaten Tasikmalaya. Pada 1915, Kabupaten Galuh dijadikan bagian dari Keresidenan Priangan dan diganti nama menjadi Kabupaten Ciamis. Pada tahun 1921 Afdeeling Sukabumi menjadi Kabupaten Sukabumi dan pada tahun 1922 dimasukkan ke Keresidenan Priangan.⁶

Setelah Perang Dunia I, di Jawa dibentuk tiga provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur). Jawa Barat merupakan provinsi pertama yang dibentuk di Hindia Belanda (1 Januari 1926). Wilayahnya meliputi lima keresidenan terdiri atas 18 kabupaten dan enam gemeenten. Keresiden di Jawa Barat terdiri dari Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, dan Cirebon, masing-masing dipimpin oleh seorang residen. Keresidenan terdiri atas kabupaten dan kotapraja dengan bupati dan wali kota sebagai kepalanya.

Pemerintah Kolonial membentuk pola pemerintahan yang menggambarkan pola dualistik. Pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang Eropa atau dikenal dengan sebutan *Binnenlands Bestuur* (B.B) seperti jabatan residen, asisten residen dan *controler*. Dan pemerintahan yang dipegang oleh kaum pribumi atau dikenal dengan

sebutan Pangreh Praja (P.P), seperti jabatan bupati, patih, wedana dan asisten wedana.⁷

Pada tahun 1926 dibentuk Pulau Jawa dibagi menjadi tiga provinsi. Salah satunya adalah Provincie West-Java yang beribu kota Batavia. Provinsi ini dibagi atas 5 keresidenan, 18 kabupaten dan 6 kota praja. Keresidenan-keresidenan itu adalah Banten, Batavia, Buitenzorg (Bogor), Priangan, dan Cirebon. Keresidenan Priangan terdiri atas kabupaten-kabupaten; Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis.

Di tingkat provinsi ada dewan provinsi (*provinciale raad*) yang anggotanya terdiri dari 20 orang Belanda, 20 orang pribumi, dan 5 orang timur asing. Di tingkat Kabupaten (*regentschapsraad*), yang anggotanya kebanyakan pribumi, dipimpin oleh bupati. Pemerintahan kabupaten dijalankan oleh dewan kabupaten dan bupati, sedangkan pemerintahan di kota Praja dijalankan oleh dewan kota (*gemeenteraad*) dan wali kota (*burgermeester*).⁸

Hubungan *Binnenlands Bestuur* dengan Pangreh Praja lebih bersifat kontrol, seperti bupati harus melaporkan segala aktivitasnya kepada asisten residen. Sedangkan elite birokrasi di tingkat Pangreh Praja dikuasai oleh kaum priyayi, di daerah Priangan dikenal dengan menak. Para menak yang ada di elite birokrasi ini, cenderung memelihara gaya hidup feodalistis dengan menempatkan diri sebagaimana

⁶ Nina H. Lubis. 1998. hal. 33-34.

⁷ Akira Nagazumi. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918*, 1989, hal. 5.

⁸ Nina H. Lubis. 1998. hal. 35.

hal seorang penguasa yang harus dilayani oleh rakyat. Pola hubungan antara menak dengan rakyat menggambarkan suatu hubungan patron client, memandang rendah rakyat biasa dan bersikap eksploitatif. Kedudukan para menak ini menjadi perantara pemerintahan Belanda dengan rakyat. Dualisme hubungan penguasa pribumi dengan rakyat dan pemerintahan Belanda, masih digunakan oleh Belanda (NICA) pada masa Revolusi Nasional dalam usaha menguasai kembali Indonesia.

Sistem dan struktur pemerintahan seperti itu berlangsung sampai menyerahnya Pemerintahan Hindia Belanda kepada Jepang (8 Maret 1942). Sejak itu sampai 14 Agustus 1945, Indonesia diduduki oleh Bala Tentara Jepang. Pada tanggal 7 Maret 1942, Pemerintah Militer Jepang di Jakarta menerbitkan Undang-Undang Bala Tentara Dai Nippon No.1, tentang Pemerintahan Militer di Pulau Jawa. Dalam undang-undang itu, dijelaskan bahwa kekuasaan Gubernur Jenderal diambil alih oleh Bala Tentara Jepang dan semua badan-badan dan pemerintahan yang ada tetap dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan militer.⁹

Struktur Pemerintahan pada dasarnya seperti pada zaman Belanda, hanya namanya diganti dengan istilah Jepang. Propinsi diganti dengan gunseibu, keresidenan diganti dengan syu, kabupaten diganti dengan ken, kewedanaan diganti dengan gun, kecamatan diganti dengan son, desa diganti dengan ku, dan kampung diganti asa.

Badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang Pemerintah Hindia Belanda, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan aturan

Pemerintah Militer Jepang, tetapi, Raad van Indie, Volksraad dihapuskan Kotapraja (Si) dilepaskan dari lingkungan administratif bupati. Walikota menjadi pegawai pangrehpraja dan berada di bawah residen (syuu).

Pulau Jawa berada di bawah kekuasaan Tentara Keenambelas (Rikugun atau Angkatan Darat). Mula-mula pulau ini dibagi atas tiga Gunseibu (pemerintahan militer), masing-masing diperintah oleh seorang gunseikan (kepala pemerintahan), yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan pusat masing-masing di Bandung, Semarang dan Surabaya.¹⁰

Setelah tenaga sipil Jepang datang di Indonesia (sekitar bulan Juli 1942), sistem pemerintahan sipil, tetapi di dalam praktek, kendali pemerintahan tetap berada di tangan militer. Pemerintah kemudian melakukan reorganisasi. Pemerintah dijalankan dengan sistem pemerintahan tunggal tanpa dewan perwakilan rakyat. Pemerintahan tingkat propinsi dihapuskan, sehingga syu (keresidenan) merupakan pemerintahan teratas yang mempunyai wewenang sendiri. Syuu diharapkan dapat berdiri secara otonom dan berswasembada terutama dalam hal pangan, meskipun hubungan antara satu syu dengan lainnya sering terputus. Kebijakan ini dimaksudkan untuk membantu politik guna mempertahankan penduduk Jepang di Indonesia.

Penduduk Jawa Barat, terutama golongan orang Sunda, dapat dikelompokkan menurut stratifikasinya (tinggi rendahnya kedudukan sosial), yaitu pertama, golongan

⁹ Noerhadi Soedarno Poetra, *Pusat Tenaga Rakyat*, 1982, hal. 3.

¹⁰ Rachmani Santoso, *Djakarta Raya Pada Djaman Djepang (1942-1945)*, Prasaran pada Seminar Sedjarah Nasional II di Yogyakarta. 1970, hal. 2. Sartono Kartodirdjo et.al., *Sejarah Nasional Indonesia*, VI, 1977, hal. 5 -6.

menak atau bangsawan, disebut juga golongan elit; kedua golongan cacah, rakyat biasa. Golongan menak jumlahnya sedikit, tetapi mempunyai pengaruh dan kekuasaan besar, karena merekalah yang memegang kekuasaan di dalam pemerintahan (penguasa/yang memerintah). Kaum menak terbentuk karena keturunan atau hubungan darah yang biasanya ditandai oleh gelar raden dan pangeran, dan karena pendidikan atau jabatan dalam pekerjaan. Mereka masih dapat dibedakan atas menak golongan tinggi (sultan atau bupati beserta keluarganya), dan golongan menak rendahan (para pegawai rendah di bawah bupati di lingkungan pemerintahan tradisional). Golongan cacah jumlahnya besar. Mereka adalah rakyat termasuk yang diperintah berdasarkan pemilikan tanah, kekayaan yang dimiliki dan pekerjaannya, golongan cacah dibedakan dalam : (1) cacah biasa, umumnya punya tanah, sawah dan sejumlah kekayaan (2) cacah kurikakan, menumpang, penukang, buruh tani, yaitu cacah yang miskin, tidak memiliki tanah dan bekerja mengolah tanah orang lain.¹¹

Karena pemerintahan kalangan pribumi (pemerintahan tradisional) merupakan lanjutan atau bagian dari pemerintahan kolonial, maka para menak itu merupakan bawahan para pejabat kolonial, baik langsung atau maupun tidak langsung. Sehubungan dengan itu, mereka dituntut untuk setia kepada pemerintah kolonial. Kesetiaan kaum menak kepada penguasa kolonial dipertahankan dan bahkan dipupuk terus melalui struktur birokrasi pemerintahan, dan juga melalui

¹¹ Samiati Alisyahbana, *A Preliminary Study of Class Structure Among The Sundanese*, 1956, hal. 1-2.

jenjang pendidikan dan kepangkatan dalam pekerjaan. Kondisi sosial tersebut di atas selanjutnya mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya. Dalam hal ini, pergerakan nasional merupakan jembatan yang mengantarkan rakyat Indonesia ke alam kemerdekaan.

II.3. Sosial Budaya dan Ekonomi

Istilah Sunda dan Jawa Barat hampir identik yang menunjuk kepada pengertian kebudayaan, etnis, geografis, administrasi pemerintahan dan sosial. Secara historis kedua istilah tersebut telah mengalami perubahan pengertian dan tafsiran dari pengertian awalnya. Sedangkan yang dimaksud suku bangsa Sunda adalah orang-orang yang secara turun temurun menggunakan bahasa-ibu bahasa Sunda serta dialeknya dalam kehidupan sehari-hari dan berasal dari daerah Jawa-Barat, daerah yang juga sering disebut Tanah Pasundan atau Tatar Sunda.¹²

Pada saat menjelang revolusi nasional perubahan di desa-desa Jawa Barat telah terjadi dan terus menerus. Isolasi, keseimbangan dan ketenangan sebetulnya telah diterobos oleh pengaruh-pengaruh baru dan luas. Ekonomi, politik dan ideologi modern, administrasi pemerintahan, komunikasi, pendidikan telah menyebabkan suatu lapisan atas, yang terdiri dari para pamong desa, para guru, juru-juru penerang, pegawai-pegawai departemen, pelajar, anggota tentara, pedagang dan pengusaha, yang semua mempunyai orientasi keluar. Sebaliknya ada suatu lapisan bawah, ialah

¹²Edi S. Ekadjati, *Kebudayaan Sunda, Suatu Pendekatan Sejarah*, 1995, hal. 1-10.

kaum petani, yang jumlahnya besar, yang kebanyakan masih butahuruf dan yang dalam cara hidupnya masih tradisional. Orang lapisan atas mempunyai kecakapan berekonomi berdasarkan prinsip mencari untung, mempunyai hubungan dengan tengkulak-tengkulak dan pedagang-pedagang besar di kota.

Dengan demikian corak kehidupan masyarakat desa Sunda cenderung homogen bernuansa agraris, dan faktor utama yang mempengaruhi sistem nilai dan budayanya adalah Islam. Dan lebih cenderung Islam agraris ketimbang Islam kosmopolitan. Walaupun homogen tetapi masing-masing desa ada ciri khas tertentu dari masing-masing desa.¹³

Ikatan bapakisme ini nampak pula pada pola kepengikutan kiai dengan para pengikutnya di pesantren atau seorang kiai yang memiliki pengaruh di daerah tertentu.¹⁴ Apa yang dilakukan kiai sebagai sikap politik maka akan diikuti oleh para pengikutnya. Faktor inilah yang merupakan penggerak utama masyarakat lokal di daerah Sunda.

Sungguhpun demikian, masyarakat Sunda dalam kondisi transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Masyarakat yang mengalami transisi, terdapat banyak ambivalensi baik struktur maupun fungsinya, bercampur aduknya

¹³“*Memori Serah Jabatan 1931-1940 (Jawa Barat)*”, 1980, ANRI.

¹⁴Karl D. Jackson, *Kewibawaan Tradisional Islam dan Pemberontakan*, 1990. hal. 201-212. Integrasi politik di kalangan masyarakat Sunda bergantung kepada sistem hubungan kewibawaan tradisional (bapakisme) yang menjwai kehidupan desa. Orang desa Sunda terorganisasi ke dalam jaringan hubungan diadik (berpasangan) yang bersifat pribadi, menyebar, penuh perasaan dan lestari. Pada awalnya hubungan bersifat sosial, ekonomi, namun dapat mengandung pengertian politik bila tokoh kewibawaan tradisional tertentu atau para tetua desa sebagai kelompok, terlibat secara politik. Berangkat dari kewajiban moral, para pengikut akan mengikuti perintah sang tokoh. Ikatan ini disebut ikatan antara yang asor dan yang unggul, tanpa memperhatikan ideologi maupun ekonomi.

nilai tradisional dan modern dalam birokrasi, sistem politik, struktur organisasi dan struktur kepemimpinan.

Secara kultural terjadi ambivalensi fungsional yang nampak pada tidak adanya pemisahan yang tegas antara fungsi formal birokratis dan fungsi pribadi, orientasi pada status, serta semi feodal. Afiliasi dan loyalitas primordial. Masyarakat masih cenderung mengandalkan magi. Mitos dan misteri. Sikap pada waktu bercirikan agraris, tidak menepati waktu. Solidaritas komunal yang kuat.

Dalam masyarakat yang semi feodal, ada kecenderungan kepemimpinan polimorfik, yakni berfungsi ganda serta tidak mengikuti tuntutan profesionalisme. Pada unit kecil kepemimpinan berada pada patron yang senantiasa dikelilingi oleh kleinnnya. Orientasi pada status dan askripsi menciptakan sikap mengandalkan kedudukan keluarga dalam masyarakat berikut jasa-jasanya serta mengambil keuntungan dari posisi itu. Pada masyarakat transisi banyak sekali hal-hal yang menarik untuk diamati dan diteliti. Bagaimana dinamika masyarakat tersebut yang terus berubah, kadang penuh intrik antara seorang dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok lain dan sebagainya.

Gemeente dibentuk untuk kepentingan orang-orang Belanda telah menyebabkan jumlah orang Belanda dan Eropa lainnya yang berdomisili di kota-kota keresidenan semakin bertambah. Di Jawa Barat, hal ini terutama terjadi di Bandung. Di Kota ini telah tersedia berbagai fasilitas kota, baik untuk kepentingan pemerintah maupun untuk masyarakat, terutama masyarakat Eropa. Fasilitas yang penting antara

lain gedung keresidenan, kabupaten, kantor-kantor, hotel-hotel, kantor pos dan telepon, toko-toko besar, pasar, rumah sakit, tempat hiburan dan rekreasi, sarana transportasi dan lain-lain.

Kelas pedagang Indonesia sebenarnya sudah ada sejak jauh sebelum abad ke 19. Mereka sering dinamakan santri sesuai dengan penelitian-penelitian di Jawa. Keterikatan mereka dengan agama Islam sangat menonjol dalam peristilahan itu. Mereka memang masih memainkan peranan sebagai pedagang tetapi dalam bentuk yang lebih kecil, dan dalam sektor-sektor yang tidak menyentuh perkembangan baru dalam bidang ekonomi tersebut. Ciri ekonomi santri sangat individual, bergerak sendiri-sendiri sehingga volume perdagangannya tidak besar dan kemungkinan perluasan sangat terbatas. Sedangkan bagi kaum menak tidak mengembangkan perdagangan, karena anggapan kaum menak perdagangan adalah fungsi untuk golongan rendah.¹⁵

Dalam pada itu, penduduk pribumi dan golongan Timur Asing pun semakin meningkat jumlahnya. Pertumbuhan penduduk Jawa Barat, terutama di daerah Priangan sejak awal abad ke-20 hingga tahun 1930-an, cukup pesat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Tumbuh dan berkembangnya perkebunan-perkebunan swasta milik orang-orang Eropa, terutama Belanda, akibat Undang-Undang Agraria 1870. Angka kematian lebih rendah daripada kelahiran, karena kesehatan masyarakat mendapat perhatian pemerintah. Perekonomian rakyat cukup baik akibat perluasan lahan pertanian, banyak lapangan kerja (buruh

perkebunan, buruh pabrik, pertukangan, dagang, kuli pasar dan stasiun kereta api dan lain-lain). Pendidikan rakyat mulai merata akibat adanya guru-guru lulusan HIK (Hollands Inlandssche Kweekschool) Bandung.

Dalam hal ini pendidikan, masyarakat Jawa Barat telah diperkenalkan dengan berbagai jenis sekolah model Barat sejak pertengahan abad ke-19. Pada umumnya dan yang diutamakan memasuki sekolah model Barat itu putera-puteri dari keluarga elit (menak). Sekolah yang mereka masuki adalah sekolah-sekolah yang kualitasnya lebih baik dan tingkatannya makin tinggi. Jenis-jenis sekolah dimaksud antara lain, Sekolah Kelas Dua (Tweede Klasse School), Sekolah Desa (Volkschool), Hollandsch Inlandsche School (HIS), bagi pendidikan dasar, Vervolgschool, Sekolah Guru (Kweekschool/HIK), MULO, Sekolah Teknik (Ambachtschool), Algemeene Middelbare School (AMS) bagi pendidikan lanjutan atau menengah, Hoofdenschool, Sekolah Dokter Jawa, Rechthogeschool, Technische Hogeschool (THS) bagi pendidikan tinggi. Di samping itu, rakyat Jawa Barat sudah sejak berabad-abad mengenal pendidikan pesantren. Pemerintah Hindia Belanda mengadakan berbagai jenis sekolah dengan tujuan utama mendapatkan tenaga kerja terdidik dan murah.¹⁶

Adanya diskriminasi siswa-siswa pada sekolah-sekolah masa kolonial terselip maksud kaum kolonial untuk membentuk kelompok masyarakat yang dapat hubungannya dan setia kepada pemerintah kolonial.¹⁷ Namun tujuan yang bersifat kolonial itu tidak seluruhnya tercapai, bahkan kenyataannya ada sesuatu yang

¹⁵R.Z. Leirissa, *Sejarah Masyarakat Indonesia*, 1985, hal. 37.

¹⁶Ekadjati, et. al., *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat*, 1986, hal. 39, 106.

tumbuh yang justru bertentangan dengan tujuan kolonial, yaitu munculnya kaum terpelajar yang menyadari kedudukan mereka yang tidak layak dalam masyarakat kolonial, sehingga berupaya keras untuk meningkatkan kehidupan dan derajat bangsa mereka serta membebaskan bangsa mereka dari kungkungan kolonial. Upaya kaum terpelajar tersebut terkenal dengan sebutan pergerakan nasional. Pada masa itu, Jawa Barat, terutama Kota Jakarta dan Bandung, menjadi pusat utama kegiatan pergerakan nasional yang melahirkan para pemimpin nasional yang melahirkan para pemimpin nasional serta organisasi-organisasi pergerakan nasional.¹⁸

Faktor penting lain yang turut mendorong berubahnya kehidupan sosial rakyat Jawa Barat ialah perkembangan transportasi dan komunikasi sejak dibukanya jalur kereta api di Jawa Barat antara 1881 - 1911, sehingga Jawa Barat dapat berhubungan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur melalui jalur Kereta Api. Akibat perkembangan kota-kota dan adanya transportasi rakyat, maka timbul pula urbanisasi dan migrasi penduduk. Terjadinya hubungan antara daerah dan percampuran hidup antara pribumi dengan orang Belanda/Eropa serta dengan golongan Timur Asing, menyebabkan kehidupan sosial budaya dan ekonomi rakyat Jawa Barat semakin kompleks.

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa tanah di wilayah Jawa Barat pada umumnya termasuk jenis tanah yang subur. Selain itu, curah hujan yang tinggi dan permukaan tanahnya berbeda-beda. Semua faktor tersebut memungkinkan

¹⁸Sartono Kartodirdjo. et. al., *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid V, 1975.

wilayah Jawa Barat menjadi daerah agraris yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Sejak abad yang lalu, produksi pertanian dari wilayah Jawa Barat bukan hanya penting bagi kehidupan masyarakat Jawa Barat sendiri, melainkan juga mempengaruhi perekonomian Nusantara. Produksi-produksi pertanian dimaksud ialah kopi, teh, kina, karet, tebu, dan padi.¹⁹

Mulai tahun 1902 di dataran yang lebih rendah berderet pula sejumlah perkebunan karet, dari daerah Banten selatan hingga daerah Ciamis di perbatasan Jawa Tengah. Dalam pada itu, di dataran rendah Cirebon dan Majalengka terhampar pula perkebunan tersebut didirikan dan dikembangkan dengan modal swasta dengan teknologi Barat, terutama datang dari Negeri Belanda yang telah lama menjadi kaum kolonial di Indonesia. Semua itu mempunyai nilai strategis bagi perekonomian Jawa Barat dan Indonesia, walaupun pernah menjalani kemunduran pada masa pendudukan militer Jepang. Sehubungan dengan potensi ekonomi yang strategis wilayah Jawa Barat dalam konteks Indonesia pada masa kolonial, tidaklah mengherankan jika pihak kolonial Belanda berusaha keras dengan segala rekayasa untuk dapat menguasai wilayah Jawa Barat.

Dalam pada itu, kehidupan agama Islam pada masyarakat Jawa Barat juga menunjukkan perkembangan, bahkan Bandung menjadi tempat Kongres Nasional Sarekat Islam (SI) pertama 1916. Sementara itu, antara 1900 hingga 1940-an kehidupan kesenian, kesusasteraan, media masa (majalah dan surat Kabar) turut

¹⁹Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*, Jilid 2, 1999.

berkembang pula. Pada masa pendudukan Jepang, kehidupan sosial ekonomi rakyat mengalami kemunduran, karena politik dan tindakan Jepang, antara lain rakyat harus melakukan kerja paksa (*romusha*) yang cukup lama, bahkan kadang-kadang di tempat yang jauh dari rumah mereka. Demikian pula dalam bidang kesenian, khususnya seni tari, tidak mengalami perkembangan. Akan tetapi ada satu hal yang menggembirakan, yaitu meluasnya pemakaian bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan karena pemerintah pendudukan Jepang menghapuskan sama sekali penggunaan bahasa Belanda, baik dalam peraturan-peraturan dan pengumuman-pengumuman resmi pemerintah maupun percakapan sehari-hari. Pada masa revolusi kemerdekaan (1945-1949), kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat Jawa Barat dapat dikatakan mengalami stagnasi, karena seluruh perhatian pemerintah dan masyarakat menghadapi revolusi kemerdekaan.

II.4. Agama dan Kehidupan Sosial.

Kegiatan sosial ke-Islam-an pertama ditandai dengan kegiatan dakwah (*syiar*) Islam yang dilakukan para da'i, guna menyampaikan ajaran Islam dan hikmah dan bijaksana kepada seluruh ummat manusia. Ajaran Islam yang disampaikan tanpa adanya suatu paksaan, serta penuh toleransi terhadap budaya setempat.

Di daerah Priangan sebutan untuk ulama atau kiai hanya diberikan kepada orang yang tinggi ilmu pengetahuan agamanya. Kiai biasanya memimpin sebuah pesantren. Pada masa kolonial sampai awal Republik Indonesia umumnya pesantren

¹⁵Moh. Ali, et.al., *Sejarah Jawa Barat: Suatu Tanggapan*, 1972. hal. 197.

berada di luar kota, bahkan banyak di luar kampung, seperti di daerah perbukitan atau lembah. Oleh karena itu disamping menjadi kepala lembaga pendidikan agama, juga dianggap sebagai sesepuh atau pemimpin penduduk non formal.

Para kiai pemimpin pesantren itu demikian berpengaruh dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Pesantren bermukim puluhan, bahkan sampai ribuan santri, baik berasal dari kampung sekitar pesantren, maupun datang dari luar daerah. Para santri ini dalam prakteknya bukan saja sekedar murid para kiai dari pesantren itu tetapi juga mengharumkan nama kiai dan pesantren dimana ia menuntut ilmu. Sedangkan bagi penduduk desa, para santri juga berperan sebagai mediator yang menyampaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat kepada kiai pesantren tersebut.²⁰

Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda di daerah Jawa Barat yang berlatar belakang agama Islam dan ekonomis, seperti Perlawanan Haji Hasan pada tahun 1919 yang dikenal dengan Peristiwa Cimareme. Perlawanan Haji Hasan merupakan gerakan Sosial merupakan ungkapan keagamaan dari konflik yang bersifat ekonomis.²¹ Perlawanan Haji Hasan timbul untuk membela keadilan dan agama, serta berjuang untuk melindungi petani miskin. Semua ini tercermin dalam keteguhan hatinya untuk melakukan perlawanan dan sabilillah daripada menyerah kepada penguasa.

²⁰ Mohamud Iskandar, et.al., *Peranan Elit Agama Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia*, 2000, hal 18-19.

²¹ *Laporan-laporan tentang Protes Di Jawa Pada Abad XX*, 1981, Chusnul Hayati, *Peristiwa Cimareme 1919*, 2000, hal. 68.

Pemimpin desa dan guru agama berbasis desa dalam masyarakat petani, memainkan peranan utama dalam mobilisasi pengikut untuk melakukan protes atau perlawanan. Kesetiaan seseorang kepada pemimpin itu terutama difokuskan secara lokal, personal, serta dilandasi oleh ikatan kekerabatan. Selain itu ideologi perang suci mendasari perlawanan Haji Hasan. Ideologi perang suci menonjolkan penolakan masyarakat muslim terhadap pemerintah kafir. Perang suci atau jihad yang dilakukan Haji Hasan dan pengikutnya lebih diartikan sebagai upaya membela diri atau mempertahankan diri.²²

Gerakan bawah tanah dalam Sarekat Islam yang dikenal "Afdeeling B" di daerah Priangan, dan mulai melakukan kegiatan sejak bulan April 1918. Pada mulanya gerakan ini mendapat restu dari CSI (Central Sarekat Islam), yang telah membentuk organisasi lokal yang disebut "Wargo Bekerja". Ketua CSI O.S. Tjokroaminoto, melihat Afdeeling B pimpinan H. Ismail ini semacam "Wargo Bekerja". Dalam pertemuan tahunan SI Manonjaya pada bulan Januari 1919, Sekretaris CSI, Sosrokardono, menyetujui gerakan itu dan sejak saat itu menyebarlah di daerah Priangan. Afdeeling B pada dasarnya merupakan perluasan dan proses transformasi SI lokal ke dalam suatu gerakan yang menjadi wadah penyalur kepercayaan serta aspirasi masyarakat lokal.²³

²² Chusnul Hayati. 2000, hal 168.

²³ William A. Oates, "The Afdeeling B: An Indonesian Case Study". *Journal Of South East Asian History*. Vol. 9. hal. 108. *Sarekat Islam Lokal*. 1975. hal 101-103. Keterangan Sekretaris SI Cianjur (Assoeri). 18 Juli 1919. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh R. Prawirakusumah, Pemimpin SI Cianjur, 17 Juli 1919.

Afdeeling B memiliki tujuan ; pertama. memelihara dan mempertahankan agama Islam; kedua, patuh pada perintah Amir sebagai pimpinan; ketiga, rela mengorbankan harta dan nyawa untuk mengabdikan pada kepentingan agama serta kewajiban-kewajiban pada kepentingan agama serta kewajiban yang dibebankan oleh Afdeeling B; keempat, berani melawan atau berperang terhadap orang-orang yang merusak agama Islam dan musuh-musuh SI, bahkan jika perlu terhadap pemerintah.²⁴

Anggota-anggota Afdeeling B terdapat di Bandung, Batavia, Ciamis, Tasikmalaya, Garut dan Sukabumi. Jadi gerakan revolusioner ini telah tersebar di seluruh Priangan. Setiap anggota baru yang masuk dalam organisasi ini disumpah di ruangan setengah gelap dengan pembicaraan yang dibisikkan sangat pelan. Sumpah itu berbunyi “ Demi Allah, demi Rasulullah, demi Al-Quran, saya bersumpah tidak akan membuka rahasia Afdeeling B kepada siapa pun, sekalipun dengan anggota SI, dan wajib taat sepenuhnya kepada Afdeeling B”²⁵

Munculnya gerakan Afdeeling B disebabkan oleh dominasi politik pemerintah Hindia Belanda yang menimbulkan perubahan sosial yang mengakibatkan kemerosotan ekonomi, desintegrasi budaya dan penindasan politik. Keadaan ini menimbulkan rakyat hidup sengsara, menderita dalam masyarakat. Tumbuhnya keresahan ini mengakibatkan lahirnya gerakan sosial yang menolak tata tertib sosial yang sedang berlaku dan menentang penguasa.

²⁴ *Sarekat Islam Lokal*, 1975, hal. 96-120.

²⁵ *Ibid.*, hal. 97.

Keresahan yang mengakibatkan timbulnya gerakan Afdeeling B antara lain karena adanya garis pemisah antara kaum santri di satu pihak dan golongan abangan, priyayi, orang Cina dan Eropa di pihak lain. Pihak pertama menganggap pihak kedua sebagai musuh yang harus dilawan. Golongan abangan dianggap musuh karena menjadi kaki tangan pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan orang Cina dan Eropa dituduh sebagai pemeras keringat serta penghisap darah rakyat.

Penyebab lain adalah adanya keyakinan umum akan terjadinya perang suci. Keyakinan ini dipadukan dengan kepercayaan akan datangnya Ratu Adil yang hendak mengubah kesengsaraan dan penderitaan. Konsep kedatangan Ratu Adil telah berakar dalam kepercayaan orang Sunda, dengan istilah "Uga".²⁶

Pada bulan Februari 1919 O.S. Tjokroaminoto memerintahkan H. Ismail membubarkan gerakan Afdeeling B. Tjokroaminoto berpendapat bahwa gerakan Afdeeling B kurang baik karena akan membahayakan kepentingan umum dan negara. Dia melarang gerakan itu, karena program kerjanya bukan merupakan ketentuan SI.²⁷

Sedangkan perlawanan dengan Ideologi Imam Mahdi atau Ratu Adil seperti pemberontakan petani yang dipimpin haji-haji setempat di daerah Banten.(1818)²⁸ Rasa dendam dan frustrasi timbul di kalangan yang telah kehilangan kedudukan

²⁶ Uga merupakan ramalan sejenis *Pralambang Jayabaya*, *Jangka Jayabaya* dan *Serat Jayabaya*. Uga merupakan bagian dari mentalitas orang Sunda, walaupun uga tidak membangkitkan gerakan-gerakan revolusioner dan lebih mencerminkan sikap pasrah, pasif menunggu dengan sabar hingga apa yang dijanjikan leluhur itu akan datang dengan sendirinya. Tetapi bagi pemimpin-pemimpin yang mampu mengolah mentalitas uga bisa menjadi potensi revolusioner untuk membangkitkan perlawanan. Demikian pula S.M. Kartosoewirjo menggunakan konsep uga dan dipadukan dengan konsep ideologi jihad untuk memobilisasi rakyat dalam memperjuangkan NII. Nina H. Lubis, *Tradisi dan Transformasi Sejarah Sunda*, 2000, hal. 156-157.

²⁷ *Sarekat Islam Lokal*, 1975, hal. 101-103.

tradisionalnya. Kontak yang makin meningkat dengan dunia barat pada abad ke-19 menimbulkan berbagai perubahan di banyak bidang. Di bawah pemerintah Hindia Belanda yang secara berangsur-angsur membangun sistem birokrasi dan memaksakan peraturan-peraturan legal rasional, menyebabkan masyarakat terpecah menjadi golongan-golongan yang saling bertentangan. Pertentangan itu berdasarkan kesetiaan kepada lembaga-lembaga tradisional atau kepada lembaga-lembaga yang didatangkan dari luar. Akibatnya timbul konflik sosial, misalnya tampilnya elit agama sebagai lawan kuat dari birokrat-birokrat kolonial. Elite agama yang memimpin perang sabil mempunyai tujuan politik revolusi, yaitu menghancurkan pemerintahan kolonial.

Pada masa sebelum perang pengaruh kebudayaan barat dan modernitas telah memasuki masyarakat Priangan terutama di kota-kota besar, yang berakibat penghargaan terhadap para kiai dan ulama makin berkurang, merosotnya pengaruh kaum agama terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintahan. Dengan masuknya pengaruh barat, terutama dalam sistem pendidikan persekolahan, masyarakat yang telah terbaratkan menganggap bahwa kaum intelektual maupun pamongpraja lebih tinggi ketimbang para kiai dan ulama. Dan pemerintahan Belanda pun lebih memperhatikan kaum intelek, memandang para guru sekolah dan para pamongpraja, lebih tinggi daripada para kiai.²⁹

²⁸Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, 1984.

²⁹H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, 1985.

oleh masyarakat, terutama kaum terpelajar, dan pamongpraja kurang atau sama sekali tidak memperhatikan kehidupan beragama. Keadaan semacam ini membuat para kiai dan ulama prihatin dengan tidak diperhatikannya kepentingan kaum agama.

Tetapi, pada saat Pemerintah pendudukan Jepang merubah keadaan yang demikian itu. Banyak para kiai dengan sekaligus diberi jabatan-jabatan kepamongprajaan dari tingkat rendah sampai tingkat atas. Juga diadakan latihan-latihan kiai, yang diberikan kepadanya bahwa merakalah yang benar-benar berhak dijadikan pemimpin rakyat, bahwa kaum agama yang dapat mengurus rakyat sebaik-baiknya. Dengan sendirinya hal ini membangkitkan rasa percaya diri dikalangan para kiai tadi, sehingga menurut pendapatnya tidak ada sesuatu hal yang tidak dapat diselesaikan olehnya. Pengalaman semasa Pemerintahan Jepang dengan melibatkan para Kaum Agama dalam struktur pemerintahan merupakan pengalaman yang sangat penting bagi peranan kaum selanjutnya di masa revolusi,³⁰

Setelah proklamasi kemerdekaan dan Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri, penghargaan, pengaruh dan kekuasaan yang tercapai dalam masa Jepang, meskipun tidak serendah seperti sebelum Perang Pasifik, merosot kembali. Berkurangnya pengaruh itu meningkat setelah anjuran Pimpinan Negara harus banyak didirikan partai-partai politik, sebab sejak didirikannya partai-partai politik ini masing-masing aktif mencari pengaruh dikalangan masyarakat.³¹ Dengan

³⁰Harry J. Benda, *Bulan Sabit Dan Matahari Terbit, Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, 1980, hal 165.

³¹Maklumat No X dari Wakil Presiden Mohammad Hatta, Mohammad Hatta, *Memoir*, Hatta, 2002.

demikian perhatian masyarakat tidak lagi hanya dipusatkan kepada Masyumi seperti terjadi pada zaman pendudukan Jepang sebab pada zaman pendudukan hanya Masyumi yang boleh berdiri sehingga oleh karenanya sedikit banyak mengakibatkan kemunduran bagi mereka. Disamping itu mereka lihat bahwa badan bersenjata dalam waktu yang singkat mudah dapat pengaruh dan kekuatan. Oleh karena itu diantara umat Islam pun timbul keyakinan bahwa untuk mendapatkan kembali kedudukan yang dicita-citakan, tidak hanya dalam hal politik yang harus mereka atasi tetapi pula dalam soal ketentaraan. Karena inilah usaha pemuda Islam dalam membentuk pasukan bersenjata mendapat bantuan dan sambutan baik dari para kaum ulama dan para kiai.³²

³²C. Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. 1983, hal. 65.

BAB III

SEKILAS BIOGRAFI SOEKARMADJI MARIDJAN KARTOSOEWIRJO

III.1. Masa Muda

Pemimpin gerakan Darul Islam ini, Soekarmadji¹ yang lebih terkenal namanya dengan Kartosoewirjo nama kekeunya, Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo demikian nama lengkap dari Kartosoewirjo, dilahirkan 7 Februari 1905 di Cepu,² sebuah kota kecil antara Blora dan Bojonegoro yang dewasa ini menjadi daerah perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Dengan demikian, Kartosoewirjo bukanlah pribumi asli Jawa Barat. Hal ini menarik secara sosiologis, mengingat basis perlawanan gerakan Darul Islam adalah daerah yang secara kultural berbeda dengan daerah asal pemimpin utama gerakan Darul Islam³.

¹Nama sebenarnya Kartosoewirjo bukan Sekarmadji sebagaimana di populerkan oleh Pinardi, tetapi Soekarmadji, seperti halnya nama Jawa lain Soekarno, Soekarni sedangkan panggilan ketika masa kecil, biasa dipanggil dengan nama Dadji demikian menurut anaknya Dodo Mohammad Darda, Wawancara dengan Dodo Mohammad Darda pada tanggal 14 September 2001 di Bandung, bukti lain bahwa nama sebenarnya adalah Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yang tertulis di dalam berkas. Mahkamah AD dalam keadaan perang untuk Djawa dan Madura, "*Berkas Perkara No: X/III/8/1962 atas nama Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo*", hal. 9.

²Dengan berbagai variasi, data-data tentang biografi S.M. Kartosoewirjo, Komando Daerah Militer VI Siliwangi, Team Pemeriksa, *Berita Atjara Interogasi III*, 20 Juli 1962, hal. 1-7, Pinardi, *Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo*, 1964, hal. 20-33, Amak Sjarifuddin, *Kisah Kartosoewirjo dan Menyerahnja*, 1965, hal. 5-7, C. Van Dijk, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*, 1883, hal.11-30, B.J.Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, 1985, hal. 57-65, Hiroko Horikoshi, "The Darul Islam Movement in West Java 1948-1962", *Indonesia*, No. 20, 1975, hal. 61-64, S. Soebardi, "Kartosoewirjo and The Darul Islam Rebellion in Indonesia", *Journal of South East Asian Studies* XIV, No. 1, 1983, hal. 109-133, C.A.O Niewenhuije, *Aspect of Islam in post colonial Indonesia*, 1958, hal. 168-171.

³Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo memiliki garis keturunan dari Aryo Jipang, melalui Kartosoewirjo, sedangkan Kartosoewirjo memiliki anak Maridjan. Jadi Kartosoewirjo adalah

Dadji, begitulah ia dipanggil sewaktu kecil, adalah putra seorang priyayi Jawa yang bernama Maridjan, pegawai Gubernemen Hindia Belanda dengan jabatan Mandor Kehutanan di Mantingan, Blora, Jawa Tengah, sebagai pegawai paling rendah pada pemerintahan Hindia Belanda. Kakek Soekarmadji bernama Kartosoewirjo, sedangkan kakak dan pamannya Maridjan bukan pegawai rendahan tetapi ada yang jadi Bupati dan Wedana yang merupakan pegawai pemerintah Hindia Belanda yang kedudukannya lebih tinggi dari Maridjan sendiri.⁴ Dalam posisi inilah, keluarga Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo mempunyai kedudukan yang cukup penting sebagai seorang pribumi saat itu, menimbulkan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kepribadiannya. Dengan status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya ini, Soekarmadji beruntung sempat mengenyam pendidikan zaman kolonial Belanda.⁵

Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pertama mendapat pendidikan pada Sekolah "Ongko Loro" (Inlandsche School der Tweede Klasse), sekolah rendah untuk kaum Bumiputra di Mantingan sampai tahun 1916. Kemudian, melanjutkan ke

kakeknya, Maridjan sendiri menikah dengan R.A Fathimah dari Solo, memiliki anak Soekarmadji dan adiknya Sumartiningsih. Wawancara dengan Dodo Mohammad Darda pada tanggal 28 Januari 2000 di Bandung, Atmodarminto, *Babad Demak Dalam Tafsir Sosial Politik Keislaman dan kebangsaan*, 2000, Chusnul Hayati, et al. *Peranan Ratu Kalinyamat Di Jepara Pada Abad XVI*, 2000.

⁴Wawancara dengan Dodo Mohammad Darda pada tanggal 16 April 2002 di Malangbong. Penulis tidak mendapatkan data mengenai nama wedana dan bupati tersebut. Hutan di daerah Cepu adalah hutan Jati. Masyarakat sekitar Cepu memiliki watak anti Belanda dan pemerintahan Hindia Belanda tidak banyak berpengaruh di daerah ini.

⁵Wawancara dengan Dodo Mohanumad Darda pada tanggal 16 April 2002 di Malangbong. Menurut ayahnya jika mau mengunjungi keluarganya yang ada di Jawa, jangan membicarakan soal ideologi atau agama. Ternyata ketika Dodo mengunjungi pamannya, dalam keluarga tersebut ada yang beragama Kristen, Islam, Kejawan dan mereka menunjukkan toleransi yang baik.

HIS (Hollandsch-Inlandsche School) di Cepu sampai kelas IV.⁶ Tahun 1919 orang tuanya memasukkan Soekarmadji ke sekolah ELS (Europeesche Lagere School) di Bojonegoro mulai kelas III dan tamat pada tahun 1923⁷ Semasa remajanya di Bojonegoro inilah Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo mendapatkan pendidikan agama dari pamannya bernama Notodihardjo dan menjadi panutannya⁸.

Dalam hal ini Soekarmadji, termasuk yang berbakat dan akhirnya ia mengambil inisiatif, juga atas dorongan ayahnya dan kakeknya,⁹ untuk menjadi dokter pribumi dengan bersekolah di NIAS (Nederlandsch Indische Artsen School) Surabaya dalam tahun 1923. Di sekolah tersebut dia mengikuti tingkat persiapan (Voorbereidende School) selama tiga tahun. Kemudian pada tahun 1926 dia mulai kuliah utama yang sebenarnya.

⁶ Menurut Dodo Mohammad Darda, Kartosoewirjo dapat sekolah di HIS, karena pamannya menjadi Wedana di Cepu dan Kartosoewirjo sendiri tinggal bersama dengan pamanya itu.

⁷ Wawancara dengan Dodo Mohammad Darda pada tanggal 16 April 2002 di Malangbong. Ketika itu ayahnya Kartosoewirjo mengajak menemui paman ayahnya (kakek) yang juga sebagai Bupati Bojonegoro, mereka memasukkan Soekarmadji ke sekolah ELS (Europeesche Lagere School) dan selama di Bojonegoro tinggal di keluarga bupati tersebut, hingga tamat ELS. Penulis belum mendapatkan data nama Bupati Bojonegoro dan Wedana Cepu.

⁸ Harsono Tjokroaminoto, *Menelusuri Jejak Ayahku*, 1983, hal. 77. Menurut Harsono ketika ia masih kanak-kanak dalam pengamatannya bahwa yang membina Mas Karto demikian ia sebut nama Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo adalah Notodihardjo pamannya, Wawancara dengan Dodo Mohammad Darda pada tanggal 16 April 2001 di Malangbong bahwa yang membina sikap keagamaan langsung ayahnya adalah H.O.S Tjokroaminoto dan interaksi dengan para Kiai PSIHT, sedangkan Notodihardjo menurutnya adalah seorang Islam yang juga penganut kejawen.

⁹ Menurut Dodo Mohammad Darda, Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo merupakan turunan ke 10 dari Aryo Jipang, maka bila telah sampai turunan ke-10 pertikaian antara Kalinyamat dan Jipang akan berakhir. Cerita ini adalah cerita turun temurun dari keluarganya. Ketika Aryo Jipang terbunuh oleh Hadiwijaya, Arya Penangsang mengatakan "bahwa tahta kerajaan Demak walaupun jatuh kepada perempuan, tetapi tidak sah, dan pertikaian ini akan baru akan berakhir pada turunan ke-10." Dan ternyata bahwa dalam diri Soekarmadji bertemu dua garis keturunan yang bertikai itu, ibunya turunan ke-9 dari Kalinyamat dan ayahnya adalah turunan ke-9 dari Aryo Jipang, Wawancara dengan Dodo Mohammad Darda pada tanggal 16 April 2002 di Malangbong, Chusnul Chatimah, et al, *Peranan Ratu Kalinyamat Pada Abad XVI*, 2000.

Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo segera memulai karier politiknya tak lama sesudah mengikuti pelajarannya di NIAS. Ia tidaklah berbeda dengan rekan-rekan pemuda Indonesia lainnya seperti Alimin, Semaun, Soekarno yang sejak muda usia telah menunjukkan minat dan bakat-bakat mereka di bidang politik.

Bagaimanapun juga iklim dan suasana politik Indonesia waktu itulah yang paling dominan membentuk karakter para pemuda Indonesia, yakni karakter emansipatoris dan bangkit dari ketertindasan oleh suatu penjajahan yang dengan kepahit-getiran. Para pemuda ini dengan semangat kebangkitan nasional yang telah membara semenjak dekade awal abad ini. Dengan demikian, Soekarmadji tumbuh bersama semangat nasionalisme yang sedang berkembang.¹⁰

Organisasi pergerakan yang mula pertama dimasuki oleh Soekarmadji adalah Jong Java cabang Surabaya, yang secara kultural, memang mudah dipahami, mengapa ia bergabung ke dalam organisasi ini dan yang secara naluriah juga mudah dipahami bahwa karena naluri kepemudaan, ia aktif di dalam organisasi pemuda ini

Organisasi yang tidak secara jelas menyiratkan nafas politiknya ini memang lebih memberikan perhatian serta orientasi kepada kebudayaan Jawa ketimbang suatu orientasi yang lebih bersifat nasionalistik. Oleh karena itu, orang-orang yang bercita-cita untuk mencapai kemerdekaan seperti Soekarno enggan berlama-lama berdiam di dalam organisasi ini.¹¹ Soekarmadji, yang memasuki Jong Java dua tahun setelah

¹⁰Sartono Kartodirdjo, *Ideologi dan Teknologi Dalam Pembangunan Bangsa, Eksplorasi Dimensi Historis dan Sosio Kultural*, 1999, hal. 55.

¹¹C. van Dijk, 1983, hal. 15, Soekarno pindah ke Bandung dari Surabaya pada tahun 1921 untuk melanjutkan pelajarannya di Technische Hogeschool (THS: ITB sekarang.), John D. Legge, *Sukarno, sebuah Biografi Politik*, 1985, hal. 79.

Soekarno meninggalkan organisasi ini. Tatkala H. Agus Salim, seorang pengurus PSIHT (Partai Sarekat Islam Hindia Timur), memperingatkan para pemuda Indonesia akan bahaya nasionalisme picik dan kerancuan Westernisasi sebagaimana dipahami oleh para pemuda Indonesia umumnya dan yang untuk hal mana H. Agus Salim mengingatkan pentingnya Islam sebagai benteng terakhir yang akan mampu melindungi para pemuda Indonesia dan kedua bahaya tadi.¹²

Soekarmadji agaknya terpanggil oleh seruan Agus Salim ini, dan pada tahun 1925, berintikan para bekas anggota Jong Java yang militan, didirikanlah Jong Islamisten Bond (JIB) yang memang gencar “menolak dominasi kekuasaan dan kultural Barat dengan kembali kepada wajah Islam yang sebenarnya yang bersih dan unsur-unsur Jawa dan bid’ah.”¹³

Dua tahun Soekarmadji aktif di JIB (1925-27),¹⁴ dua tahun pula mulai mengenal ide-ide modernisme Islam Agus Salim. Kenyataan ini agak mengherankan jika dibandingkan dengan aksi-aksi politik Soekarmadji pada pasca kemerdekaan, dengan gerakan Darul Islam-nya bersikeras mendirikan negara Islam yang secara fundamental akan memberlakukan hukum-hukum Islam di Indonesia!¹⁵

¹²A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, 1984, hal.101, Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia di masa Pendudukan Jepang*, 1985, hal. 253, Salim memang khawatir dengan nasib para pemuda Islam di dalam Jong Java yang semata-mata berdasarkan nasionalisme saja itu, dan terhadap sikap pemuda Indonesia umumnya yang mulai terpengaruh oleh Westernisasi.

¹³A.K. Pringgodigdo, 1991, hal. 100-101, C. van Dijk, 1983, hal. 15-16.

¹⁴Pinardi, 1964, hal.22, mencatat bahwa Soekarmadji pernah menjabat Ketua JIB, tanpa pasti apakah sebagai Ketua JIB Pusat ataupun Ketua JIB cabang Surabaya.

¹⁵Untuk pikiran-pikiran Salim tentang modernisme Islam dalam kaitannya dengan nasionalisme, Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-42*, 1996.

Akan tetapi, kegiatannya di dalam Jong Islamieten Bond pada akhirnya menggiringnya kepada pemecatannya dari NIAS karena menuduhnya terlalu aktif dalam kegiatan politik. Tambahan lagi, pada Soekarmadji ditemukan sejumlah buku mengenai Sosialisme dan Komunisme¹⁶ maka tak ada alasan untuk mengelak dari kenyataan bahwa memang ia telah terlalu jauh terlibat di dalam kegiatan politik, setidak-tidaknya untuk ukuran seorang mahasiswa NIAS

Buku tersebut didapat dari pamannya di Yogyakarta yang ia temui pada saat libur yakni seorang wartawan dan sastrawan generasi pertama yang amat terkenal pada zamannya, bernama Mas Marco Kartodikromo,¹⁷ dan ia mendapatkan buku-buku yang sangat menarik bagi dirinya,¹⁸ buku tersebut ketika ia pulang ia bawa ke asrama. Karena didapatkan ia memiliki sejumlah buku sosialis dan komunis, bukunya pun belum sempat ia baca. Pada awal tahun 1927, dia dikeluarkan dari NIAS karena dituduh memiliki sejumlah buku sosialis dan komunis yang bukunya pun belum sempat ia baca.

Kemudian ia kembali ke Bojonegoro menceritakannya pada kakeknya. Demikianlah nasib Soekarmadji, masih beruntung tidak harus mengembalikan beasiswa. Kemudian ia menjadi guru partikelir HIS di Bojonegoro. Pada saat inilah

¹⁶Buku-buku Sosialisme-Komunisme itu diperolehnya dari pamannya, Mas Marco Kartodikromo, yang Komunis itu.: Wawancara dengan Dodo Mohammad Darda pada tanggal 16 April 2002 di Malangbong, Hersri S. & Joebaar Ajoeb, "S.M. Kartosuwiryo, Orang Seiring Bertukar Jalan", *Prisma* No. 5, Mei 1982, hal. 81.

¹⁷Pedoman Dharma Bakti Jilid 2, 1960, Manifest Politik Negara Islam Indonesia, No. V/7, hal. 101-103.

¹⁸ Penulis tidak mendapatkan keterangan tentang judul buku yang dibawa Kartosoewirjo.

ayahnya, Maridjan meninggal.¹⁹ Ketika ia menjadi guru partikelir di HIS, ia pertama sekali bertemu dengan H.O.S Tjokroaminoto, yang sedang mempropagandakan PSIHT, karena Kartosoewirjo sangat antusias dan ingin lebih tahu tentang gerakan Islam dan Partai, kemudian dia diajak ke Bandung. Selama tahun 1926-1927 menjadi sekretaris pribadi H.O.S Tjokroaminoto. Jadi mulai mengenal dan mengajarkan Islam dan pergerakan langsung dari Oemar Said Tjokroaminoto, bukan dari Hadji Agus Salim, karena ia bertemu dengan Hadji Agus Salim setelah Kantor pusat PSI (Partai Sarekat Islam) pindah ke Batavia, dari Agus Salim inilah ia mendapatkan kemampuan berdebat.²⁰

Selama tahun 1928, selain bertugas sebagai sekretaris umum PSIHT (Partai Sarekat Islam Hindia Timur)²¹, Kartosoewirjo pun bekerja sebagai wartawan di koran harian Fajar Asia. Semula ia sebagai korektor, kemudian diangkat menjadi reporter. Dalam bulan Oktober Kartosoewirjo menjadi peserta kongres pemuda Indonesia mewakili organisasi PSIHT. Di dalam kongres ini pandangan Kartosoewirjo tentang pendidikan harus berlandaskan Islam, yang bertentangan dengan pendapat ketua Kongres Soegondo.²² Pada tahun 1929, dalam usianya yang relatif muda 24 tahun, Kartosoewirjo telah menjadi redaktur harian Fajar Asia. Dalam kapasitasnya

¹⁹Menurut Dodo Mohammad Darda, Maridjan meninggal karena dibunuh oleh orang dari pihak keturunan Kalinyamat.

²⁰Wawancara dengan Dodo Mohammad Darda pada tanggal 16 April 2002 di Malangbong.

²¹Pada Kongres PSIHT bulan Desember 1927 di Pekalongan Kartosoewirjo terpilih menjadi sekretaris PSIHT.

²²Ahmaddani G. Martha, et.al., *Pemuda Indonesia Dalam Dimensi Sejarah perjuangan Bangsa*, 1984, hal. 72-79, Sidi Mawardi, *Bibit Perseteruan Nasionalis Islam Vs Nasionalis Sekuler, pengalaman Jong Islamieten Bond 1925-1942*, 2000, hal. 89-90, Holik H. Dengel, *Darul Islam dan Kartosoewirjo, Angan-angan yang gagal*, 1995, hal.10.

sebagai redaktur, mulailah dia menerbitkan berbagai artikel yang isinya banyak sekali kritikan-kritikan, baik kepada penguasa pribumi maupun penjajah Belanda²³. Gagasan radikal Kartosoewirjo mulai tampak dalam artikel-artikel *Fadjar Asia* itu, termasuk cita-cita Kemerdekaan Indonesia.

Ketika dalam perjalanan tugasnya itu dia pergi ke Malangbong. Di sana bertemu dengan pemimpin PSIHT setempat yang terkenal bernama Ardiwisatra, seorang yang juga aktivis PSIHT Malangbong. Di sana pulalah dia berkenalan dengan Siti Dewi Kalsum putri Ardiwisatra,²⁴ yang kemudian dinikahnya pada bulan April tahun 1929. Kartosoewirjo yang berasal dari Cepu Jawa Tengah tetapi mampu mengembangkan pengaruhnya di Jawa Barat yang mayoritas didiami oleh suku Sunda. Suku bangsa ini memang termasuk diantara suku bangsa yang dikategorikan memiliki keyakinan kuat terhadap agama Islam, kemampuan mengembangkan pengaruhnya mungkin sekali disebabkan oleh faktor yang saling berkait. Ia mendapat dukungan dari masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Jadi Kartosoewirjo oleh orang Sunda Jawa Barat tidaklah dipandang “orang Jawa” melainkan “tokoh Islam”, karena itu mereka memberikan dukungannya baik langsung maupun tidak langsung.²⁵

²³Fadjar Asia 16 Januari 1929, Fadjar Asia 27 April 1929, Fadjar Asia 6 Juni 1929.

²⁴Menurut Dodo Mohammad Darda bahwa Ardiwisatra menikah dengan Siti Rubu Aisyah memiliki anak Dewi Siti Kalsum, Ayah Siti Rubu Aisyah adalah Mohammad Ilyas, yang merupakan anak dari R. Surayuda adik Bupati Sumedang R. Kusumahyuda (1828-1833). Wawancara dengan Dodo Mohammad Darda pada tanggal 5 Juli 2001 di Bandung.

²⁵Anhar Gonggong, *Abdul Qahhar Muzakar, Dari Patriot Hingga Pemberontak*, 1992, hal.104-105

III.2. Aktivitas Intelektual dan Organisasi

Seluruh episode mengenai masa sekolahnya di NIAS ini menandai sekaligus memulai sosialisasi politiknya yang pertama sebagai anak muda, dan segera setelah itu ia akan memasuki episode baru di dalam hidupnya. Ia bertemu dengan H.O.S. Tjokroaminoto dari Partai Sarekat Islam seorang tokoh perlawanan politik Indonesia terhadap kolonialisme Belanda yang memimpin sebuah gerakan rakyat Indonesia yang juga selama periode 1912 – 1916 dianggap sebagai simbol pembebasan nasional.²⁶

Perkenalannya dengan Tjokroaminoto segera menaikkan prestisenya, karena begitu ia masuk ke dalam partai ini tahun 1927, ia diangkat sebagai sekretaris pribadi HOS Tjokroaminoto selama dua tahun. Walaupun kondisi Tjokroaminoto dan Sarekat Islam tidak lagi seperti tatkala gerakan ini masih jaya di tahun-tahun 1911-21, sebelum orang Komunis berhasil memecah gerakan ini dan pada tahun 1921, namun yang pasti Kartosoewirjo, sebagaimana Semaun, Alimin dan Soekarno, juga sempat mengenyam cita-cita perjuangan dan mentor politiknya ini.²⁷ Pada masa

²⁶A.P.E. Korver, *Sarekat Islam, Gerakan Ratu Adil?*, 1985, hal. 43, Partai Sarekat Islam lebih populer dengan sebutan “Sarekat Islami” saja. Didirikan 1911 dengan nama Sarekat Dagang Islam, kemudian menjadi Sarekat Islam (September 1912), lalu menjadi Partai Sarekat Islam (1921). Pada tahun 1927 berubah menjadi Partai Sarekat Islam Hindia Timur, dan terakhir menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia tahun 1930.

²⁷Tjokroaminoto seolah seperti “mata air dari semua ideologi”, di mana Islam, Nasionalisme dan Komunisme tumbuh subur pada pangkuannya. Semaun, Alimin, Musso dan Soekarno, “The Founding Fathers” Nasionalisme dan Komunisme, juga sempat berguru kepadanya. Tetapi ide Pan Islamisme Tjokroaminoto diteruskan oleh S.M. Kartosoewirjo dengan mewujudkan melalui tahapan

tiga tahun (1926-29) itu ikut membentuk kepribadiannya, yakni kepribadian seorang pemuda Indonesia yang dengan semangat Islamnya mencita-citakan terwujudnya kemerdekaan Indonesia, dan gagasan Pan-Islamisme untuk menegakkan kembali kekhalifahan Islam sebagaimana H.O.S Tjokroaminoto sendiri.²⁸ Tjokroaminoto memperjuangkan ide sebuah negara Islam dan pengertian atas sebuah negara yang demikian itu adalah sebuah negara yang benar-benar menjalankan Syari'at dan hukum Islam sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi secara konsekuen dan menyeluruh.²⁹

Pada Kongres Nasional PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) 1929, ia diamanatkan untuk menjabat sebagai Komisaris Jawa Barat yang berkedudukan di Malangbong, Garut. Ternyata, Malangbong memberikan segalanya untuk Kartosoewirjo: persahabatannya dengan para pemimpin PSII dan guru Islam setempat³⁰, pergaulannya yang akrab dengan penduduk setempat, dan akhirnya seorang istri. Dari para guru Islam setempat, ia belajar theologi Islam (al-'aqidah al-Islamiyah), tarikh (sejarah) Islam, tasawwuf, fiqh (yurisprudensi) Islam, dan lain-lain

"Negara Basis" Negara Islam Indonesia yang akan dilanjutkan ke tahapan "dunia" (kekhalifahan). H.O.S. Tjokroaminoto, *Islam dan Sosialisme*, 1966, hal. 101-104.

²⁸ Amelz, *HOS Tjokroaminoto: Hidup dan perjuangannya*, 1952, Deliar Noer, 1986, hal. 242. Gagasan Pan-Islamisme masuk ke dalam SI terutama setelah runtuhnya kekhalifahan Turki pada tahun 1922, gagasan tersebut dilanjutkan kedalam Kongres Al Islam di Mekah. Walaupun demikian pemikiran Tjokroaminoto itu ada kecenderungan sosialis tetapi menolak komunisme, H.O.S. Tjokroaminoto, *Islam dan Sosialisme*, 1966, hal. 103-104.

²⁹ Menurut pengertian dalam Islam, apa yang didirikan oleh Nabi Muhammad di Madinah adalah sebuah negara, Z.A. Ahmad, *Membangun Negara Islami*, 2001, hal. 14, Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, 1999, hal. 58.

³⁰ Guru Islam setempat adalah para Kiai atau ajengan, yang biasanya memiliki keahlian khusus dalam ilmu-ilmu Islam. Soekarmadji cenderung untuk autodidak dalam mempelajari ilmu-ilmu Islam melalui konsultasi pribadi dengan kiai-kiai yang konsekwen dan sholeh, dan mempelajari

ilmu tradisional Islam yang kesemuanya itu memberikan bekal secukupnya dalam pembentukan Darul Islam. Demikianlah, dengan theologi Islam Kartosoewirjo menjadi faham akan hakikat Ke-Esaan Ilahi, baik dalam makna transendensinya maupun dalam makna politikalnya; dengan mempelajari tarikh Islam ia memahami esensi pembentukan basis ideologis masyarakat Islam melalui peristiwa “Hijrah sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dahulu³¹; dengan mendalami Fiqh Islam, menjadi faham lah ia akan perlunya penataan kembali masyarakat Islam sesuai dengan hukum-hukum eksternal Islam (syari’at); dan dengan Tasawwuf, semua hal di atas tiada hampa dari makna-makna terdalam yang dikandungnya. Sedemikian rupa hal-hal di atas berjalın-kelindan sehingga semua itu berpengaruh terhadap perilaku dan kepribadian Kartosoewirjo sehari-hari; ia begitu gemar melakukan kontemplasi (khalwat) di kesunyian alam Malangbong guna melatih kesucian batinnya, yang pada akhirnya menuntunnya untuk menjalani kehidupan sebagai seorang “sufi yang mengabdikan diri.”³² Dalam pada itu, karena ia dikenal

melalui buku-buku yang ada pada saat itu. Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, 1994, Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*, 1999.

³¹Kalim Siddiqui, *Seruan-seruan Islam: tanggung Jawab Sosial dan Kewajiban Menegakkan Syariat*, 2002, hal. 188-190. Metode perjuangan hijrah sudah dilakukan oleh Diponegoro yang dilanjutkan dengan jihad (perang sabil) melawan pemerintahan jahiliyah (Belanda), Saleh As’ad Djahhari, *Stelsel Benteng Dalam Pemberontakan Diponegoro 1827-1830 Suatu Kajian Sejarah Perang*, 2002, hal. 57-57, QS Al Baqarah ayat 218. Penulis berpendapat Kartosoewirjo tidak menutup kemungkinan telah membaca Babad Diponegoro.

³²Hiroko Horikoshi, “The Darul Islam Movement in West Java (1948-62): An Experience in the Historical Process”, *Indonesia*. No. 20, 1975, hal. 74, Wawancara dengan Dodo Mohammad Darda di Malangbong pada tanggal 16 April 2002. Sesungguhnya Kartosoewirjo tidak pernah berguru langsung kepada seseorang. Hubungannya dengan Mertuanya Ardiwisastra seorang Wedana Pengganti yang menguasai Tarikh Islam, Abdul Quddus yang menguasai Theologi Islam, Joesoef Taudjiri yang menguasai Tasawwuf, Kiai Ramli, R. Oni, I. Qital dan Kiai Mustafa Kamil yang menguasai Tafsir Quran Hubungan mereka bukan hubungan guru dengan murid tetapi merupakan persahabatan dalam PSII, tetapi Kartosoewirjo memang sering menimba ilmu kepada siapapun.

sebagai orang yang “amat meluhurkan sikap saling menghormat”³³ kepada sesama, serta ditambah lagi ia sendiri menantu dari Ardiwisasta, seorang wedana pengganti dan disegani di Malangbong, maka ia pun memperoleh tempat terhormat dan dapat bergaul erat dengan masyarakat setempat. Dengan bekal ini semua lah ia bisa “bersatu dengan massa, berada di tengah-tengah massa, dan menggembelng massa menjadi kekuatan yang terorganisir dan tersebar luas”³⁴ sungguhpun berdasarkan asal-usulnya Kartosoewirjo bukan pribumi asli Jawa Barat. Keberhasilan Kartosoewirjo dan Darul Islamnya dalam memobilisasi massa disebabkan oleh adanya “wibawa tradisional” (traditional authority), yakni “kesediaan seseorang atau sekelompok orang untuk bertingkah-laku sesuai dengan kehendak orang lain tanpa mempertimbangkannya terlebih dahulu dengan standart nilai/patokan yang mereka miliki.”³⁵ Terlepas dan penilaian apa pun terhadap gerakan ini, namun yang pasti, masa dua tahun (1929-31) pengabdian di Malangbong ini telah memberikan arah hidup dan kehidupan yang sama sekali baru bagi Kartosoewirjo; arah kehidupan yang kelak dicap sebagai pemberontak.

Dengan pengalaman Malangbong, tiga tahap dilaluinya masa sosialisasi politiknya: Jong Java (JJ), Jong Islamieten Bond (JIB), dan dengan Mas Marco

Dengan bakat dan ketulusan jiwanya sehingga mampu menerima pencerahan. Pada waktu Kartosoewirjo memproklamasikan NII-nya, Joesoef Taudjiri berpihak kepada Republik Indonesia, dan baru pada saat menjelang wafatnya Joesoef Taudjiri membenarkan apa yang dilakukan Kartosoewirjo. Seluruh pengalaman batin Kartosoewirjo dapat dilihat pada pemikirannya kelak tentang “Hijrah.”

³³Hesri & Ayoeb, 1982, hal. 86.

³⁴Ibid, hal. 83.

³⁵Karl D. Jackson, *Traditional Authority, Islam and Rebellion: A Study of Indonesian Political Behavior*. 1980, hal. 187.

Kartodikromo selama menempuh pendidikan di NIAS; sebagai Sekertaris Pribadi Tjokroaminoto selepasnya dari NIAS; dan di Malangbong, ketika ia bertugas sebagai Komisanis PSII untuk Jawa Barat. Dengan demikian, berturut-turut sosialisasi nilai yang didupatkannya adalah: Tradisionalisme Jawa (Jong Java), Reformisme/Modernisme Islam³⁶ (Jong Islamieten Bond), Sosialisme-Komunisme (Marco Kartodikromo), "militansi Islam dan cita-cita negara Islam Tjokroaminoto, dan akhirnya nilai-nilai Islam dan para guru (Kiai PSII) dan sahabatnya di Malangbong". Akan tetapi, sebegitu jauh, nilai-nilai Islam yang diperolehnya dan para gurunya di Malangbong dan internalisasi nilai-nilai politik Islam ketika ia memimpin PSII yang menjadi inti ideologi pergerakan Darul Islam untuk mewujudkan Negara Islam Indonesia.

Dalam Kongres Nasional partai ke 22, Agustus 1936, di mana kongres merasa perlu untuk meneruskan strategi "Hijrah" ini guna "mempelajari dan mencontoh Sunnah Rasulullah SAW yang terpenting dalam melakukan *maatschappij opbouw*

³⁶G. F. Pijper, dalam *Beberapa Studi tentang Islam di Indonesia, 1900-50*, 1984, hal. 104, 107, 149-151, memberikan beberapa kecenderungan dari apa yang dikatakan sebagai Reformisme/Modernisme: "pertama, kecenderungan untuk mempertahankan sistem dari abad-abad permulaan Islam sebagai suatu sistem yang 'benar' setelah dibersihkan dan bid'ah; kedua, berusaha membangun kembali agama Islam, juga didasarkan atas sendi-sendi ajaran yang 'benar', kalau perlu disesuaikan dengan pengertian-pengertian temporer yang mencakup segi-segi agama, kesusilaan, dan kemasyarakatan; ketiga, berpegang teguh ke pada dasar-dasar agama Islam yang diakui umumnya, tetapi tidak menutup pintu bagi pandangan pandangan baru yang biasanya datang dari Barat. Kecenderungan yang terakhir ini dapat kita sebut sebagai modernisme dalam Islam". ; Robert van Niel, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, 1985, hal. 161-63. Akan tetapi perlu diingat, relevansi Reformisme/Modernisme Islam Agus Salim dalam studi ini adalah: Reformisme/Modernisme H. Agus Salim mengenai dimensi intelektual dan Islam, tetapi yang menerima wujud nasionalisme/kebangsaan sebagai ideologi Negara suatu pemikiran yang berbeda jauh dengan Kartosoewirjo yang tidak menerima sama sekali nasionalisme Indonesia sebagai ideologi negara.

(pembinaan masyarakat).³⁷ Para pendukung “Hijrah” yang memperoleh kemenangan besar dalam kongres 1936 itu, menetapkan untuk mengakhiri semua perdebatan mengenai “Hijrah” dan “menegaskan kembali ‘Hijrah’ sebagai politik resmi partai dan memerintahkan semua pimpinan partai untuk menyebarluaskan sikap politik ini. Dan menugaskan kepada S.M. Kartosoewirjo untuk membuat brosur ‘hijrah’³⁸.

Dalam Kongres itu merupakan momentum terpecahnya Pucuk Pimpinan Partai sehubungan dengan pemikiran yang disampaikan oleh Kartosoewirjo. Usul yang dikemukakan Kartosoewirjo menghendaki diadakannya perubahan mengenai dasar perjuangan PSII. Usul ini kemudian terkenal dengan nama “Sikap Hijrah PSII”. Pokok pikiran yang terkandung dalam “Sikap Hijrah PSII itu secara ringkas dapat disimpulkan oleh Harsono Tjokroaminoto bahwa Kartosoewirjo menganggap masyarakat Hindia Belanda adalah masyarakat yang lebih condong kepada masyarakat Jahiliah pada jaman Nabi Muhammad Saw dahulu. Masyarakat yang dianggap setengah bathil. Dalam hubungan ini menurut pandangan Kartosoewirjo PSII perlu membentuk embrio permulaan ummat dan dari embrio ini akan muncul serta kaum dimana kaum ini bisa hijrah dari pergaulan masyarakat Hindia Belanda, seperti yang selalu diambil sebagai contoh dalam sejarah hijrah Nabi Muhammad Saw dari Mekah ke Madinah. Nabi pada waktu itu mengetahui bahwa masyarakat yang ada di Mekah adalah masyarakat kaum Quraisy, kaum yang menentang Islam

³⁷Wawancara dengan Dodo Mohammad Darda pada tanggal 16 April 2002 di Malangbong., Deliar Noer, 1996, hal. 162.

bahkan memusuhi Islam dan ummatnya disana. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah dan dengan kaum yang jumlahnya masih sedikit itu Nabi berhasil membangun benihnya berdirinya satu kaum yang kecil, tetapi yang kemudian bisa dijadikan satu ummat yang akhirnya berhasil membangun satu masyarakat Islam, sebagai lawan daripada masyarakat yang ada di Mekah. Demikianlah jalan pikiran Kartosoewirjo, melihat pergaulan hidup masyarakat Hindia Belanda pada waktu itu. Dari pemikiran ini Kartosoewirjo menganggap sangat penting sekali untuk membangun satu embrio, untuk kemudian menjadi satu ummat yang bisa mendirikan satu negara yang berdasarkan Islam, terpisah dari masyarakat Hindia Belanda.³⁹

Dalam pandangan Kartosoewirjo fase-fase perjuangan Islam PSII, kewajiban hijrah dan jihad dalam rangka konsolidasi kekuatan Islam. Secara kreatif ia menganalogikan Indonesia sebagai Mekah dan Madinah bermakna simbolik, yang pertama bermakna negara kafir (jahiliyah) dan yang kedua Negara Islam. Menegakkan negara Islam adalah bagian dari upaya ummat Islam mengikuti Sunnah Nabi SAW.

Menurut Dodo Mohammad Darda penunjukkan S.M. Kartosoewirjo menyusun Brosur "Sikap Hijrah Partai" banyak tidak disukai kiai-kiai PSII, yang hafizh Al Quran dan menguasai ilmu-ilmu Hadist, tetapi orang yang dianggapnya memiliki latar belakang sekuler ditetapkan oleh Partai untuk menyusun brosur "sikap Hijrah Partai"

³⁸Deliar Noer, 1996, hal. 163

³⁹Harsono Tjokroaminoto, 1983, hal. 83.

Kartosoewirjo untuk melaksanakan keputusan Partai tersebut, pertama ia membuat pos di daerah Ciledug Garut untuk menampung usulan-usulan dan naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana penulisan Tafsir hijrah partai dari seluruh cabang-cabang PSII seluruh Indonesia selama tenggang waktu tiga bulan. Tulisan-tulisan dan karangan dari berbagai cabang PSII itu merupakan bahan-bahan untuk rencana penulisan. Walaupun demikian Kartosoewirjo sendiri merasa berat menerima tugas dari partai ini untuk menyusun tafsir hijrah partai karena haru bertanggung jawab dunia akhirat demikian dalam pikirannya, lalu ia berkonsultasi kepada kiai-kiai dan tokoh-tokoh PSII yang ada di Malangbong dan Garut. Menurut salah seorang kiai dari anak Cabang PSII Kadungora Garut, sebelum menyusun brosur tersebut harus mencari “Guru Mursyid” (pembimbing)⁴⁰ dengan cara melakukan kontemplasi (khalwat), tabattul dan taqarrub⁴¹ selama 40 hari berturut-turut, sambil melakukan laku lampah yang sesuai dengan petunjuk seorang “pembimbing” (pengasuh).

Kemudian mencari tempat yang sesuai, didapatlah tempat di Tarogong Garut dan prosesnya melakukan perjanjian antara “yang diasuh” dengan “pengasuh” untuk melakukan ibadah, dari membaca Al Quran, dzikir, melakukan shalat wajib dan salah

⁴⁰Yang dimaksud guru mursyid adalah pembimbing dalam mencari ilmu yang haqiqi (asli). Menurut Imam Al Ghazali yang dimaksud ilmu haqiqi biasa disebut ilmu Laduni yaitu ilmu yang diberikan langsung oleh Allah kepada hambaNya. Dalam suatu Hadits Nabi SAW bersabda “*Barang siapa ikhlas (beribadah) kepada Allah empat puluh pagi (hari), Allah akan menampakkan sumber-sumber hikmah dari hatinya pada lisannya*”. ; Imam Al-Ghazali, *Ilmu Laduni*, (Terjemahan dari Al-Risalat Al-Laduniyah), 2003, hal. 59, Sayid Muhammad Mahdi Thabatba’I Bahrul Ulum, *As-Sair Wa As-Suluk, Perjalanan Menuju Alam Rohani*, 2000, Michaela Ozelsel, *40 Hari Khalwat, Catatan Harian Seorang Psikolog dalam Pengasingan Diri Sufistik*, 2002..

⁴¹Tabattul adalah membulatkan perhatian dan perasaan jiwa hanya untuk dzikrullah semata. Taqarub adalah mendekatkan diri kepada Allah S.W.T dengan memperbanyak ibadah nawafil (ibadah tambahan).

sunat dalam sehari semalam. Termasuk makan diatur oleh pengasuhnya, apa yang harus dimakan atau harus melakukan puasa. Kartosoewirjo mampu melakukan hal tersebut hingga hari ke 39, dalam kegiatan ibadah tersebut masih tetap harus datang ke mesjid untuk melakukan shalat wajib dan shalat Jum'at. Karena menurut ajaran Tasawuf Muhaqiqin⁴² orang yang melakukan ibadah "menyepi" ini harus dilakukan dalam periode 40 hari, kemudian istirahat minimal satu minggu. Kenyataannya Kartosoewirjo hanya melakukan satu kali semasa hidupnya dalam rangka menyusun brosur hijrah. Menurut keterangan Dodo Mohammad Darda, sesudah hari ke 35 masih ikut shalat Jum'at, kemudian pada hari 39 masuk rumah sakit, tidak sadarkan diri karena, kelelahan secara fisik.

Menurut Dodo Mohammad Darda, ayahnya pernah bercerita tentang keanehan yang dialami setelah melakukan khalwat bahwa pada malam ke 39 datang seorang yang untuk pertama kalinya ia bertemu, dan orang tersebut membawa sejenis suntikan, kemudian disuntikan ke dalam pundaknya sekitar satu liter banyaknya, dan terasa panas. Kemudian tidak sadarkan diri, hingga ia tersadar sudah berada di rumah sakit. Pada saat dia tersadar ada cahaya terang benderang menerangi sekitarnya dan ia melihat pembuluh darah yang ada di dalam pembuluh nadinya, dan sumsum yang ada dalam tulangnya, kulitnya terlihat transparan, kemudian membaca Al Quran. Pertama sekali yang ditemui disamping tempat tidurnya ketika di rumah sakit adalah Kiai Mustafa Kamil, anggota Dewan PSII. Ketika ia ditanya oleh

⁴²S.M. Kartosoewirjo. *Daftar Oesaha Hidjrah*, 1940.

Mustafa Kamil mau makan apa. Malah Kartosoewirjo meminta dibacakan ayat-ayat Al Qur'an, yang kemudian ditafsirkan secara berbeda dengan tafsirnya di lingkungan Pesantren, dan dibenarkan oleh Kiai tersebut.⁴³ Ilmu semacam ini biasa disebut ilmu laduni, artinya ilmu yang langsung dikaruniakan Allah kepada seorang hamba yang dicintai-Nya, tanpa melalui proses belajar sebagaimana biasanya, tetapi melalui proses tertentu sesuai dengan tradisi kitab tertentu yang beredar di pesantren.

Selanjutnya Kartosoewirjo istirahat di Ciledug Garut, disertai oleh Kiai Mustafa Kamil, sambil terus berdialog tentang tafsir Al-Quran yang dibandingkan dengan tafsir pesantren, tafsir Al-Quran versi Kartosoewirjo yang dibenarkan oleh Kiai Mustafa Kamil. Kemudian kembali ke Malangbong untuk menulis brosur sikap Hijrah.⁴⁴

III.3. Kepribadian dan Kepemimpinan

Kepribadian dan gaya hidup pribadi Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dan sikap-sikap pri hidup kehidupannya memperlihatkan keluhuran budi yang sederhana, tawadhu' dan rendah hati, seorang pemaaf yang sabar dan mementingkan keperluan orang lain.⁴⁵ Kartosoewirjo dalam kehidupan sehari-hari lebih memilih kehidupan sederhana dan lebih mementingkan kehidupan partainya dan perjuangannya. Dalam waktu senggang lebih banyak digunakan untuk menemui

⁴³Wawancara dengan Dodo Mohammad Darda pada tanggal 16 April 2002.

⁴⁴ Brosur hijrah tersebut terdiri dari dua jilid dengan judul "Sikap Hidjrah PSII". brosur ini diterapkan oleh Madjilis Tahkim PSII yang ke 22, diberi kata pengantar oleh Abikoeso Tjokrosocjoso dan Aroedji Kartawinata diterbitkan pada tanggal 10 September 1936.

⁴⁵Wawancara dengan Lukman Dahlan pada tanggal 12 Juni di Bekasi, Wawancara dengan Affandi Ridwan pada tanggal 27 Juni 2001 di Jakarta.

tokoh-tokoh keagamaan disekitar tempat tinggalnya. Seperti dikatakan teman dekatnya sewaktu tinggal di daerah Malangbong. S. M. Kartosoewirjo tak pernah menyia-nyiakan waktu begitu saja, jika ia tidak terlihat di ladang mertuanya dengan cangkul kecil yang rupa-rupa diouat untuk keperluannya dia sendiri, atau membaca buku, hampir setiap pagi kalau pergi ke ladang, dia kelihatan memakai celana model kuno, tetapi ia tetap tinggal di ladang tak lama; rupanya sekedar hanya mencari keringat saja".⁴⁶

Menurut Harsono, Kartosoewirjo adalah bukan saja seorang intelektual tetapi juga berpengetahuan luas dalam bidang keagamaan, dalam hal ini agama Islam. Ia memandangnya hanya dari sudut penguasaan ilmu agama itu sendiri terlepas dari penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selama berkeliling mengunjungi cabang-cabang partai baik di Jawa maupun di luar Jawa, Harsono berpendapat bahwa dalam menerangkan ayat-ayat Suci Al Qur'an Kartosoewirjo dianggap memiliki pengetahuan yang cukup dalam.⁴⁷

Menurut Harsono Tjokroaminoto, apa yang Kartosoewirjo menjadi buah pikirannya, sikap hijrah Partai, sulit ia terima dan demikian juga bagi para anggota Pimpinan PSII lainnya, selama rakyat Indonesia masih di bawah telapak kaki penjajahan Hindia Belanda. Strategi perjuangan untuk mencapai kemerdekaan

⁴⁶Pinardi, 1964, hal. 28.

⁴⁷Harsono Tjokroaminoto, *Menelusuri Jejak Ayahku*, 1983, hal. 76-81. Buku ini merupakan penerbitan Arsip Nasional Republik Indonesia dari hasil wawancara Wardiningsih dengan Harsono Tjokroaminoto.

dengan cara yang diusulkan oleh Kartosoewirjo itu sangat merugikan perjuangan PSII.

Akhirnya Harsono Tjokroaminoto sebagai salah pucuk Pimpinan PSII dalam kesempatan ia mengatakan kepada Kartosoewirjo:

“Mas Karto, walaupun saya bertahun-tahun telah menjadi murid dan merasakan telah banyak memperoleh bimbingan dan asuhan serta dibesarkan dalam perjuangan oleh Mas Karto sendiri, tetapi rupanya saatnya sudah tiba dalam perjuangan sekarang ini kita terpaksa harus berpisah”. Dalam pembicaraan selanjutnya Harsono Tjokroaminoto mengemukakan salah satu ayat suci Al Qur'an “lakum dinukum walliyadin” yang artinya “agamaku untukku, agamamu untukmu”.⁴⁸

Dengan demikian Harsono Tjokroaminoto berpisah dengan Kartosoewirjo dalam pandangan strategi perjuangan Islam. Harsono mengenal pribadi Kartosoewirjo sejak masa remaja. Kartosoewirjo menurut ukuran kacamata Harsono mempunyai pribadi yang bersemangat tinggi dalam memperjuangkan sesuatu. Menurut pengamatannya Kartosoewirjo tidak kenal menyerah dalam memperjuangkan sesuatu ide yang diyakininya.

Demikian Harsono mengemukakan bahwa manifestasi dari perpecahan yang terjadi dalam Kongres PSII tahun 1938, kemudian Kartosoewirjo dengan para pendukungnya yang tidak seberapa jumlahnya itu, memproklamasikan berdirinya yang ia namakan Komite Pembela Kebenaran (KPK) PSII yang ia pimpin langsung oleh Kartosoewirjo sendiri. Demikian pula dalam sejarah kemerdekaan RI dapat dipahami bahwa terbentuknya DI/TII tidak lain merupakan perwujudan daripada ide Kartosoewirjo yang dalam tahun 1938 ingin dipaksakan kedalam tubuh PSII, tetapi

⁴⁸Harsono Tjokroaminoto, 1983, hal. 77.

mendapat tantangan keras dari Pucuk Pimpinan Partai. Dan rupanya ide itu tidak pernah padam dalam jiwanya, sehingga tetap saja ingin dilanjutkan. Terbukti dalam perjalanan selanjutnya bahwa penafsiran Kartosoewirjo mengenai “hijrah PSII” itu sangat jauh berbeda dengan penafsiran Badan Penyadar PSII, dan ternyata tidak mungkin dilaksanakan di Indonesia.

Mengenai Negara Islamnya Kartosoewirjo, menurut pengamatan Harsono bahwa hal ini adalah idenya Kartosoewirjo sendiri. Hal ini karena rasa fanatisme sehingga terlalu dogmatis di dalam menafsirkan ajaran-ajaran Al Quran, terutama sekali dogmatis di dalam menafsirkan sunnah Nabi sehingga apa yang terjadi di Negara Arab dalam jaman Nabi dahulu ingin pula ditrapkan di Indonesia secara harfiah.⁴⁹

Berbeda dengan tafsir Kartosoewirjo, Harsono menafsirkan perkataan hijrah dalam bahasa Arab mempunyai dua arti. Pertama penafsiran maknawi dan kedua penafsiran ma’ani. Penafsiran maknawi adalah penafsiran secara harfiah. Tetapi kalau penafsiran ma’ani lebih banyak bersifat “figuurlijk”, lebih bersifat melukiskan. Harsono sendiri tidak berpegang kepada penafsiran maknawi sebab situasi dan kondisi di negara Arab jauh berbeda dengan situasi dan kondisi di negara Indonesia.

Demikian pula sejarah hijrah nabi Muhammad Saw kiranya penting untuk dijadikan landasan perjuangan bagi ummat Islam di Indonesia. Tetapi tidak dalam pengertian maknawi. Hal ini harus dihindarkan, karena yang bersifat harfiah itu

⁴⁹ Sebagaimana yang dilakukan Diponegoro (1825-1830), Saleh As’ad Djainhari, 2002, hal. 24.

kadang-kadang bisa menimbulkan penafsiran yang bersifat dogmatis pula, sehingga akhirnya akan membawa ke arah penerapan tanpa memperhatikan situasi yang berlaku di suatu tempat. Inilah perbedaan pokok pola pikir Kartosoewirjo dengan Harsono dalam hal Sikap Hijrah partai.

Kesan Harsono terhadap pribadi Kartosoewirjo ialah terutama sekali bahwa Kartosoewirjo adalah orang yang berwatak keras dan ketat memegang prinsip. Apabila mempunyai suatu idea atau pendirian yang dipandang baik maka idee atau pendirian itu akan dipertahankan secara mati-matian. Dengan berbagai motivasi dan argumentasi idee atau pendirian itu akan selalu pertahankan mati-matian. Dengan berbagai motivasi dan argumentasi idee atau pendirian itu akan diusahakan agar diterima oleh orang lain. Kartosoewirjo bukanlah pemimpin yang diplomatis, tetapi lebih tepat kalau dinamakan seorang perintis jalan. Perintis suatu idee atau gagasan.

Sikap hidupnya sehari-hari yang dipandang patut dicontoh terutama sekali sikap yang selalu serba sederhana. Sederhana dalam tingkah laku, sederhana di dalam mengurus rumah tangga, sederhana di dalam perbelanjaan rumah tangga, dan sederhana dalam berpakaian. Kegemaran Kartosoewirjo selain senang bekerja keras juga termasuk orang yang kuat dan taat menjalankan ibadah. Kartosoewirjo tidak hanya menjalankan sembahyang lima waktu, tetapi juga senang melakukan sembahyang istikharah, tahajjud, dan lain-lainnya. Ketaatan Kartosoewirjo ini mungkin karena pengaruh dari gurunya di Bojonegoro dan mertuanya di Malangbong, karena seperti telah dikemukakan kedua orang tua itu termasuk Islam yang konsiten. Tetapi lain halnya pandangan M. Natsir sebagai seorang PERSIS dan

juga aktif di PSII Bandung, juga sering bertemu dengan Kartosoewirjo, M. Natsir menganggap orang-orang PSII tidak pernah sembahyang Jum'at.⁵⁰ Sedangkan persoalan awal mulanya Darul Islam, menurut M. Natsir bahwa dengan Persetujuan Renville, masyarakat Jawa Barat ditinggalkan TNI, kemudian Kartosoewirjo membentuk Majelis Islam (MI) bukan Darul Islam. Majelis Islam menurutnya suatu cara untuk menghadapi Belanda bagi rakyat Jawa Barat. Dengan demikian menurutnya Majelis Islam tersebut dilegalisir oleh M. Hatta walaupun tidak tertulis.⁵¹

Pengaruh tarekat terhadap Kartosoewirjo dalam kebiasaan ibadahnya, seperti diungkapkan oleh Jamhur Sudrajat salah seorang sekretaris pribadinya. Kartosoewirjo adalah pendiam, tidak bicara kalau tidak penting, dalam diamnya selalu berdzikir mengucapkan La Ilaha Illallah.⁵² Tidak pernah membuang-buang waktu, biasanya setelah shalat fardhu (shalat lima waktu) selalu melakukan shalat hajat dengan membaca Surat Al Ikhlas dalam rakaat pertama sepuluh kali, dalam rakaat kedua dua puluh kali, dalam rakaat ketiga tigapuluh kali dan dalam rakaat keempat empat puluh kali. Sebelum tidur Kartosoewirjo selalu melakukan shalat empat rakaat setelah salam biasanya sujud sambil membaca "Shubbuhun Quddusun Robbuna Wa Rabb Malaikati wa ruh" sambil menahan nafas. Menjelang tidur ia merapatkan tangannya persis orang shalat sambil mengucapkan "La Ilaha Illallah"⁵³

⁵⁰Transkripsi wawancara J.R. Chaniago dengan M. Natsir pada tanggal 13 April 1983 di Jakarta. (ANRI) (Kaset ke-14)

⁵¹Transkripsi wawancara J.R. Chaniago dengan M. Natsir pada tanggal 13 April 1983 di Jakarta. (ANRI) (Kaset ke-14)

⁵²Dzikir yang selalu didawamkan setiap waktu dinamakan dzikir muhaqiqin.

⁵³Kalimat tauhid yang berarti "Tidak ada tuhan selain Allah".

seirama dengan nafasnya. Dengan kebiasaan dzikir ini sehingga ketika bangun masih tetap berdzikir. Hidupnya selalu qana'ah, dalam bekerja selalu teliti, cakrawala pengetahuannya luas⁵⁴

Kartosoewirjo selama di Markas Besar NII selalu mengikuti aturan para Komandan Markas. Hal ini bila ia menyuruh anak buahnya bekerja selalu bertanya dulu tentang kesehatannya, dan sarana dan prasarananya. Salah satu ketelitiannya bila anak buahnya membersihkan mesin tik, ia selalu memeriksanya dengan menempelkan ibujarnya yang telah dijilat ke mesin tik yang sudah dibersihkan, jika masih ada debu yang menempel di ibu jarinya maka pekerjaan tersebut dianggap belum tuntas.⁵⁵

Kartosoewirjo bukan seorang otoriter, ia selalu mengambil keputusan berdasarkan syuro (musyawarah), bila ia menyusun konsep tertentu mengenai masalah-masalah politik maupun militer lalu ia musyawarahkan. Tetapi dalam hal penentuan serangan, maka hal itu diserahkan kepada Panglima masing-masing, setelah musyawarah itu tercapai diambil suatu keputusan, maka realisasinya harus dilaksanakan secara konsekuen. Hal ini merupakan manifestasi dari sikap seorang Ulil Amri.⁵⁶ Pasukan-pasukan pun dianjurkan harus melakukan musyawarah setiap hari sebelum mereka bertempur, mereka harus melaporkan setiap keadaan dan

⁵⁴Wawancara dengan Janhur Sudrajat pada tanggal 19 Januari 2000 di Garut.

⁵⁵Wawancara dengan Janhur Sudrajat pada tanggal 19 Januari 2000 di Garut.

⁵⁶Transkripsi wawancara Dokjarah TNI AD dengan Ateng Djaelani pada tanggal 12 Januari 1971. (Dokjarah TNI AD). Wawancara dengan Talmid Rahunat Basuki pada tanggal 7 Juni 2000 di Bandung. Wawancara dengan Ules Suja'i pada tanggal 16 Juni 2001 di Cianjur.

merencanakan apa yang akan dilakukan. Hal ini tentunya merupakan karakteristik dari dinamika dalam PSII yang diterapkan dalam tubuh kemiliteran.

Markas Besar NII sering disebut MAB (Marsudin Ayu Ing Buana) atau MBS⁵⁷ (Muda Bhakti Suci), sebagai markas dimana Imam memegang sentral Komando, semua anggota MBS harus melaporkan, apa yang dia lihat, yang didengar, dalam pikiran apa yang terlintas, mimpi apa, situasi keamanan dalam dan luar. Misalkan ada yang sakit harus melapor, siapa yang sakit, kenapa sakit, diobati apa. Dalam hal makan, orang yang sakit harus makan lebih dulu. Mereka yang membuat kesalahan, misalnya mencari kayu bakar tidak boleh bersuara, yang mencari kayu bakar bersuara dipanggil dan tidak dipekerjakan lagi tetapi diberi makan istimewa, sehingga yang membuat salah tersiksa batinnya. Kartosoewirjo tidak pernah marah dengan fisik dan kasar, tetapi halus, bijak pada bawahan.

Kartosoewirjo bukan penganut mistik sebagaimana anggapan masyarakat, tetapi ia seorang sufistik yang kotentplatif, ia tidak percaya terhadap jimat atau bahkan seperti yang disebut mengenai golok panjang Ki Rompang dan Ki Dongkol, kedua golok tersebut berasal dari Musium Pangeran Papak Wanaraja yang dirampas oleh NII supaya menghilangkan kemusyrikan di masyarakat, diambil oleh R. Enoch. Menurut Jamhur Sudrajat golok tersebut ketika di gunung biasa digunakan untuk memabat rumput dan mencari kayu bakar. Selain itu juga peralatan-peralatan yang dikeramatkan masyarakat pada waktu itu dan merusak aqidah, diinstruksikan

⁵⁷ MBS singkatan dari Markas Bantala Seta, Markas besarnya NII selama bergerilya di pegunungan.

Kartosoewirjo untuk dihancurkan. Barang-barang dari Musium pangeran Papak bisa dimanfaatkan sedang dari Situ Panjalu dikubur atau dimusnahkan.

Kepribadian Kartosoewirjo berdasarkan analisa psikologis yang dilakukan oleh Kaskodam VI/ Siliwangi terhadap dirinya sewaktu berada dalam tahanan.⁵⁸ Tes dilakukan ketika SM Kartosoewirjo berumur 57 tahun, di kamar tahanannya setelah tertangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Hasil evaluasi didasarkan pada penilaian grafologis dari tulisan tangan SMK, berupa surat kepada Danu, dalam tahun 1950 dan Penilaian grafologis dari SMK, berupa sebagian buku harian dari tahun 1960⁵⁹, dan melalui Observasi dan Analisa Pembicaraan (*gesprachs analyza*) sewaktu diadakan interogasi terhadap SMK oleh As-1 KASKODAM VI/SLW dan PAPENDAM VI/SLW pada tanggal 27 Juni 1962. Didasarkan pada observasi sewaktu diadakan interview dengan SMK oleh PAROKHDAM VI/SLW beserta pembantu-pembantunya pada tgl 18 Juli 1962.

Menurut observasi tersebut, "Kecerdasan SM Kartosoewirjo, berdasarkan hasil evaluasi psychologi adalah bertaraf tinggi. Mutunya tidak bertitik berat pada kemampuan akademis semata-mata, melainkan juga pada penggunaan fungsi-fungsi intelektual yang ada padanya. Daya berfikir dan daya ingat pada usia lanjut hanya

⁵⁸Wawancara dengan Jamhur Sudrajat pada tanggal 19 Januari 2000 di Garut. Transkripsi wawancara Dokjarah TNI AD dengan H. Zainal Abidin pada tanggal 18 Januari 1971 di Bandung (Dokjarah TNI AD).

⁵⁹PSYDAM VI/SILIWANGI, *Analisa Psychologi S.M. Kartosoewirjo*, Bandung tanggal 19 Juli 1962.

menurun sedikit. Pada dirinya terdapat keseimbangan berfikir yang bersifat teoritis dan praktis.⁶⁰

Kemampuan intuisi Kartosoewirjo juga besar. Terutama dibidang inter human relation. Jadi dalam menghadapi manusia lain sebagai individu maupun sebagai suatu kelompok ia secara intuitif dapat mengambil langkah-langkah yang paling sesuai dijalankan untuk mencapai maksudnya. Kemampuan ini dapat memperkuat kedudukannya sebagai pimpinan. Intuisi yang kuat ini juga menyebabkan, interest terhadap mistik dan metaphysik ada. Akan tetapi dilain pihak, rasionalitasnya demikian besar sehingga daya kritik yang obyektif tetap terpelihara.

Segi lain dari pada struktur intelegensianya adalah, jalan pikirannya yang sangat kausal. Kausalitasnya bertitik tolak pada prinsip-prinsipnya, sehingga pembahasan segala persoalan dilakukannya menurut garis-garis tertentu yang tidak dapat dirubah lagi. Dengan demikian, suatu problem tertentu, bagi dia, mempunyai suatu cara pemecahan yang tertentu pula. Tindakan-tindakannya yang konsekuen dapat dipandang dari sudut ini. Fantasinya adalah konkret dan disesuaikan dengan keadaan realita. Itu sebabnya ia dapat menunjukkan akal dan siasat yang tepat untuk mengatasi problema-problema yang nyata. Ia adalah seorang intelektual yang sangat produktif⁶¹.

⁶⁰PSYDAM VI/SILIWANGI, *Evaluasi Psikologi S.M. Kartosoewirjo*, Bandung , 1962, hal.1.

⁶¹ *Ibid*, hal. 3.

S.M. Kartosoewirjo memiliki kontrol rasional terhadap pergolakan emosinya, menyebabkan ia tidak mudah terangsang oleh kejadian-kejadian sekitarnya. Secara fisik ia dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dimana ia berada. Berkat intelegensianya yang penuh dengan perhitungan dan pertimbangan yang konkrit, maka ia mampu menghadapi dan menerima situasi aktual secara obyektif, tanpa mengalami perasaan-perasaan depressif.

Menurut analisis Kapten Drs. Suyono HW, struktur pribadi SM Kartosoewirjo menggambarkan adanya dorongan-dorongan jasmaniah yang besar, dorongan mana berada di bawah dominasi intelektual secara keras. Maka dari itu, cara hidup dan cara mengatur lingkungannya, adalah higienis. Energi vital yang berakar di dalam bidang dorongan ini menyebabkan ia tidak dapat tinggal diam, melainkan memerlukan penyaluran melalui kegiatan-kegiatan yang produktif. Arus daripada penyaluran energi ini adalah keras dan terpusat. Hal ini dapat dilihat dari usaha-usaha yang dijalankan dengan intensif, agresif dan terpusatkan pada inti persoalan.⁶²

Hasil evaluasi psikologi seperti yang sudah dikutip di atas terhadap pribadi SM Kartosoewirjo menunjukkan, bahwa motivasi dan kesadaran spiritual yang menjadi dasar pergerakan Darul Islam, berpengaruh nyata terhadap kehidupan individu muslim. Memang kesadaran demikian akan bereaksi dalam jiwa seseorang yang menghendaki agar setiap individu memiliki intuisi yang peka, yang dengan itu

⁶²*Ibid*, hal. 3

dapat membedakan "yang ini benar dan yang itu salah", serta dapat merasakan yang indah dan yang buruk.⁶³

Bukankah Islam mengajarkan cara paling utama untuk menghubungkan hati seorang muslim dengan khaliknya, yaitu dengan mujahadah, mendidik intuisi yang peka dan perasaan halus. Pemikiran Islami dapat meningkatkan dan mendorong kepada penemuan baru yang dapat mengetahui alam dan mengetahui rahasianya. Karena itu manusia muslim diwajibkan agar senantiasa menjaga ibadah dan mengikuti perintah Allah guna meningkatkan intuisi, mempelajari apa-apa yang dapat memperluas wawasan pengetahuan, agar pengamatannya semakin luas, tajam serta menjangkau ke depan.⁶⁴

Kiai Joesoef Taudjiri, seorang teman dekatnya yang sama-sama di Pengurus KPK PSII dan pernah bergaul selama 20 tahun dengan SM Kartosoewirjo, memberikan penilaiannya sebagai berikut: "SM Kartosoewirjo adalah seorang yang mempunyai dasar-dasar jiwa pemimpin dan berkemauan keras." Tetapi salahnya, bahwa di dalam segala hal ia mau memegang pimpinan saja. Bila tidak demikian, maka ia selalu berusaha untuk mengadakan perpecahan dikalangan organisasi untuk dapat mencapai maksudnya.⁶⁵

Kiai Joesoef Taudjiri memihak ke Republik dan pesantren Darus Salam yang ia pimpin di Cipari Garut di serang oleh TII sebanyak 30 kali. Pada tahun 1937 Kiai

⁶³Kalim Siddiqui, *Seruan-Seruan Islami: Tanggung Jawab Sosial dan Kewajiban Menegakkan Sosial Islam*, 2002, hal. 226.

⁶⁴Sayyid Husein Nashr, *Tasauif Dulu dan Sekarang*, 1985, hal. 59-60.

⁶⁵Republik Indonesia, *Propinsi Djawa Barat*, 1953, hal. 215-216.

Joesoef taudjiri memisahkan diri dari KPK-PSII menurut dia, alasan memisahkan diri karena Kartosoewirjo banyak menyalahi ajaran Islam, terutama dalam mengisi uang kas organisasi dengan jalan tidak sah, seperti mengorganisir orang-orang jahat, yang ia tidak setuju, walaupun untuk tujuan yang baik.

Menurut Kiai Joesoef Taudjiri waktu Jepang menyerah didalam Perang Dunia kedua pada tanggal 14 Agustus 1945, Kartosoewirjo mengajaknya untuk memproklamirkan NII (Negara Islam Indonesia), tapi Joesoef Taudjiri menolaknya. Waktu jaman "Renville" dimana tentara dihijrahkan ke Jogja, maka anggota-anggota badan perjuangan dan Sabilillah yang tidak ikut hijrah menarik diri dan berkumpul di Gunung Tjupu. Waktu itu Kartosoewirjo juga mengajak lagi Joesoef Taudjiri untuk memproklamirkan NII-nya, tapi ia tetap menolaknya. Tentang Ide DI bagi Kartosoewirjo adalah bukan barang baru atau suatu hal yang kebentulan saja. Kartosoewirjo memikirkan sejak dahulu. Dan bila ada pihak yang mengatakan pula bahwa tindakan Kartosoewirjo itu adalah disebabkan beberapa pertentangan antara pihak-pihak yang tertentu semasa permulaan proklamasi, alasan ini tidak banyak kebenarannya.⁶⁶

Menurut A.H. Nasution, gerakan DI-Kartosoewirjo permulaannya berdiri dengan bantuan yang penuh dari TNI, berhubung perintah Siliwangi, sebagai salah satu pelaksanaan Persetujuan Renville, karena TNI tidak diperkenankan lagi

⁶⁶ Republik Indonesia, *Propinsi Djawa Barat*, 1953, hal. 216-218

meneruskan perang gerilya di Jawa Barat melawan Belanda. Maka DI itu banyak mewarisi organisasi gerilya peninggalan TNI yang hijrah itu.⁶⁷

Pada tahun 1928, Kartosoewirjo menjadi peserta Kongres Pemuda II di Batavia⁶⁸ dimana dia mewakili partainya. Di dalam kongres ini pandangan Kartosoewirjo tentang hakikat pendidikan pada masa yang akan datang sangat bertentangan dengan pendapat ketua rapat kongres Soegondo. Kartosoewirjo menegaskan bahwa dasar-dasar pendidikan harus berlandaskan pada ajaran Islam. Soegondo memberikan jawaban padanya, bahwa sikap yang demikian itu dapat membahayakan persatuan bangsa. Ketika Kartosoewirjo masih juga membela pandangannya secara terperinci, Soegondo memotongnya dengan memukul palu di atas mimbar, dan dengan demikian debat sengit itu diakhiri.⁶⁹ Juga Soenarjo yang mewakili dalam kongres tersebut heran atas sikap Kartosoewirjo yang tanpa kompromi, yang bagi orang Jawa hal itu tidak lumrah⁷⁰

III.4. Kartosoewirjo dan karya-karya.

Disamping sebagai organisatoris ulung Kartosoewirjo juga sangat produktif dalam menghasilkan sejumlah tulisan, yang biasanya bersamaan dengan persoalan umat Islam dan bangsanya, bahkan selama memimpin Darul Islam, ketika ia menjadi Imam Negara Islam Indonesia, hampir semua keputusan politiknya adalah

⁶⁷ A.H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas*, Jilid 2, 1983, hal. 271-272.

⁶⁸ Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, *Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun*, 1982, hal 36.

⁶⁹ R. Nalenan, *Arnold Mononutu. Potret Seorang Patriot*, 1981, hal. 82.

⁷⁰ Holk. H. Dengel, 1995. hal. 10.

hasil karyanya. Tulian-tulisannya yang merupakan hasil renungannya meliputi banyak hal diantaranya: Ideologi, Politik, Sikap Partai, Program dan Strategi dan Taktik, Analisa Masyarakat dan Sejarah, Aqidah Tauhid. Tulisan tersebut diantaranya adalah:

III.4.1. Tulisan Masa Hindia Belanda

1. Artikel

- **“Soenan dan Kebangsaan”**

Ditulis 16 Januari 1929 dimuat dalam Fajar Asia merupakan kritikan yang ditujukan kepada bangsawan Jawa yang bekerja sama dengan Belanda diantaranya, ketika Sunan Solo mengadakan ulang tahun ke-64.

- **“Memboeta Toeli”**

Ditulis 29 Januari 1929 dimuat dalam Fajar Asia merupakan jawaban untuk Ketua Cabang Muhammadiyah Betawi atas kritikan terhadap H.O.S. Tjokroaminoto berkaitan dengan “algemeene discipline” (disiplin partai) yang dilakukan CSI terhadap Muhammadiyah dan Kartosoewirjo balas mengkritik atas sikapnya Muhammadiyah menerima subsidi dari pemerintah Belanda dan perusahaan-perusahaan Belanda.

- **“Barisan Moeda”**

Dimuat dalam Fajar Asia tanggal 6 Februari 1929, berisi latar belakang berdirinya (Pemoeda Moeslimin Indonesia) PMI sebagai tempat persemaian kader-kader PSII yang berlandaskan Islam dan Nasionalisme.

- **“Islam Terantjam Bahaja”**

Dimuat 9 Februari 1929 dalam *Fadjar Asia*, berisi kritikan terhadap pemerintah Belanda yang netral terhadap agama tetapi mempersoalkan perijinan pendirian Mesjid.

- “Ra’iat dan Nasibnja”

Ditulis 12 Februari 1929 dalam *Fadjar Asia*, berisi tentang uraian kondisi masyarakat jajahan yang tidak berubah nasibnya berkaitan dengan soal “erfpacht” (hak-hak tanah rakyat). Untuk merubah kondisi itu ia mengajak rakyat untuk berjuang mencapai kemerdekaan Indonesia dengan landasan keyakinan terhadap Islam.

- “Bahaja jang Mengantjam Roeh dan Djiwa Ra’iat Djadjahan”

Dimuat 14 Februari 1929 dalam *Fadjar Asia*, berisi kritikan terhadap pemerintah Belanda yang berpihak terhadap misi zending dan juga analisa kondisi moralitas rakyat jajahan.

- “Moelai Sadar akan Hak-haknya”

Ditulis 16 Februari 1929 dalam *Fadjar Asia*, berisi analisa tentang sudah saatnya rakyat telah terjaga dari tidurnya yang selama berabad-abad lamanya dan sadar akan kewajiban dan haknya serta sama-sama menemukan suatu persatuan yang berjuang untuk kepentingan rakyat.

- “Satoe Boekti Gampangnja Hak Ra’iat Djadjahan Dilanggar atau Terlanggar”

Dimuat 23 Februari 1929 dalam *Fadjar Asia*, berisi kritikan terhadap aparat birokrasi pemerintah Belanda yang tidak berlaku adil terhadap rakyat jajahan, dan ia mengajak rakyat untuk sadar memperjuangkan nasibnya dalam rangka mencapai kemerdekaan yang berlandaskan Islam.

- “Halangan P.M.I Solo”

Dimuat dalam Fajar Asia tanggal 28 Februari 1929, berisikan pembelaannya atas tuduhan pemerintah Belanda terhadap PMI Solo, yang dituduh sebagai gerakan komunis yang hendak memuat makar, Kartosoewirjo mengajak anggota PMI untuk terus melakukan kegiatan organisasi, karena hal tersebut merupakan ujian sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Semua itu merupakan ujian bagi kaum pergerakan, sebagaimana keteguhan iman, kekokohan tauhid dan kesetiaan terhadap agama Islam, tidak perlu takut, teruskan perjuangan PMI.

- “Riwayat Almarhoem Raden Adjeng Kartini” ditulis 23 April 1929

Dimuat dalam Fajar Asia pada tanggal 23 April 1929, berisi kritikan terhadap peringatan Hari Kartini, dan penjelasan tentang kemajuan “kaum isteri” yang didasarkan Islam.

- “Kongres Liga”

Ditulis 25 April 1929 dimuat dalam Fajar Asia, berisi bantahan tentang ikut sertanya PSII dengan gerakan perlawanan terhadap Imperialisme untuk kemerdekaan Nasional.

- “Zaman Terbalik”

Dimuat dalam Fajar Asia tanggal 25 April 1929, kritikan terhadap orang-orang Islam yang ikut perajaan Imlek. Dalam tulisan ini dimulai dengan menuliskan ayat Al Quran, kemudian menguraikan sifat-sifat muslim yang baik.

- “Keberatan Ra’iat”

Dimuat dalam Fadjar Asia tanggal 27 April 1929, tulisan ini berisi tentang keberpihakan Kartosoewirjo terhadap rakyat jajahan yang diperas oleh macam-macam pajak, dan ia mengajak untuk rakyat untuk bersatu padu bersama PSII untuk memperjuangkan kemerdekaan.

- “Selamat Djalan”

Dimuat tanggal 2 Mei 1929 dalam Fadjar Asia. Berisikan tentang bangkitnya rasa kebangsaan dengan berangkatnya H. Agus Salim ke Eropa sebagai utusan bangsa Indonesia.

- “Perajaan 1 Mei”

Dimuat dalam Fadjar Asia tanggal 6 dan 7 Mei 1929, tulisan ini berupa uraian dan penjelasan tentang I.S.D.V ketika Rapat Besar I.S.D.V. di Betawi. Ia mengharapkan bahwa cita-cita kaum “social democrat” bisa tercapai sebagaimana tergambar dalam lagu “Internationaal”.

- “Nasib Ra’iat Tjitjoeroek”

Dimuat 11 Mei 1929 dalam Fadjar Asia, Kritik atas kenaikan pajak sawah hingga 90%. Dia juga mengeritik kerja rodi (Heerendienst) yang diganti dengan pembayaran tahunan, hanya karena tidak ada lagi lapangan kerja, akibat krisis ekonomi di Hindia Belanda pada masa itu. Pajak sawah kelas 1 dinaikkan dari f. 7.50 menjadi f. 13.90 dan pajak kelas 2 dinaikkan f. 6 menjadi f. 11.50, kemudian dia mengajak untuk bergerak di medan umum sambil menegakkan syiar Islam.

- “Rintangan dan Halangan”

Dimuat dalam Fajar Asia 14 Mei 1929, berisi anjuran kepada P.M.I untuk terus melanjutkan aktivitas organisasi walaupun banyak rintangan dari kalangan aparat Pemerintah Hindia Belanda.

- “Main-kokolijo”

Ditulis 18 Mei 1929 dimuat dalam Fajar Asia, berisikan bantahan terhadap kaum “Liberal-Nasionalis” atas kritikan bahwa Fajar Asia mendapat subsidi dari Pemerintah Hindia Belanda.

- “Soe’al Kaoem Boeroeh dan Madjikan”

Dimuat 3 Juni 1929 dalam Fajar Asia, tulisan ini berisi uraian tentang nasib kaum buruh yang mendapat penghasilan yang pas-pasan, dan ia mengajak untuk memperbaiki nasib kaum buruh dengan jalan harus memiliki pemerintahan sendiri.

- “Tipoe Moeslihat”

Ditulis 4 Juni 1929 yang dimuat dalam Fajar Asia dengan nama samaran Arjo Djipang, berisi kritikan terhadap kaum nasionalis.

- “Belanda Keboen jang Soeka Mempermainkan Anak Interi Orang”

Dimuat dalam Fajar Asia pada tanggal 6 Juni 1929, berisi kritikan terhadap orang Belanda untuk menghormati kaum wanita. Terutama para pengusaha yang memiliki perkebunan di daerah Sumatera.

- “Mana Hak Ra’iat ?”

Dimuat dalam Fadjar Asia 8 Juni 1929, berisi kritikan terhadap tuan tanah di daerah Sumatra dan kecaman terhadap para pemilik modal terutama di perkebunan daerah Lampung, yang berakibat tanah-tanah rakyat yang diambil alih begitu saja. Kartosoewirjo rakyat tidak memiliki perlindungan sehingga tidak bisa mencari keadilan.

- “Orang Lampoeng Boekan Monyet tetapi ialah Manoesia Belaka”

Ditulis 10 Juni 1929 dalam Fadjar Asia, berisi uraian tentang kasus tanah di daerah Lampung, terutama tentang “erfpacht”. Dalam tulisan ini berisikan uraian tentang kasus tanah di Lampung dan menjelaskan sikap Pimpinan PSII atas nama hukum kemanusiaan untuk mengembalikan hak tanah rakyat.

- “Neutral, Onpartijdig dan Kemoenafikan”

Ditulis 14 - 15 Juni 1929 dalam Fadjar Asia, dengan nama samaran Arjo Djipang. Dalam tulisan ini berisi kritikan dan jawaban atas kritikan redaktur “Bintang Timoer”, Parada Harahap yang menyerang surat kabar “Fadjar Asia” dan menyerukan untuk tidak mempercayai surat kabar tersebut sebagai surat kabar pergerakan Nasional.

- “Goblok tapi Sombong”

Dimuat dalam Fadjar Asia tanggal 17 Juni 1929, dengan nama samaran Arjo Djipang. Dari tulisan ini memberikan gambaran tentang Parada Harahap dan bantahan atas kritikan “Bintang Timoer”.

- “Penjiar Pechabaran Palseo”

Dimuat dalam Fadjar Asia tanggal 22 Juni 1929. Berisikan bantahan kritikan Parada Harahap terhadap para pimpinan PSII dengan kasus disiplin partai terhadap Muhammadiyah, keberangkatan Agus Salim ke Eropa, pengunduran diri para pimpinan PSII terutama H.O.S. Tjokroaminoto, A.M. Sangadji, Wondoamiseno. Kartosoewirjo di dalam artikel ini menyatakan tidak setuju dengan “Bank Nationaal” yang cenderung menguntungkan kaum kapitalis.

- “Boekan Oekoeran kita”

Dimuat dalam Fadjar Asia tanggal 24 Juni 1929. Memuat tentang jawaban kritikan surat kabar “Bintang Timoer”, berkaitan dengan pribadi Kartosoewiro sendiri, dan ia balas mengkritik bahwa Parada Harahap tidak memahami kebudayaan Jawa.

- “Memang koerang adjar”

Dimuat dalam Fadjar Asia 25 Juni 1929, berisi bantahan kritikan Parada Harahap terhadap peran PSII baik dalam pembelaan rakyat maupun peran sosial PSII. Juga peran PSII dalam membangkitkan kesadaran rakyat untuk mencapai kemerdekaan.

- “Berekor Pandjang”

Dimuat dalam Fadjar Asia tanggal 2 Juli 1929, berisi jawaban kritikan surat kabar “Darmo Kondo” tentang Nasionalisme PSII. Kartosoewirjo menjelaskan paham kebangsaan Islam semata-mata yang tidak terbatas oleh tanah air, tetapi berkaitan dengan persatuan Islam. Dengan kata lain “Nasionalisme Lillahi Ta’ala”.

- “Perbandingan”

Dimuat dalam Fajar Asia 7 Juli 1929, berisi tentang tuntutan PSII untuk kemerdekaan Indonesia dan umat Islam harus bergerak dalam berbagai lapangan perjuangan sehingga kemerdekaan dapat tercapai.

- “Siapa jang Tidak Setoedjoe dengan Kita, ialah Moesoeh Kita”

Dimuat dalam Fajar Asia tanggal 9 Juli 1929, kritikan terhadap surat kabar yang pro kaum kapitalis.

- “Roedjak Sentoel”

Dimuat dalam Fajar Asia 17 Juli 1929, berisi kritikan terhadap Nasionalisme “Darmo Kondo” yang berbeda dengan Nasionalisme PSII. Menurut Kartosoewirjo bahwa Kemerdekaan Indonesia hanya merupakan “Jembatan Emas” bagi berlakunya Hukum Islam yang merupakan kemerdekaan sejati.

- “Lagi tentang Sembahjang Djoem’ah dan pendirian Masdjid”

Dimuat dalam Fajar Asia 11 April 1930. Tulisan ini berisi bahwa dalam perjuangan rintangan dan halangan bukan suatu musibah tetapi merupakan ujian tercapainya cita-cita perjuangan yang lebih luhur.

- “Boepati dan Agama Islam”

Dimuat dalam Fajar Asia tanggal 21 April 1930, dalam tulisan ini kritikan terhadap Bupati Garut yang melarang sembahyang Jum’at yang diselenggarakan oleh PSII Cabang Garut. Kartosoewirjo mengajak kaum PSII untuk melakukan perlawanan sambil ia memberikan penjelasan dengan ayat-ayat Al Quran.

- “Hendak Damai atukah Mengganggoe?”

Dimuat dalam Fajar Asia 30 April 1930, memuat tentang pertikaian antara wedana Malangbong dengan PSII cabang Malangbong.

- “Faham jang menjempitkan hak berkoempoel”

Dimuat dalam Fajar Asia tanggal 20 Mei 1930, tulisan ini dengan nama samaran Arjo Djipang. Berisi penjelasan pertikaian PSII Cabang Cilame dengan pemerintah setempat yang berkaitan dengan hak berkumpul untuk menyelenggarakan perkumpulan yang sudah diakui tetapi masih dipersulit dengan macam-macam pembatasan.

- “Sedikit tentang “Oeloel Amri”

Dimuat dalam Fajar Asia tanggal 23 Mei 1930. Berisi bantahan pengertian penjelasan “Ulil Amri ” oleh pemerintah setempat. Kartosoewirjo menjelaskan pengertian “Ulil Amri” sebagai pemerintahan Islam yang merdeka dan berdaulat. Pemerintahan Islam itu dipimpin oleh orang-orang Mukmin (orang yang beriman), sebagaimana pemerintahan zaman “Khulafaur Rasyidin”.

- “Lagi tentang ‘Oeloel Amri”

Dimuat dalam Fajar Asia tanggal 24 Mei 1930. Berisikan penjelasan kewajiban ummat Islam untuk membentuk pemerintahan Islam.

2. Sikap Hidjrah PSII Jilid 1

Ditulis di Malangbong tahun 1936 diterbitkan oleh Madjlis Tahkim Partai Sarekat Islam Indonesia ke-22 dengan kata pengantar dari Abikoesno Tjokrosoejoso. Brosur ini merupakan penuntun langkah gerak, usaha dan program partai PSII yang

harus dijadikan pedoman partai. Brosur Sikap Hijrah ini merupakan sikap politis dari warga PSII keluar maupun kedalam. Dalam brosur jilid pertama ini berisi penjelasan Hakekat manusia dan hubungannya dengan Tuhan dan masyarakat dengan pendekatan transendental, yang cenderung sufistik tetapi dengan makna yang berbeda. Dengan kata lain pendekatan lebih bersifat nubuwah walaupun manusia sudah dekat dengan Tuhan tetapi tanggungjawab sosial lebih penting. Selain itu membahas pula tahapan perkembangan masyarakat Indonesia dalam sudut pandang Islam hakiki. Bab-bab selanjutnya membahas sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dari sebelum hijrah hingga hijrah ke Yastrib hingga terbentuknya Madinah Al-Munawarah sebagai wujud bentuk negara Islam pertama. Tujuan utama dalam brosur ini adalah untuk mewujudkan ideologi PSII di tengah-tengah masyarakat Indonesia yaitu: Tidak ada hukum kecuali ada hakim, tidak hakim kecuali harus ada negara yang merdeka, tidak ada negara yang merdeka kecuali harus ada bangsa yang merdeka.

3. Sikap Hijrah PSII jilid ke 2

Brosur ini ditulis tahun 1936 merupakan kelanjutan jilid pertama. Berisi penjelasan makna Hijrah dan Jihad dalam sudut pandang Al-Quran dengan pendekatan logika bahasa Arab seperti siapa, dimana, kapan, kemana, tujuan, syarat, sebab, dan jenis. Selanjutnya membahas program jihad partai yang biasa sebut program tandhim. Prinsip utama tauhid yang dijadikan landasan Kartosoewirjo, sejak tahun 1936 dan menjadi wacana dikalangan PSII, hakekat Tauhid dengan pengertian *La mathluba illallah* (tidak ada yang dicari dan dituju melainkan rahmat dan ridlo

Allah), La maqshuda illallah (Tidak ada yang dituju melainkan untuk mengikuti perintah-perintah Allah), La ma'buda illallah (tidak yang wajib dihambai kecuali Allah), La maujuda illallah (tidak ada yang berwujud kecuali Allah). Tauhid inilah sebagai manifestasi hakekat La Ilaha Ilallah. (Tiada Tuhan selain Allah).

4. Daftar Oesaha Hijrah

Ditulis di Malangbong tahun 1940, brosur yang rencananya akan dibahas dalam dalam Kongres PSII di Palembang, tetapi tidak jadi dan pada Kongres itu S.M Kartosoewirjo bersama pendukung "hijrah" dipecat dari PSII, kemudian pada bulan Maret ia dan kawan-kawannya membentuk KPK-PSII dan menerbitkan "Daftar Oesaha Hijrah" dengan pandangan bahwa KPK-PSII adalah PSII yang sejati yang akan meneruskan cita-cita H.O.S. Tjokroaminoto. Brosur ini berisi cita-cita mendirikan tata dunia baru yakni Darul Islam hingga tingkat dunia. Adapun metode dan jalan untuk mencapai itu dengan strategi yang dilakukan Muhammad SAW atas dasar prinsip-prinsip tauhid dalam arti luas. Strategi perjuangan yang dilakukan dengan hijrah dari "Mekah Indonesia" hingga mampu membentuk "Madinah Indonesia".

III.4.2. Masa Jepang

1. Artikel

- "I'tibar Madjazy dan Ma'any dari perdjalanan Isra dan Mi'radj Rasoeloellah cim"

Ditulis tahun 1943 yang di muat dalam Soeara MIAI I, No, 11, 2603. Berisi penjelasan hikmah dan ajaran peristiwa 'Isra dan Mi'raj' Nabi Muhammad SAW yang ditinjau dari aspek ideologis dan teosofi.

- “Menyelenggarakan ‘Benteng Islam’ “

Dimuat dalam Soeara MIAI I, No. 17, 2603. Dalam tulisan ini menjelaskan kewajiban ummat Islam untuk mempertahankan tanah tumpah darah.

- “Tarich Bait Al-Mal”

Ditulis bersama Kiai H. Ghozali Toesi tahun 1943, dimuat dalam Soeara MIAI I, No. 15, 2603. Tulisan yang berisi penjelasan peranan ekonomi ummat dalam rangka pembelaan negara.

III.4.3. Masa Republik Indonesia.

1. Haloean Politik Islam

Ditulis tahun 1946 di Malangbong, tulisan ini merupakan ringkasan pidato politik selama menjabat Komisaris Masyumi Jawa Barat, berisi tentang jawaban persoalan dan keadaan revolusi kemerdekaan, terutama ditujukan kepada kalangan Masyumi khususnya dan ummat Islam bangsa Indonesia umumnya. Dalam tulisan ini Kartosoewirjo menjelaskan tentang hakekat revolusi nasional dan revolusi Islam

III.4.4. Masa DI/TII

1. Mendjelang Dunia Baru Darul Islam atau Negara Islam Indonesia

Ditulis 11 Januari 1949 di Malangbong dengan nama samaran Huru Hara. Tulisan ini berisi analisis situasi pada saat itu, tentang politik Belanda terhadap Indonesia dan ramalanya tentang kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga dan Revolusi Dunia, dan berdirinya Negara Islam Indonesia secara de facto dan de jure setelah Perang Dunia Ketiga.

2. Menjongsong Ad Daulatul Islamijah

Ditulis pada 3 Maret 1949 , dengan nama samaran Ki Abu Darda. Dalam tulisan ini menjelaskan grafik perjuangan ummat Islam Bangsa Indonesia dari tahun 1945 sampai 1949 dan alternatif solusinya. Selain itu ia juga menjelaskan manifestasi dari Kurnia Allah SWT berupa “Kerajaan Allah di dunia” bewujudkan Negara Islam Indonesia, dengan keyakinan menunggu “sa’at” (waktu) tetapi dalam kerangka upaya dan ikhtiar manusi

3. Ramalan Djojobojo Tentang Ratu Adil atau Heru Tjokro

Ditulis pada 7 Februari 1955 dengan nama samaran Karma Yoga, ditujukan kepada barisan Mujahidin terutama bagi jajaran elit NII. Tulisan yang dilengkapi dengan terjemahan bebas Joyoboyo Surakarta dari (K.R.T.M.I.H) Purwodiningrat. Pada hakekatnya yang dimaksud dengan Heru Cokro itu adalah Pemerintah Negara Islam Indonesia.

4. Hikmah dan Adjaran daripada Perdjalanan Sutji Isra’ Mi’radj Rasulullah CAW.

Ditulis pada 1 Maret 1955 dengan nama samaran Mustafa Habibullah. Tulisan ini merupakan pendekatan sufistik terhadap peristiwa “Isra’ Mi’raj”, sebuah pelajaran etika yang bersifat batiniah dengan penuh makna terdalamnya. Selain itu membahas kosmologi menurut Islam dan tanggung jawab sosial para Mujahid dalam rangka mengemban tugasnya.

5. Pedoman Dharma Bakti Jilid 1

Buku ini merupakan kumpulan keputusan-keputusan politik selama Kartosoewirjo memimpin Darul Islam/Negara Islam Indonesia berupa maklumat-maklumat yang ditandatangani oleh Kartosoewirjo.

6. Pedoman Dharma Bakti Jilid 2

Buku ini merupakan kumpulan tulisan berupa Statment politik dan Nota Rahasia yang dikeluarkan oleh Kartosoewirjo sebagai Imam Negara Islam Indonesia.

7. Pedoman Dharma Bakti Jilid 3.

Buku ini berisi tulisan-tulisan Kartosoewirjo dalam rangka membina bawahannya dan kaum mujahidin.

8. Pedoman Dharma Bakti Jilid 4⁷¹

Buku ini berisi tulisan mengenai pembinaan untuk para bawahannya. Penulis tidak mendapatkannya.

⁷¹ Wawancara dengan Dodo Mohammad Darda pada tanggal 16 April 2002 di Malangbong.

BAB IV

AWAL MULA PERGERAKAN ISLAM

IV.1. Gerakan Politik Islam.

Pergerakan Darul Islam merupakan kulminasi dari pemikiran politik Islam¹ yang berkembang ditubuh PSII sejak zaman kolonial Belanda. Gerakan Darul Islam muncul bermula dari Majelis Islam (MI) 1948 kemudian mentransformasi dirinya menjadi Negara Islam Indonesia (NII) yang di proklamasikan oleh Soekarnadji Maridjan Kartosoewirjo pada tanggal 7 Agustus 1949 di Cisampang desa Cidugaleun kecamatan Cigalontang, Tasikmalaya.

Di tengah-tengah situasi revolusi kemerdekaan masyarakat Jawa Barat terutama kalangan ulama dan santri serta para politisi Islam Jawa Barat memberi respon terhadap situasi politik yang berkembang baik secara Nasional maupun pada tingkat daerah. Titik tolak kemunculan gerakan Darul Islam ini, berawal dari Konferensi Cisayong dari tanggal 10 sampai 11 Februari 1948. Konferensi tersebut sesungguhnya adalah Konferensi Ummat Islam Jawa bagian sebelah Barat yang dimotori oleh Masyumi Wilayah Jawa Bagian Barat di bawah kepemimpinan S.M. Kartosoewiryo, untuk menjawab persoalan situasi revolusioner.

Asal usul pertumbuhan gerakan politik di Indonesia dapat dikatakan identik dengan asal usul pertumbuhan Sarekat Islam. Nama ini berubah menjadi Partai

Sarekat Islam dalam tahun 1921 dan Partai Sarekat Islam Indonesia pada tahun 1929. Sarekat Islam adalah sebuah partai yang memusatkan perhatiannya secara eksklusif bagi orang-orang Indonesia, maka ia mendapatkan pengikut-pengikutnya dari semua kelas baik di kota maupun di desa, para pedagang muslim, para pekerja kota-kota, para Kiai dan ulama, bahkan beberapa priyayi. Dan diatas segala-galanya petani ditarik ke dalam gerakan massa politik yang pertama dan yang terakhir di Indonesia di zaman kolonial Belanda.²

Sebelumnya sudah ada organisasi lain seperti Budi Utomo, akan tetapi Budi Utomo yang terutama menarik mereka yang berpedidikan Barat; orang-orang Indonesia profesional adalah a-politik yang sifatnya bukan politik. Dan hanya pada tahun-tahun terakhir, beberapa orang diantara para pendirinya memegang peranan utama dalam aktivitas-aktivitas politik, lagi pula intinya terbatas pada seni dan kebatinan.³ Karena Budi Utomo mengarah kepada priyayi sentris maka, Dr. Sutomo sebagai pendirinya akhirnya menyatakan keluar. Kemudian setelah itu Dr. Sutomo mendirikan "Studie Club" yang kemudian menjadi Parindra (Partai Indonesia Raya).⁴

Organisasi-organisasi Islam lainnya terutama di daerah Jawa, Muhammadiyah berdiri 18 November 1912, di Yogyakarta oleh K.H. A Dahlan.

¹Pemikiran politik Islam adalah cita-cita politik yang berkembang di kalangan PSII yang bertujuan untuk mendirikan Negara Islam dengan dasar Al Quran dan As Sunnah, H.O.S. Tjokroaminoto, *Tafsir Program Asas dan Program Tandhim Syarikat Islam*. 1985, hal. 18.

²Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*. 1980, hal. 64.

³Amelz, H.O.S. Tjokroaminoto *Hidup dan Perjuangannya*, Jilid 2, 1952, hal. 161. A.K. Pringgodigdo. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. 1991, hal. 16. Pemimpin Budi Utomo diantaranya: Dr. Wahidin, Dr. Sutomo, Dr. Rajiman. W., Wuryaningrat, Dwidjosewojo, R.M.A. Suryo Suprpto. (Mangkunegoro VII).

Persatuan Islam didirikan oleh H. Zaman dan H.M. Junus, yang kemudian diikuti oleh A. Hasan dan M. Natsir. Nahdatul Ulama didirikan di Surabaya dalam awal tahun 1926, tokoh-tokoh pendirinya antara lain: K.Hasyim. Asy'ari dari Tebu Ireng, K.H. Abdul Wahab Chasbullah. Pada umumnya organisasi tersebut dan serentetan organisasi lainnya, secara organisatoris tidaklah mempunyai program untuk kemerdekaan, kecuali beberapa tokohnya secara individu banyak yang aktif dalam Sarekat Islam. Organisasi ini lebih-lebih ditujukan untuk saling berbantahan dalam masalah furu dan adat. Dimana segolongan yang disebut pembaharu yaitu golongan yang ingin menghapuskan adat istiadat dan tata cara peribadatan khusus yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Termasuk dalam golongan ini adalah Persatuan Islam, Muhammadiyah, Al Irsyad, dan lain sebagainya. Di pihak lain adalah golongan yang mempertahankannya, termasuk dalam golongan ini : Nahdatul Ulama, Jami'at Khaer dan lain-lainnya. Hampir di setiap forum perdebatan-perdebatan antara kedua golongan ini selalu berakhir dengan tidak ada kesepakatan, karena masing-masing merasa mempunyai dalil qot'i, juga tidak adanya hakim dengan kekuasaannya sanggup memutuskan perkara diantara golongan tersebut. Tidak jarang pula pertentangan ini diakhiri dengan kekerasan lainnya.⁵

Awal mulanya berdirinya Sarekat Dagang Islam tanggal 16 Oktober 1905, dengan tokoh utamanya H. Samanhoedi.⁶ Ada dua macam sebab mengapa SDI

⁴Akira Nagazumi, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918*, 1989.

⁵Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, 1996, hal. 260.

⁶Anton Timur Jaylani. *The Sarekat Islam Movement its Contribution to Indonesia Nationalism*, 1950, Deliar Noer, 1996, hal. 115. Menurut Deliar Noer, Sarekat Islam didirikan di Solo.

didirikan, sebab pertama ialah karena kompetisi (persaingan) yang meningkat dalam perdagangan batik terutama dengan golongan Cina terhadap Melayu (Indonesia) sehubungan dengan berhasilnya revolusi Cina 1911. Sebab kedua adalah akibat tekanan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia terutama Solo ketika itu dari kalangan bangsawan. Sarekat Dagang Islam (SDI) dimaksudkan menjadi benteng bagi orang-orang Indonesia yang pada umumnya terdiri dari pedagang-pedagang batik di Solo terhadap orang-orang Cina dan para bangsawan tadi. Tetapi organisasi ini tidak berumur lama karena Belanda mencium berbau politik, yang kemudian pada tanggal 12 Agustus 1912 dibekukan oleh residen Surakarta. SDI dilarang menerima anggota baru dan mengadakan rapat. Tetapi kemudian pada tanggal 16 Agustus dicabut kembali⁷

Pada tanggal 11 November 1911 setelah Sarekat Dagang Islam (SDI) dibekukan Belanda, maka tokoh-tokohnya mengadakan Kongres di Solo dan dibentuklah Sarekat Islam (SI). Anggaran dasarnya yang pertama bertanggal 11 Desember 1912 dirumuskan oleh Raden Mas Tirta Adisuryo. Ia adalah lulusan

pada tanggal 11 November 1912. Raden Mas Tirtoadisoerjo seorang pemimpin redaksi harian Medan Prijaji yang berbahasa Melayu, sebuah harian yang agak kritis sikapnya terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1910 ia mendirikan Sarekat Dagang Islam di Bogor. A.P.E. Korver, *Sarekat Islam, Gerakan Ratu Adil?*, 195, hal. 12-13.

⁷Deliar Noer, 1996, hal.115 – 116, A.K. Pringgodigdo, 1991, hal. 5, Menurut Pringgodigdo sebab-sebab didirikan Sarekat Dagang Islam itu selain kecongkakan pedagang Cina setelah revolusi Cina Juga - Kemajuan gerak langkah agama Kristen dan ucapan-ucapan yang menghina dalam parlemen Hindia Belanda, dengan tipisnya kepercayaan agama Bangsa Indonesia. - Cara-cara adat lama yang terus dipakai di daerah Kerajaan Jawa, makin lama, makin dirasakan sebagai penghinaan, A.P.E. Korver. *Sarekat Islam, Gerakan Ratu Adil?*, 1985. Menurut Korver, gerakan SI merupakan gerakan emansipasi, yang memiliki ciri-ciri ; pertama, cita-cita suatu pengelompokan orang tertentu menuju identitas diri dan perkembangan batin; kedua, berusaha agar diakui sebagai bagian masyarakat yang sepenuhnya dan memiliki peluang dan hak yang sama seperti golongan-golongan yang lebih

OSVIA. Tetapi residen Surakarta (Solo) segera membekukan Sarekat Islam, setelah organisasi itu dengan cepat berkembang ke daerah-daerah lain di Jawa. Kemudian pembekuan itu dicabut pada tanggal 26 Agustus 1912, dengan syarat anggaran dasarnya dirubah.

Sementara itu Sarekat Islam (SI) mendapat tokoh baru yaitu Oemar Said Tjokroaminoto yang diharapkan dapat mengemudikan organisasi tersebut melalui tahun-tahun awal yang sukar itu. Oemar Said Tjokroaminoto bergabung dengan Sarekat Islam di Surabaya dalam bulan Mei 1912, atas ajakan H. Samanhoedi yang memang mencari orang-orang yang pernah mendapat pendidikan dan berpengalaman untuk mempekuat organisasinya. Tjokroaminoto pada waktu itu telah dikenal sebagai seorang yang mempunyai sikap radikal terhadap Belanda dan pemerintah pada umumnya.⁸

Tanpa memperhatikan syarat-syarat yang diajukan residen Surakarta tadi, O. S. Tjokroaminoto menyusun sebuah Anggaran Dasar baru untuk organisasi itu, untuk seluruh Indonesia. Sejak itu Kota Surabaya dengan lapisan pedagang, pengusaha dan alim ulamanya menjadi satu basis yang kuat bagi Sarekat Islam. Kongres-Kongres yang diadakan di Kota Surabaya antara tahun 1913 s/d 1921 menarik ribuan rakyat, nama Tjokroaminoto sebagai pimpinan utamanya menanjak terus, sehingga orang Belanda menyebutnya "de aanstaande Koning der Javanen" -

diistimewakan dalam masyarakat itu. Ketiga, mengusahakan pemutusan hubungan dengan golongan yang berkuasa dalam masyarakat.

⁸*Fadjar Asia*, 28 Januari 1929.

Rajanya orang Jawa yang akan datang"⁹ Sarekat Islam merupakan penjelmaan dari kesadaran rakyat yang umumnya setia; Karena itu meskipun orang mau dan mampu membubarkan pergerakan itu, akan tetapi gerakan ini merupakan gerakan yang tumbuh dari kesadaran rakyat untuk dapat hidup setara dengan Pemerintah Hindia Belanda yang telah menjajah cukup lama, perasaan yang telah tumbuh dalam jiwa rakyat sehingga telah mewujudkan dalam bentuk pergerakan Sarekat Islam, yang merupakan kesadaran emansipatoris. Simbol pergerakan ini termanifestasi dalam wujud H.O.S Tjokroaminto sebagai simbol kesadaran emansipatoris, yang "garang dan galak".

Karena Belanda melihat Sarekat Islam sebagai organisasi yang berbahaya, maka pada tahun 1913, Belanda mengutus Marie Sneevliet seorang Marxis bersama Adolf Baars mendirikan I.S.D.V (Indische Sociaal Democratische Vereniging). Tugas I.S.D.V adalah membubarkan konsentrasi dan memecah belah partai Politik di Indonesia; Mereka telah cukup, bila kepercayaan rakyat terhadap Sarekat Islam goncang; seperti yang dikatakan oleh salah seorang dari I.S.D.V, Adolf Baars: "Kami tahu.... Perdebatan ini menyebabkan kebingungan di kalangan orang-orang Indonesia di Surabaya dengan ini pun tujuan kita telah berhasil."¹⁰

Dengan demikian terjadilah saling mempengaruhi dan merebut hati rakyat. Melalui Semaun Cs, Sneevliet berhasil memasukkan ajaran Karl Marx (Marxisme) ke dalam tubuh Sarekat Islam; yang kemudian tumbuh subur di Sarekat Islam

⁹H.O.S. Tjokroaminoto, *Islam dan Sosialisme*, 1966, hal. vi

¹⁰Deliar Noer, 1996. hal. 119.

cabang Semarang.¹¹ Tahun 1915 H. Agus Salim bergabung ke dalam Sarekat Islam.¹²

Pada tanggal 23 Februari 1918 atas desakan orang-orang Sarekat Islam - juga meningkatnya suhu politik internasional, dengan tercetusnya revolusi di Rusia - maka pemerintah Belanda membentuk Volksraad (Dewan rakyat) mengangkat H.O.S. Tjokroaminoto sebagai salah satu anggotanya.¹³ Sebelum itupun masalah ini - pengangkatan H.O.S. Tjokroaminoto menjadi anggota Dewan Rakyat - sudah diperdebatkan pada Kongres tahun 1917 antara yang pro dan kontra. Akhirnya Sarekat Islam menyetujui pengangkatan Tjokroaminoto ini. Diantaranya yang pro itu adalah H. Agus Salim tetapi dia pula yang pada periode berikutnya berbalik haluan dan mencap Volksraad sebagai komidi omong kosong.¹⁴

Pada tanggal 23 Mei 1920 didirikan Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah itu perpecahan didalam tubuh Sarekat Islam, mulai nampak jelas, segolongan berhaluan Komunis (SI Merah) dan segolongan lagi berhaluan Islam (SI Putih). PKI ini boleh dianggap sebagai kader, sedang yang menjadi partai rakyat jelata ialah Partai Sarekat Islam Merah.¹⁵ Tahun berikutnya Kongres Sarekat Islam yang diadakan di Surabaya memutuskan orang-orang Komunis dikeluarkan dari Partai Sarekat Islam, dengan perbandingan 23 lawan 7. Keputusan ini disebut disiplin

¹¹Dewi Yuliati, *Semaoen Pers Bumiputera dan radikalasi Sarekat Islam Semarang*, 2000.

¹²Suradi, *Haji Agus Salim dan Konflik Politik Dalam Sarekat Islam*, 1997. Panitia Buku Peringatan, Seratus Tahun Haji Agus Salim, 1996.

¹³A.K. Pringgodigdo, 1991, hal. 15.

¹⁴Deliar Noer, 1996, hal. 131.

partai. Pada saat itu O.S. Tjokroaminoto berada dalam tahanan, maka Kongres di pimpin oleh H. Agus Salim dan Abdul Muis.¹⁶ Pemecatan ini bisa dipahami yaitu satu upaya untuk memurnikan Islam, namun dampak negatifnya terasa sekali. Percekcokan antara Partai Sarekat Islam dengan Partai Sarekat Islam Semarang makin meruncing hampir disetiap rapat umum. Tahun 1923. Program Partai Sarekat Islam (PSI) diperluas bukan hanya untuk dalam negeri saja tapi juga untuk luar negeri. Program itu disebut PAN ISLAMISME.¹⁷

Masih dalam tahun 1927. Timbul perpecahan lagi dalam tubuh Partai Sarekat Islam dalam hal Kemerdekaan, golongan ingin dasar nasionalisme, sedang yang lain menginginkan atas dasar Islam.¹⁸ Golongan pertama pada tanggal 4 Juli 1927 mendirikan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) diprakarsai oleh Soekarno dan Sartono, diikuti kemudian oleh Ishaq Sanusi, Mr. Muhammad Yamin dan Amir Sjarifuddin.

¹⁵Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-tonggak Perjalananku*, 1974. Tentang perpecahan di tubuh Sarekat Islam, antara SI Merah dan SI putih, Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara*, Jilid 2, hal. 64.

¹⁶Nor Hiquah, H.M. Misbach, *Sosok dan Kontroversi Pemikirannya*, (Yogyakarta: Yayasan Litra Indonesia, 2000); seorang pendakwah dari PKI ialah K.H. Misbach dari Solo, yang menyatakanseorang tidak menyetujui asas Komunis, mustahil ia seorang muslim sejati. Tokoh ini dibuang ke Manokwari pada bulan Juli 1924 dan meninggal disana pada bulan Mei 1926.

¹⁷H.O.S. Tjokroaminoto, *Islam dan Sosialisme*, 1966, hal. 104. M.A. Gani, *Cita-cita & Pola Perjuangan Syarikat Islam*, 1984. Kesadaran untuk membentuk pemerintahan Islam tingkat dunia yang biasa dikenal dengan Kekhalifahan, mengingat pada saat itu hampir setiap jengkal Dunia Islam, dikuasai oleh kolonialisme Barat. Program ini mula-mula diperkenalkan oleh Jamaluddin Al Afghani.

¹⁸Tentang Negara yang berasaskan Islam. Perpecahan dengan kaum Nasionalis, meluas sampai ke Studie Club pimpinan Dr. Sutomo; yang menyatakan bahwa dalam hal tertentu ada baiknya bekerja sama dengan pemerintah jajahan, jika pemerintah memang bermaksud baik untuk memajukan rakyat Indonesia; haruslah diberikan kepada orang-orang Indonesia pangkat-pangkat yang memberikan pimpinan. Ungkapan Sutomo ditanggapi oleh tokoh-tokoh Sarekat Islam, bahwa kaum Nasionalis dari Studie Club hanya bermaksud mendapat pangkat dan bergaji besar pada Gubernamen; dan bahwa kaum Nasionalis itu bersikap kooperasi atau non kooperasi tak berdasarkan keyakinan yang kokoh. Oleh karena itu Sarekat Islam harus memberlakukan disiplin Partai terhadap Studie Club. Tidak boleh seorang anggota Sarekat Islam merangkap menjadi anggota Studie Club, Pringgogidgo (1991), hal. 46.

Tokoh yang terakhir ini kemudian terkenal sebagai Perdana Menteri RI berhaluan komunis, dalam tahun 1947 sampai dengan 1949, setelah menjatuhkan Perdana Menteri Sjahrir - Kabinet Sjahrir - bersama-sama Wilopo, A.K. Gani dan Trimurti yang diangkat sebagai menteri Perburuhan.¹⁹ Termasuk juga sebagai tokoh PNI adalah Moh. Hatta dan Sjahrir setelah pulang dari pendidikan di Negeri Belanda.²⁰ Sebenarnya yang banyak mendukung PNI adalah orang-orang PKI dan orang-orang Sarekat Rakyat, setelah ditinggalkan oleh pemimpinnya akibat pemberontakan tahun 1926.²¹

Pada tahun 1929 Partai Sarekat Islam telah menambah kata 'Indonesia' yang memperjelas kedudukan geografisnya. Sejak tahun 1923 telah menjalankan strategi politik "Hijrah", yakni suatu prakarsa politik yang sebenarnya pada waktu itu bertujuan untuk berdiri di atas kaki sendiri, tanpa harus bekerja sama dengan pemerintah Belanda dalam memperjuangkan cita-cita partai. Sikap demikian ini diambil oleh partai setelah partai tidak percaya lagi kepada pemerintah Belanda yang tidak merehabilitasi nama baik H.O.S Tjokroaminoto atas tuduhan terlibat di dalam "Afdeeling B" --suatu organisasi bawah tanah yang bermaksud berontak terhadap pemerintahan Hindia Belanda dan dalam hal mana H.O.S Tjokroaminoto dianggap

¹⁹John Ingleson, *Jalan Ke Pengasingan, Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*, 1988, hal, 35.

²⁰John Ingleson, 1988, hal. 10, Azas PNI adalah - Zelf Helf (Prinsip menolong diri sendiri) Non Kooperasi- Marhaenisme.

²¹Ibid. hal, 26.

sebagai pemimpinnya.²² Dalam kenyataannya, sikap ini tidak lain hanyalah merupakan tindak lanjut dari sikap non-kooperasi partai yang memang telah dijalankan partai sejak semula itu, serta sikap mencontoh Mahatma Gandhi di India dalam berhadapan dengan penguasa penjajah Inggris, yang dalam hal ini Gandhi menjalankan sikap “swadeshi” atau berdikari itu. Taktik politik seperti ini, bagaimanapun juga wujudnya, justru semakin memancing pemerintah Belanda untuk bersikap keras terhadap semua kekuatan politik yang bersifat non-koperatif.²³

Masih pada tahun 1931, di dalam tubuh Sarekat Islam terjadi perpecahan lagi, antara yang ingin kerja sama (kooperasi) dan yang menginginkan tidak kerja sama (non kooperasi) dengan Belanda dalam memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia. Termasuk tokoh yang pertama adalah H. Agus Salim, sedangkan tokoh yang termasuk golongan kedua H.O.S. Tjokroaminoto. Tahun 1933. Kongres di Surabaya antara PSII Kooperatif dan PSII Non Kooperatif, melahirkan satu sikap bersama bahwa Islam tidak kooperatif dan tidak pula non kooperatif, tetapi harus mempunyai sikap Hijrah.²⁴

Pada tanggal 17 Agustus 1934 H.O.S. Tjokroaminoto meninggal dunia. Setelah Sarekat Islam ditinggalkan oleh tokoh utamanya, maka Belanda mencoba mendekati kembali dengan menawarkan kedudukan sebagai Volksraad; Oleh karena itu H. Agus Salim meminta kepada Lajnah Tanfidziah (LT) pada saat itu Sekjennya

²²Untuk suatu rekonstruksi singkat mengenai tuduhan Belanda terhadap Oemar Said dalam kaitannya dengan “Afdeeling B” ini. H.A. Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, 1984, hal. 75-78.

²³Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1940-1942*, 1996, hal, 161.

adalah S.M. Kartosoewirjo, untuk meneliti kembali perlu atau tidaknya Pola Hijrah, tetapi Lajnah Tanfidziah menolak usul H. Agus Salim tersebut.

Demikianlah, pada tahun 1935 H. Agus Salim, pencetus sikap “Hijrah” partai tahun 1923 dahulu, mengusulkan agar “Hijrah” direvisi, berkenaan dengan sikap pemerintah Belanda yang semakin keras terhadap partai-partai politik yang bersifat non-koperatif. Melihat gelagat ini, Kartosoewirjo tampil sebagai ujung tombak kelompok pendukung strategi politik “Hijrah” ini. Akibatnya, terdapat dua faksi di dalam partai faksi pendukung dan faksi yang berkeinginan agar “Hijrah” direvisi. Alasan para pendukung revisi sikap ini adalah: “Hijrah” akan menghambat partai dalam meraih cita-cita partai. Pertentangan ini terus berkelanjutan, dan mencapai puncaknya dalam Kongres Nasional partai ke 22, Agustus 1936, di mana kongres merasa perlu untuk meneruskan strategi “Hijrah” ini guna “mempelajari dan mencontoh Sunnah Rasulullah SAW yang terpenting dalam melakukan *maatschappij opbouw* (pembinaan masyarakat).” Dan menugaskan kepada S.M. Kartosoewirjo untuk membuat brosur ‘hijrah’²⁵

Ini berarti, kelompok pendukung “Hijrah” memperoleh sukses besar, dan Agus Salim, penganjur utama peninjauan kembali Hijrah tersingkir dari “inner circle” partai, dan bersama para pengikutnya membentuk sebuah fraksi yang disebut Barisan Penyadar Partai Syarikat Islam Indonesia (BP PSII) tanggal 26 November

²⁴A.K. Pringgodigdo, 1991, hal. 143.

²⁵Wawancara dengan Dodo Mohamunad Darda pada tanggal 16 April 2002 di Malangbong; Deliar Noer, 1996. hal. 162.

1936 dengan maksud “agar pemikiran pemikirannya akhirnya akan diterima oleh partai.”²⁶ Padahal Haji Agus Salim yang sebelumnya melakukan pemecatan-pemecatan terhadap orang-orang Muhammadiyah, Orang-orang Persatuan Islam (Persis) dan Orang Partai Islam Indonesia (PAKII)²⁷ termasuk Soekiman dan Wali Al Fatah, ketika dalam tahun 1930 secara bersama-sama mengusulkan kepada Partai Sarekat Islam Indonesia agar meninggalkan Pola Hijrah. Pola Hijrah ini sebetulnya sudah menjadi topik pembicaraan anggota Kongres sejak tahun 1923, yang kemudian dikukuhkan, menjadi Pola Dasar Organisasi pada tahun 1933.²⁸ Maka berjalanlah PSII dengan Pola Hijrah di bawah pimpinan Abikoesno, S.M. Kartosoewirjo, Wondoamiseno dan Aroedji Kartawinata.

Tetapi, Kartosoewirjo dan para elit partai lain pendukung “Hijrah” yang memperoleh kemenangan besar dalam kongres 1936 itu, tidak tinggal diam menghadapi aksi H. Agus Salim dan kawan-kawan ini, melainkan menginstruksikan “melarang cabang partai di mana saja untuk memberi bantuan kepada BP PSII dalam mengadakan pertemuan-pertemuannya,”²⁹ setelah sebelumnya, pada tanggal 19 Desember 1936, sebuah rapat Dewan Partai dan Dewan Eksekutif Partai menetapkan untuk mengakhiri semua perdebatan mengenai “Hijrah” dan “menegaskan kembali ‘Hijrah’ sebagai politik resmi partai dan memerintahkan semua pimpinan partai

²⁶Deliar Noer, 1996, hal. 163, Pinardi, *Sekarmadji Marijan Kartosuwirjo*, 1964, hal. 25.

²⁷PAKII ini didirikan oleh Dr. Soekiman Cs. Pada akhir tahun 1932, setelah tokoh tersebut dipecah dari PSII karena menolak Pola Hijrah.

²⁸Deliar Noer, 1996, hal. 176, A.K. Pringgodigdo, 1991, hal. 120

²⁹Deliar Noer, 1996, hal. 163.

untuk menyebarluaskan sikap politik ini.”³⁰ Pada bulan Februari 1937 Agus Salim dan pengikut-pengikutnya yang berjumlah 27 orang, di antaranya terdapat Mohammad Roem, kelak menjadi diplomat terkemuka Indonesia di masa pasca proklamasi 1945, dipecat dari keanggotaan partai. Kini tinggalah para pendukung ‘hijrah’ saja, yang menjadi anggota inti partai, dengan Kartosoewirjo dan Abikoesno Tjokrosoejoso, adik HOS Tjokroaminoto, yang telah wafat pada tahun 1934, sebagai tokoh pusatnya. Pada tahun 1936 itu juga dua buah brosur karangan Kartosoewirjo yang berjudul “Sikap Hijrah PSII” dibuat dan dipublikasikan secara resmi oleh partai pada bulan September 1936. Dengan demikian, dua sejoli Kartosoewirjo-Abikoesno Tjokrosoejoso bekerja bahu-membahu memasyarakatkan politik “Hijrah” partai.

Susunan P.S.I.I pada tahun 1936 adalah sebagai berikut: Dewan P.S.I.I terdiri dari: W. Wondoamiseno (Surabaya), President; S.M.Kartosoewirjo (Malangbong), Vice-presiden; Anggota terdiri dari : Anwaroeddin (Rembang), K.H. Moestafa Kamil (Garut); Joesoef Taudjiri (Wanaraja Garut). Ladjnah Tanfidzyah P.S.I.I terdiri dari: R. Abikoesno Tjokrosoejoso (Jakarta); Sj. Latif (Bandung), Vice-president merangkap Ketua Mepsi; Aroedji Kartawinata (Jakarta) , Algemeen-secretaris merangkap ketua Departemen Statistik dan Propaganda; Harsono Tjokroaminoto (Jakarta), secretaris II; Njonja S. Soemadhi (Jakarta) , Ketua Pergerakan Isteri; Thoa

³⁰Ibid, hal. 163.

Mahsoen (Surabaya) Ketua departemen P.P.R dan Masjwi.; Kamran (Cilacap), Ketua Departemen Pemoeda dan Siap. Dengan cabang 125 buah.³¹

Pada tanggal 19-23 Juli 1937 Sarekat Islam mengadakan Kongres yang ke-23 di Bandung. Kongres itu membuat keputusan yang juga akan mencabut pemecatan atas diri anggota-anggota yang dalam tahun 1933 sudah dikeluarkan dari PSII - dan sudah mendirikan PARII- dan akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk masuk PSII kembali. Sebab pemecatan atas H. Agus Salim dari partai itu dan wafatnya H.O.S. Tjokroaminoto, dianggap sudah melenyapkan rintangan yang ada antara PSII dengan Dr. Soekiman cs. Pada tanggal 17 September 1937, sungguh bersatulah kembali PSII dengan kelompok Dr. Soekiman, sedang PARII dengan sendirinya meleburkan diri kedalam partai asalnya itu. Jadi yang masih tinggal terpisah hanyalah kelompok H. Agus Salim dengan BP-PSII-nya (Badan Penyadar PSII).

Perdamaian dengan kelompok Yogyakarta - Dr. Soekiman dan Wali Al Fatah cs., umurnya tidak begitu lama setelah dalam Kongres ke - 24, diantara mereka - Dr. Soekiman dan Wali Al Fatah - tidak ada yang diangkat menjadi pucuk pimpinan dalam partai tersebut. Akhirnya mereka menyatakan keluar dan kemudian mendirikan PII (Partai Islam Indonesia). Sebelum PII itu didirikan, Pengurus Besar PSII sudah menerima surat dari Dr. Soekiman, Wali Al Fatah, K.H. Mas Mansur dll. Yang menerangkan, bahwa mereka itu akan masuk PSII kalau partai ini : a) mau

³¹*Soeara P.S.I.I.*, Tahoen I, 25 April 1937.

melepaskan asas Hijrah b) semata-mata hanya mengerjakan aksi politik c) mau selekas-lekasnya mencabut disiplin partai, yang sudah dilakukan terhadap Muhammadiyah. PSII membalas surat ini dengan menolak permintaan itu hanya disiplin partai terhadap Muhammadiyah yang mungkin akan dibicarakan lagi.³²

Tanggal 30 Juli - 7 Agustus 1938. PSII mengadakan kongresnya yang ke -24, di Surabaya. Dalam kongres tersebut oleh S.M. Kartosoewirjo dijelaskan, bahwa Hijrah yang menjadi sikap partai itu, haruslah jangan diartikan sama dengan non kooperasi yang diadakan oleh partai-partai lain terhadap pemerintah Belanda. Ia menunjukkan bahwa sikap non-kooperasi itu adalah suatu sikap yang negatif, sedang sikap hijrah itu adalah suatu sikap yang positif dan bersifat membangun. Sebab katanya, hijrah itu sesungguhnya sikap penolakan, akan tetapi disamping itu dijalankan usaha dengan sekuat-kuatnya, untuk membentuk kekuatan hebat, yang menuju kepada "Darul Islam".³³ Pada kongres itu diserahkan jabatan ketua Dewan Partai, kepada Wondoamiseno dan jabatan ketua Lajnah Tanfidziah kepada Abiskoesno Tjokrosoejoso, sedang S.M. Kartosoewirjo, disertai pekerjaan penyelenggaraan asas hijrah dalam lapangan politik dan ekonomi. Pada bulan Desember 1938 konferensi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) memutuskan: Menugaskan kepada S.M. Kartosoewirjo untuk mengelapai suatu lembaga, yang direncanakan melatih kader-kader partai yang militan realisasinya terwujud dalam tahun 1940 dengan membentuk "Institut Suffah" di Malangbong.

³²A.K. Pringgogidgo, 1991. hal. 118-120

Akan tetapi, tak sampai tiga tahun semenjak ditetapkannya “Hijrah” tahun 1936, badai kembali menerjang partai. Pada awal tahun 1939, tak diduga oleh Kartosoewirjo, Abikoeno Tjokrosoejoso, Wondoamiseno dan Aroedji Kartawinata membelokkan arah perjalanan partai dari “Hijrah” menjadi partai koperatif dengan bergabung ke dalam GAPI (Gabungan Politik Indonesia), suatu federasi politik yang kebangsaan/nasionalisme, yang menuntut kepada pemerintah kolonial Belanda agar “Indonesia ber-Parlemen.”³⁴ Tentu saja kebijaksanaan ini di tentang habis-habisan oleh Kartosoewirjo, karena hal ini dianggapnya sebagai penyimpangan dari apa yang hampir dua tahun lalu disepakati bersama sebagai garis resmi perjuangan partai.

Pada kongres partai yang ke 25 dalam bulan Januari 1940 di Palembang, pemecatan Kartosoewirjo, Joesoef Taudjiri, Akis, Kamran, dan Soekoso dengan perimbangan 134 suara setuju, 9 suara netral, disyahkan oleh kongres³⁵. Sesungguhnya Kartosoewirjo sudah dipecat oleh Ladznah Tanfidziah pada tanggal 30 Januari 1939. Pada kongres yang sama juga diputuskan, bahwa pelaksanaan

³³Khusus mengenai Pola berpikir dan Perjuangan Kartosoewirjo; C.A.O. Van Nieuwenhuijze, *The Dar ul-Islam Movement in Western Java Till 1949*.

³⁴A.K. Pringgodigdo, 1991, hal. 151, Anggota-anggota GAPI lainnya adalah Parindra (Gabungan B.U dengan Persatuan Bangsa Indonesia. 1933). Partai Islam Indonesia (didirikan oleh Soekiman 1938, setelah dipecat dari PSII 1930). Gerindo (didirikan 24 Mei 1937, lanjutan dari Partindo). Pasundan, Persatuan Minahasa, dan Partai Politik Katholik Indonesia. Deliar Noer, 1996, hal. 289.

³⁵Daftar Kpoetoesan-kepoetoesan Majelis Tahkim (Congress) PSII XXV di Sriwidjaja (Palembang) pada tanggal 20-25 Januari 1940, *Soeara PSII IV*, No, 1-2-1940, hal. 7-9.

program hijrah tidak lagi diteruskan dan komisi yang sebelumnya ditugaskan untuk menyusun program ini, dibubarkan³⁶.

Akan tetapi, resolusi pemecatan itu tidak membuat Kartosoewirjo berhenti menjalankan apa yang selama ini dianggapnya sebagai prinsip itu; bersama-sama dengan rekan-rekannya seprinsip, ia bahkan membentuk Komite Pertahanan Kebenaran (KPK) PSII dengan mengabaikan resolusi pemecatan tersebut, dan direncanakan bergerak hanya di lingkungan PSII saja. Tetapi, ketika dirasakan tidak mungkin untuk memulai misi dari dalam tubuh PSII sendiri, akhirnya ruang gerak KPK PSII terpisah sama sekali dan PSII Abikoesno dan Benar-benar berdiri sendiri sebagai partai politik.

Hal ini diputuskan pada sebuah rapat umum KPK PSII tanggal 24 Maret 1940 di Malangbong Jawa Barat, hadir tokoh-tokoh KPK-PSII dari cabang PSII Jawa Barat yang hadir, yaitu dari Cirebon, Cibadak, Sukabumi, Pasanggrahan, Wanaraja, dan Malangbong³⁷. Melakukan rapat terbuka, merumuskan konsepsi-konsepsi yang menjadi dasar pergerakan Darul Islam.³⁸ Rapat mana juga mengklaim bahwa KPK-lah yang merupakan PSII sejati yang konsisten dengan garis perjuangan partai, dan bukannya BP-PSII Agus Salim atau PSII Parlementer Abikoesno Tjokrosoejoso,

³⁶Daftar Kepoatoesan-kepoatoesan Majelis Tahkim (Congress) PSII XXV di Sriwidjaja (Palembang) pada tanggal 20-25 Januari 1940, *Soeara PSII IV*, No. 1-2-1940, hal. 9.

³⁷Hiroko Horikoshi, 1975, hal. 63, A.K. Pringgodigdo, 1991, hal. 122. Pinardi, 1964, hal. 26.

³⁸Sedjarah Militer Kodam VI Siliwangi, *Siliwangi dari Masa ke Masa*, 1968, hal. 504.

yang mereka nilai telah mengkhianati perjuangan partai dengan bersikap kooperatif.³⁹ Kartosoewirjo mengubah KPK-PSII menjadi sebuah partai yang berdiri sendiri, namun masih dengan anggaran dasar dan peraturan PSII, sebab dia yakin bahwa partainya ini adalah satu-satunya PSII yang benar⁴⁰. Menurut Kartosoewirjo selama KPK-PSII berdiri, "kantor pusatnya selalu ada di Malangbong, dan cabang-cabangnya terdapat di seluruh Indonesia, seperti juga sama halnya dengan cabang-cabang PSII".⁴¹

Sesuai dengan keputusan di atas, rapat umum itu juga menyetujui usul Kartosoewirjo untuk membentuk suatu lembaga "tempat" pendidikan, pengajaran dan pelatihan bagi pemimpin-pemimpin partai untuk menjalankan hukum dan perintah-perintah Islam⁴². Mengenai lokasi Institut Suffah ini disetujui oleh hampir seluruh anggota diputuskan di Balakasak dekat Babakan Cipari Garut, tetapi menurut peraturan tata kota waktu itu tidak boleh didirikan sebuah bangunan

³⁹A.K. Pringgodigdo, 1991, hal. 134, mencatat, cabang cabang KPK berjumlah 21, dan yang semula hanya berjumlah 2 buah. Tapi ia tidak merinci, daerah mana saja yang menjadi cabang-cabang KPK PSII Kartosoewirjo.

⁴⁰A.K. Pringgodigdo, 1991, hal. 152.

⁴¹Pinardi rupanya salah mengerti pernyataan Kartosoewirjo tersebut. Sebab dia menambahkan, bahwa hampir di semua tempat di mana terdapat cabang PSII, simpatisan Kartosoewirjo juga mendirikan sebuah cabang KPK-PSII. Pinardi, 1964, hal. 26.

⁴²"Institut Suffah" ini sebenarnya merupakan gagasan yang dicetuskan oleh konferensi Desember 1938, ketika Kartosoewirjo belum dipecat dari partai; tapi kemudian Kartosoewirjo melaksanakan sendiri hasil keputusan konferensi Partai ini setelah ia dipecat dan keanggotaan partai. Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan dalam bentuk pesantren yang direncanakan H.O.S. Tjokroaminoto dengan lulusannya hafizh Al-Quran, muridnya hingga berumur 16 tahun, sejenis pesantren terpadu antara ilmu-ilmu Islam dan ilmu-ilmu Barat. Dalam prakteknya menggunakan bahasa pengantar bahasa Belanda. Lembaga yang mirip pesantren ini juga bersifat swasembada, di mana para siswanya, yang berasal bukan saja dari Priangan Timur, tapi juga dari luar Jawa seperti Toli-toli (Sulawesi Utara), mengerjakan sawah. Kursus di lembaga ini berlangsung selama 4-6 bulan, di mana Kartosoewirjo sendiri mengajarkan Bahasa Belanda dan Ilmu Tauhid. Deliar Noer, 1996, hal. 166-167, Pinardi, 1964, hal. 27-29. Van Dijk, 1983, hal. 29.

pesantren di daerah itu. Sementara calon santri sudah datang, akhirnya atas prakarsa Ardiwisastra dibeli tanah seluas 4 Hektar di daerah Malangbong dekat rumahnya. Sesungguhnya Joesoef Taudjiri, menginginkan tempat Institut Suffah di Cipari Wanaradja Garut, hal inilah merupakan awal hubungan kurang harmonis antara Joesoef Taudjiri dengan Kartosoewirjo. Namun Joesoef Taudjiri juga membentuk pesantren di Cipari yang diberi nama Pesantren Darussalam.

“Institut Suffah” adalah sebuah pendidikan dalam bentuk gaya sebuah pesantren tradisional dengan bahasa pengantar bahasa Belanda⁴³, dimana para siswa disamping mendapat pengajaran umum dan pendidikan agama Islam juga dididik dalam Ilmu Politik. Kartosoewirjo memiliki dua lembaga yang secara politis menopang cita-cita perjuangannya: KPK PSII dan “Institut Suffah”, di mana KPK PSII berfungsi sebagai Batang-tubuh politiknya, sedangkan “Suffah” berfungsi sebagai sarana sosialisasi politiknya.⁴⁴

Melihat kenyataan di atas, Kartosoewirjo tampaknya tak pernah jera memperjuangkan aspirasi politiknya; oleh karena itu, wajarlah jika akhirnya ia dipecat dan PSII. Selain, telah sejak 1935 ia sering berkhotbah secara terang-terangan mengenai perlu didirikannya “Dar ul-Islam” atau “negara Islam.”⁴⁵ Hal ini tentu saja berbeda dengan interpretasi rekan-rekan di dalam PSII dulu, di mana mereka

⁴³Tentang fungsi dan pembangunan sebuah pesantren, Zamankhsyari Dhofier, *Tradisi pesantren. Studi tentang pandangan hidup kyai*, 1982.

⁴⁴Hiroko Horikoshi, 1975, hal. 63, Suffah atau Safwa berarti “Elite penganut agama Islam”.

⁴⁵C.A.O van Nieuwenhuijze. *Aspects of Islam in Post Colonial Indonesia*, 1958, hal. 168.

menjadikan Islam sebagai “kekuatan pembebas” (a liberating force)⁴⁶ dalam berhadapan dengan setiap bentuk penjajahan, yang dari sini suatu nasionalisme berdasarkan Islam ditegakkan, bukannya suatu negara Islam sebagaimana secara lantang dikemukakan oleh Kartosoewirjo dari kongres ke kongres setelah Kongres Nasional partai ke 22 tahun 1936.⁴⁷

Menjelang invansi Jerman ke Belanda suhu politik di Indonesia makin panas. Menarik untuk dicatat disini adalah perlawanan Islam - bukan kaum Nasionalis- yang rupanya diusahakan untuk dijinakkan oleh pemerintah kolonial, pada masa akhir pemerintahannya. Bagi pemerintah kolonial jauh lebih gampang untuk memperoleh sahabat dari kalangan kaum Nasionalis sekuler, dengan memberikan otonomi politik yang lebih besar, dibandingkan dengan menghadapi tantangan yang jauh lebih ekstrim yang diwakili kebudayaan santri dalam perpolitikan. Oleh karena itu pemerintah kolonial Belanda, memeras otak untuk menundukkannya, dengan berbagai cara, mulai dengan cara persuasif, misalnya dengan memberikan subsidi pada sekolah-sekolah Muhammadiyah, yang memang bisa diajak kerja sama atau subsidi uang negara untuk membantu haji-haji yang tidak mampu di Ibukota Arab Saudi dan jika perlu tidak lupa diintimidasi.⁴⁸

⁴⁶Terma “a liberating force” saya ambil dari Ahmad Syafi’i Ma’arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, 1985, hal. 8.

⁴⁷“Hijrah” berarti membangun dan berusaha sekuat tenaga untuk membentuk kekuatan hebat menuju Darul Islam, A.K. Pringgodigdo, 1991, hal. 130.

⁴⁸Harry J. Benda, 1980, hal. 126-127

Sementara itu pada bulan Maret 1939 terbentuk Gabungan Politik (GAPI) yaitu kelompok Nasionalis (Partindo, Gerindo), Kelompok Islam Nasionalis (SI Penyadar, PII) dan kelompok Kiri (PARI, PKI), yang kemudian hari pengelompokan ini berlanjut. Tujuan pokok dari GAPI ialah tuntutan Indonesia berparlemen. Yang disetujui oleh Sarekat Islam (BP-PSII dan PSII Abikoesno) dan PII. Sarekat Islam berpendapat bahwa dalam parlemen "ummat Islam mendapat kesempatan seluas-luasnya, buat mendapat peraturan-peraturan menurut akan cita-cita mereka, menurut perintah agamanya". Parlemen yang dikehendaki oleh Sarekat Islam ialah yang menimbulkan manfaat dan maslahat yang sebesar-besarnya untuk ummat Islam Indonesia dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Apakah dukungan terhadap tuntutan Indonesia berparlemen ini tidak berlawanan dengan politik hijrah, menurut PSII Abikoesno, tidak berlawanan karena parlemen yang dimaksudkannya mempunyai ketentuan-ketentuan "yang mengandung asas-asas yang selaras dengan Islam" berbeda dengan badan-badan perwakilan yang ada pada saat itu.⁴⁹

Tanggal 13-14 September 1941, GAPI mengadakan Kongres di Yogyakarta yang dihadiri oleh : Abikoesno, Sukarjowiryo Pranoto, Otto Iskandardinata, Mr Sartono, Kasimo dll. Hasil kongres tersebut diputuskan dibentuknya parlemen di luar Volksraad yakni Majelis Rakyat Indonesia dianggap sebagai badan perwakilan rakyat Indonesia.

Mulanya Belanda tidak mengakui Majelis Rakyat Indonesia ini tetapi setelah pada tanggal 13 Desember 1941 Majelis Rakyat Indonesia bersama-sama GAPI,

⁴⁹ Deliar Noer, 1996, hal. 289

mengeluarkan maklumat yang isinya “dianjurkan kepada seluruh anggota supaya berdiri di belakang Pemerintah Belanda.” Lagi pula tekanan dari Jerman dan Jepang terhadap Belanda makin kuat dan meningkat. Tetapi karena tidak setuju adanya kerjasama Indonesia, yang terakhir, sebagai prakarsa Sartono dan Sukarjo dengan pemerintah Belanda, maka Abikoesno dan kawan-kawan keluar dari GAPI atau pun Majelis Rakyat Indonesia sebagai protes.⁵⁰

IV.2. Kiprah pergerakan Islam semasa Jepang

Hindia Belanda terlibat dalam Perang Pasifik segera juga sesudah serangan udara Jepang atas Pearl Harbour pada 8 Desember 1941. Segera sesudah mendengar berita tentang serangan itu serta pernyataan perang Jepang terhadap Amerika Serikat dan Inggris, Pemerintah Belanda dalam pengasingan di London menyatakan perang pada Jepang. Pernyataan ini disampaikan kepada Menteri Luar Negeri Jepang pada 10 Desember.

Angkatan perang Belanda kebanyakan melawan serangan Jepang tanpa semangat dan dengan setengah-setengah, sehingga menimbulkan kesan hebat bagi kebanyakan orang Indonesia. Pada dini hari tanggal 1 Maret 1942 bala tentara Jepang yang ke 16 mendarat di tiga tempat di Jawa; di Barat dekat Merak di selat Sunda, di Eretan dekat Subang dan di Jawa Timur dekat Rembang. Dalam waktu delapan hari,

⁵⁰Harry J. Benda, hal. 129, Deliar Noer, 1996, penulis berpendapat keanggotaan Abikoesno dalam GAPI dengan mengatasnamakan PSII; tidaklah syah, mengingat beliau - bersama rekan-rekannya - telah meninggalkan PSII, beserta seluruh programnya yang telah disetujui bersama; Apa

Letnan Jendral Ter Poorten, Panglima Tentara Hindia Belanda (KNIL), menyerah atas nama seluruh angkatan perang sekutu di Jawa. Pada 9 Maret 1942, menyerahnya angkatan perang Belanda, terhadap angkatan Perang Jepang, di Kalijati Jawa Barat.⁵¹

Pendekatan Jepang terhadap umat Islam Indonesia beda sekali - untuk maksud yang sama - dengan Belanda. Padahal orang Jepang baru pertengahan tahun 1920-an mempelajari Islam. Jepang lebih rasional dan meyakinkan. Jelas motivasinya adalah rencana ekspansionisme Dai Nippon, karena hanya ada beberapa ratus orang Islam yang hidup di Jepang pada saat itu.

Propaganda anti Barat oleh Jepang, nampaknya sangat menyentuh perasaan Ummat Islam Indonesia, terutama Islam Ortodoks, sehingga invasi Jepang ke Indonesia, tidak terdapat intimidasi perlawanan dari Ummat Islam Indonesia, bahkan di Sumatera mendapat dukungan militer dari Islam ortodoks. Sebuah keputusan Masyumi berbunyi:.....dengan Nippon kita berdiri, dengan Nippon kita jatuh menghancurkan tirani musuh.⁵²

Harapan bahwa Jepang akan memperkenankan orang Indonesia turut ambil bagian yang lebih aktif dan dalam menentukan kebijaksanaan politik segera juga memudar. Tetapi, para pembesar Jepang hanya melakukan penyesuaian kecil, dan seperti juga Belanda sebelum mereka, terus juga memerintah dengan menggunakan

lagi keputusan Abikoesno dalam GAPI menyatakan untuk keluar dari GAPI, adalah pencerminan sikap skeptis terhadap jalan pemikirannya yaitu: Islam Parlementer.

⁵¹George Mc. Turnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia: Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik*. 1995.

⁵²Diterbitkan lagi dalam Socara Moeslimin Indonesia. Thn II. 15 Oktober 1944, hal. 2

perantaraan pemimpin-pemimpin tradisional. Semua kegiatan politik Indonesia, juga secara jelas terbukti bahwa Jepang akan melanjutkan politik yang telah ditetapkan Belanda. Dalam bidang politik tidak ada maksud mereka memberikan kesempatan ikut memainkan peranan pada bekas eksponen nasionalis dan Islam anti-Belanda.

Segala dugaan tentang susunan Pemerintah Indonesia kelak segera berakhir dengan diumumkannya dekrit Panglima Militer Jawa (Maklumat No.3) pada 20 Maret yang melarang membicarakan struktur politik Indonesia. Kata-kata maklumat itu disusun sedemikian rupa hingga benar-benar tidak memungkinkan semua kegiatan politik sebelum perang. Organisasi-organisasi yang hanya dapat diawasi dengan teliti dan dapat digunakan untuk usaha perang Jepang. Untuk memobilisasikan rakyat, Pemerintah Pendudukan Jepang lebih menginginkan terbentuknya organisasi masa yang baru, yang diketuai pemimpin-pemimpin Indonesia yang terkenal yang terkenal dan kooperatif, ketimbang bekerja dengan organisasi-organisasi yang ada. Akibatnya, partai-partai politik sebelum Perang harus menghentikan kegiatannya.

Perkembangan menarik akhirnya di bidang politik, terpisahnya Islam dari politik praktis, merupakan keputusan politik yang sama pentingnya di dalam rencana Jepang yang asli, sebagaimana yang dilakukan Snouk Hourgronje. Seperti para pendahulunya, orang-orang Jepang tetap mengawasi secara ketat organisasi Islam. Terutama terhadap pendidikan Islam. Bilamana penjara atau pembuangan merupakan

hukum yang paling kejam bagi agitasi radikal Belanda, maka kini penyiksaan atau kematian bisa dijatuhkan bagi mereka yang cukup dicurigai tidak taat.

Demikianlah keadaan Kartosoewirjo hingga masa akhir kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda. Situasi Indonesia segera berubah pada awal 1942, sebab pada bulan Maret tahun itu tentara militer Dai Nippon berhasil menduduki Indonesia, dan tak berapa lama setelah itu segera membubarkan semua partai politik yang telah ada sebelumnya. Satu-satunya kekuatan politik --jika dapat disebut demikian-- Islam yang diizinkan oleh Jepang untuk beroperasi adalah Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang didirikan September 1937.⁵³

Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo mulai aktif kembali di bidang politik, ketika dia pada tahun 1943 menjadi sekretaris dalam Majelis Baitul Mal, sebuah organisasi kesejahteraan dari MIAI (Madjilis Islam Alaa Indonesia) yang baru dibentuk di bawah pimpinan Wondoamiseno.⁵⁴ Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo turut serta dalam pendirian organisasi ini dan mengunjungi cabang-cabang Baitaul-Mal di propinsi terutama di daerah-daerah yang sangat dia kenal yaitu Priangan. Gagasan pembentukan Baitul Mal bukanlah berasal dari para pemimpin MIAI, yang pada kenyataannya mengambil alih rencana tersebut. Pembentukan Baitul Mal yang pertama, yaitu organisasi Islam otonom yang menerima zakat dan selanjutnya

⁵³Harry J. Benda. 1980. hal. 119 .

⁵⁴*Soeara MIAI* I, No. 13, 1-7-2603, hal. 5, *Asia Raya*, 19-6-2603, H.J. Benda. 1980. hal. 179.

membagikannya bagi fakir miskin didirikan oleh Bupati Bandung, R.A.A Wiranata Kusuma⁵⁵

Badan usaha yang baru tersebut dikepalai oleh Ketua MIAI Wondoamiseno, dengan anggota komite Mr. Kasman Singodimedjo, S.M. Kartosoewirjo, Moh Sjafe'i, K. Taufiqurrachman dan Anwar Tjokroaminoto sedangkan Wiranata Kusuma menjadi penasehat kehormatan. Dalam waktu beberapa bulan Baitul Mal telah didirikan di tiga puluh kabupaten di Jawa.⁵⁶ Pada bulan Mei 1943, Kartosoewirjo bersama-sama Wondoamiseno dan Safe'i bertemu dengan residen Jepang Aseha di Bandung dalam kaitannya dengan pendirian Baitul Mal di lima kabupaten di Priangan.⁵⁷

Dengan demikian re-organisasi muslim yang diakui pemerintah Dai Nippon tersebut. Sangat beralasan bilamana organisasi Masyumi ini sangat dibenci oleh golongan nasionalis, sebab popularitasnya, hampir di setiap daerah mengalahkan organisasi sekuler, terutama pada tahun 1944.⁵⁸

Lembaga yang mengurus masalah kesejahteraan ummat ini tidaklah disia-siakan begitu saja oleh para pemimpin Islam Indonesia, melainkan dengan taktis sekali mereka berusaha "mendirikan jaringan sel Islam di Pulau Jawa dalam usaha untuk mempersatukan rakyat atas nama Allah, dan bukan atas nama Tenno Haika,

⁵⁵*Soeara MIAI*, I, No. 4, 15 Pebruari 1943, hal. 6.

⁵⁶*Soeara MIAI* I. 18-19, 1 Oktober 1943. Pada saat didirikan secara resmi Pemerintahan Militer 8 Agustus 1942, Jawa terdiri dari 79 Kabupaten, *Pandji Poestaka*, XXI, 22, 15 Agustus 1943.

⁵⁷*Asia Raja*, 18-5-2603.

⁵⁸Harry J. Benda, 1980, hal. 195

Sang Kaisar...”⁵⁹ tetapi sayangnya hal ini segera terciium oleh penguasa militer Dai Nippon, dan tak ampun lagi, MIAI dibubarkan pada bulan Oktober 1943, dan sebulan kemudian pemerintah Jepang mendirikan sebuah wadah pernersatu lagi bagi ummat Islam: Masyumi, “Majelis Syura Muslimin Indonesia”. Meskipun demikian dapatlah diduga, apa maksud politik pemerintah Jepang dengan didirikannya Masyumi: pemerintah Jepang tidak ingin gerakan rahasia Bait al-Mal MIAI menjadi preseden bagi kekuatan-kekuatan Islam sejenis yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah Jepang. Oleh karena itu, Masyumi yang baru saja mereka bentuk itu dimaksudkan untuk memudahkan kontrol pemerintah atas kegiatan dan kemungkinan timbulnya gerakan-gerakan dari ummat Islam.

Sungguhpun dirasakan tidak ada lagi ruang gerak yang menguntungkan bagi ummat Islam di masa pendudukan Jepang ini, akan tetapi, karena Jepang datang ke Hindia Belanda dengan mengobral janji bahwa Jepang adalah “saudara tua bangsa Indonesia yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda, tambahan pula para pemimpin Islam juga mengusulkan Kepada pemerintah Jepang agar membentuk pasukan pertahanan untuk ummat muslim Jawa, maka mau tak mau pemerintah Jepang harus mewujudkannya dalam bentuk yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh bangsa Indonesia dan, lebih khusus lagi dalam hal ini, ummat Islam ditanah Jawa.⁶⁰

⁵⁹Harry J. Benda, 1980, hal. 181.

⁶⁰Pertimbangan strategis Jepang telah menyebabkan tidak adanya perkembangan politik yang seragam di Nusantara;Pulau Jawa, pulau terpenting, ditempatkan di bawah pengawasan Komando

Maka demikianlah, tanggal 8 Desember 1944 Jenderal Kamakichi Harada, Panglima Militer Jepang di Jawa, mengizinkan korps relawan Muslim, "Hizbullah", didirikan demi memenuhi "kewajiban bagi rakyat Asia Timur, dan terutama rakyat Jawa, membela negeri sendiri,"⁶¹ dan dengan demikian, resmilah ummat Islam Indonesia memiliki organ militer sebagaimana kaum nasionalis, yang telah lebih dahulu memiliki PETA (Pembela Tanah Air) yang didirikan bulan Oktober 1943.

Meski harus bertindak sebagai korps cadangan PETA dan berada setingkat di bawah PETA dalam hal kualifikasi⁶² namun kehadiran Hizbullah amatlah berarti bagi ummat Islam, sebab sebagaimana terlihat nanti, inti pasukan Darul Islam Kartosoewirjo berasal dari satuan ini, ditambah dengan "Sabiilillah," sejoli Hizbullah yang dibentuk bulan November 1945.⁶³ Dalam hubungan ini, Kartosoewirjo

Angkatan Darat, yang mencerminkan kebijaksanaan yang ditempuh penguasa Jepang di negeri-negeri lain yang mereka duduki, seperti Birma, Filipina dan Vietnam, di mana Jepang menjanjikan kemerdekaan nasional sebagai imbalan dukungan rakyat setempat kepada Jepang dalam peperangan melawan Sekutu...sedangkan Borneo, Celebes, Maluku dan Kepulauan Sunda Kecil, diperintah oleh Komando A L Jepang yang dengan kejam menindas setiap gerakan nasional yang muncul, Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia, 1945-67*, (terj.), 1986, hal. 2.

⁶¹C. Van Dijk, 1983, hal. 63, Harry J. Banda, 1980.

⁶²Menurut Anggaran Dasarnya, Hizbullah mempunyai tugas militer dan keagamaan. Dalam bidang militer. Hizbullah harus bertindak sebagai korps cadangan PETA dalam perang melawan Sekutu, dan dalam bidang keagamaan Hizbullah diharapkan mempropagandakan dan mempertahankan Islam serta menjamin agar masyarakat Islam memenuhi kewajiban agamanya. Tetapi di dalam prakteknya, tidak terdapat kerjasama atau hubungan antara PETA dengan Hizbullah. Hizbullah adalah dan tetap merupakan cabang bersenjata Masyumi, dan dengan demikian dan masyarakat Islam yang diwakilinya. Di atas kertas, melalui Masyumi, setelah kemerdekaan Indonesia Hizbullah tunduk kepada Pemerintah Republik dan TNI Tetapi, di dalam praktek, hubungan ini luar biasa lemahnya, terutama pada tahun-tahun pertama revolusi Indonesia, ketika diplomasi pemerintah bertabrakan dengan semangat revolusioner, Van Dijk, 1983, hal. 63, 64. Amat tidak mengherankan jika Kartosoewirjo memperoleh dukungan dan pasukan-pasukan Hizbullah dalam aksinya menentang strategi diplomasi pemerintah Indonesia di masa-masa hangat menjelang munculnya Darul Islam kelak, sebab Hizbullah memang memilih jalur keras melawan Belanda

⁶³Sabiilillah diusulkan untuk didirikan ketika Masyumi "Islam" didirikan tanggal 7 dan 8 November 1945, dalam suatu konferensi di Jogjakarta, dan dimaksudkan Masyumi sebagai "milisi

bertindak sebagai pemimpin Hizbullah Malangbong dan sebagai pengawas pada rencana latihan gerilya yang diselenggarakan oleh Jawa Hokokai suatu gerakan masa yang dikendalikan kaum nasionalis “sekular”, di Banten.⁶⁴ Dan, seluruh karier militernya di Malangbong dan di Banten ini nampaknya mengakhiri riwayat aktifitasnya selama pendudukan Jepang.

Pada 8 Maret 1943, Tawaran Jepang untuk menghidupkan kembali Majelis Islam yaitu terbentuknya Majelis Islam a'la Indonesia (MIAI) nampaknya orang-orang Sarekat Islam (Kooperatif & Parleментар) lah yang banyak mendominasi dalam kepengurusan MIAI ini. Tetapi simpati Jepang terhadap Majelis ini hanyalah sebentar saja; selanjutnya MIAI dikucilkan dari setiap program yang menyangkut ummat Islam. Rencana pemerintah Jepang untuk mendirikan Korps Sukarelawan Islam pun dicabut kembali, setelah diketahui tokoh MIAI ikut andil di dalamnya. Baru setelah dirasakan tekanan sekutu semakin gencar maka pada bulan Desember 1944,izinkan Korps Sukarelawan tersebut. Sebelumnya militan-militan Islam bergabung dalam PETA yang diketuai oleh Kasman Singodimedjo, setelah tanggal 8 Februari 1944 berjanji setia kepada Dai Nippon.⁶⁵

Perlulah diperhatikan bahwa Nasionalisme sekuler, pada saat itu belum lah mendapat perhatian dan dukungan rakyat pedesaan, bahkan jauh sekali dibandingkan dengan popularitas Islam Indonesia. Karena logis, bahwa dalam usaha mencari

warga negara dalam perang gerilya melawan Belanda”, serta ditujukan untuk memperkuat kesiapsiagaan rakyat untuk ber-JIHAD FII SABILILLAH. Van Dijk, 1983, hal. 66.

⁶⁴Harry J. Benda, 1980, hal. 324.

simbol yang dapat diterima dan berarti yang akan diberikan kepada angkatan bersenjata Indonesia yang pertama; Maka penguasa Jepang di Jawa haruslah memalingkan mukanya kepada Islam.

Bendera PETA - daidanki - yang diterima Komandan Islamnya di dalam upacara yang mengesankan, dari tangan panglima Jepang pada awal Februari 1944, tidaklah menunjukkan warna merah putih dari Nasionalisme Indonesia, melainkan Bulan Sabit, dengan dasar hijau yang ditempatkan diatas Matahari terbit Dai Nippon.

Dengan demikian, hampir satu tahun sebelum nasionalisme Indonesia bisa memberikan ketegasan, Islam bukanlah saja telah diberi tempat utama dan terpenting di dalam melawan kembali kolonialisme Barat; Akan tetapi peranannya dalam perjuangan tersebut memperdalam sentimen anti Barat para serdadu Indonesia dan para petani Indonesia sampai pada tingkat yang paling penting.⁶⁵

Pada bulan Februari 1944, Jepang menciptakan sebuah alat baru dengan mendirikan Djawa Hokokai, yaitu Perhimpunan kebaktian Rakyat Jawa sebagai pengganti "Poetra" (Poesat Tenaga Rakjat). dan dalam perhimpunan ini para politikus Indonesia diintergrasikan. Kartosoewirjo pada saat itu bekerja di kantor pusat Djawa Hokokai (Djawa Hokokai Chuo Honbu) di bagian Chosaka yang

⁶⁵Harry J. Benda, 1980, hal. 173.

⁶⁶Harry J. Benda. 1980, hal. 174-175. Mengenai bendera PETA. bandingkan. Roeslan Abdul Gani, didalam pidatonya yang berjudul " *Fungsi Sejarah PETA*". Pada Rconi Yayasan PETA di Lumajang. 10 Nopember 1982. Diterbitkan kembali oleh Yayasan PETA dalam satu risalah khusus, berjudul : Benarkah Nugroho Notosusanto. Di himpun oleh Pamoe Raharjo. Buku tersebut sebagai bantahan atas ungkapan Nugroho Notousanto yang berbunyi: Dengan atau tanpa PETA Tentara Nasional Indonesia Merdeka, akan tetap lahir juga. Juga menurut ungkapan beliau PETA bukan tentara sungguhan..... Tentang lambang negara: Merah Putih, adalah lambang PNI dan Perhimpunan Indonesia. bandingkan A.K. Pringgodigdo, 1991, hal. 69.

tugasnya ialah mengumpulkan data-data ekonomi dan informasi lainnya yang penting.⁶⁷

Peranan Kartosoewirjo dalam *Hizbullah* dan *Jawa Hokokai* kiranya menyimpulkan seluruh kegiatan politik dan militernya selama pendudukan Jepang. Beberapa waktu tak lama sesudah serbuan Jepang dan berakhirnya riwayat PSII Kedua dia aktif dalam MIAI, satu-satunya organisasi Islam yang masih diizinkan Jepang ketika itu. Dalam hubungan ini dia menjadi salah satu anggota komite sentral yang mengelola *Bait al-Mal* yang dibentuk MIAI untuk mengumpulkan zakat dan membaginya di kalangan orang miskin. Ketika MIAI dalam kongresnya Oktober 1945 membubarkan dirinya sendiri dan “Bait al-Mal” harus pula dibubarkan, Kartosoewirjo berhenti memainkan peranan masyarakat yang terkemuka dalam gerakan Islam.

Selama beberapa waktu Kartosoewirjo memang memimpin kesatuan *Hizbullah* di Malangbong. Tetapi, tampaknya hal itu dilakukannya sebagai salah seorang dari pemimpin Islam yang paling berpengaruh dari daerah itu dan tidak dalam kedudukannya sebagai pimpinan Institut Suffah yang barangkali sudah ditutup pada waktu itu. Keterlibatannya di cabang Malangbong kelihatannya tidak seintensif seperti yang mungkin diharapkan dari orang seperti Kartosoewirjo. Ia membagi waktu antara memimpin *Hizbullah* Malangbong dan bertindak sebagai pengawas di

⁶⁷N.P. Soedarsono, *Poetera (Poesat Tenaga Rakyat): Wadah Perjuangan Soekarno-Hatta beserta para perintis Kemerdekaan lainnya dalam zaman Jepang*, 1982, hal. 79, Soebagijo I.N., *Sumanang, Sebuah Biografi*, 1981, hal. 90.

Karesidenan Banten dari suatu rencana pelatihan gerilya yang diadakan oleh Jawa Hokokai, suatu gerakan massa yang dikuasai ataupun dikendalikan para nasionalis "sekuler".

VI.3. Kemerdekaan Indonesia

Pada tanggal 7 September 1944 di dalam sidang istimewa Teikoku Gikai (Parlemen Jepang) ke-85 di Tokyo, Perdana Menteri Koiso (pengganti Perdana Menteri Tojo) mengumumkan tentang pendirian pemerintah Kemaharajaan Jepang, bahwa daerah Hindia Timur (Indonesia) diperkenankan merdeka kelak dikemudian hari. Hal ini situasi Jepang semakin buruk karena dalam bulan Juli 1944 pulau Saipan yang letaknya strategis jatuh ketangan Amerika yang menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat Jepang.

Menghadapi situasi yang kritis, pemerintah militer Jepang di Jawa dibawah pimpinan Saiko Syikikan Kumakici Harada pada tanggal 1 Maret 1945, telah mengumumkan pembentukan suatu Badan Untuk Menyelidiki Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan disingkat menjadi Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Zyumbi Tyosakai). Maksud tujuannya ialah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting yang berhubungan dengan segi-segi politik, ekonomi, tata pemerintahan dan lain-lainnya yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka.⁶⁸

Pada tanggal 28 Mei 1945 Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai), diresmikan oleh Seiko Sikikan dan

Gunseikan. Dalam sambutannya peresmian Saiko Sikikan menjelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah suatu bukti nyata akan tujuan perang suci Dai Nippon. Ditegaskannya usaha mendirikan negara merdeka bukanlah usaha yang mudah untuk perlu diadakan penelitian yang seksama terutama mengenai pembelaan negara⁶⁹.

Sidang yang pertama berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 membahas dasar negara. Dalam sidang tersebut dari 68 anggota yang mendapat kesempatan berpidato hanya empat orang, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin dan Prof. Mr, Dr, Soepomo. Pada tanggal 1 Juni, Ir, Soekarno mengucapkan pidato yang kemudian dikenal dengan Lahirnya Pancasila. Materi Pancasila yang dikemukakan adalah 1) kebangsaan Indonesia; 2) Internasionalisme atau perikemanusiaan; 3) Mufakat atau demokrasi; 4) Kesejahteraan Sosial; 5) Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷⁰

Tanggal 7 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diresmikan namun baru bersidang pada tanggal 18 Agustus sampai 22 Agustus 1945. Badan ini terdiri dari 20 anggota, delapan mewakili pulau-pulau di luar Jawa, keduabelas wakil untuk Jawa : Soekarno (Ketua), Mohammad Hatta (Wakil ketua), dan anggotanya: Radjiman Wedyodiningrat, Otto Iskandardinata, Sutardjo Kartohadikusumo, Soeroso, Soepomo, Abdul Kadir (Peta), Ki Bagus Hadikusumo,

⁶⁹ Sartono Kartodirdjo et.al.. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid VI, 1977, hal. 15-17.

⁷⁰ *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, 1995, hal. 367.

Wahid Hasyim (Masyumi), Yap Tjwan Bing, Latuharhary, Amir, Abdul Abbas, Mohammad Hasan, Hamdhani, Ratulangi, Andi Pangeran, I Gusti Ktut Pudja, Soerjomihardjo, dan Poerobojo. Dua orang yang disebut terakhir ini, mewakili kerajaan-kerajaan Jawa Tengah.⁷¹ Tetapi atas saran Soekarno enam orang anggota ditambahkan.⁷²

Setelah Jepang bertekuk lutut kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, maka selesailah Perang Dunia II. Tiga hari menjelang Indonesia diproklamirkan adalah hari-hari vacuum kekuasaan. Secara formil tentu saja, tetapi secara faktual Jepang masih tetap berkuasa/ memegang kekuasaan, sesuai dengan perintah sekutu.

Waktu tiga hari ini, benar-benar merupakan pergolakan yang sangat menentukan sejarah Indonesia kelak di kemudian hari; Adanya perbedaan paham antara golongan pemuda yang tergabung dalam API di bawah pimpinan Sukarni, Adam Malik dan Dr. Muwardi, dengan golongan yang bergerak legal, pimpinan Soekarno dan Hatta. Golongan pertama menginginkan proklamasi kemerdekaan dibacakan sesegera mungkin, dan harus lepas dari segala basa-basi organisasi yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Jepang. Seperti PPKI agar nanti tidaklah dikatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu di cap atau dituduh sebagai warisan

⁷⁰ Ibid, hal. 63-84.

⁷¹ Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, 1978, hal. 399. Harry J. Benda, 1980, hal. 330.

⁷² Keenam anggota baru tersebut ialah: Wiranatakusumah, Ki Hadjar Dewantara, Kasman Singodimedjo, Sajuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri dan Soebardjo. "Sebetulnya mula-mula akan ditambahkan sembilan anggota baru, tetapi Sukarni, Chairul Saleh dan Adam Malik menolak keanggotaan mereka, sebab Panitia Persiapan Kemerdekaan itu mereka anggap buatan Jepang", Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, 1969, hal. 61.

Jepang; atau sebangsa penjajah lainnya. Sebaliknya golongan kedua yang menginginkan proklamasi terjadi, sejalan dengan organisasi legal yang diakui pemerintah Jepang.

Tanggal 17 Agustus 1945. Jam 10.00 pagi bertempat tinggal di Pegangsaan Timur No. 56, pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno. Teks proklamasi ini terdiri dari dua kalimat, kalimat pertama diambil dari piagam Jakarta- Preamble - Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Semula Soekarno menganggap ini sudah cukup, tetapi Bung Hatta tidak setuju, karena tidak melihat tindakan-tindakan yang menuju kepada realisasinya. Lalu ditambahkan Kalimat kedua : Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Secara de facto daerah Republik Indonesia itu sendiri tidak ada kecuali Pegangsaan Timur 56; daerah lain masih dikuasai bala tentara Jepang. Kendati begitu pada tanggal 4 September 1945, terbentuklah Kabinet pertama Republik Indonesia. Semua yang diangkat menjadi menteri, sudah menduduki Jabatan dalam dinas Jepang. Oleh karena itu di mata rakyat umumnya pemuda khususnya pengangkatan itu tidak memuaskan, sebab mereka itu termasuk kolaborator Jepang.⁷³

Demikian pula Gubernur dan Residen yang diangkat Presiden RI adalah bekas Wakil Gubernur dan Wakil Residen pada pemerintahan Jepang. Inilah yang dimaksud dengan "Pemindahan kekuasaan dengan seksama", memang ironis

⁷³Ben Anderson, *Revolusi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, 1988.

kedengarannya, setelah merdeka pun, untuk mengadakan rapat raksasa di Lapangan Ikada 19 September 1945 perlu izin dari tentara Dai Nippon.

Kartosoewirjo muncul kembali di gelanggang politik sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Mohammad Hatta, 17 Agustus 1945. Dia tetap tinggal di latar belakang selama masa pendudukan Jepang, tetapi tetap aktif dalam politik nasional lagi begitu kemerdekaan dinyatakan. Dia adalah salah seorang pendiri Masyumi pada November 1945. Dalam organisasi ini yang kini menjadi partai politik, dia menduduki jabatan sekretaris pertama.⁷⁴ Masyumi -yang menurut Kartosoewirjo ia membantu mendirikan- menggantikan Masyumi masa Jepang.⁷⁵ Bertentangan dengan Masyumi lama, Masyumi yang baru menyatakan dirinya sebagai partai politik. Dalam soal-soal lain ia mirip sekali dengan Masyumi lama.

Dengan melanjutkan tradisi Masyumi dari masa pendudukan Jepang, Masyumi yang baru dibayangkan sebagai wahana organisasi bagi semua kelompok Islam. Masyumi dimaksudkan agar menjadi partai politik kesatuan bagi semua Muslim, tanpa membedakan latar belakang agama, sosial pendidikan, dan ekonomi. Sesungguhnya, pada suatu waktu Masyumi sesudah Perang ini anggota-anggotanya terdiri dari berbagai kelompok politik dan agama Islam sebelum Perang. Di dalamnya dipersatukan perorangan dan organisasi yang sebelum Perang saling cakar dan terlibat dalam percek-cokan yang kadang-kadang sengit. Organisasi-organisasi

⁷⁴Wawancara dengan Dodo Mohaminad Darda pada tanggal 16 April 2002 di Malangbong, Ben Anderson, *Revolusi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, 1988, hal. 249, Pinardi, 1964, hal. 31, Deliar Noer, *Partai-Partai Islam DI Pentas Nasional*, 1987, hal. 100.

yang masuk ke dalam Masyumi umpamanya tidak hanya Muhammadiyah, tetapi juga lawannya, Nahdatul Ulama, yang justru pada tahun 1926 didirikan untuk menentang penyebaran reformisme yang Muhammadiyah menjadi eksponennya.

Sementara itu pada tanggal 10 November 1946 diparaf naskah Persetujuan Linggajati. DR. H.J. Van Mook kepala Netherland Indies Civil Administration (NICA) yang kemudian diangkat sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda, dengan gigih memecah belah RI. Persetujuan tersebut isinya antara lain: Pemerintah Belanda mengakui - untuk pertama kalinya - pemerintah RI berkuasa secara de facto; Tapi hanya atas Jawa, Madura dan Sumatera. Dibentuknya Republik Indonesia Serikat - RIS - yang wilayahnya meliputi: RI (Jawa, Madura dan Sumatra) kalimantan dan Timur Besar. Dibentuknya pemerintah Uni Belanda - Indonesia, yang setiap keputusan harus disetujui Raja Belanda yang menjadi kepala pemerintahan Uni Belanda - Indonesia. Naskah persetujuan ini ditanda tangani bersama pada tanggal 25 Maret 1947.⁷⁶

Dalam tahun-tahun mula Republik itu Kartosoewirjo diangkat pula sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) mewakili Masyumi.⁷⁷ Pada sidang kelima KNIP di Malang pada Februari dan Maret 1947. Kartosoewirjo ditunjuk sebagai salah seorang dari lima anggota Masyumi dalam Komite Eksekutif, yang terdiri dari 47 anggota.

⁷⁵Wawancara dengan Dodo Mohammad Darda pada tanggal 16 April 2002 di Malangbong;

⁷⁶Sedjarah Militer Kodam VI Siliwangi, 1968. hal. 129

⁷⁷George Mc Kahin. 1995, hal. 258.

Kartosoevirjo datang ke Malang untuk mengikuti sidang KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), dalam sidang tersebut membahas apakah Persetujuan Linggajati yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik dan Belanda pada bulan November 1946 akan disetujui atau tidak. Kartosoevirjo sendiri termasuk para politikus Masyumi yang menolak persetujuan Linggajati tersebut tanpa kompromi.

Kartosoevirjo datang bersama lasykar Hizbullah dari Jawa Barat, bersama pimpinan-pimpinan lokal terutama yang harus menghadiri konperensi Hizbullah. Menurut Sutomo, lasykar Hizbullah bersama dengan anggota sejumlah satuan Badan-badan perjuangan untuk melindungi anggota-anggota KNIP, khususnya dari Masyumi dan PNI, yang menentang persetujuan Linggajati yang ditandatangani Pemerintah Republik dan Belanda November 1946, dan sekarang dibicarakan oleh KNIP, menghadapi kemungkinan serangan dari satuan badan-badan perjuangan pendukung partai-partai kiri yang menyokong persetujuan itu. Sutomo menyatakan selanjutnya, ketika anggota KNIP yang anti-Linggajati benar-benar diancam gerilyawan Pesindo, dengan sekuat daya dia harus menggunakan pengaruhnya untuk mengubah Kartosoevirjo memerintahkan pasukannya agar menembaki satuan-satuan Pesindo⁷⁸

Perdana Menteri Sjahrir menyatakan kesediaan untuk mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan. tetapi menolak gendarmerie bersama. Jawaban ini mendapatkan reaksi keras dari kalangan parpol-parpol di Republik dan berakibat jatuhnya Kabinet Sjahrir. Pengganti Sjahrir adalah Amir Syarifuddin yang

sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri, dia menggaet anggota PSII yang dulu untuk duduk dalam Kabinetnya. Termasuk menawarkan kepada Kartosoewirjo untuk turut serta duduk dalam kabinetnya menjadi Wakil Menteri Pertahanan kedua. Namun apa jawaban Kartosoewirjo? Seperti yang dijelaskan dalam sepucuk suratnya kepada Soekarno dan Amir Syarifuddin, dia menolak kursi menteri karena "ia belum terlibat dalam PSII dan masih merasa terikat kepada Masyumi".⁷⁹

Kartosoewirjo menolak tawaran Amir Syarifuddin bukan semata-mata karena loyalitasnya kepada Masyumi. Penolakannya untuk menjadi menteri juga ditimbulkan oleh keinginannya untuk menarik diri dari gelanggang politik pusat. Kecewa akibat politik Masyumi dewasa itu ia pun kembali ke Malangbong. Akibat menyaksikan kondisi politik yang tidak menguntungkan bagi Bangsa Indonesia disebabkan berbagai perjanjian yang diadakan pemerintah RI dengan Belanda, di samping itu Kartosoewirjo tidak menyukai arah politik Amir Syarifuddin yang kekiri-kirian. Kalau dilihat dari sepak terjang Amir Syarifuddin selama manggung di percaturan politik Nasional dengan menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan sangat jelas terlihat, bahwa Amir Syarifuddin membawa arah politik Indonesia kepada arah Komunisme.⁸⁰ Tetapi dia tetap menjabat sekretaris pertama

⁷⁸Sutomo, *Sebuah Himbauan*, 1977, hal. 8-9.

⁷⁹*Merdeka*, 19 Juni 1947, Ben Anderson, 1988, George Mc. Turnan Kahin, 1995.

⁸⁰Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya*, 1994.

partai, dan diangkat pula sebagai wakilnya untuk Jawa Barat. Dalam jabatannya yang terakhir ini ia mulai menyusun kembali pasukan gerilya Islam di daerah ini.

IV.4. Sikap Politisi Islam Jawa Barat

S. M. Kartosoewirjo ikut serta dalam perencanaan pembentukan Partai Islam setelah kemerdekaan, yakni Masyumi. Bahkan yang membuat rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Masyumi adalah Kartosoewirjo sendiri atas saran Dr. Soekiman. Pada pertemuan Awal bulan Oktober 1945 di Surabaya yang hadir pada perencanaan tersebut selain Kartosoewirjo juga Wahid Hasjim, Dr. Soekiman, Abikoeno Tjokrosoejoso⁸¹, maka pada kongresnya yang pertama pada tanggal 7- 11-1945 di Yogyakarta. Masyumi didirikan sebagai sebuah partai politik yang baru dengan nama yang lama.

Dr. Soekiman Wirjosandjojo menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Masyumi, Abikoeno Tjokrosoejoso menjadi wakil ketua I, R. Wali Fatah menjadi ketua II. S.M. Kartosoewirjo menjadi sekretaris. Kepala bagian pemuda dipegang oleh Harsono Tjokroaminoto. Majelis Syuro dipegang oleh K.H. Hasjim Asj'ari sebagai ketua umum, Ki Bagus Hadikusumo sebagai ketua I. Ketika itu juga, NU dan Muhammadiyah, menggabungkan diri ke dalam partai Masyumi yang baru, maka

⁸¹Komando Daerah Militer VI Siliwangi Team Pemeriksa, *Berita Ajjara Interogasi III*, 20 Juni 1962. hal. 3. Wawancara dengan Dodo Mohamad Darda pada tanggal 16 April 2002 di Malangbong.

dengan demikian partai ini praktis mewakili semua partai-partai dan organisasi Islam yang ada pada waktu itu.⁸²

Pada Kongres Masyumi yang pertama di Yogyakarta juga ditetapkan bahwa di samping Hizbullah, yaitu sebuah lasykar Islam yang masih tetap berdiri, dibentuk lagi sebuah lasykar yang dinamakan Sabilillah. Berbeda dengan Hizbullah yang anggotanya masih sangat muda, anggota Sabilillah terdiri dari generasi yang lebih tua⁸³. Keputusan lainnya adalah bahwa ummat Islam harus dipersiapkan untuk menjalankan jihad.⁸⁴ Dalam programnya, Masyumi merumuskan tujuannya, yaitu untuk menciptakan sebuah negara hukum yang berdasarkan ajaran agama Islam.⁸⁵

Pemimpin-pemimpin organisasi di masa Jepang selain mendirikan BKR (Badan Keamanan Rakjat) juga mendirikan berbagai lasykar atau Badan Perjuangan dengan macam-macam ikatan etnis, politik dan keagamaan. Dengan demikian di daerah Bandung dan Priangan saja terbentuk 18 lasykar besar. Suatu masalah yang dihadapi lasykar tersebut adalah pengadaan senjata, karena daerah Bandung rakyat kurang berhasil dalam merampas senjata dari Jepang.⁸⁶ Untuk mencapai koordinasi yang lebih baik dari lasykar-lasykar tersebut, maka pada tanggal 15-9-1945 didirikan

⁸²Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, 1987, hal. 100-101. Ben Anderson, *Revolusi Pemoeda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, 1988, hal. 249.

⁸³S. Soebardi, 1983, hal. 116.

⁸⁴Sedjarah hidup K.H.A. Wahid Hasjim 1957, hal. 353.

⁸⁵Deliar Noer, 1987, Ben Anderson, 1988.

⁸⁶A.H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas. Jilid 1, Kenangan Masa Muda*, 1982, hal. 75. A.H. Nasution, *Tentara Nasional Indonesia I*, hal. 117.

di Bandung Markas Daerah Pertahanan Priangan MDPP⁸⁷. Yang menjadi anggota MDPP ini adalah Hizbullah dibawah pimpinan Zainal Abidin, Kadar Solihat dan Kamran. Juga Sabilillah menjadi anggota MDPP dengan pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan politikus Masyumi seperti Isa Anshari, Adjengan Toha dan Kiai Joesoef Taudjiri.

Pada tanggal 12 Pebruari 1946, MDPP berubah menjadi MPPP (Madjlis Persatuan Perdjoangan Priangan)⁸⁸ yang terdiri dari 61 organisasi militer dan sipil. Kamran diangkat menjadi ketua MPPP dan Sutoko, bertanggung jawab untuk masalah pertahanan. Ketika lasykar-lasykar tersebut dibubarkan dan kemudian dileburkan dalam TNI, terjadi konflik antara Kamran dan Sutoko, karena Kamran mula-mula menolak untuk mengintergrasikan lasykaranya dalam TNI.⁸⁹

Sejak didirikan Partai Politik Islam di Indonesia (mulai didirikan PSII sebelum perang), telah tumbuh cita-cita golongan Islam politik. Cita-cita politik Islam yang bertujuan untuk mendirikan Negara dengan dasar Agama Islam. Oleh karena tiap-tiap partai yang mempunyai dasar agama Islam akhirnya pasti mempunyai tujuan selain supaya agama Islam berkembang pula supaya hukum Islam berlaku. Banyak diantara kaum Islam radikal tadi menjadi pelopor dan inti dalam

⁸⁷Dinamakan juga: Madjlis Dewan Perdjuangan Priangan, atau "Markas Dewan Pimpinan perdjoangan", John R.W. Smail, *Bandung in the early revolution 1945-1956: A Study in the Social History of the Indonesian revolution*, 1964, hal. 129.

⁸⁸Sering juga dinamakan "Markas Pimpinan Perjuangan Priangan" Bandingkan dengan: Team Pencerangan Umum, Badan Penelitian Penyusunan Sejarah Jawa Barat suatu..., hal. 248.

⁸⁹Sedjarah Militer Kodam VI Siliwangi, 1968, hal. 84.

gerakan Darul Islam, sehingga setelah mendapat kekuatan mendirikan Negara dengan dasar agama Islam, dapat pula dengan mudah menggerakkan para kiyai.

Pada permulaan pecahnya revolusi nasional melawan tentara pendudukan Inggris/Belanda, disamping Badan perjuangan lainnya, oleh pemuda Islam daerah Priangan didirikan pula Hizbullah dan Sabilillah sebagai salah satu bagian dari Partai Masyumi.

Adapun susunan pengurus Masyumi daerah Priangan hasil Konferensi di Cicalengka pada akhir tahun 1945 adalah sebagai berikut:

Ketua :

- | | | |
|---------------|---|---------------|
| 1. Ketua Umum | : | K.H. Moechtar |
| 2. Ketua I | : | Ismail Nafoe |
| 3. Ketua II | : | Moch Syafei |
| Sekretaris | : | Aboen |
| Bendahara | : | H. Zaenoedin |

Kepala Bagian

- | | | |
|------------------------|---|----------------------|
| 1. Penerangan | : | Moh. Isa Ansyari |
| 2. Penyelidik | : | Moch Noer Lubis |
| 3. Pertahanan | : | Aminoeddin Hamzah |
| 4. Pimpinan Hizbullah | : | Zainoel Bachri |
| 5. Pimpinan Sabilillah | : | K.H. Toha dan Kamran |
| 6. GPII | : | ATR Hassan |

Konferensi berikutnya pada bulan April 1947, menghasilkan susunan Pimpinan Masyumi Daerah Priangan sebagai berikut:

Ketua

1. Ketua Umum	: K.H. Moechtar
2. Ketua I	: Moch Syafei
3. Ketua II	: Djajarachmat
4. Ketua III	: R. Oni
Sekretaris	: Sanoesi Partawidjaya
Keuangan	: M.A. Djoedjoe
Kepala Bagian	
Penerangan	: Sar'an
Ekonomi	: M.A Djoedjoe
Politik	: Djajarachmat
STII	: Oto Soekmawidjaja
SDII	: Kartadinata
Perburuhan	: Parta
Muslimat	: Nj. Ipah dan Nj. Rochani
Pertahanan	: R. Oni
Hizbullah	: Zaenoel Bachri
Sabilillah	: K.H. Toha
GPII	: Dahlan Loekman

Kalangan Masyumi Jawa Barat sangat menentang Biro Perdjuaan yang dibentuk oleh Mentri Pertahanan Amir Syarifuddin yang mengharuskan setiap laki-laki yang berusia 15 tahun ke atas untuk masuk ke dalam Biro tersebut. Hal ini menurut R. Oni, alasan untuk menentang rencana tersebut ialah, karena menurut R. Oni, usaha tersebut berusaha membuat umat Islam menjadi sosialis.⁹⁰ Pihak gerakan Darul Islam ini juga dengan jelas dapat dilihat kekhawatiran lasykar Islam terhadap integrasi mereka kedalam tubuh TNI. Sejak Amir Syarifuddin menjadi Menteri Pertahanan, semua perwira tentara Republik adalah anggota sayap kiri, dan dengan demikian, kemungkinan Sabilillah dan Hizbulah diterima untuk masuk TNI sangat tipis karena kurangnya pendidikan para lasykar tersebut juga dikhawatirkan, bahwa TNI hanya akan mengambil senjatanya saja dan kemudian mereka dipulangkan ke tempat masing-masing.⁹¹

Oleh karena menurut pandangan orang-orang Masyumi, pada waktu itu perjuangan ummat Islam tertindas sekali dalam kekuasaan politik disebabkan kekuasaan tentara dibawah pimpinan sayap kiri⁹² maka untuk memperkuat bagian ketentaraannya pada akhir April 1947 diadakan Konferensi Sabilillah seluruh daerah Priangan.

Hasil keputusan konferensi Sabilillah daerah Priangan diantaranya:

⁹⁰Tentang "Inspectorat Perdjoangan" . A.H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas*. Jilid 1, hal. 148.

⁹¹Holk H. Dengel, *Kartosuwiryo dan Darul Islam*, 1995.

⁹²Pada waktu itu Amir Syarifuddin menjadi menteri Pertahanan

R. Oni,⁹³ sebagai Wk. Ketua Masyumi daerah Priangan dan merangkap sebagai Pejabat Pertahanan Hizbullah/Sabilillah, diangkat menjabat formatur Sabilillah Daerah Priangan dengan amanat Konferensi sebagai berikut:

1. Selambat-lambatnya dalam waktu seminggu harus menetapkan dan mengumumkan susunan Pengurus Sabilillah Daerah Priangan.
2. Dalam waktu satu bulan harus sudah dapat membubarkan Organisasi Biro Perjuangan
3. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya harus dapat mengorganisir ketentaraan yang sesuai dengan ketentaraan yang sebaik-baiknya.

Akhirnya R. Oni dalam waktu satu minggu dapat menyusun Pengurus Sabilillah Daerah Priangan, yang terdiri dari:

I. Ketua

Ketua umum : R. Oni

Ketua I : R Maskoen

Ketua II : Chaeroedin

II. Staf Umum : Zainal Mamoen

III. Keuangan : Soelaeman

IV. Staf Bagian

Pembelaan : Boesyari

Pertahanan I : R. Maskoen

Pertahanan II : Oedjoe

Penerangan dan Pendidikan : R. Oemar Hamzah dan K.H. Toha

Penyelidik : Saefoelloh

Sekretariat : Zainal Abidin dan Syamsuodin

⁹³Nama lengkapnya R. Oni adalah R.O.I.Q singkatan dari Rohani Oni Ideologi Qital.

Persenjataan	: Oeboe dan Soekar
PMI	: Abdoel Salam
Pendidikan Keterangan	: Endjoe

V. Penasehat

1. Kiai Abdoel Hamid, Pangkalan
2. Kiai Badroezaman, Biroe Tarogong Garut

Dengan keputusan tersebut, terutama dengan tujuan untuk membubarkan Biro Perjuangan dalam usahanya menyatukan organisasi-organisasi perjuangan dalam satu komando, ternyata segala usaha yang keluarnya dari pihak sayap kiri dipandang sebagai jalan untuk menindas dan meniadakan Hizbullah/Sabilillah, bahkan lebih buruk lagi yakni untuk memasukan barisan ummat Islam dibawah pimpinan sayap kiri. Usaha Biro perjuangan pun dianggap oleh mereka atas kebijakan Amir Syarifuddin sebagai pimpinan sayap kiri

Sejak kepemimpinan dipegang oleh R. Oni efektifitas organisasi Sabilillah dalam melebarkan sayapnya dalam hal ketentaraan, lebih mampu mengembangkan sayapnya. diantaranya dengan mendirikan SKD. (Sabillah Keamanan Daerah) di tiap-tiap Desa.

Ketegangan ini lebih meruncing setelah Persetujuan Renville dilakukan, hal mana akhirnya menyebabkan Pasukan Sabillah berubah tujuan: Pertama, oleh karena tidak menyetujui politik yang dilakukan pemerintah dengan mengadakan Persetujuan Renville, bagi kalangan Masyumi Jawa Barat merupakan alasan yang kuat untuk

melaksanakan cita-citanya mendirikan negara dengan dasar agama Islam. Kedua, oleh karena menurut pandangan TNI dan pemerintah RI sudah terlalu banyak dipengaruhi pihak sayap kiri.

Pada tanggal 21 Juli 1947 tengah malam mulailah pihak Belanda melancarkan agresi militer yang pertama⁹⁴. Situasi yang kacau pada saat itu yang diakibatkan oleh agresi militer Belanda membuat Kartosoewirjo lebih memfokuskan perjuangannya.

Pada bulan Agustus 1947, Sutoko, yang berwenang atas masalah pertahanan, membentuk Dewan Mobilisasi Oemat Islam Indonesia di Priangan yang anggotanya terdiri dari Masyumi, GPII, Hizbullah, Sabilillah dan organisasi Masyumi lainnya. Bagi Kartosoewirjo, langkah ini hanya taktik baru dari golongan sayap kiri untuk membatasi kemandirian organisasi Islam.⁹⁵

Dalam suatu rapat Masyumi di Garut, yang dipimpin oleh Kartosoewirjo sendiri dan di mana semua organisasi yang bergabung dalam Masyumi harus mengirimkan wakilnya, diputuskan, bahwa Masyumi cabang Garut diganti namanya menjadi Dewan Pertahanan Oemat Islam (DPOI). Organisasi ini direncanakan untuk memperdalam dan mengkoordinasikan perjuangan masyarakat Islam setempat melawan Belanda. Reorganisasi perjuangan gerilya dirasakan perlu mengingat keadaan, dalam tiga minggu sesudah mereka melancarkan aksi militer besarnya, apa

⁹⁴George Mc Turnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi Di Indonesia*, 1995, Holk H. Dengel, 1995.

⁹⁵Kartosoewirjo juga menjadi ketua DMOI dan wakil ketua Dewan Pertahanan Daerah Priangan, *Dokumen Sedjarah Militer AD*, 1952, hal. 10-11.

yang disebut aksi polisionil pertama, Belanda menduduki kota-kota utama di Priangan, seperti Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Menyolok bahwa dalam pembentukan dewan ini, Kartosoewirjo secara tegas telah menyebutkan masyarakat Islam.

Ketika pada akhir tahun 1948 Belanda juga menyerang Malangbong dan membakar Suffah yang terletak di Cisit, beberapa kilometer di luar kota Malangbong di jalan yang menuju Wado, Kartosoewirjo mulai melakukan perang gerilya dan sejak itu terus berpindah tempat dari daerah satu ke daerah yang lain. Mula-mula keluarganya turut menemaninya. Sayangnya dalam serangan Belanda atas Malangbong, juga seluruh perpustakaan Kartosoewirjo dengan semua catatan pribadinya terbakar habis bersama suffah itu. Menurut Dodo Mohammad Darda, tetapi ada keanehan dari peristiwa penyerangan Belanda terhadap Institut Suffah tersebut, semua bangunan termasuk masjid yang terbuat dari kayu jati hangus terbakar, tetapi mimbar untuk khatib tidak hangus bahkan ketika diangkat mencederai dan ada yang mati tertimpa mimbar tersebut.⁹⁶

Dengan ditanda-tanganinya Persetujuan Renville (17 Januari 1948) antara pemerintah Republik dengan Belanda. Dimana pada persetujuan tersebut berisi antara lain gencatan senjata dan pengakuan garis demarkasi van Mook. Sementara pemerintah RI harus mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia, maka Republik harus mengosongkan tempat-tempat penting yang strategis bagi pasukannya di

daerah-daerah yang dikuasai oleh pasukan Belanda, dan semua pasukan harus ditarik mundur ke Jawa Tengah.⁹⁷ Wilayah RI tinggal Yogyakarta dan 8 keresidenan berdasarkan Persetujuan Renville. Bung Hatta juga sedih Persetujuan Renville menyebabkan Jawa Barat di-tinggalkan TNI. Hatta menilai hijrah TNI akibat uiaah Perdana Menteri Amir Syarifuddin yang tanpa pikir panjang menyerahkan Jawa Barat begitu saja kepada Belanda.⁹⁸ Dan begitu sekitar 35.000 tentara Divisi Siliwangi meninggalkan Jawa Barat⁹⁹, sehingga daerah-daerah yang telah ditinggalkan menjadi daerah *vacum of power* (kosong kekuasaan). Dan kemudian pihak Belanda yang menguasai daerah koloninya dengan mengokohkan berdirinya negara-negara “boneka” buatannya sendiri. Bukan hanya Dr. Moh. Hatta, Letnan Jendral Oerip Soemohardjo pun sangat kecewa dengan hal ini, sehingga akhirnya ia mengundurkan diri dari TNI¹⁰⁰.

Mundurnya RI ke Jogja sebagai konsekwensi logis dari Persetujuan Renville yang mengakui bahwa Jawa Barat bukan lagi daerah Republik. Karena persetujuan ini Tentara Republik resmi “Divisi Siliwangi” mematuhi ketentuan-ketentuannya. Hal yang berbeda dengan pasukan gerilya Hizbullah dan Sabilillah bagian yang

⁹⁶Wawancara dengan Dodo Mohammad Darda pada tanggal 16 April 2001 di Malangbong. Kejadian semacam itu sering menjadi bahan ceritera, yang menunjukkan suatu keajaiban tertentu. Hal ini merupakan suatu mitos yang selalu berkeimbang di tengah masyarakat.

⁹⁷Ide Anak Gede Agung, *Renville*, 1983,

⁹⁸M. Natsir, ‘Politik Melalui Jalur Dakwah, *Memoar*, hal., 93.

⁹⁹George Mc, Turnan Kalin, 1995.

¹⁰⁰Ben Anderson, 1988.

cukup besar dari kedua organisasi gerilya Jawa Barat (lebih dari 4000 personil), menolak untuk mematuhi¹⁰¹.

Selain Sabilillah yang telah menolak meleburkan diri kedalam tubuh TNI dan tetap tinggal di Jawa Barat, masih terdapat beberapa Satuan Hizbullah di daerah Cirebon dibawah kepemimpinan Agus Abdullah, di Cicalengka dibawah pimpinan Atjeng Kurnia, dan di Balubur Limbangan di Bawah pimpinan Zainal Abidin yang mengambil langkah yang sama. Satuan-satuan Sabili'llah yang berada di daerah Wanaraja dan Garut di bawah komando R. M. Enoch¹⁰² dan di daerah sekitar Gunung Cupu, sebelah utara Tasikmalaya dibawah komando R. Oni¹⁰³.

Situasi yang kacau akibat agresi militer kedua Belanda, apalagi dengan ditandatanganinya Persetujuan Renville antara pemerintah Republik dengan Belanda.¹⁰⁴ Di mana pada persetujuan tersebut berisi antara lain gencatan senjata dan pengakuan garis demarkasi van Mook. Tempat-tempat penting yang strategis bagi pasukannya di daerah-daerah yang dikuasai pasukan Belanda harus dikosongkan, dan semua pasukan harus ditarik mundur karena persetujuan ini, Tentara Republik resmi dalam Jawa Barat, Divisi Siliwangi, mematuhi ketentuan-ketentuannya. Tentara

¹⁰¹ Segera setelah persetujuan Renville, pada tanggal 30 Januari 1948 R. Oni berangkat ke Puteuyunggal dekat Garut untuk berunding dengan Kartosoewirjo tentang masalah situasi politik dan militer dewasa itu. Keduanya sepakat, bahwa pasukan-pasukan Islam harus tetap berada di Jawa Barat untuk melanjutkan perjuangan bersama-sama dengan rakyat melawan Belanda dan "anggota-anggota Sabilillah dan Hizbullah yang turut mengundurkan diri harus dilucuti senjatanya dengan damai atau dengan paksa".

¹⁰² R. M. Enoch adiknya Ibrahim Adjie

¹⁰³ C. Van Dijk, 1983. Holk H. Dengel, 1995. Wawancara dengan H. Maskur pada tanggal 15 Juli 2001 di Singapura.

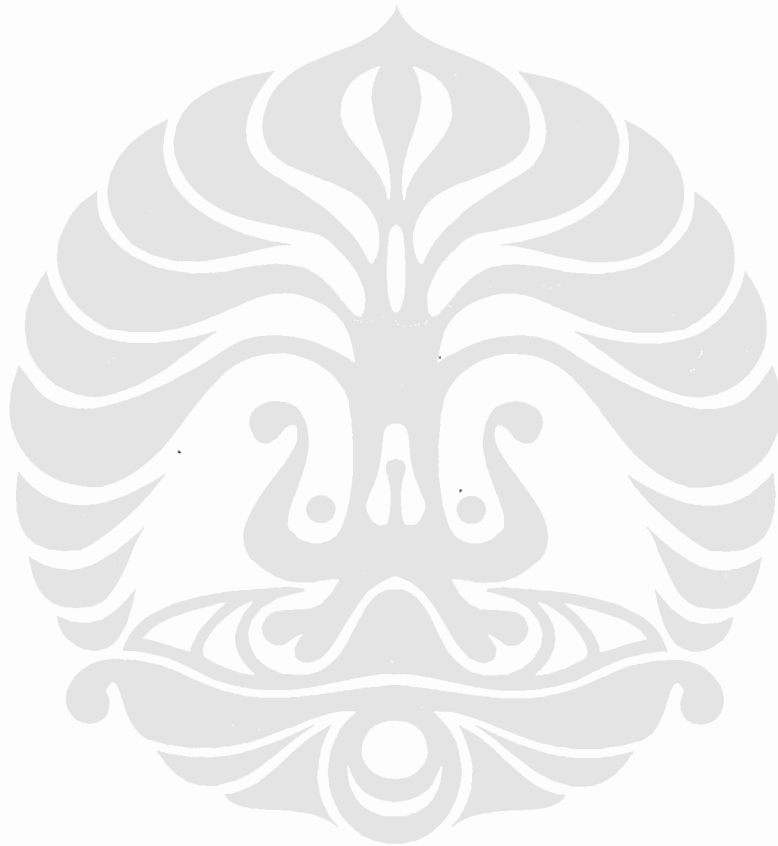
¹⁰⁴ Idr Anak Agung Gde Agung. *Renville*, 1991.

Belanda telah menguasai Bandung, Garut dan Tasikmalaya. Salah satu Partai yang menolak Persetujuan Renville adalah Masyumi, dengan demikian semua Pengurus maupun yang dicurigai sebagai anggota Masyumi tidak aman dari serbuan Belanda. Dan banyak ummat Islam yang terbunuh akibat bentrok dengan Belanda.

Sebagai akibat persetujuan Renville, perpecahan antara Kartosoewirjo dan Masyumi menjadi definitif dan tidak terhindarkan lagi. Walaupun menentang persetujuan itu sendiri, segera sesudah penandatanganan persetujuan Renville, Masyumi menjadi partai pemerintah, dan dengan demikian turut bertanggung jawab akan pelaksanaan persetujuan itu dan terpaksa dengan sendirinya mematuhinya. Karena itu tak dapat mereka mengikuti Kartosoewirjo dalam hal ini.

Untuk menentukan tindakan selanjutnya R. Oni selaku ketua Pimpinan Sabilillah, pada tanggal 30 Januari 1948 meninggalkan daerah Tasikmalaya dan berangkat ke daerah Garut untuk mengadakan pertemuan dengan Kartosoewirjo untuk membicarakan situasi politik dan militer dewasa itu. Langkah pertama menuju pembentukan Tentara Islam Indonesia diambil justru sebelum penarikan mundur Tentara Republik ke Jawa Tengah. Keputusan yang diambil dalam pertemuan itu: Pertama, Sabilillah tidak akan turut hijrah. Kedua Anggota Hizbullah yang akan turut berhijrah, harus diminta senjatanya. Bila tidak mau menyerahkannya, harus dilucuti dengan kekerasan. Ketiga Untuk menentukan sikap dan merundingkan bagaimana

cara meneruskan perjuangan ummat Islam selanjutnya, diadakan konferensi Pimpinan Ummat Islam seluruh Priangan bertempat Cisayong.¹⁰⁵



¹⁰⁵Dinas Sejarah Militer AD, Tentara & Teritorium III . *Petikan dari Dokumen-dokumen, Mengenai, Negara Islam Indonesia* , Jilid 1, 1951. hal. 8

BAB V

PEMIKIRAN DAN AKSI S.M. KARTOSOEWIRJO

V.1. Pemikiran Masa Muda.

Mengingat bahwa Darul Islam mengklaim dirinya sebagai ahli waris pemikiran H.O.S Tjokroaminoto yang bercita-cita untuk mewujudkan tegaknya pemerintahan Islam yang demokratis, dan sekaligus merupakan kelanjutan dari pemikiran sikap politik Hijrah PSII.¹ Pada tahun 1949, tepatnya pada tanggal 7 Agustus, Indonesia mengalami suatu perubahan politik besar-besaran. Yaitu dengan diproklamasikan berdirinya "Negara Islam Indonesia (NII)", atau yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai DI/TII, oleh Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Cisampang desa Cidugaleun, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sambutan terhadap NII yang diproklamirkan S.M. Kartosoewirjo ini segera menjadi kekuatan perekat baru bagi masyarakat Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan yang sedang menyusun alasan untuk berpisah dari Republik Indonesia. "Pemberontakan" bersenjata yang sempat mengurus habis logistik angkatan perang Republik Indonesia ini bukanlah pemberontakan kecil, bukan pula pemberontakan yang bersifat regional, bukan "pemberontakan" yang

¹Wawancara dengan Dodo Mohamud Darda pada tanggal 16 April 2002 di Malangbong

muncul karena sakit hati atau kekecewaan politik lainnya, melainkan karena sebuah "cita-cita", sebuah "obsesi" yang diilhami oleh ajaran-ajaran Islam.²

Pemikiran S.M. Kartosoewirjo tentang Negara Islam didasarkan pada proses mula terbentuknya masyarakat Islam pada masa Rasulullah SAW di awal abad pertama Hijriyah. Pada saat itu, keragaman etnis, budaya, agama dan bahasa sangat beragam sama seperti ketika Indonesia memulai revolusi nasional pada pertengahan paruh tahun 1945. Selain itu sebagai tanggapan terhadap kecenderungan republik ke arah sekuler, sekaligus juga merupakan upaya mewujudkan cita-cita teologis Negara Islam. Pergerakan Islam yang dikenal dengan nama lain Darul Islam ini berpusat di Jawa Barat dengan meluaskan pengaruhnya hingga ke Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. S.M. Kartosoewirjo adalah seorang pemimpin pergerakan umat Islam yang semenjak zaman Hindia Belanda telah lama (mulai 1929-1942) mencita-citakan berdirinya suatu negara Islam di Indonesia. Ia telah dari sejak awal mengumpulkan para pengikutnya untuk melawan Belanda dan berjuang tidak secara ko-operatif dan tidak melalui parlemen (volksraad) atau partai politik yang pernah dimasukinya yaitu PSII maupun Masyumi.

Perbedaan yang paling mendasar antara Masyumi dengan Darul Islam yaitu bahwa Masyumi bercita-cita mewujudkan Nasionalisme yang didasarkan atas Islam. Ideologi ini merupakan gabungan ideologi "kebangsaan yang merdeka" dengan "modernisme Islam", karena modernisme Islam tidak menolak Nasionalisme

²Al Chaidar, et.al., *Federasi atau Disintegrasi : Telaah Awal Wacana Unitaris versus Federalis Dalam Perspektif Islam Nasionalisme dan Sosial Demokrasi*, 2000, hal. 222-223.

sepanjang tidak bertentangan dengan atau harus dijiwai oleh Islam. Masyumi tidak berbicara mengenai "Negara Islam" sebagaimana Darul Islam. Langkah strategis yang dilakukan Masyumi adalah mewujudkan nilai-nilai Islam dalam musyawarah-musyawarah lembaga-lembaga politis tertinggi untuk meraih supremasi Islam dengan landasan konstitusional negara yang menjadi justifikasi berlakunya Islam di Indonesia. Corak gerakan Masyumi adalah musyawarah dengan kelompok-kelompok non Islam. Tujuan akhir bagaimana terciptanya Islamisasi negara dengan kata lain negara Islami berdasarkan konsensus Nasional Pancasila dan UUD 1945.³

Negara Islam adalah sebuah wujud kehidupan yang menjadi cita-cita banyak ideolog Muslim di mana pun di dunia ini. Namun, upaya perwujudannya selalu mengalami kegagalan. Sehingga, sebagaimana terakui di dunia Barat sekalipun, kekuasaan Islam adalah lambang kemajuan yang sangat cemerlang dalam dunia politik.

Dalam Islam pengertian kekuasaan ini menjadi sesuatu yang inheren dalam ajaran-ajarannya yang diperoleh lewat suatu sosialisasi penyadaran dengan menggunakan Al Qur'an dan sejarah Nabi Muhammad SAW yang bermuara pada penaklukan kota Mekkah di bawah manajemen kekuasaan orde Islam. Kekuasaan, bukanlah sebuah kenikmatan yang harus dihirup, melainkan suatu tanggung-jawab maha berat yang harus dipikul dan mempertanggung-jawabkannya di hadapan Allah yang nota bene, secara demokrasi, adalah di hadapan rakyat banyak secara terbuka

dan jujur. Berkuasa bukanlah memegang kendali politik sambil menikmati sumber daya dengan cara menindas, melainkan terkandung pertanggung-jawaban politik yang berat di dalamnya. Oleh karenanya, politik, sebagai salah satu aspek budaya Islam, berkembang dalam sebuah diskursus antara ketaqwaan (tunduk pada perintah atau kekuasaan suci, *divine imperatives*) dan praktek struktur kekuasaan. Islam memandang kekuasaan politik yang stabil ditandai oleh sebuah kepercayaan awal bahwa "masyarakat Muslim harus diperintah oleh Muslim yang terbaik". Persamaan moral seluruh pemeluk Islam dan perlunya masyarakat diperintah menurut hukum Tuhan menjadi cita-cita bagi semua pemikir Islam, bagaimanapun sulitnya untuk menyesuaikannya dengan realitas politik yang ada. Bagaimanapun Islam telah melakukan suatu dekonstruksi, dalam pengertiannya yang umum, terhadap banyak premis pengetahuan yang berkembang selama ini.⁴

Dalam perkembangannya sejak awal pergerakan kebangkitan nasional Indonesia, kekuatan logika Islam dalam lapangan politik adalah sangat besar pengaruhnya dan sangat beragam. Ada yang hanya sebatas memihak, ada yang juga sebatas setuju belaka bahkan ada yang sangat menentang. S. M. Kartosoewirjo adalah tokoh yang sangat militan dalam intensitas perjuangan untuk mendirikan negara yang berdasarkan ideologi Islam. Meski ketika itu perdebatan tentang ideologi Islam belum final, ia telah menerjemahkan nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam bentuk-bentuk praktek birokrasi dan hukum negara.

⁴Dwi Purwoko, *Negara Islam?*, 2001, Bachtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik di Indonesia*, 1998.

Dalam bulan Oktober tahun 1928, Kartosoewirjo menjadi peserta kongres pemuda Indonesia di Batavia⁵ dimana dia mewakili partainya. Di dalam kongres ini pandangan Kartosoewirjo tentang hakikat pendidikan pada masa yang akan datang sangat bertentangan dengan pendapat⁴ ketua rapat kongres Soegondo. Kartosoewirjo menegaskan bahwa dasar-dasar pendidikan harus berlandaskan pada ajaran Islam. Soegondo memberikan jawaban padanya, bahwa sikap yang demikian itu dapat membahayakan persatuan bangsa. Ketika Kartosoewirjo masih juga membela pandangannya secara terperinci, Soegondo memotongnya dengan memukul palu di atas mimbar, dan dengan demikian debat sengit itu diakhiri.⁶ Juga Soenarjo yang mewakili dalam kongres tersebut heran atas sikap Kartosoewirjo yang tanpa kompromi, yang bagi orang Jawa hal itu tidak lumrah.⁷

Kartosoewirjo pada tahun 1929 menjadi redaktur *Fadjar Asia* dan mulai menerbitkan artikel-artikel, yang mula-mula hanya ditujukan untuk menentang bangsawan-bangsawan Jawa yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Di dalam artikel-artikelnya mulai terlihat sikapnya dan pandangan-pandangan politiknya yang radikal. Dia juga menyerang Sunan Solo, ketika Sunan ini mengadakan resepsi ulang tahunnya yang ke 64 dan hanya memperhatikan wartawan-wartawan Belanda. Tentang Sunan dia menulis sebagai berikut :

⁴Abdul Rashid Moten, *Ilmu Politik Islam*, 2001.

⁵Almaddani G. Martha. et.al., *Pemuda Indonesia Dalam Dimensi Perjuangan Bangsa*, 1984, hal. 76. Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, *Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun*, 1982, hal. 36.

⁶R.Nalanan, *Arnold Mononutu. Potret seorang patriot*, 1981, hal. 82

⁷Holk. H. Dengel, *Darul Islam dan Kartosuwirjo, Angan-angan yang gagal*, 1995, hal. 10

Rasa kebangsaan ta'ada, ke Islaman poen demikian poela halnja. kandatipoen ia menoeoet titelnja mendjadi kepala agama Islam, agama kebangsaan kita di tanah toempah darah ini. Bangsanja dibelakangan dan bangsa lain diberi hak jang lebih dari batas..., Jang soedah terang dan njata ialah : Boekan karena tjinta bangsa dan tanah air..., melainkan karena keperloean sendiri belaka, keperloean jang bersangkoetan dengan kesoenanannja.⁸

Selanjutnya dia menulis, bahwa tidak ada perbedaan, siapa yang berkuasa, apakah itu pemerintahan sendiri atau pemerintahan bangsa lain, hasilnya sama saja, yaitu bahwa rakyat tidak memiliki kemerdekaan.

Semendjak zaman keradjaan Padjadjaran sampai kezaman Browidjojo, maka jang boleh dianggap merdeka tjocma radjanja sadja. Tetapi rakjatnja sedjak zaman itoe sampai ini waktoe tetap tinggal dalam gelombang perhambaan dan perhinaan jang serendah-rendahnja dan sodalam-dalamnja.⁹

Secara politik PSIHT selalu berupaya untuk membela rakyat dan bangsanya, agar supaya kelak di kemudian hari Indonesia menjadi Indonesia merdeka dan agama Islam menjadi agama nasional bangsa Indonesia, demikian tulis Kartosoewirjo.¹⁰

Nasionalisme dalam Islam boekan satoe sport atau satoe peloeang waktoe dan jocga boekan satoe tempat kesenangan melainkan adalah socatu kewadajiban jang berat ataoe ringannja haroes ditanggungan.¹¹

Kartosoewirjo melihat saatnya telah tiba, dimana rakyat telah terjaga dari tidurnya selama berabad-abad lamanya dan sadar akan kewajiban dan haknya serta sama-sama menemukan suatu persatuan yang berjuang untuk kepentingan rakyat¹². Dia mengeritik, bagaimana dengan cepatnya seseorang dituduh komunis,¹³ termasuk anggota *PMI* (Pemoeda Moeslim Indonesia) yang dituduh sebagai gerakan komunis

⁸S.M. Kartosoewirjo, "Sambil Laloe" *Fadjar Asia*, 16-1-1929.

⁹S.M. Kartosoewirjo, "Ra'iat dan Nasibnja". *Fadjar Asia*, 12-2-1929

¹⁰S.M. Kartosoewirjo, "Bahaja jang mengantjam Roeh dan Djiwa Ra'iat Djadjahan", *Fadjar Asia*, 14-2-1929.

¹¹S.M. Kartosoewirjo, "Barisan Moeda". *Fadjar Asia*, 6-2-1929

¹²S.M. Kartosoewirjo, "Moelai sadar akan Hak2-nja", *Fadjar Asia*, 16-2-1929

yang dapat membahayakan keamanan dan tata tertib. Namun Kartosoewirjo terhadap kesulitan yang dihadapi oleh PMI itu harus disikapi dengan kesabaran, keteguhan dan prinsip-prinsip Tauhid sambil mengutip ayat Al Quran dan Riwayat Nabi Muhammad SAW:

Djangan P.S.I.I., sedang anak2nja, seperti S.L.A.P. dan P.M.I. sadja poen mendapat gangoean jang seolah-olah keloea dari batas, lebih dari mestinja. Membikin pergerakan dihalang-halangi, mengadakan vergadering dikatakan ini dan itoe! Mengadakan pertemoean poen diintai-intai poela. Ditangkap, ditahan dan dijabloskan diteroengkoe, dan perkara.... Belakang, katanja. Memang begitoealah nasib kita anak djadjahan! Kesedjahteraan dan keamanan djaoeh dari pada kita! Oentoeng malanglah jang dapat kita dapat! Bockan perkara jang loear biasa, melainkan kedjadian jang sematjam itoe ialah kedjadian jang biasa. Soengoeh2 tidak mengherankan kita mendapat rintangan dan halangan!

Riwayat doenia menjatakan, bagaimana Nabi kita Mochammad c.a.w. menderita kehinaan, tjatji makian, bentjana d.l.l. dp. Orang2 jang ta' socka dan ta' setoedjoe dengan Rasoeleollah dan agama Islam. Semoeanja itoe bagi kita kaoem pergerakan hanjalah socatoe oedjian, sehingga mana ketegoechan Iman kita dan dalam dan kekokohan Tauhid kita dan lagi kesetiaan kita terhadap kepada agama kita, agama Islam, tidak perloe kita takoet2, tidak perloe kita ingkar dari pendirian kita, malahan berdosalah mereka jang berlakoe demikian itoe. Boetinja. Firman Toehan '(ja ajeohan nnaasoe 'iitaqoe rabbakoem)' ertinja: "Hai manoesia, takoetlah akan Toehanmoe!!!

Djanganlah kita perdoeli kepada orang2 jang sengaja atau tidak sengadja (sebagai perkakas) merintang, menghalang-halangi dan berchianat kepada kita, sebab mereka itoe toch tidak akan mendengar naschat jang baik, tidak akan dapat penerangan tjahja Ilahi dan hatinja poen tertoeoep poela boeat memahami jang haq - Sifatnja orang2 jang demikian itoe soedah diterangkan dan dijatakan oleh Allah dalam Kitabnja jang soetji, Al-Qoer'anoel Hakim, jaitoe '(oemoem, boekmoem 'oenjoem fahoem la fardji' oer), ertinja: "(Mereka itoe adalah orang2 jang pekak (bedeg, Dj.), bisoe (tidak pandai berkata) dan boeta)." Dan lagi '(oemoem, boekmoem 'oenjoem fahoem la ja'qiloen), maksoednja: "(Mereka itoe adalah orang2 jang pekak (doengoe), bisoe dan boeta dan tidak ber'aqal).¹⁴

Akan tetapi keprihatinannya terhadap masyarakatnya Kartosoewirjo tidak lupa memperhatikan nasib para petani kecil,

"jang menjewakan tanahnja kepada peroesahaan Barat ataoe pada kapitalis priboemi".¹⁵

¹³S.M. Kartosoewirjo, "Satoe Bockti gampangnja Hak Ra'iat djadjahan dilanggar ataoe terlanggar". *Fadjar Asia*, 23-2-1929

¹⁴S.M. Kartosoewirjo, "Halangan P.M.I. Solo", *Fadjar Asia*, 28-2-192

¹⁵S.M. Kartosoewirjo, "Keberatan Ra'iat", *Fadjar Asia*, 27-4-1929

Dia juga marah sekali atas kenaikan pajak sawah hingga 90%. Dia juga mengeritik kerja rodi (Heerendienst) yang diganti dengan pembayaran tahunan, hanya karena tidak ada lagi lapangan kerja, akibat krisis ekonomi di Hindia Belanda pada masa itu.¹⁶ Ketika beberapa petani di Lampung yang diusir dari tanah mereka oleh "sekelompok kapitalis asing", petani ini meminta bantuan kepada partai, Kartosoewirjo menulis tentang itu

Orang-orang Lampoeng dipandang dan diperlakoean sebagai monjet belaka, ialah monjet jang dioesir dari sebatang pohon ke sebatang pohon lainnja.¹⁷

Kemanakah ra'iat mesti mentjari dan memperoleh perlindoengan sebagaimana haroesnja ? Katanja ada Madjelis ini dan Madjelis itoe, ada Volksraad, ada Provinciale Raad dan Madjlis Negeri (Tweede Kamer) dan dan segalaanja boeat melindoengi ra'iat boeat menceribkan keamanan dan keadilan. Mana dia ?? Tjoema omong belaka ?? Boekan kepentingan kita.¹⁸

Dia mengajak para buruh untuk memperbaiki keadaan mereka :

"Djanganlah berkeloeih-kesah ! Djanganlah meminta-minta ! Djanganlah tinggal diam sadja ! Kalaoc takoet mati djanganlah hidoep ! Kalaoc hendak hidoep, djanganlah takoet mati."¹⁹

Kemerdekaan bangsa Indonesia hanya bisa dicapai dengan pengorbanan yang besar, demikianlah keyakinan Kartosoewirjo pada saat itu :

Sebab kemerdekaan tanah air tidaklah sedikit harganja, jang oleh karena harganja, tentoc bakal memakan korban jang loear biasa.²⁰

Karena artikel-artikel itu, Kartosoewirjo mendapat banyak musuh, tapi justru bukan dipihak penguasa kolonial, melainkan di pihak bangsanya sendiri, terutama dikalangan kaum nasionalis yang netral agama²¹.

¹⁶S.M. Kartosoewirjo, "Nasib Ra'iat Tjitjoeroek", *Fadjar Asia*, 11-5-1929

¹⁷S.M. Kartosoewirjo, "Orang Lampoeng boekan Monjet tetapi Manoesia belaka!", *Fadjar Asia*, 10-6-1929.

¹⁸S.M. Kartosoewirjo, "Mana Hak Ra'iat ?", *Fadjar Asia*, 8-6-1929

¹⁹S.M. Kartosoewirjo, "Soal Kaoem Boeroeh dan Madjikan", *Fadjar Asia*, 3-6-1929.

²⁰S.M. Kartosoewirjo, "Perajaan 1 Mei", *Fadjar Asia*, 6-5-1929

Perbedaan pendapat antara kaum nasionalis Islami dan nasionalis lebih jelas nampak pada tahun 1928/29, dan yang lebih menonjol lagi ketika PNI lebih dominan di dalam pergerakan kebangsaan Indonesia dan di lain pihak mundurnya Partai Sarekat Islam Hindia Timoer. Ketika kemunduran partai tak dapat dibendung lagi, Kartosoewirjo meluapkan kekecewaannya dan menyerang para Nasionalis sekuler terutama mereka yang menjadi anggota PNI²². Maka dia dalam bulan-bulan terakhir jabatannya sebagai redaktur dan wakil pimpinan *Fadjar Asia*²³ menyerang kaum Nasionalis netral agama. Artikel-artikelnya yang paling tajam tidak lagi ditandatangani dengan nama aslinya, melainkan dengan nama samaran "Arjo Djipang."²⁴

Sasaran kritiknya adalah pimpinan redaksi Bintang Timoer, Parada Harahap. Koran Bintang Timoer disebutnya reaksioner, Parada Harahap sendiri disebut sebagai penjual Bangsa Indonesia²⁵

Soeatoc soe'al kebangsaan jang mempoenjai kepentingan bagi sekalian ra'iat Indonesia oemoemnja dan kepada kaoem pergerakan pada choesoesnja teroetama bagi kaoem pergerakan jang berdasarkan semata-mata kepada kejakinan, jang biasanja dinamakan "*Nationalisme* atau *Indonesische Nationalisme*". Jang katanja dalam dewasa jang achir-achir ini soedahlah berkobar-kobar demikianlah kata Ir. Sockarno, djempolan partai National Indonesia- dalam hati sanoebari

²¹Holk H. Dengel, 1995, hal. 15.

²²J. Ingleson, *Jalan ke pengasingan : Pergerakan Nasionalis Indonesia tahun 1927-1934*, 1983, hal. 142.

²³Pada tanggal 30 April 1929, Kartosoewirjo menjadi wakil Kepala Redaksi dan penguasa penuh harian tersebut (*Plaatsvervangend Hoofdredacteur tevens Procuratiehouder*), *Fadjar Asia*, 30-4-1929.

²⁴Arjo Djipang atau disebut juga Arjo Panangsang adalah Adipati (Bupati) dari Jipang yang terletak dekat Cepu, yang pada pertengahan abad ke 16 termasuk daerah kekuasaan Kerajaan Demak. Arjo Djipang membunuh penguasa yang kedua dari Demak yaitu Sunan Prawoto karena dendam atas kematian ayahnya. Arjo Djipang terbunuh oleh Djoko Tingkir atas permintaan Ratu Kalinyamat. Kartosoewirjo yang mengaku keturunan dari Arjo Djipang dari garis ayah dan Ratu Kalinyamat dari garis Ibu. Wawancara dengan Dodo Mohamad Darda 16 April 2002 di Malangbong, R. Atmodarminto, *Babad Demak Dalam Tafsir Politik*, 2000.

²⁵S.M. Kartosoewirjo (dengan nama samaran Arjo Djipang) "Tipoe Moesilihat", *Fadjar Asia*, 4-6-1929.

sekalian ra'iat Indonesia, teristimewa dalam kalboe pemoeda-pemoeda jang terpeladjar atau setengah terpeladjar.

Pembatja sekalian tentoelah soedah mengetahoei akan nama Parada Harahap alias P.D., ialah singkatan dari perkataan P(endjoeal) H(india), *directeur-hoofredacteur* dari soerat chabar harian Bintang Timoer, soeatoe soerat chabar "Indonesia" begitoelah kalau kita tjuma melihat dari locar sadja dan tidak soeka mendalam2kan penjelidikan kita akan hal itoe jang katanja *Liberaal-Nationalistisch*, ja'ni beralaskan kepada tjinta Bangsa dan Tanah Tocmpah darah jang sama sekali tidak bersangkoetan dengan agama mana atau apa poen djoege. Walapoen soerat chabar itoe soedah terang halocannja, tegasnja haloean kanan (*rechtscege partij*) alias *reactionnair*, tetapi sebagai djoege ketju atau perampok terdiri dari pada beberapa orang jang achirnja mendjadi sekawan bangsat atau perampok, denikian poela halnja dengan soerat chabar Bintang Timoer itoe. Terlebih2 kentaranja haloeannja jang sangat berbahaja bagi pergerakan National Indonesia itoe, ketika ia (si P.D.) telah sampai dari Poelau Pertja Timoer dimana dia mendjoeal "diri" dan "peroesahaan" kepada Kemodalan asing ialah malahan Bangsa Indonesia poen bila maoe bakal didjoeal kepada golongan si angkoro moerko, jang memang hendaknja akan melinjapkan atau sekocrang2 akan berdaja-oepaja hendak melenjapkan pergerakan2 anak Indonesia jang menocroet kejakinannja "boleh djadi" akan berbahaja bagi dirinja, bocat meroegikan peroesahaannja, mengoerangkan oentoengnja, mengantjam keamanan dan ketertiban oemoem, dan lain2 sebagainya.²⁶

Di bidang ekonomi pemikirannya cenderung menolak sistem kapitalisme dan sistem perbankan, dapat dipastikan menimbulkan keresahan yang besar di antara para Nasionalis timbul karena artikel Kartosoewirjo mengenai bank nasional. Apa itu, tanyanya :

"jang dinamakan "national" jang tak lain melainkan bank setjara barat, bank systeem tirocan, bank jang menimboelkan kapitalisme, bank jang mendorong kita ke arah perscsatan, bank jang akan memperoleh hasil karena memoengoet rente."²⁷

Koran harian "Darmo Kondo" di Solo menulis, bahwa artikel ini menggoncangkan kaum nasionalis Indonesia dan mendidihkan darah mereka.²⁸ Darmo Kondo menganggap Nasionalisme kita ini aneh, tulis Kartosoewirjo. Dan dia melanjutkan :

²⁶S.M. Kartosoewirjo, "Tipoe Moelihat", *Fadjar Asia*, 4-6-1929

²⁷S.M. Kartosoewirjo, "Penjiar Perchabaran Palsoe", *Fadjar Asia*, 22-6-1929.

²⁸S.M. Kartosoewirjo, "Berckor Pandjang", *Fadjar Asia*, 2-7-1929.

"Kebangsaan kita dianggap aneh oleh Darmo Kondo. Djanganlah kira kalaoe kita kaoem kebangsaan jang berdasarkan kepada Islam dan ke Islaman tidak berangan-angan ke Indonesia merdeka. Tjita-tjita itoe bukan monopolinja collega dalam Darmo Kondo. Dan lagi djangan kira, bila kita orang Islam tidak senantiasa berocsa dan ihtiar sedapat-dapatnja oentoek mentjapai tjita-tjita kita, socpaja kita dapat menguasai tanah air kita sendiri. Tjoema perbedaan antara collega dalam Darmo Kondo dan kita ialah, bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia bagi Nasionalisme jang dinjatakan oleh redaksi Darmo Kondo itoe adalah poentjaknja jang setinggi-tingginja, sedang kemerdekaan negeri toempah negeri toempah darah kita ini bagi kita hanjalah satoe sjarat, socatue djembatan jang harus kita laloei, oentoek mentjapai tjita-tjita kita jang lebih tinggi dan lebih moelia, ialah kemerdekaan dan berlakoenja agama Islam di tanah air kita Indonesia ini dalam arti kata jang selocas-loeasnja dan sebenarnja. Djadi jang bagi kita hanja satoe sjarat (midel) itoe, bagi redaksi Darmo Kondo adalah maksoed dan toejoean (doel) jang tertinggi."²⁹

Dengan demikian pengertian Kartosoewirjo tentang kebangsaan sesuai dengan pandangan Tjokroaminoto yang menulis sebagai berikut :

"Islam itoelah tjita-tjita kita jang tertinggi, sedang nasionalisme dan patriotisme itoe ialah tanda-tanda hidoep kita sanggoep akan melakoean Islam dengan selocas-loeas dan sepenoechnja. Pertama-tama adalah kita Moeslim, dan didalam ke Moesliman itoe adalah kita Nasionalist dan Patriot, jang menoeedjeo kemerdekaan negeri toempah darah kita tidak tjoea dengan perkataan-perkataan jang hebat dalam vergadering sadja, tetapi pada tiap-tiap saat bersedia djuga mendjadikan korban sedjalan apa sadja jang ada pada kita untuk mentjari kemerdekaan negeri toempah darah kita."³⁰

Pemerintah Belanda merasa khawatir akan dinamika baru di dalam pergerakan kebangsaan yang ditimbulkan oleh PNI, dan kini semakin mengambil tindakan represif yang pertama ditujukan kepada PNI. Pada tahun 1929 Kartosoewirjo masih relatif tanpa rintangan dapat mengeluarkan gagasan-gagasan politiknya dalam *Fadjar Asia*, sementara Soekarno pada akhir tahun 1928 sudah dilarang untuk menggunakan istilah-istilah seperti "Merdeka" atau "Kemerdekaan" di dalam pidato-pidatonya.³¹

²⁹S.M. Kartosoewirjo, "Roedjak Sentoel", *Fadjar Asia*, 17-7-1929

³⁰H.O.S. Tjokroaminoto, "Islam dan Nasionalisme", *Fadjar Asia*, 29-1-1929

³¹J. Ingleson, 1983, hal. 87.

Sikapnya terhadap Muhammadiyah yang menerima subsidi dari pemerintah Belanda, Kartosoewirjo menulis:

Sjahkan, maka M.D. semendjak berdirinja boekanlah soeatu perhimpoean Islam jang soeka mementingkan politiek dan tidaklah djoega soeka mendjalankannja, sebagaimana menoeeroet Islam dan ke-Islaman jang sedjati. Pada waktoc itoe pocn M.D. masih berdjabat tangan (crtinja tidak berlawanan dengan P.S.I. (doeloc C.S.I.). Tetapi berhoecboeng dengan beberapa sebab, maka M.D. makin lama makin menjaoehkan diri dari pada pergerakan politiek, bahkan lama-kelamaan M.D. bersikap anti-politiek. Inilah jang meola2 menimboelkan perpisahan antara M.D. dan C.S.I.

Ketika M.D. masih beloem kocat dan berhadapan dengan kaoem kolot (*orthodoxe Islamieten*) jang tidak moedah dikalahkannja, maka pada waktoc itoe C.S.I. dengan segala kesenangan hati membantoe M.D. dalam propagandanja dan dalam tiap-tiap aksi jang dilakoean oleh M.D. disokong P.S.I. dengan sekocat-koeat tenaga dan fikirannja, mitsalnja mendirikan tjabang-tjabang M.D. d.l.l.s. Akan tetapi setelah perpisahan antara M.D. dan P.S.I. tambah lama tambah jaoeh karena perbedaan dengan kedoea golongan itoe makin lama makin besar, maka kaoem M.D. moelai sa'at itoe melakoean tipoe-dajanja terhadap kepada P.S.I. dengan djalan propaganda anti-P.S.I.. Inilah salah satoe daripada beberapa fasal jang menjebabkan, maka P.S.I. laloc tidak maoe tjampoer dalam oeroesan M.D. jang -sesoedah poetoesan Kongres P.S.I., di Pekalongan dalam tahoen 1926 - kemoedian mendjadi "*algemeene discipline*" (1929). Ada djoega beberapa fasal lainnja oempamanja tentang *Subsidie*.

Subsidie ini tidaklah hannja terdapat dari Pemerintah sadja, tetapi djoega diperolehnja dari kaoem goela dan lain2 peroesahaan Barat jang ada di Indonesia ini. Adapoen alasan jang dikemoekakan ialah "karena Zending Kristen mendapat sokongan (*subsidie*), sedang M.D. pada waktoc itoe tidak". Dalam perkataan ataoe alasan itoe tidak boleh tidak orang haroes mengkoei bahwa Islam -begitoelah menoeeroet ma'na perkataan itoe- tidak lebih deradjatnja dari pada agama Kristen. Pendek kata dengan alasan jang sematjam itoe adalah terkandoeng soetoe pengakoean jang menoendjoekkan bahwa agama kita Islam jang Soetji dan Moelia itoe seolah-olah lebih rendah deradtnja dari pada agama Kristen. Djadi merendahkan deradjat Islam dan ke-Islaman jang tidak boleh tidak djoega akan ber'akibat merendahkan deradjat Oemmat Islam Indonesia pada choesoesnja dan oemat Islam sedoenia pada oemoemnja. Lagi poela pengakoean kerendahan deradjat bangsa dan ra'iat kita (jang oemoemnja diseboet oemmat Islam) itoe boekanlah satoe sjarat bagi kita oentoek memadjoekan ra'iat kita dengan djalan pertjaja kepada kekocatan sendiri boeat menjapai tjita2 kita boeat mengedjar Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia. Sebaliknja pengakoean itoe akan menimboekan tabi'at tiroe2an jang mendorong kita ke arah ke-Baratan.³²

Pandangan Kartosoewirjo terhadap problem-problem umat Islam di tanah jajahan, terutama ikut campurnya pemerintah Kolonial dalam mengatur kehidupan beragama, dan mengganggu ketentraman beribadah. Ia menyatakan sambil mengutip Al Quran.

"Siapakah jang lebih dhalim daripada orang jang melarangkan masjid2 Allah bahwa didzikirkan orang nama Allah didalamnya, dan berosaha akan meroeboehkan masjid2 itoe, mereka itoe seharoesnja tidak masoek ke dalam melainkan dengan ketakoetan; bagian mereka itoe di doenia kenistaan dan di achirat mendapat siksa jang hebat."

DENGAN ISLAM KITA HIDOEP DAN DENGAN ISLAM POELA KITA MATI

Tiap2 orang Islam, ataoc jang Islam hanya dalam pengakoeannja sekalipoen, mesti berani bersedia oentoek mendjadikan tiap2 koerban oentoek membela Agama Allah, Agama Islam, oentoek mendjocnjoeing deradjat sebagai oemmat, boeat mema'moerkan tanah toempah darahnja. Itoclah kewadajiban orang Islam Indonesia. Itoclah kewadajiban oemmat Islam Indonesia. Itoclah kewadajiban oemmat Islam sedoenia.³³

Semenjak tahun 1930 S.M. Kartosoewirjo memiliki pandangan bahwa pemerintahan Islam perlu ditegakkan, untuk memberlakukan hukum-hukum Islam dan memelihara ketertiban dan keadilan sosial. Reaksi dia terhadap khutbah Jumat yang disampaikan oleh ulama yang pro pemerintah Belanda berkaitan dengan bahwa ummat Islam harus mentaati pemerintah yang berkuasa dengan dalil dari Al Qur'an Surat An-Nissa ayat 59 berkaitan dengan Ulil Amri.

Kembali kepada „Oelil Amri“, jaitu pemerintah Islam, diatur setjara Islam, didjadikan oleh oemmat Islam dan bersendikan semata-mata kepada hoekoem (sjara') Islam. Perintah Allah Sblh. W.T, dalam ajat terseboet meloeloe ditoedjoeckan kepada orang2 jang beriman (Moe'miin) dan oleh karenanja, maka „minkoem“ (daripada antara kamoe) di sini bererti „daripada antara orang2 Moe'minin“. Marilah kita sekarang menjelidiki, apakah jang dinamakan orang2 jang beriman itoe, Firman Allah dalam Al-Qoeran-al-Hakim demikian:

„Innamal moe'minoenaladzina amanoe billahi, wa rasoelihi tsoemma lam jartaboe wa djahadoe biamwalihin wa amfoesihim fi sabilillah oe laika hoemoec-cadiqoen.“

Ertinja kl. begini: „Bahwasanja (jang dinamakan) orang2 jang beriman itoe (ialah) orang2 jang pertjaja kepada Allah dan kepada Rasasoellah, kemoedian tidak ragoe2 atau segan (boeat mengamalkan) kepertjajaannja itoe dan berosaha dengan keras2 (djihad) dengan harta bendanja dan dengan djiwanja pada djalan: (maka) mereka itoclah orang2 jang benar.“

Dengan keterangan jang sesingkat ini dapatlah kiranja kita masing2 memikirkan, bagaimanakah agaknja atocrannja, tjara2 dan sifat pemerintah Islam jang hanya terdiri dari orang2 Moe'minin belaka.³⁴

³²S.M. Kartosocwirjo, "Membocta Toeli", *Fadjar Asia*, 29-1-1929

³³S.M. Kartosocwirjo, "Islam Terantjam Bahaja", *Fadjar Asia*, 9-2-1929

³⁴S.M. Kartosoewirjo, "Sedikit tentang 'Ocloel Amri'", *Fadjar Asia*, 23-5-1930

Prinsip-prinsip dasar inilah yang kemudian terkristal dalam kepribadian dan pola pikir S.M. Kartosoewirjo dalam upaya menegakan pemerintah Islam, dengan demikian pemikiran dan cita-cita untuk membentuk Negara Islam Indonesia sudah tumbuh dalam dirinya semenjak awal aktif di PSIHT. Sesungguhnya alam pikiran semacam inilah yang tengah berkembang dan juga sekaligus menjadi wacana di tengah-tengah kehidupan Partai Sarekat Islam Hindia Timur. Pada saat itu H.O.S Tjokroamnito masih ada di tengah-tengah mereka walaupun bukan merupakan gerakan massa seperti pada awal-awal bangkitnya Sarekat Islam. Sekali lagi Kartosoewirjo menulis tentang "Ulil Amri" yang mengungkapkan:

...wadjiblah berdaja oepaja dan beroesaha dengan sekeras-kerasnja oentoek mengadakan atau membangoeatkan seopaja pemerintah jang sematjam itoe, agar soepaja kita tjakap mendjadi satoe oemmat jang mempoenjai hoekoem dan mendjalankan hoekoem itoe sendiri, dapat berkoeasa atas tanah toempah darah kita sendiri, pendeknja: agar soepaja kita dapat mendjalankan hoekoem sjara' Islam hingga sesempoerna-sempoernanja dalam segala oeroesan hial-ichwal kita.

Wadjib kita mengoesahakannja, karena kita ta' dapat mendjalankan hoekoem sjara' Islam dengan seloeas-locasnja, bila kita ta' mempoenjai pemerintah sendiri, jang semata-mata ta' loek-toendoek kepada hoekoem Allah"³⁵

Fakta ini memang menyebabkan Kartosoewirjo sangat konsisten untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk struktur negara dengan strategi model perjuangan "Hijrah", hingga akhirnya ia memproklamasikan NII.

³⁵S.M. Kartosoewirjo, "Lagi Tentang 'Oelil Amri'", *Fadjar Asia*, 24-5-1930

V.2. Pemikiran Politik

Tidaklah diragukan, yang membuat Kartosoewirjo dipecat dari keanggotaan PSII dalam tahun 1939 adalah prinsip politik “hijrah.” Baiklah sekarang kita telaah, apa yang dimaksudkannya dengan sikap politik “hijrah” itu.³⁶

Menurut Kartosoewirjo, “Hijrah” adalah “kewajiban semua pria dan wanita, tua dan muda, kecuali yang lemah” yang meliputi “setiap tindakan, apapun sifat dan bentuknya, yang dapat mengakibatkan orang menyimpang dari jalan-jalan Kebenaran seperti yang diutarakan dalam ajaran agama Islam”.³⁷ Lalu, bagaimana dengan kooperatif atau non-kooperatif dengan pihak pemerintah “tidak berharga sedikitpun”.³⁸ Ditekannya lebih lanjut, bahwa “Hijrah tidak boleh dihentikan” sebelum “Falah (Keselamatan) dan Fatah Kemenangan) tercapai”.³⁹ Maksudnya adalah “hijrah” tidak boleh dihentikan sebelum kemerdekaan suatu negeri Islam yang bakal memberlakukan syari’at Islam secara zhahir (kongkrit) tercapai, sebagaimana dinyatakannya secara eksplisit:

“Hoekoem jang tertinggi ialah kitaboellah dan soenah Rasoelloellah jang njata. Tidak ada hoekoem jang boleh dan dapat berlaku, melainkan setelah ada hakim; dan tidak ada hakim jang tidak mendjadi sebagian dari pada soeatoe perikatan – Keradjaan jang merdeka; dan tidak poela akan boleh pemcrintahan itoe berdiri, melainkan mesti ada satoe Kemerdekaan Negeri dan Bangsa.”⁴⁰

³⁶Hijrah pernah dilakukan Diponegoro dengan tujuan untuk membentuk Balad Islam, secara simbolik Diponegoro menanggalkan pakaian Jawa dengan menggantinya dengan pakaian rasul yang serba putih, menandakan dengan peristiwa tersebut untuk mengikuti jejak dan perbuatan Nabi, Saleh As’ad Djamhari, *Stelsel Benteng Dalam Pemberontakan Diponegoro 1827 – 1830, Suatu Kajian Sejarah Perang*, 2002, hal. 56. Kartosoewirjo sebagai orang Jawa tentunya memahami Babad Diponegoro, ia berguru kepada pamannya Notodihardjo seorang Islam Kejawen.

³⁷S.M. Kartosoewirjo, *Sikap Hidjrah PSII*, Jilid 2, 1936, hal. 25

³⁸Ibid, hal. 68.

³⁹Ibid, hal. 22

⁴⁰S.M. Kartosoewirjo, *Sikap Hidjrah PSII*, Jilid 1, 1936, hal. 31.

Yang secara jelas berarti: kemerdekaan suatu negeri atau bangsa itu mutlak adanya sebagai prasyarat untuk berdirinya suatu negara, dan baru setelah berdirinya negara merdeka dan berdaulatlah segala institusi dan aparat hukum yang bakal memberlakukan Kitabullah dan Sunah Rasul Allah dapat ditegakkan. Inilah implikasi politis sikap “Hijrah” Kartosoewirjo yang dipegangnya secara teguh dan yang menyebabkan pemecatannya dari keanggotaan PSII.

Dilihat dari sudut pandang ini, tampaknya perbedaan antara Kartosoewirjo dengan elit PSII lainnya hanyalah terletak pada masalah kooperatif dan non-kooperatif. Tapi sebagaimana terbukti kelak, Kartosoewirjo tidak berhenti pada kemerdekaan nasional Indonesia belaka sebagaimana rekan-rekan Muslim lainnya, melainkan ia terus berkeras untuk mendirikan suatu negara Islam di Indonesia. Jadi, apa yang diinginkan oleh Kartosoewirjo sebenarnya adalah kembali kepada ortodoksi Islam semurni-murninya dan menerapkannya di dalam kehidupan kenegaraan.

Setelah menerangkan tentang “Hijrah”, Kartosoewirjo melanjutkannya dengan “Jihad”, sebagaimana Al-Qur’an selalu mengasosiasikan “Hijrah” dengan “Jihad.”

Dikatakannya: “tiada tindakan ‘Hijrah’ dapat dianggap absah bila dalam ‘Hijrah’ cita-cita ‘Jihad’ tidak dilaksanakan”⁴¹. “Jihad”, lanjutnya, “bukanlah perang dalam arti yang sering dipahami oleh orang-orang Barat atau orang yang di-Barat-

⁴¹S.M. Kartosoewirjo, Jilid 2, 1936, hal. 30.

kan⁴²; melainkan usaha sungguh-sungguh untuk mengikuti jalan Allah, jalan kebenaran, jalan Kenyataan”⁴³.

Menjelaskan arti Jihad, ia membagi istilah ini ke dalam dua bagian, yakni “jihad kecil” (jihad ashgar) dan “jihad besar” (jihad akbar). Katanya: “Jihad kecil...hanya merupakan pembelaan, atau bela diri atau membela agama terhadap serangan dari musuh-musuhnya; dan kita berpendapat bahwa jihad besar adalah positif dan konstruktif sifatnya, karena jihad besar meliputi unsur-unsur membangun dan menyusun diri sendiri maupun desa dan negeri sendiri, demikian pula masyarakat Islam”⁴⁴

Apakah dengan demikian PSII Parlemen Abikoesno dan BP PSII Agus Salim tidak melaksanakan prinsip-prinsip seperti dikemukakan di atas, sehingga ia merasa perlu untuk mengklaim bahwa KPK PSII-nya lah yang benar-benar teguh⁴⁵ melaksanakan prinsip-prinsip “Hijrah” ini?

Dalam hubungan inilah kiranya perlu dilihat, bagaimana penilaian Kartosoewirjo terhadap perjuangan PSII sendiri.

Dikatakan, bahwa Sarekat Islam sejak 1912 hingga 1932 masih berjuang dalam batas-batas “qauliyah”,⁴⁶ dimana:

⁴²Ibid, hal. 45

⁴³S.M. Kartosoewirjo, Jilid 2, 1936, hal. 46

⁴⁴Ibid, hal. 48.

⁴⁵Butir-butir sikap politik “Hijrah” ini diambil dari Deliar Noer, 1996, hal. 164-65, dan dari Van Dijk, 1983, hal. 24, yang mengutip langsung brosur Kartosoewirjo, “Sikap Hijrah PSII”, 1936.

⁴⁶Al-Qur’an Surat 2:218; 8:72,74,75; 9:20 dan 48:15

⁴⁶Qauliyah berasal dari kata “qaul”, yang berarti: “perkataan”, atau “ucapan.”

“Orang hanya mementingkan keperluan keduniaan, baik yang mengenal diri manusia masing-masing masing-masing mengenal rakyat oemoem. Pergerakan waktu itu hidoep sebagai tangga oentoek menjari keoentoengan kebendaan, misalnja keoentoengan perdagangan dan lain-lain sebagainya, dengan tidak sadar dan tidak insaf akan Islam dan ke-Islaman sedjati.

...Pada zaman itoe orang sangat mementingkan socara daripada mengoetamakan kelakoean, menghargakan koelit daripada mengoetamakan kelakoean, menghargakan koelit daripada isinja.”⁴⁷

Periode 1923 hingga 1930 dinilainya sebagai periode transisi (Fi'liyah), di mana kesadaran sebagai seorang Muslim sudah mulai timbul; suatu kesadaran sebagai seorang muslim sudah mulai timbul; suatu kesadaran yang dinilainya benar-benar nampak pada periode 1930 dan seterusnya, di mana prinsip “Hijrah” dijadikan pegangan yang sungguh-sungguh. Masa ini dianggapnya sebagai periode I'tiqadiyah⁴⁸ di mana:

“...orang moelai sadar dan insjaf akan kehidoepannya, moelai tahoe akan kewadjabannya, kewadjaban menoeentoet amal salch yang sebanjak-banjaknja dan sempoerna-sempoernanja, dengan kejakinan dan kepertjajaan yang koelat dan tegoech. Tiada halangan yang dapat memoendoerkan dia, tiada rintangan yang bias menghentikan ataoe menghambat perjalanannya...”⁴⁹

Dengan demikian, periode I'tiqadiyah lah yang dianggapnya sebagai periode perjuangan yang benar, karena periode ini tidak berorientasi pada hasil-hasil duniawi semata. Atas dasar pandangan, adalah wajar jika ia merasa perlu untuk mengklaim

⁴⁷S.M. Kartosocwirjo, *Sikap Hidjrah PSII*, Jilid 2, 1936, hal. 21. Bandingkan dengan A.P.E. Korver, *Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil?*, 1985 dan Deliar Noer sendiri dalam *Gerakan Moderen Islam...*, yang menyatakan bahwa justru periode 1912-1916 (Korver) dan 1916-1921 (Noer) sebagai periode puncak Sarekat Islam, dengan dasar argument bahwa pada masa-masa ini Sarekat Islam benar-benar mampu membuktikan dirinya sebagai kekuatan pembebas rakyat dari keterbelakangan mental yang diakibatkan oleh penjajahan Belanda. Setuju dengan pendapat Noer, Kuntowidjojo mencibirkan Kartosoewirjo yang membagi periodisasi ini dengan menyatakan: Kartosoewirjo menyalahkan periodisasi 1912-23 sebagai zaman ‘Qauliyah’..”, Kuntowidjojo, 1985, Akan tetapi, betapapun juga, baik Korver, Deliar Noer dan Kuntowidjojo sendiri, menyandarkan analisis mereka pada realisme politik yang terjadi waktu itu, sedangkan Kartosoewirjo mengemukakan pandangannya berdasarkan idealisme Islamnya. Dengan demikian, keduanya berdiri pada dasar yang kukuh.

⁴⁸“I’tiqadiyah” berasal dari kata “i’ tiqad”, yang berarti “Kepercayaan.”

⁴⁹S.M. Kartosoewirjo. Jilid 1, 1936, hal. 22

bahwa KPK PSII-nya lah yang benar-benar konsisten melaksanakan prinsip perjuangan partai ini dan bukannya PSII Parlemen Abikusno Tjokrosujoso dan BP PSII Agus Salim telah kembali ke zaman "Qauliyah."

Demikianlah pemikiran Kartosoewirjo mengenai sikap politik "Hijrah", bahwa dengan "hijrah", Kartosoewirjo telah berhasil luput dari dilemma "kooperasi" dan "non-kooperasi", dan dengan "Jihad", ditatanya masyarakat Islam sesuai dengan aspirasi politiknya, dan dengan "hijrah" dan "Jihad", dirintisnya sungguh-sungguh Darul Islamnya!

Revolusi Islam dalam pandangan Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, bukanlah sebuah pemberontakan, bukan peperangan yang menumpahkan darah rakyat yang tidak berdosa tetapi sebuah perubahan yang gradual dan mendasar dari struktur masyarakat yang menindas menjadi masyarakat yang egaliter. Sebuah hijrah (perpindahan) dari apa yang dilarang Allah pada apa yang diperintahkan Ilahi (Menegakkan Keadilan Islam, persamaan dan kebebasan sebagai manifestasi keyakinan Tauhid) dalam ujud Negara Kurnia Allah.⁵⁰

Sungguh pun demikian, karena peperangan yang dipaksakan Pemerintahan Republik Indonesia kepada NII, seandainya Pemerintah republik Indonesia tidak menganggap Negara Pasundan boneka buatan Belanda lebih pantas dijadikan kawan seiring dari pada NII yang gigih melawan Belanda semenjak Jawa Barat ditinggalkan RI. Andai Pemerintah Republik Indonesia mau melakukan perundingan jujur dengan

⁵⁰Ziaul Haque, *Wahyu dan Revolusi*, 2000, hal. 67-71, S.M. Kartosoewirjo, *Sikap Hijrah PSII*, Jilid 2, 1936, hal. 22-23.

negara baru yang menjadikan Al Quran dan Hadits sebagai hukum tertinggi ini, tentu sejarah Nusantara pasca 1945 tidak akan banyak korban tidak berdosa. Perlu diketahui bahwa, NII tidak mempermaklumkan Pemerintah Republik Indonesia sebagai musuh. Musuh⁵¹ NII adalah Negara Belanda, bahkan S.M. Kartosoewirjo tidak henti-hentinya memberikan masukan pada Pemerintah Republik Indonesia agar berdiri tegar menghadapi Belanda. Namun sayang Pemerintah Republik Indonesia malah balik melanggar wilayah kedaulatan NII dan menyerangnya, barulah perang yang dipaksakan dan tidak dikehendaki itu terjadi, dan berkepanjangan.

Ini dapat kita telusuri dengan sikap dan pandangan Soekarmadji sejak tahun 1945 yang memberikan dukungan penuh terhadap RI. Apa yang Soekarmadji lakukan adalah sikap matang seorang negarawan dalam membela rakyat, sayangnya konspirasi internasional dengan Belanda sebagai pelaku utama, berhasil mendorong Pemerintah Republik Indonesia bersama negara-negara boneka Belanda lainnya menjadi pasukan sekutu yang mengepung NII.

Sikap dan pandangan Soekarmadji sejak tahun 1945 yang memberikan dukungan penuh terhadap RI. Pidato-pidato di daerah Garut, Cilacap yang ia lakukan selama menjadi Pengurus Masyumi Daerah Priangan yang kemudian dibukukan pada pertengahan bulan Juli 1946 atas permintaan cabang-cabang⁵¹. Pidatonya tersebut kemudian diringkas dalam sebuah buku yang berjudul "Haloean Politik Islam" yang

⁵¹Wawancara dengan Dodo Mohaminad Darda, pada tanggal 16 April 2002 di Malangbong

diterbitkan Dewan Penerangan Masjoemi daerah Priangan⁵². Dari buku ini tampak jelas apa yang dimaksud Soekarnadji Maridjan Kartosoewirjo tentang cara melaksanakan syari'at Islam di Indonesia secara menegara, diawal lahirnya RI yang disebut Soekarnadji sebagai "Jembatan Emas" dan sebelum ia memproklamasikan Negara Islam Indonesia. Antara lain; Soekarnadji Maridjan Kartosoewirjo menerima keberadaan RI sebagai sebuah awal kebaikan, yang harus dipelihara dan dipertahankan, sebagai sebuah suasana yang kondusif untuk memasyarakatkan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam:

Sekarang, Negara dan Ra'jat Indonesia soedah merdeka, hampir tjockoeop setahun oemocrnja. Kini baroe merdeka (de facto) (njata menurut boekti) dan tidak lama lagi insja Allah menjadi merdeka " de jure " bila mana waktoc salah satoe negeri locar mengesahkan kemerdekaan negara kita. Pada sa'at itoeolah kemerdekaan Indonesia menjadi boelat 100 pct penoch, tidak lebih dan tidak kocrang, sehingga dalam ikatan dan persatuan bangsa bangsa di doenia, negara kita akan mendapat kedoeoedokan jang sederadjat dan sedjadar dengan negara2 merdeka lainnya⁵³.

Soekarnadji Maridjan Kartosoewirjo mengajak muslimin untuk terus bersetia pada perjuangan politik, dengan tetap berpegang pada dua hal : ideologi dan realita. Tetap harus setia dengan *apa yang diinginkan* (sebagai hamba Alah tentunya Darul Islam di dunia dan Darus Salam di akhirat), dan tidak buta dengan kemungkinan kemungkinan yang bisa dilakukan untuk menghantarkan keinginan itu di alam nyata :

Seorang ahli perdjoeangan jang berideologi tidak pernah terhenti —djangkalan sengadja menghentikan diri— dalam oesahanja mendekati dan mentjapai tjita-tjitanja. Moemkin pada soeatoc waktoc ia tampak lari "milir-moedik", melompat kekanan dan kekiri, terbang kebarat atau ketimocr —karena keadaan dan kenjataan masjarakat tidak memberi kemocmkinan atau

⁵²S.M. Kartosoewirjo, *Haloean Politik Islam*, 1946,. Sesungguhnya brosur ini bukanlah pidato yang lengkap dibacakan pada rapat tersebut, tetapi merupakan suatu tulisan yang berasal dari berbagai pidato Soekarnadji dalam pertemuan-pertemuan Partai Masyumi di berbagai tempat di daerah Jawa bagian Barat selama kurun 1945-1946, atas usul para pengurusnya untuk dituliskan menjadi 'Haluan Politik bagi Masyumi', dan diberi nama "Haloean Politik Islam".

⁵³S.M. Kartosoewirjo, 1946, hal. 9

kelapangan lebih daripada itoe--; tetapi dalam pada ia terombang-ambing oleh gelombang masyarakat dan terdampar diatas pantai kesengsaraan, maka mata-hatinja tidak pernah lepas dari Ideologi. Tiap-tiap langkah dan geraknja selaloe diarahkan kepada tertjapainja ideologi. Ia hidoep dengan ideologinja dan ingin mati poen dalam djalan dan oesaha menoejdjoe tertjapainja ideologi itoe. Djiwa perdjoeangan jang seroeapa itoe tiadalah ternilai harganja. Djiwa jang seroeapa itoe adalah moestika bangsa, jang mendjadi benih kemoelwaan dan keloehocran sesocatoe Oemmat dan Agama.⁵⁴

Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pun mengingatkan jangan sampai terjebak dalam dua sisi ekstrim, berideologi tapi tidak melihat kenyataan, atau pasrah pada kenyataan dan kehilangan ideologi. Bahkan kesadaran ideologi ini pun tidak boleh membutakan diri akan adanya ideologi lain yang harus dihadapi sebagai competitor yang disikapi secara cerdas dan cermat. Jangan sampai semangat memperjuangkan ideologi Islam di tengah perkembangan negara muda RI yang masih rentan itu, melahirkan konflik horizontal antara sesama warga RI, yang akhirnya menjadi perlemahan ke dalam dan membuka peluang pada musuh untuk kembali menjajah RI:

Poen sebaliknja, kita haroes poela bertjermin kepada pelbagai peristiwa, jang orang boleh demikian yakin kepada sosoeatoe ideologi, sehingga loepa kepada realiteit "tergila-gila kepada ideologi sendiri", mabok kepada kebenaran sendiri, sehingga sering loepa- bahkan kadang-kadang tidak barang sedikit menaroech perhatian atau penghargaan-kepada ideologi jang lainnja.

Penjakit "fanatisme" jang seroeapa inilah jang moedah sekali jang membahajakan persatocan bangsa dan persatocan perdjoeangan, jang kesoedahanja bernalidjahkan kepada perpetjahan dan pertjideraan jang tidak diharapkan, teroetama sekali pada masa genting-roenting seperti sekarang ini, dimana tiap-tiap warga Negara seharoesnja merasa wadajib ikoet serta menjempoernakan perdjalananan Revolusi Nasional, jang lagi tengah kita hadapi bersama. Lebih-lebih lagi, kalau kita yakin, bahwa tiap-tiap perpetjahan antara kita dengan kita, adalah satoc keentocngan bagi moesoeh. Tentang hal ini, lebih landjoet akan kami sadjikan dibagian jang lain.

Wal-hasil, keterangan dan penerangan ringkas diatas tjoekeoplak kiranja menoejdjoeakkan tentang wadajib kita, selaloe haroes berpegangan kepada kedoea "akidah politik itoe" djika kita hendak melaloei djalan jang sebaik-baiknja dalam per-djoeangan, menoejdjoe dan mentjapai kemoelwaan dan kelochoeran Noesa, Bangsa dan Agama, tegasnja: Menegakkan Repoebliek Indonesia.⁵⁵

⁵⁴Ibid, hal. 12-13

⁵⁵S.M. Kartosoewirjo, 1946, hal. 14-15

Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo mengingatkan bahwa ada dua jenis revolusi yang harus dilangsungkan, pertama revolusi nasional, yang bertujuan mempertahankan RI dari pencaplokan kembali bangsa asing, dan terus membangunnya hingga berdiri sejajar dengan bangsa bangsa lain. Dan kedua adalah revolusi sosial, yakni perubahan di dalam negara RI sendiri, dimana dengan menyadari besarnya pengaruh dukungan rakyat, setiap pejuang ideologi harus berusaha menarik dukungan rakyat, dan membuka kesadaran rakyat pada ideologi yang ditawarkannya. Dan tanggung jawab muslimin adalah mengembangkan ideologi Islam sehingga memperoleh kesempatan menerima kepercayaan rakyat untuk menjalankan kekuasaan negara berdasarkan syari'at Islam :

Pada waktoe itoelah orang berdjoeng dengan sepenoeh-penoeh kekocatanja, oentoek membela dan mempertahankan kejakinan dan ideologinja masing-masing. Tiap-tiap golongan dan party berichtiar dan berdaja-oepaja dengan segenap oesahanja, oentoek mengembangkan ideologi dalam kalangan ra'jat. Dan oleh karena Repoebliek Indonesia berdasarkan Kedaulatan ra'jat, maka soeara ra'jat jang terbanjak itoelah, jang akan memegang kekocasaan Negara. Djika komunisme, jang diikoeti oleh sebagian besar daripada ra'jat, maka pemerintah Negara akan mengikoeti haloean politik, sepandjang ajaran komunisme. Dan bila Sosialisme atau Nasionalisme jang "menang soeara", maka Sosialisme dan Nasionalismelah jang akan menentoekan haloean politik Negara.

Demikian poela, djika Islam jang mendapat koernia Toehan "menang dalam perdjoengan politik" itoe, maka Islam poelalah jang akan memegang tampoek Pemerintahan Negara. Sehingga pada waktoe itoe terbangoenlah Doenia Islam atau Dar-oel-Islam, jang tetap bersendikan kepada kedaulatan Ra'jat, jang tidak menjimpang seramboet dibelah toedjoel skalipoen daripada ajaran-adjaran Kitaboeallah dan soennatoen-Nabi Mochammad Clm.

Pada sa'at itoelah kita hidoep didalam Doenia Baroe, jang boleh kita gelari: "Al-Daulatoel-Islamiyah". Selandjoetnja, tentang hal ini akan kami bentangkan dibagian lain. Oleh sebab itoe, maka dalam perdjoengan kedoea ini bolehlah dinamakan: 'Alam perdjoengan ideologi'.⁵⁶

Menurut Kartosoewirjo cita-cita kemasyarakatan atau ideologi yang menjadi suara hati nurani ummat Islam memiliki tujuan:

1. Hendaklah Republik Indonesia menjadi Republik jang berdasar Islam;

⁵⁶S.M. Kartosocwirjo, 1946, hal. 16-17

2. Hendaklah pemerintah dapat mendjamin berlakoenja hoekoem sjara' Agama Islam; dalam arti jang seloeas-locas dan sesempoerna-sempeornanja;
3. Kiranja tiap-tiap Mocslim dapat kesempatan dan lapangan oesaha, oentock melakoean kewadjabannja, baik dalam bagian doeniawy maoepoen dalam oerocsan oechrowy;
4. Kiranja ra'jat Indonesia, teristimewa sekali Oemmat Islam, terlepaslah daripada tiap-tiap perhambaan jang mana poen djoca.⁵⁷

Tjita-tjita jang seroeпа itoe tertanam dalam-dalam dan berakar koeat-koeat dalam kalboe Oemmat Islam, sehingga tiap-tiap Mocslim dan Moe'min menganggap hidoepnja tiada berguna (moebadzir), balikan ia merasa menangoeng dosa jang sebesar-besarnja, djika ia menghentikan ichtijar dan oesahanja, bagi mentjapai Dar-oel-Islam, Dar-oes-Salam!⁵⁸

Soekarnadji Maridjan Kartosoewirjo mengamanatkan agar revolusi sosial ini dilakukan secara hati hati, sehingga tidak merusak tatanan yang sedang dibangun :

Djadi pada dewasa ini, Revolusi Sosial moemkin dapat berlakoe --bersamaan dengan waktoe berlakoenja Revolusi Nasional--, djika keadaan ditempat atau daerah itoe menoen-toet dan menghendakinja. Dan bilamana terpaksa terdjadi jang seroeпа itoe, maka hendaknja didjaga beberapa perkara, diantaranya ialah:

1. Peliharalah eratnja persatocan antara Pemerintah dan Ra'jat, dan djagalah persatocan antara golongan dengan golongan, antara berbagai-bagai Lapisan ra'jat, sehingga moemkin terdjadi pertjideraan, pertikaian atau pertengkar, jang kadang-kadang menimboelkan koerban. Sebab, setiap oesaha jang mereng-gangkan kita sama kita, tiap-tiapnja itoe mendjadi keoentoengan moesoch, maka hendaknja kita haroes lebih tambah berhati-hati, tertib dan teliti dalam tiap-tiap gerak dan langkah kita.
2. Revolusi Sosial itoe djangan hendaknja hanya memberi keoentoengan kepada tempat atau daerah itoe sendiri sadja, tetapi djoega menimboelkan keoen-toengan nasional. Tegasnja, Revolusi Sosial jang berlakoe itoe dapatlah kiranja menambah pesatnja kekoeatan, boeat menjelesaikan Revolusi Nasional.

Sebaliknya, djika disoeatoc tempat terdjadi Revolusi Sosial, dan ternjata meroegikan kepada tempat atau daerah itoe sendiri, djangankan meroegikan perdjoeangan Oemmat (nasional), teranglah, bahwa Revolusi jang seroeпа itoe boekanlah Revolusi jang kita harapkan, jang boleh membawa ra'jat bangsa kita kepada Kemerdekaan jang sedjati.

Adapoen Revolusi jang kita harapkan ialah Revolusi jang membangoen (konstruktif) dan boekan Revolusi jang membongkar (destruktif), jang menoeumboelkan "hoeroe-hara" atau "perang saudara" dalam kalangan bangsa kita sendiri. Padahal tiada-lah mara-bahaya jang lebih hebat dan dahsjat, jang boleh menimpa Oemmat dan Negara, melainkan toemboehnja "hoeroe-hara" dan "perang saudara" itoe, teristimewa sekali pada masa jang segenting ini, dimana nasibnja bangsa dan Negara kita hanya tergantoeng kepada kekoeatan diri sendiri semata-mata dan pada hakikatnja hanya terkandoeng kepada tolong dan koernia Ilahy.

Oleh sebab itoe, kami berharap, moega-moega kejakinan jang seroeпа ini dan taktik perdjoeangan jang kita lakoean itoe, tidak hanya mendjadi milik kita sendiri sadja, miliknja Party Politik Islam Masjoemi dan Oemmat Islam oemoemnja, melainkan djoega merata kepada sekalian ahli perdjoeangan, jang sama-sama menghendaki kemoecliaan noesa, bangsa dan teroeclama Agama, dalam melakoean wadjib kita bersama, menegakkan Kedaulatan Repoebliek Indonesia. Kalau kita selaloe mendjaoelikan masalah-masalah jang ketjil (far'iyah) dari

⁵⁷Ibid, hal. 22-23

⁵⁸Ibid, hal. 24.

pandangan kita dan melihat kewadajiban² yang besar (oesoel), yang selamanja menantikan kita, insja Allah segala sesoeatoe akan dapat kita selesaikan bersama-sama, dengan tjara yang sebaik-baiknja.⁵⁹

Dari uraian di atas tampak S.M. Kartosoewirjo menghendaki bahwa Revolusi Islam yang dicita-citakannya bersifat membangun, sejalan dengan pembangunan negara RI yang baru berdiri. Pada konferensi tersebut Kartosoewirjo mengucapkan sebuah pidato tentang haluan politik Islam tentang pertanyaan siapa yang akan berkuasa di Indonesia. Masih juga ia menganjurkan persatuan dalam cita-cita perjuangan; ia memperingatkan para pendengarnya sekaligus pendukungnya bahwa konflik antara sesama bangsa Indonesia hanyalah akan menguntungkan Belanda, dan ia mendesak menghentikan perbedaan-perbedaan ideologi. Segera setelah tercapai kemerdekaan penuh, perbedaan-perbedaan ini dapat dicari penyelesaiannya secara demokratis, menurut kedaulatan rakyat.

Sejak tahun 1940 Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dalam pemikirannya telah menggunakan istilah Darul Islam dan membagi masyarakat di Hindia Belanda menjadi tiga bagian. Ketiga masyarakat itu adalah 1) Masyarakat Hindia Belanda 2) masyarakat kebangsaan Indonesia dan 3) Masyarakat Islam atau Daroel Islam. Masing-masing masyarakat tersebut mempunyai tujuan yang berbeda :

Ketiga masjarakat itoe, yang tiap-tiap hari dapat kita temoean dalam tiap-tiap tempat di Negeri Toempah Darah kita, bedalah dasar dan haloeannja, beda pole maksoed dan toejoeannja. Kalau masjarakat Hindia Belanda bermaksoed hendak mempertahankan, mempertegoehkan dan mensentausakan kekoeasaan Belanda di Negeri Toempah Darah kita ini.... Masjarakat kebangsaan Indonesia mengarahkan langkah dan sepak terdjangnja ke djoeroesan Indonesia Raja, agar soepaja dapat berbakti kepada Iboe Indonesia. Sebaliknja itoe, maka kaoem moeslimin yang hidoep dalam masjarakat Islam (Daroel Islam) tidaklah mereka ingin berbakti kepada iboe

⁵⁹Ibid, hal. 29-31.

Indonesia atau kepada siapapoen joega, melainkan mereka hanya ingin berbakti kepada Allah jang Esa belaka. Maksoed dan toejoecannja poen boekan Indonesia – Raja, melainkan Daroel Islam jang sesempocernanja di mana tiap-tiap moeslim dan moeslimat dapat melakoeakan hoekoem Agama Allah (Islam) dengan seloeas-loeasnja baik jang berhoeboengan dngan sjahsjiah maocpoen jang idjtima'jah.⁶⁰

Dalam lingkup terminologi fiqih klasik pembagian 'dunia' dibagi menjadi dar al-Islam (tempat kediaman Islam) atau dimana Islam berkuasa sebagai agama mayoritas, yaitu dimana hukum suci Islam (syari'ah) mengatur kehidupan manusia. Kemudian, dar al-Sulh 'tempat kedamaian' dimana kaum Muslimin hidup sebagai minoritas, tetapi mereka berada dalam kedamaian dan dapat melaksanakan ajaran agamanya secara bebas. Akhirnya dar al-Harb, tempat 'konflik atau perang' dimana kaum Muslimin bukan hanya minoritas, melainkan dalam keadaan konflik dengan atau berjuang melawan lingkungan politik dan sosial eksternal agar dapat menjalankan agama mereka.⁶¹ Pengertian yang diungkapkan oleh Kartosoewirjo pada tahun 1940, ternyata tetap konsisten sampai muncul gerakan Darul Islam tahun 1948.

V.3. Pemikiran Politik dan Aksi Pasca Revolusi Nasional

Menurut Kartosoewirjo dalam tulisannya yang berjudul "Mendjelang Dunia Baru, Darul Islam atau Negara Islam Indonesia" dengan nama samaran "Huru-Hara" menjelaskan bahwa revolusi adalah suatu tingkatan dalam kehidupan msayarakat, negara dan agama, yang menunjukkan akan beralihnya suatu keadaan kepada

⁶⁰S.M. Kartosocwirjo, *Daftar Oesaha Hidjrah*, 1940, hal. 4-5.

⁶¹Sayyed Hossen Nashr, "Perkembangan Dunia Islam Dewasa ini", Harun Nasution dan Azumardi Azra, *Perkenibangan Modern dalam Islam*, 1940, hal. 46-47. Konsep dar al-Islam memiliki pengertian sama dengan Balad Islam, yakni negara Islam.

keadaan yang lain. Biasanya peralihan itu berlaku dengan cepat dan hebat serta dahsyat. Revolusi dunia menurut keyakinannya akan terjadi yaitu pecahnya Perang Dunia ke III, maka ummat Islam Bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri.

Persiapkanlah dirimu untuk memasuki gelanggang perjuangan hebat, perang totaliter, perang seluruh dunia, satu peperangan, dimana Allah akan menentukan nasibnya tiap2 Ummat dan Bangsa.

Siap ! Siap! Siap! Sekarang djuga!!

Bagi menegakkan Ke'adilan Tuhan dan mengenjahkan segala matjam pendjadjahan!⁶²

Kartosoewirjo memberikan suatu pesan rahasia, yang memberitahukan rencananya kepada Komandan Divisi I/TII, Tjakrabuana (Kamran), bahwa ia akan menyampaikan pesan-pesan kepada Pengurus Besar Masyumi di Yogyakarta. Dalam pesan-pesan tersebut dia ingin menjelaskan tindakan militer dan politik yang telah diambilnya untuk menghindari timbulnya salah pengertian di masa yang akan datang.⁶³ Tetapi Kartosoewirjo memainkan peranan ganda, sebab dia tidak memberitahukan perkembangan yang terakhir kepada teman-teman partainya di Yogyakarta, yaitu perubahan Madjlis Islam Pusat menjadi Dewan Imamah yang dia pimpin sendiri sebagai Imam. Juga surat pengantar yang diberikannya kepada kurir tersebut sebagai bukti legitimasi, dia tandatangani dua bulan setelah pembentukan Dewan Imamah, masih tetap atas nama "Pimpinan Umum Madjlis Islam Pusat Djawa Sebelah Barat". Sebaliknya pesan rahasia yang dia kirim kepada Kamran dua hari sebelumnya yaitu pada tanggal 6 Juli 1948, dibuat Kartosoewirjo atas nama

⁶² Pedoman Dharma Bhakti, Jilid 3, 1961, "Mendjelang Dunia Baru, Darul Islam atau Negara islam Indonesia", hal. 14.

⁶³Holk H. Dengel, 1995, hal. 79.

"Pemerintah Negara Islam Indonesia" dan pesan tersebut ditandatangani sebagai Imam.⁶⁴

Pesan-pesan lisan Kartosoewirjo disampaikan antara lain kepada Anwar Tjokroaminoto, Ramlan, A.H. Soebakin, Soedardjo, Soemadhi, dan Abikoesno Tjokrosoejoso. Dalam surat pengantarnya Kartosoewirjo meminta agar mereka datang ke Jawa Barat untuk bersama-sama membicarakan langkah-langkah selanjutnya. Surat pengantar yang singkat itu hanya berisi 6 butir:

1. Sedjak ditandatangani Renville kami ummat Islam di Djawa Barat telah menentukan sikap yang tegas.
2. Akibat daripada sikap itu, terdjadilah perjuangan yang dahsyat, sehingga darah syuhada terus mengalir.
3. Tjita-tjita perjuangan kami ini, tidak hanya merupakan perjuangan regional akan tetapi hendaknja merata ke seluruh kepulauan Indonesia
4. Dari itu untuk mensatukan bentuk an langkah pejuangan kita, disamping keterangan-keterangan yang disampaikan oleh utusan kami, diharap supaja diantara saudara-saudara yang bertanggungjawab kepada Perjuangan ummat disini datang saja untuk membicarakan bentuk dan langkah Perjuangan pada dewasa ini
5. Semoga dengan djalan ini, karunia Allah, lahirnja Negara Islam yang Merdeka, akan datang setcepat-tcepatnya.
6. Selesai.⁶⁵

Kartosoewirjo berharap, bahwa Masyumi akan mendukungnya untuk mewujudkan rencananya, yaitu pembentukan sebuah Negara Islam, dan para politikus Masyumi mau datang ke Jawa Barat untuk membicarakan rencana ini. Bila para politikus itu hadir pada sidang Dewan Imamah yang berikutnya, Kartosoewirjo merencanakan untuk memproklamkan Negara Islam. Dengan cara demikian, Kartosoewirjo berharap akan memperoleh pengakuan bukan hanya secara nasional, tapi juga dari dunia internasional. Sebab baginya jelas, bila ia ingin berbicara atas

⁶⁴Ibid. hal. 79.

nama seluruh bangsa Indonesia, dia harus menghindarkan agar proklamasi itu hanya menjadi suatu peristiwa lokal saja.

Pada akhir bulan Juli 1948, Anwar Tjokroaminoto memberitahukan dalam suratnya, bahwa ia menerima surat Kamran dan Kalipaksi (Kartosoewirjo) dan mengerti semua isi surat-surat tersebut⁶⁶, namun dia sendiri tidak bertolak ke Jawa Barat. Pada waktu melewati garis demarkasi, seorang dari kurir-kurir itu ditangkap Belanda. Sebagai akibatnya, Anwar Tjokroaminoto kelak dituduh bekerja sama dengan gerakan Darul Islam, sebuah tuduhan yang selalu dia tolak.⁶⁷

Dari surat Kartosoewirjo kepada Kamran juga dengan jelas dapat dilihat bahwa untuk Kartosoewirjo suatu hubungan yang tidak terputus-putus dengan daerah Republik adalah penting sekali. Dia juga memberitahukan Kamran, bahwa dia telah mengirim surat kepada pemimpin-pemimpin di daerah Republik, di mana dia menjelaskan situasi politik dan militer agar supaya mereka "jangan salah paham dan dapat pula menghilangkan salah paham". Kartosoewirjo menulis sebagai berikut:

"Djoega saja ingin sekali memperingatkan kepada socatoe hal jang tampaknja ketjil, tapi amat penting sekali dalam perdjoeangan kemerdekaan dan perdjoeangan agama, ja'ni terbentuknya pos-pos di sepanjang djalan antara kita dengan daerah Republik. Satoe djalan doeloe (route) boleh dimoelai, asal sempoema. Djangan poetoos-poetoos. Selain dari pada itoe, djoega tentang bentoekan koerir jang tetap, jang berangkat dan datang pada waktoe jang tentoe. Saja harap, soepaja hal-hal ini lekas dibentoeck oleh Divisi. Agar soepaja kita dengan kawan-kawan di daerah Republik meroepakan rantai jang erat sekali. Insya Allah, itoelah salah satoe djalan dan oesaha, menoejoe kepada Revolusi Islam Totliter, di mana komando kita akan dihargakan oleh Oemmat dan Ra'jat seloeroehnja, dan beberharga poela dalam pandangan doenia internasional seloeroehnja. Lebih-lebih lagi, di mana-mana tempat dan tiap-tiap pendjoeroe doenia socdah moelai tampak menjala-njala api, jang agaknya akan menjadi pangkal timboelnya Perang Dunia Ketiga".

⁶⁵lampiran

⁶⁶lampiran

⁶⁷H. Holk H. Dengel, 1995, hal, 79.

“Oleh sebab itoe socpaja dioesahakan meletoesnya Pemberontakan Ra’jat, ataoe Revolusi Islam, baik jang meroepakan pentjoelikan , pemboenochan, sabotasje, dan –dimana moengkin— petempoeran⁶⁸”.

Pihak Republik di Yogyakarta ternyata tidak mempunyai gambaran yang jelas tentang situasi sebenarnya di Jawa Barat, bukan karena akibat tidak cukupnya komunikasi, melainkan karena Kartosoewirjo tidak memberikan informasi yang lengkap tentang tindakan-tindakan yang telah dilaksanakannya. Waktu itu memang tersebar desas-desus bahwa Kartosoewirjo telah memproklamkan sebuah sebuah *Negara Islam* di Priangan, namun pada waktu itu desas-desus semacam ini tidak merupakan yang baru karena desas-desus yang sama juga tersiar tentang kelompok-kelompok politik yang lain. Pihak pimpinan militer menganggap semua ini hanya merupakan tipu daya Kartosoewirjo agar dapat meneruskan perjuangannya di Jawa Barat.⁶⁹

Pada tanggal 25 Agustus 1948 keluar maklumat yang pertama dari Pemerintah Islam Indonesia yang memerintahkan mobilisasi dan militerisasi total seluruh pimpinan sipil dari residen sampai kepala desa diberi tugas sebagai Komandan pertahanan di daerahnya⁷⁰ dan dua hari kemudian pada tanggal 27 Agustus 1948 “Kanun Azasi” Negara Islam Indonesia diumumkan, semua Daerah I harus menyesuaikan dengan Kanun Asasy tersebut.⁷¹

⁶⁸H. Holk H. Deng el, 1995. hal. 81

⁶⁹Dinas Sedjarah Militer Kodani VI/Siliwangi, *Dari Masa ke Masa*, 1968, hal. 280.

⁷⁰Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid1 , 1960, Maklumat No.1 , 25-8-1948.

⁷¹Dokumentasi Sedjarah Militer AD, *Darul Islam*, 1952, hal. 70.

Dalam maklumat No 2 yang keluar pada tanggal 28 Oktober, diumumkan perubahan susunan Pimpinan Negara dan siasat perjuangan berdasarkan referendum Dewan Imamah. Selanjutnya diterangkan bahwa Kalipaksi (Kartosoewirjo), Tjakrabuana (Kamran) dan K.H. Dajeuhluhur (K.H. Gozali) akan berpindah ke daerah Republik, sementara Mandaladatar (R. Oni), Jogaswara (Toha Arsjad) dan Kalirasa (Sanoesi Partawidjaja) telah berangkat ke daerah yang diduduki Belanda untuk menjalankan sebuah misi istimewa. Selanjutnya diterangkan bahwa segera *Negara Islam Indonesia* yang diwakili oleh seorang Konsul di Yogyakarta.⁷²

Pergantian Dewan Imamah ini dasarnya hanyalah merupakan taktik untuk mengelabui musuh semata, sebab satu-satunya yang benar dirubah hanyalah nama-nama samaran para anggota Dewan Imamah saja. Sebenarnya semua anggota *Dewan Imamah* tetap berada dalam posisi yang semula, kecuali Kamran mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan di Jawa Tengah. Tetapi pernyataan bahwa *Negara Islam Indonesia* mempunyai perwakilan di Yogyakarta dan juga pengangkatan waki-wakil di daerah-daerah yang diduduki Belanda, memang ada secara peserorangan.

Dalam maklumat berikutnya yang keluar 2 November 1948 yang ditandatangani HIM Tjokro menerangkan, bahwa berdasarkan perkembangan politik dewasa itu tidak mungkin lagi akan dicapai penyelesaian masalah secara damai dengan Belanda, dan kekejaman Belanda sudah melampaui kemanusiaan dan agama, karena itu rakyat harus mempersiapkan diri untuk perang total, sehingga terwujud Negara Kurnia Allah. Dan mengeluarkan "Komandan Umum" agar supaya

⁷²Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid 1, 1960, Maklumat No. 2, 28-2-1948, hal. 4.

seluruh rakyat mempersenjatai diri dengan senjata apa saja. Saat pecahnya perang Dunia Ketiga akan bersamaan dengan mulainya perang antara Republik Indonesia dengan Belanda.⁷³

Maklumat No. 3 bahwa Sidang Dewan Imamah menyerahkan kembali tampuk pimpinan ke tangan S.M. Kartosoewirjo dan kini kembali memegang pimpinan *Negara Islam Indonesia*, setelah dia selama sepuluh bulan berada di "daerah lain"⁷⁴. Kira-kira seminggu kemudian, benar-benar terjadi perang lagi antara Belanda dengan Republik, ketika pada 14 Desember 1948 pasukan Belanda menyerbu daerah Republik dan memulai Agresi Militer yang kedua. Dengan demikian Belanda sekarang juga melanggar perjanjian Renville.

Pada hari pertama Agresi Militer tersebut, Soekarno dan Wakil Presiden Hatta, dan banyak anggota kabinet Republik ditangkap oleh Belanda. Kekuasaan pemerintahan kini diteruskan oleh Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat.⁷⁵ Angkatan Bersenjata Republik kini mundur ke daerah pedalaman dan dari sana memulai perang gerilya melawan Belanda.

Maklumat berikutnya untuk menjawab situasi yang berkembang terutama jatuhnya Pemerintahan Republik Indonesia, mempermaklumkan perang "suci mutlak/ perang totaliter" sehari setelah kejadian tersebut. Seluruh APNII untuk

⁷³Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid1, 1960, Maklumat No. 3, 2-11-1948, hal. 6.

⁷⁴Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid1, 1960, Maklumat No. 5, 12-12-1948, hal. 10.

⁷⁵Mestika Zed, *Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*, 1997.

memelopori/membantu rakyat sehingga revolusi Islam selesai sehingga Negara Kurnia Allah, "Negara Islam Indonesia (NII)", dapat didirikan.⁷⁶

Pada tanggal 12 Desember 1948 dikeluarkan maklumat No. 6 yang menyatakan supaya ummat Islam bangkit bergerak melanjutkan perjuangan jihad fi sabilillah, dengan satu komando dan satu pimpinan, Jatuhnya Republik Indonesia dipandang sebagai membuka lapangan jihad dan sebagai karunia dari Allah menuju Darul Islam⁷⁷

Pada tanggal 23 Desember 1948, Kartosoewirjo menyatakan Negara Islam Indonesia berada dalam keadaan perang dan hukum yang berlaku, adalah hukum Islam di masa perang. Dewan Imamah kini diubah namanya menjadi "Komandemen Tertinggi" yang memegang Komando Umum bagi rakyat dan tentara sesuai dengan situasi yang baru. "Komandemen Tertinggi" tersebut dipimpin langsung oleh Kartosoewirjo sebagai Imam dan dia menegaskan bahwa sejak diumumkan Maklumat No. 7, hanya dikenal dua golongan yang berperang, yaitu Negara Islam Indonesia dan negara Belanda. Dia memperingatkan golongan yang pasif dan ragu-ragu dan belum memutuskan apakah "ikut kepada Belanda (kafir) atautkah ikut kepada Islam". Dia memberikan waktu selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. Kemudian mereka itu boleh diperlakukan sepanjang Hukum Islam di masa perang.⁷⁸ Dengan berakhirnya Republik di Yogyakarta, sebenarnya telah terdapat vakuum kekuasaan, yang telah untuk memproklamkan Negara Islam Indonesia.

⁷⁶Salinan Pedoman Dharma Bhakti, Jilid 1, 1960, Maklumat No. 5, 20-12-1948, hal. 10.

⁷⁷Salinan Pedoman Dharma Bhakti, Jilid 1, 1960, Maklumat No. 6, 21-12-1948, hal. 12.

Dengan demikian sistem pemerintahan dari tanggal 10 Februari 1948 sampai dengan 25 Agustus 1948 masih menggunakan Majelis Islam Pusat (MI), merupakan pemerintahan bayangan, transformasi dari Masyumi daerah Priangan. Sistem pemerintahan Negara Islam Indonesia yang berlaku antara dari 25 Agustus hingga 25 Desember 1948 adalah sistem Dewan Imamah. Keputusan perubahan dari "Majelis Imamah" menjadi "Dewan Imamah" dalam Rapat setelah Konferensi Cijoho pada tanggal 9-10 Mei 1948 yang bertempat di Cijoho. Pada sidang ke lima pada tanggal 23 Desember 1948 bertempat di Cipurut Garut Timur, Dewan Imamah kemudian berubah menjadi sistem Komandemen.⁷⁹ Sistem Komandemen berlaku dari tanggal 12 Desember 1948 sampai dengan 7 Agustus 1959. Akhirnya berubah menjadi sistem Sapta Palagan yang berlaku dari 7 Agustus 1950 hingga berakhir.

Perbedaan antara golongan konstitusi (Bulan Bintang) dengan golongan inskonstitusi (Bintang Bulan) yang diwakili oleh S.M. Kartosoewirjo terletak dalam cara dan target akhir. Golongan pertama yang merupakan mainstream dari pemikiran dan gerakan Islam yang berupaya melakukan Islamisasi negara dengan memadukan Islam dan Nasionalisme. Tujuan akhir adalah Nasionalisme yang didasarkan Islam. Islam sebagai bagian dari kesatuan Indonesia. Sejauh mana kontribusi Islam untuk Indonesia.

Dengan demikian golongan pertama bertujuan mengislamkan negara dengan sebanyak-banyaknya kursi di Parlemen. Jika demikian diharapkan suara - undang-

⁷⁹Salinan Pedoman Dharma Bhakti, Jilid 1, 1960, Maklumat No. 7, 23-12-1948, hal. 15.

undang - yang keluar dari badan legislatif itu, adalah suara- undang-undang Islam. Namun begitu yurisprudensi pokok adalah tetap tidak bisa diubah yaitu UUD 1945 dan Pancasila sebagai konsideran. Sedangkan diktum - keputusan- adalah berdasarkan Al Qura'i dan Sunnah. Kerena yurisprudensi considerans tidak sama dengan yuriprudensi diktum. Jika demikian, maka ketetapan itu akan bersifat semu, sebab hukum yang keluar dari badan legislatif tersebut tidak mengikat.

Sedangkan golongan kedua (Bintang-Bulan), S.M. Kartosoewirjo bermaksud menegarkan Islam, yaitu melegalisasi kekuasaan untuk memberlakukan Syareat Islam dan menata ummah. Dengan demikian negara tersebut, hanya dapat satu perundang-undangan yaitu undang-undang Islam sedangkan masyarakatnya sendiri boleh Islam boleh tidak pula. Hanya jika diantara mereka , maka yang didapat hanya satu hukum, yaitu hukum Islam. Adapun langkah yang dilakukan dengan "Hijrah", membentuk basis ideologi ummat, secara bertahap membentuk perangkat kenegaraan untuk memobilisasi kekuatan. Seluruh tata nilai Islam terstrukturisasi dalam bentuk kekuasaan, sehingga seluruh fungsi-fungsi Islam terstruktur dalam organisasi negara.

⁷⁹Tentara & Territorium III Staf Siliwangi (Bag. I), *Petikan Dari Dokumen-dokumen Mengenai Negara Islam Indonesia* . 1951, hal. 24.

BAB VI

KONFERENSI CISAYONG 1948

VI.1. Konferensi Cisayong 1948

Sesungguhnya Sarekat Islam telah menghantarkan Indonesia kepada kemerdekaan dengan memberikan benih-benih ideologi “National Vrijheid”¹ yang melahirkan corak gerakan emansipatoris dengan simbol karakter H.O.S Tjokroaminoto. Sedangkan sifat reformisme Islam dari Sarekat Islam yang diwakili oleh simbol H. Agus Salim, tetapi reformasinya lebih dari sekedar reformasi dalam bidang sosial, pendidikan dan peribadatan. Ideologi Sarekat Islam ini merupakan perpaduan antara Islam dengan demokrasi Barat. Pada masa pasca kemerdekaan ideologi Nasionalisme yang didasarkan atas semangat Islam diwakili oleh Masyumi.

Lain halnya dengan Darul Islam yang tumbuh di dalam situasi revolusi fisik yang mengupayakan reidentifikasi hakekat ummat dengan cara menata kembali masyarakat Islam melalui penentuan kembali Syariat Islam dan noma-norma Sosial dari hakekat Islam.² Tujuan akhir Darul Islam kemerdekaan Islam yang hakiki atau dikenal dengan istilah terciptanya “wilayah hukmu al-Islam”.³ Langkah-langkah yang dilakukan untuk itu: Pertama, hijrah secara ideologis atau reidentifikasi

¹Kebangsaan yang merdeka

²Definisi fundamentalisme Islam dari Sayyed Hossen Nashr, Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, Dari Fundamentalism, Modernisme Hingga Post Modernisme*, 1996. hal. 114-115.

³Terbentuk Negara Islam dalam pengertian fiqih adalah Daulah Islamiyah.

identitas Muslim: Kedua mempersiapkan wilayah hukum dan angkatan perang; Ketiga mempersiapkan struktur pemerintahan ; Keempat mempersiapkan konstitusi.

Menurut alam pikiran yang berkembang di kalangan Masyumi daerah Priangan, terutama yang berasal dari KPK-PSII bahwa perjuangan ummat Islam tidak bisa dihentikan dan harus dilanjutkan dengan tahapan dari revolusi Nasional menuju revolusi Islam. Situasi pada saat itu di kalangan ulama dan santri yang tergabung dalam lasykar-lasykar dan badan-badan perjuangan dalam memepertahankan kemerdekaan nasional, timbul alam pikiran yang menyatakan apakah mereka yang gugur itu mati syahid, sementara menurut ukuran fiqih dan pemahaman saat itu, bahwa syarat sahnya syahid itu harus ada yang memepertanggung jawabkan secara hukum, maka hal ini dibutuhkan seorang imam yang terpilih.⁴ Hal inilah salah satu latar belakang yang mendorong Masyumi daerah Priangan melaksanakan Konferensi di Cisayong, selain faktor-faktor politik dan situasi eksternal.

Konferensi diadakan pada tanggal 10-12 Februari 1948 di Pamedusan Kecamatan Cisayong atas anjuran S.M. Kartosoewirjo dan R. Oni I Qital, dengan tujuan menentukan sikap Ummat Islam terhadap Persetujuan Renville dan merundingkan cara bagaimana menentukan perjuangan selanjutnya. Konferensi dihadiri oleh 160 wakil wakil organisasi Islam dan sebagian besar Pengurus Masyumi daerah Priangan, para utusan dari Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Garut dan Bandung, dan Diantara mereka yang hadir Kartosoewirjo sebagai wakil

⁴James Turner Johson, *Perang Suci Atas Nama Tuhan: Dalam Tradisi Barat dan Islam*, 2002, hal. 102-104.

pengurus besar Masyumi untuk Jawa Barat⁵, Kamran untuk sebagai komandan teritorial sabilillah. Sanoesi Partawidjaja sebagai sekertaris Masyumi daerah Priangan, R. Oni I. Qital sebagi pemimpin Sabilillah Daerah Priangan, Dahlan Lukman sebagai ketua GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia) untuk Priangan, Affandi Ridhwan sebagai sekertaris GPII untuk Priangan, dan Siti Murtadji'ah dari GPII putri⁶. Utusan Masyumi Bandung adalah Iyet Hidayat, utusan dari Ciamis H. Sulaeman, utusan dari Priangan H. Sobari, utusan dari Sumedang Samsu, dari Hisbullah hadir Rusyad Nurdin, utusan dari Garut hadir Sayid Umar bin Yasir. Yang mewakili ulama adalah Zaenal Hasan. Utusan dari DMOI (Dewan Pertahanan Oemmat Islam) adalah M. Thohir. Sebagai ketua Masyumi cabang Garut hadir Saefullah, begitu juga 4 ketua DPOI (Dewan Pertahanan Oemmat Islam) yang lain. Dari Bandung dan Sumedang hadir masing-masing 2 utusan DPOI di cabang Bandung dan Sumedang, selain itu dari Tasikmalaya dan Ciamis 3 orang anggota MPOI.⁷

Konferensi ini sesungguhnya adalah konferensi Masyumi Daerah Priangan walaupun diikuti pula oleh wakil Pesindo dan Pasukan Pangeran Papak dari Sumedang, Pasukan Elang dari Cirebon.⁸ Menurut Dahlan Lukman bahwa

⁵Komisaris Masyumi Jawa Barat

⁶Wawancara dengan Dahlan Lukman pada tanggal 12 Juni 2001 di Bekasi.

⁷Wawancara dengan Affandi Ridhwan pada tanggal 27 Juni 2001 di Jakarta, Wawancara dengan Dahlan Lukman pada tanggal 12 Juni 2001 di Bekasi, Wawancara dengan Ules Sudjai pada tanggal 16 Juni di Cianjur, Dinas Sejarah AD, Tentara & Territorium III Staf Siliwangi Bagian I, *Petikan dari Dokumen-dokumen Mengenai Negara Islam Indonesia*, 1951, hal. 8, Holk H. Dengel, *Darul Islam dan Kartosurjo*, 1995, hal. 65.

⁸Wawancara dengan H. Maskur pada tanggal 15 Juli 2001 di Singaparna.

Konferensi tersebut merupakan pertemuan yang telah direncanakan oleh R. Oni I. Qital bersama S.M. Kartosoewirjo dalam upaya memecahkan persoalan umat Islam terutama daerah Jawa sebelah Barat, tempat yang dipilih adalah di Pamedusan Cisayong, karena jauh dari jangkauan tentara Belanda yang sudah makin gencar mencari orang-orang yang tidak setuju dengan Persetujuan Renville. Adapun tempat yang dipilih di rumah Sarhani, tempat bekas rumah tersebut kini sudah menjadi kebun singkong, sedangkan mushollanya masih ada walaupun sudah direnovasi. Menurut Dahlan Lukman sendiri pada Konferensi Cisayong itulah merupakan pertemuan terakhir dengan Kartosoewirjo.⁹

Dalam Konferensi terlibat pembicaraan menurut Kamran "kalau pemerintah RI tidak sanggup membatalkan Renville, lebih baik pemerintah kita bubarkan dan membentuk lagi pemerintah baru dengan corak baru. Di Eropa dua aliran sedang berjuang dan besar kemungkinan akan terjadi perang Dunia III, yakni aliran Rusia lawan Amerika". Kamran selanjutnya menerangkan "kalau kita disini mengikuti Rusia, kita akan digempur Amerika, begitu pula sebaliknya. Dari itu, kita harus mendirikan negara baru, yakni negara Islam. Timbulnya Negara Islam ini, yang dapat menyelamatkan Negara". Untuk itu menurut Kamran harus diadakan persiapan, antara lain harus dapat dikuasai satu daerah tertentu yang dapat dipertahankan sungguh-sungguh, merupakan daerah basis. Sedangkan R. Oni, berpendapat "Dengan adanya Persetujuan Renville maka tentara sabil harus melanjutkan

⁹Wawancara dengan Dahlan Lukman pada tanggal 12 Juni 2001 di Bekasi. Pada saat itu Kartosoewirjo terlambat hadir, yang seharusnya konferensi diadakan tanggal 8 Februari 1948, karena

perjuangan. Untuk mendapatkan kekuatan dengan mengumpulkan senjata yang ada ditangan Ummat Islam, membeli dan melucuti senjata liar”.

Menurut Dahlan Lukman “Masyumi dengan semua organisasinya sementara ini harus dihentikan.”¹⁰ Sedangkan Affandi Ridhwan dari GPII¹¹ mengusulkan supaya pemerintah di Yogyakarta didesak agar Jawa Barat diserahkan kepada ummat Islam. Dan dia usulkan kepada Pengurus Besar Masyumi di Yogyakarta.¹¹ “supaya Soekarno diturunkan, baik sandiwara atau tidak kalau perlu “Coup d' etat”. Atas usul Affandi Ridhwan tersebut Kartosoewirjo menjawab sebagai berikut, “Jawa Barat bukanlah Shanghai, bukan negara Internasional, dan kudeta hanya dijalankan oleh golongan ilegal, sedangkan Masyumi adalah sebuah partai yang legal”. Seterusnya Kartosoewirjo menerangkan menurut pengamatan tersebut sukar untuk dijalankan.

Usul yang diterima adalah, agar Masyumi menghentikan semua kegiatannya di Jawa Barat sampai waktu tertentu dan diganti dengan Majelis Islam yang diketuai oleh seorang Imam. Sedangkan usul dari utusan dari Ciamis H. Sulaeman supaya “S.M. Kartosoewirjo” diangkat menjadi “Imam”, yang kemudian Dahlan Lukman berbicara lagi “bahwa setuju dengan usulan delegasi dari kabupaten Ciamis bahwa seluruh organisasi Islam di daerah Jawa bagian sebelah barat ini dibubarkan dan dibentuk Majelis Islam untuk mempersatukan potensi Ummat Islam, tetapi dari

harus menghindari tentara Belanda yang sudah memasuki daerah Garut dan Tasikmalaya.

¹⁰Alasan-alasan pembubaran Masyumi Jawa Bagian Sebelah Barat, supaya tidak terkait dengan Republik Inodnesia yang sudah menerima Persetujuan Renville dan Belanda memang memburu anggota-anggota Masyumi sampai ke pelosok desa-desa, Transkripsi Wawancara dengan H. Zainal Abidin pada tanggal 18 Januari 1971 di Bandung (Dokjarah TNI AD)

¹¹Dinas Sejarah Militer AD, Tentara & Teritorium III, 1951, hal. 8-9

pihak pemuda (GPII) keberatan dengan istilah Imam lebih baik ketua sadja.” Kemudian K.H. Gozali Toesi mengatakan “saja seorang kiai jang berasal dari Banten yang lama tinggal di Jakarta, saya berbicara atas nama ummat Islam bangsa Indonesia, setuju sepenuhnya dengan usulan delegasi dari Ciamis, siapa yang tidak setuju dengan istilah Imam, lebih baik keluar dari ruangan musyawarah ini, supaya tidak mengganggu jalannya musyawarah ini”.¹² Suasana seperti itulah yang terjadi dalam sidang Konferensi di Pamedusan Cisayong.

Menanggapinya usul yang menyebutkan Kartosoewirjo menjadi Imam, Kartosoewirjo minta waktu untuk berpikir, dan dia juga tidak setuju dengan kata Imam.¹³ Noer Loebis, bila kita sekarang diangkat seorang "Imam" hendaknya diinsyafi bahwa pemimpin sekarang harus berlainan dengan pemimpin di masa lampau.¹⁴

Setelah melakukan musyawarah selama dua hari, maka hasil keputusan yang terpenting dalam konferensi ini adalah Membekukan Masyumi Jawa Barat. Menyetujui rencana yang disusun mengenai: Politik Ummat Islam, Susunan Ketentaraan, Kesatuan Pimpinan, Mengumpulkan Senjata. Keputusan penting yang merupakan titik tolak dari gerakan Darul Islam adalah mengangkat S.M. Kartosoewirjo sebagai Imam Ummat Islam Indonesia di Jawa Sebelah Barat dan mengangkat pimpinan Ketentaraan Islam Indonesia Daerah Priangan. Memberi

¹²Wawancara dengan Dodo Mohammad Darda pada tanggal 5 Juli 2001 di Bandung.

¹³Dinas Sejarah Militer AD, Tentara & Teritorium III, 1951, hal. 10

¹⁴Ibid, hal. 10

kesempatan kepada R. Oni I. Qital , sebagai pemimpin Ketentaraan di Priangan, untuk menyusun ketentaraan dalam waktu 3 bulan.¹⁵

Keputusan tentang rencana pengumpulan senjata meliputi: Mengumpulkan dan memusatkan segenap senjata Sabilillah yang telah ada. Memerintahkan kepada seluruh Ummat Islam supaya menyerahkan senjata yang ada padanya dan segera dikirimkan kepada Resimen untuk dijadikan senjata Tentara Islam. Memerintahkan segenap Ummat Islam supaya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk membeli senjata. Di resimen akan dibentuk bagian persenjataan yang dapat membuat senjata sendiri senjata-senjata liar baik yang ada pada tentara (luar Tentara Islam) ataupun pada Rakyat yang tidak mau menyerahkannya kepada tentara Islam, akan dirampas.¹⁶

Beberapa hari sesudah Konferensi Cisayong, pada tanggal 15 Februari 1948 diadakan rapat-khusus untuk merundingkan pembentukan ketentaraan. Rapat tersebut dihadiri oleh R. Oni I. Qital , M. Oedjoe, Saefulloh, Choeruddin, Boesjaeri , R. Soerjana dan yang lainnya. Rapat ini dengan tujuan memberikan bentuk yang kongkret kepada Tentara Islam Indonesia. Tidak hanya dibentuk Tentara Islam Indonesia yang sebenarnya, tetapi juga sejumlah korps khusus seperti BARIS (Barisan Rakyat Islam) dan PADI (Pahlawan Darul Islam) diadakan.¹⁷ Markas besarnya didirikan di Gunung Cupu, pangkalan pasukan Sabili'llah yang dipimpin R.

¹⁵Ibid, hal. 9.

¹⁶ Ibid, hal 6.

¹⁷Pinardi, *Sekarnadji Maridjan Kartosuwirjo*, 1964, hal. 57.

Oni I. Qital. Dia sendiri diangkat menjadi komandan daerah Tentara Islam Indonesia di Priangan dan merangkap menjadi komandan PADI, demikian pula menjadi kepala pasukan polisi rahasia Mahdiyin¹⁸. Juga dibentuk korps polisi biasa. Mulanya badan ini disebut Badan Keamanan Negara, tetapi namanya diubah menjadi Polisi Islam Indonesia pada Oktober 1949, sesudah proklamasi resmi Negara Islam Indonesia

Adapun keputusan rapat mengenai susunan ketentaraan daerah Priangan:

1. Komandan Resimen : R. Oni I Qital
2. Staf Umum/Kepala Siasat : R. Soerjana
3. Sekertaris : T. Bachri
4. Bagian ketentaraan : M. Oedjoe
5. Bagian Tata Usaha : E.Z. Muttaqien
6. Bagian Pendidikan/Kmd. Detasemen : O. Saefulloh
7. Bagian Perlengkapan : S. Oedin
8. Bagian Keuangan : Enod. Lukman
9. Bagian Persenjataan : Soekarno
10. Bagian Kesehatan (Palang Merah) : Karim (Orang Jepang)
11. Bagian Perhubungan : Baridji;
12. Bagian penyelidikan : (dirahasiakan)
13. Bagian Perkabaran : O. Kosasih
14. Barisan PADI : R. Oni. I. Qital

¹⁸Mahdiyin artinya terpimpin secara benar.

15. Barisan Algojo : R. Oni. I. Qital

16. Pengawal Komandan Resimen :

1. Abdoellah
2. Dimjati
3. Moehji
4. Sadili¹⁹

Selanjutnya PADI (Pahlawan Darul Islam) dibentuk, yang anggotanya berasal atau terdiri dari barisan pertahanan sipil yang sebelumnya telah dibentuk. R. Oni I. Qital yang diangkat menjadi Komandan Resimen yang kemudian diberi nama Resimen Sunnan Rahmat. Seterusnya diangkat pula komandan-komandan dari daerah tempat batalyon yang direncanakan akan didirikan. Dengan demikian S. Otong dari Bandung menjadi komandan Batalyon I (Batalyon Sangkuriang). H. Zainal. Abidin dari Limbangan Komandan Batalyon II (Batalyon Sapu Jagad), M. Noor Loebis dari Sumatera Barat komandan Batalyon III (Batalyon Halilintar) dan Komandan Batalyon IV diserahkan kepada Adah Djaelani dari Singapura. (Batalyon Kholid bin Walid)²⁰

Setelah Ketentaraan dibentuk dengan corak baru pada tanggal 15 Februari 1948 ditetapkan Markas besar Pasukan di Cihaur. Namun karena pertempuran dengan Belanda dan pasukan ini terdesak, maka markas besarnya dipindahkan ke

¹⁹ Dinas Sejarah Militer AD, Tentara & Teritorium III, 1951, hal. 10

²⁰ Wawancara dengan H. Maskur pada tanggal, 15 Juli 2001 di Singapura, Wawancara dengan Jamhur Sudrajat pada tanggal 19 Januari 2000 di Garut, Dinas Sejarah Militer AD, Tentara & Teritorium III, 1951, hal. 10. Dokumentasi Sejarah Militer AD, *Darul Islam*, 1952, hal. 70

daerah Bojonggaok. Karena persenjataan masih terbatas daerah Bojonggaok diserang pihak Belanda, kedudukan pun dipindahkan ke Cidolog. Setelah Cidolog diserang pihak Belanda, pada akhir bulan Februari 1948 tempat kedudukannya dipindahkan lagi ke Kadupugur. Setelah itu tempat kedudukannya selalu beralih tempat; hanya didaerah sekitar gunung Cupu yang agak lama, bahkan ditempat itulah TII mulai berkembang melebarkan sayapnya.

Tugas Pertama yang harus dilakukan para Komandan Batalyon Resimen I, pada saat pembentukan Ketentaraan, diperintahkan: oleh R. Oni. I. Qital Sepulangnya dari Konferensi harus segera menyusun staf Batalion yang lengkap. Harus segera mendaftarkan senjata yang telah ada pada Sabilillah, dan mengumpulkan senjata yang masih terpencar. Harus segera mengirimkan daftar banyaknya anggota tentara, terutama calon Komandan, sedang Seksi Komandan dapat di angkat oleh Komandan Batalion. Daftar tentara yang harus dikirimkan ialah anggota tentara yang sudah diseleksi dalam hal kejujuran, keberanian dan kesehatannya. Laporan-laporan tersebut, selambat-lambatnya dalam 15 hari harus sudah diterima oleh komandan Resimen. Seminggu setelah Konferensi di Pamedusan, terjadilah pertempuran yang pertama dengan pasukan Belanda pada tanggal 17 Februari. Bagi Kartosoewirjo hari itu merupakan awal revolusi Islam di Jawa Barat yang kemudian dirayakan setiap tahun sebagai "Hari Angkat Senjata".²¹

²¹Komando Daerah Militer VI Siliwangi Team Pemeriksa, *Berita Atjara Interogasi III*, 20 Juni 1962, hal. 4, Dokumentasi Sejarah Militer AD, *Darul Islam*, 1952, hal. 70.

Dalam pandangan Darul Islam bahwa Konferensi Cisayong 1948 merupakan musyawarah atau dikenal dengan “Syuro Ummah”²² yang dilandasi nilai-nilai Al Quran, yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Islam yang bertanggung jawab, dengan “Syuro Ummah” diambil keputusan untuk “mendirikan Majelis Islam yang merupakan perwujudan manifestasi dari gerakan Islam dikalangan ummat Islam untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan dan perjuangan Islam untuk merealisasi berdirinya Negara Islam yang merdeka”.

Majelis Islam (MI) menurut pandangan Darul Islam adalah sebagai wadah satu-satunya organ perjuangan ummat Islam yang sah baik secara syar’i maupun secara politis melalui proses istikhlaf “syuro ummah” pada tanggal 10-11 Februari 1948 merupakan hasil ijtihad wakil ummat Islam yang representatif dari Jawa bagian sebelah Barat.²³ Kemudian berlanjut hingga proklamasi Negara Islam Indonesia sebagai pembentukan negara basis yang akan berproses ke tingkat kekhalifahan Islam di tingkat global.

VI.2. Pertempuran Gunung Cupu

Setelah Belanda mengetahui bahwa R. Oni I. Qital memusatkan pasukannya di Gunung Cupu, Belanda mulai menyerang pasukan itu dari segala penjuru., maka

²²Syuro Ummah adalah musyawarah yang mewakili ummat Islam untuk memilih pemimpin Islam yang bertanggung jawab. Imam biasa digunakan sebatas lokalitas tertentu, sedangkan pemimpin Islam tingkat dunia disebut Khalifah, Al Quran Surat 3 ayat 104, 110, 144, 155, 164; Surat 6 ayat 106. Metoda penulisan (istikhlaf) pimpinan ummat Islam disebut pula syuro siyasah atau syuro ummah pada saat suatu daerah vacuum of power.

²³ Wawancara dengan Tahmid Rahmat Basuki pada tanggal 7 Juni 2000 di Bandung.

terjadi pertempuran di daerah Gunung Cupu sebagai pertahanan Majelis Islam, mulai tanggal 17 Februari 1948, dan bertahan selama empat bulan. Batalyon III bertahan di daerah Indihiang sampai Cihaur yang dibantu oleh Toha Arsyad dari Batalyon IV, Batalyon II dibantu pasukan dari Cirebon pimpinan Abdul Hanan. Cikoneng dan Cihaur merupakan daerah frontal Belanda berhadapan dengan Indihiang, Rajapolah dan Cibeureum, Citanduy, TII berada di posisi seberang Citandus Ciamis diserang dari darat, dan udara.²⁴

Salah satu daerah yang amat berarti bagi gerakan Darul Islam adalah daerah sekitar Gunung Cupu²⁵ (Ciamis Utara), sebab di daerah itulah mereka mulai memperkembangkan ketentaraan (TII), pemerintah sipil (MI) dan lain-lain, alat-alat kekuasaannya. Daerah ini diduduki oleh Pasukan Sabilillah sejak meletusnya aksi militer Belanda pertama dan oleh karena di daerah ini baik sekali dilihat dari sudut perbekalan maupun kemiliteran, diantaranya banyak lobang perlindungan dan pertahanan yang tadinya dibuat oleh militer Jepang untuk melakukan perlawanan gerilya dengan sekutu, maka R. Oni I. Qital selaku komandan Sabilillah memilih tempat ini sebagai daerah kedudukannya.

Setelah Belanda menduduki kota Tasikmalaya, diantara perlawanan-perlawanan yang di dapat dari para pejuang kemerdekaan RI dengan selalu tidak kurang sengitnya, perlawanan dari pasukan Sabilillah yang berkedudukan di daerah Gunung Cupu-lah dirasanya selalu paling berat, bahkan pada permulaan fihak

²⁴Wawancara dengan *Jamhur Sudrajat* pada tanggal 19 Januari 2000 di Garut

Belanda selalu menderita kekalahan walaupun mengadakan serangan disertai dengan pesawat terbang, demikian oleh karena kedudukan tempat Pasukan Sabilillah didalam melakukan perlawanan sudah mulai berkembang pemikiran (mentalite), sehingga yang gugur dianggap sebagai "syuhada". Kemenangan yang dialami dengan kepercayaan dan keyakinan terhadap pertolongan Tuhan, namun menurut anggapan para ulama saat itu syarat seseorang mati syahid itu perlunya seorang imam yang akan mempertanggungjawabkan di Yaumul Akhir. Dengan demikian yang mendorong diadakan "Konferensi Cisayong", adalah alam pikiran untuk mengangkat seorang Imam²⁶.

Dengan begitu lamanya mempertahankan daerah Gunung Cupu sampai akhir Mei 1948, walau hampir setiap hari mendapat serangan dari pihak Belanda, menunjukkan betapa kuatnya bentuk pertahanan yang mereka susun di daerah itu. Diantaranya yang menyebabkan mereka kuat ialah banyak para kiai yang dikejar-kejar oleh militer Belanda, meninggalkan tempat tinggalnya dan disertai para santri-santrinya melarikan diri ke daerah Gunung Cupu. Sesampainya di tempat itu para santri yang sekiranya dapat dijadikan tentara, dilatih dalam hal ketentaraan, sedang para Kiai yang tua-tua dikumpulkan di satu tempat tersendiri, dimana mereka diberi tugas: melakukan shalat istia'anah (hadjat), bacaan Al Quran sebagai doa (ayat-ayat yang bertalian dengan perang), Dzikir, Riyadhoh masing-masing menurut apa yang

²⁵Gunung Cupu adalah nama suatu desa, bukan gunung termasuk Kabupaten Ciamis terletak antara Ciamis dan Tasikmalaya dibatasi oleh sungai Citanduy.

²⁶Wawancara dengan Tahmid Rahmat Basuki pada tanggal 7 Juni 2000 di Bandung.

dipandang perlu; Shalat tahajud Sujud syukur, dimana ada kemenangan Islam. Markas dimana para Kiai berkumpul, dinamakan "Markas Doa"²⁷

Dengan demikian anggota-anggota pasukan Sabilillah semakin lama, semakin banyak jumlahnya, sedang di dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda, mereka sangat bersemangat oleh karena mempunyai kepercayaan bahwa ada yang mendoa guna keselamatan mereka (yaitu Markas Doa) dan bila yang gugur dalam pertempuran keyakinannya menjadi "syuhada".²⁸

Di "markas doa" itu siang-malam selalu mendoa sedikitnya 41 orang, diantaranya harus ada seorang pemimpin. Hal-hal yang harus dilakukan di markas doa ialah shalat istianah (hajat), syukur, membaca ayat-ayat Al Qu'ran sebagai doa, terutama ayat-ayat yang bertalian dengan perang, dzikir dan shalat tahajud. disamping itu mereka juga dididik dalam bidang ideologi dan politik. Kepada mereka diberi penerangan tentang situasi perjuangan dan jalannya perang yang sedang berlangsung.

Tugas ketua "markas doa" ialah, untuk mengumpulkan "hal-hal tanda gaib yang terdapat sehari-hari dan disampaikan kepada pembesar yang tertinggi di tempat itu, baik sipil atau militer, selanjutnya di mana perlu ke pusat.

Daerah Gunung Cupu dapat mereka pertahankan sampai akhir bulan Mei 1948, barulah Belanda bisa mengerahkan pasukan secara besar-besaran untuk tindakan menghancurkan pertahanan Majelis Islam, setelah mengadakan persiapan

²⁷Wawancara dengan Zainal Mutaqin pada tanggal 10 Februari 2001 di Bekasi

²⁸Menurut keyakinan kaum Muslimin, baik yang dari Al Quran maupun Al Hadits, bahwa mereka yang syahid mereka tidak mati tetapi hidup, dan balasannya adalah Syurga, Al Quran Surat 2

matang tidak kurang dari 14 batalyon, yang diperkuat dengan tank baja serta didukung oleh angkatan udara, Belanda bermaksud untuk mengepung dan menghancurkan daerah Gunung Cupu, sebagai basis pertahanan TII. Jendral Spoor, yang menjabat sebagai gubernur militer sekaligus memimpin langsung gerakan penyerangan ini, yang ingin menghancurkan pertahanan gunung Cupu secara tuntas dalam waktu singkat. Mereka masuk dari segala arah, kemudian memborbardir dengan meriam dan kanon. Ternyata usaha Belanda tidak dapat terlaksana dengan secepatnya, karena daerah pertahanan Gunung Cupu dibentengi oleh sungai Citanduy yang cukup lebar dari daerah selatan, sedangkan dari daerah utara ada bukit-bukit yang sudah dijaga oleh TII. Hal ini sudah diatur oleh R. Oni, sehingga Belanda Sulit mendobrak pertahanan ini.²⁹

Setelah merasa terkurung oleh pasukan Belanda. R. Oni I. Qital selaku Komandan Resimen memerintahkan kepada K H. Zaenal Hasan dan Kiyai Masduki, masing-masing Bupati Ciamis dan Camat Cikoneng dari Majelis Islam , untuk melakukan sholat istikhoroh dengan maksud mencari jawaban bagaimana seharusnya dalam menghadapi keadaan waktu itu. Setelah beberapa hari berselang kedua kiai itu melaporkan hasil istiharohnya, R. Oni I. Qital mengambil keputusan untuk memindahkan pasukannya ke Buni Asih, kemudian ke Tejamaya Kecamatan Rajapolah, sedang para Kiai dan santri-santri yang dipandang tidak dapat

: 154; 3 : 169, 170, 171; 47: 4; 4 : 69, Wawancara dengan Jamhur Sudrajat pada 19 Januari 2000 di Garut.

²⁹Republik Indonesia, *Propinsi Djawa Barat*, 1953, hal. 216.

melanjutkan perlawanan memakai senjata, diperintahkan pulang ke daerahnya masing-masing dengan diberi tugas tertentu.

Belanda kemudian mengerahkan kekuatannya dibawah pimpinan Westerling dengan "Divisi 7 Desember " mendobrak Gunung Cupu masuk melalui Gunung Bongkok, pada awal Juni 1948. Setelah Peristiwa Gunung Cupu Kekuatan Majelis Islam dibawah pimpinan S.M. Kartosoewirjo pindah ke Lewisari dan bergerak ke arah daerah Selatan daerah Sodong, kemudian S.M. Kartosoewirjo selaku Imam dari MI, mengumumkan, memerintahkan gerakan MI harus melakukan perang gerilya bukan gerakan frontal, perang gerilya ini nantinya dikenal dengan "gerakan kirikumi"³⁰, untuk menghancurkan Pos-pos TNI setelah TNI kembali ke Jawa Barat. Sebab bila gerakannya frontal maka Belanda mampu menghimpun kekuatan. Semua kekuatan yang dikenal sebagai Mujahid Gunung Cupu (Gunung Tjupu=GT) pecah dari Gunung Cupu dan menyebar ke berbagai daerah dari Cirebon sampai ke Banten. Gerakan-gerakan yang hampir sama dengan gerakan Gunung Cupu ini, seperti Gerakan AOI (Angkatan Oemat Islam) di Kebumen yang dipimpin oleh Kiai Mahfudz Abdurrahman yang bermarkas di Somalangu, dan yang bermarkas di Brebes, Tegal yang dipimpin oleh Amir Fatah dinamakan APS (Angkatan Perang Sabil), kemudian S.M. Kartosoewirjo mengutus Kamran Hidayatullah untuk

³⁰Taktik kirikumi dalam bahasa orang-orang Darul Islam disebut taktik "kulunu", untuk menghancurkan markas musuh cukup dibutuhkan beberapa orang prajurit yang siap syahid dan harus disiplin, baru ketika musuh lengah mereka menyerang markas, kadang-kadang mereka harus menunggu sampai malam, Kamran Hidayatullah, *Pedoman Gerilya*, 1952, Wawancara dengan H. Maskur pada tanggal 15 Juli 2001 di Singaparna, Wawancara dengan Toha Mahfud pada tanggal 10 Agustus 2002 di Sukabumi.

melakukan koalisi, yang kemudian baik APS maupun AOI menjadi MI yang dikoordinasikan oleh MI Pusat di Jawa sebelah bagian Barat.³¹

Pada waktu pasukan TII meninggalkan daerah Gunung Cupu (akhir bulan Mei 1948) banyak pelarian-pelarian pemimpin-pemimpin Islam, 'ulama, Kiai dan para santri yang tadinya datang sekedar mencari perlindungan, dan petolongan karena mereka bukan saja dikejar oleh tentara Belanda melainkan juga oleh "komunis serta sosialis", disuruh pulang dan diberi tugas setibanya di tempat masing-masing: membentuk PADI (Pahlawan Darul Islam) dan membentuk BKN (Badan Keamanan Negara), yang mempunyai kewajiban: sebagai pelopor, menerima pasukan TII bila datang ke daerahnya, melakukan sabotase kepada Pemerintah bukan NII melakukan penculikan-penculikan; pembunuhan terhadap orang-orang penghianat agama negara dan bangsa.

Adapun ketentaraannya sejak itu dipecah-pecah sehingga tidak lagi merupakan pasukan besar yang berkumpul disatu tempat, tetapi merupakan kelompok kecil-kecil yang dapat bergerak cepat dan sangat mobiel. Disamping itu di tiap-tiap batalion diperkenankan membentuk suatu pasukan yang dinamakan "Pasukan Silam" yang diberi tugas: mengadakan penyelidikan dengan sekalian diberi kuasa untuk bertindak (menculik, membunuh, dsb); menjalankan infiltrasi dengan pura-pura untuk menjadi anggota atau bekerja pada ketentaraan, kepolisian, sipil dari pihak musuh.

³¹Wawancara dengan H. Maskur pada tanggal 15 Juli 2001 di Singapura.

Dengan demikian jelas apa sebabnya pasukan Darul Islam sangat mobiel dan pada umumnya mudah memasuki satu daerah, oleh karena hampir di tiap-tiap tempat yang dikunjungi telah ada persiapan dan ada organisasi dan jaringan. Orang-orang yang sebelumnya telah diberi tugas untuk menerimanya.

VI.3. Tindak Lanjut Konferensi Cisayong

Untuk memperluas pengaruh perjuangan ummat Islam daerah Priangan dan menyempurnakan aksi-aksi berikutnya dan sebagai tindak lanjut Konferensi Cisayong, Pengurus Masyumi Jawa Bagian Barat yang telah dibekukan dan berubah menjadi Majelis Islam (MI), pada tanggal 1-2 Maret mengadakan Konferensi di Cipeundeuy, Kecamatan Bantarujeg, daerah Majalengka. Tempat konferensi tersebut terletak di lereng Gunung Ciremai. Dalam Konferensi Bantarudjeg hadir semua pemimpin cabang-cabang Masyumi daerah Jawa Barat seperti dari Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, Cirebon dan juga para Komandan TII. Para pimpinan yang hadir dalam konferensi tersebut adalah S.M. Kartosoewirjo, R. Oni I Qital, K.H. Gozali Toesi, Sanoesi Partawidjaja, Toha Arsjad, Kiai Abdul Halim. Ketika semua peserta konferensi hadir setelah penempuh perjalanan dengan jalan kaki sehari-hari dari tempat masing-masing seperti Jakarta, Banten, Bogor dan Priangan, Kamran membuka konferensi tersebut pada jam 8 malam. Sanoesi Partawidjaya menjelaskan keputusan-keputusan konferensi di Pamedusan, R. Oni I. Qital menerangkan peleburan Hizbullah dan Sabilillah menjadi tentara Islam.

Ketika Konferensi dilanjutkan pada hari berikutnya, semua keputusan konferensi Pamedusan disetujui Kartosoewirjo ditetapkan sebagai Imam di Jawa sebelah Barat, Keputusan berikutnya adalah Hizbullah Cirebon dilebur menjadi TII dan Kamran diangkat menjadi panglima divisi. Konferensi Cipeundeuy dipergunakan untuk meninjau serta merumuskan langkah-langkah berikutnya, mengingat Tentara Islam Indonesia terutama Divisi I Sunan Rahmat, sedang bertempur di Gunung Cupu melawan Pasukan Belanda. Dalam Konferensi tersebut telah berhasil mematangkan beberapa konsepsi, sehingga dalam waktu singkat pelaksanaannya dapat diterapkan baik di dalam maupun di luar daerah Priangan.

Pada hari pertama konferensi itu pimpinan sidang meninjau kembali rencana-rencana yang dibuat pada Konferensi Cisayong (Pamedusan) mengenai; Politik Ummat Islam, Susunan Ketentaraan dan Kesatuan Pimpinan. Akhirnya dalam konferensi tersebut mengesahkan rencana-rencana tadi, yang meliputi Empat program utama Majelis Islam yang disebut sebagai Program Politik Ummat Islam.

Program tersebut terdiri dari : pertama, membuat brosur tentang pemetjahan politik pada dewasa ini, yakni perlunya lahir satu negara baru, yakni negara Islam (Pengarang S.M. Kartosoewirjo, untuk disiarkan ke seluruh Indonesia); Kedua, mendesak kepada Pemerintah Pusat Republik Indonesia agar membatalkan semua perundingan dengan Belanda; kalau tidak mungkin, lebih baik Pemerintah dibubarkan seluruhnya dan dibentuk suatu Pemerintah baru dengan demokrasi yang sempurna (Islam); Ketiga, mengadakan persiapan untuk membentuk Negara Islam

jang akan dilahirkan, bilamana Negara Djawa Barat ala Belanda lahir, atau Pemerintah Republik Indonesia Bubar; Keempat, tiap-tiap daerah yang telah kita kuasai sedapat-dapatnya kita atur dengan peraturan Islam, dengan seizin petunjuk Imam.

Untuk melaksanakan Program Politik tersebut dibuat langkah-langkah taktis yang disebut "daftar usaha cepat ". Memberikan penerangan seluas-luasnya kepada rakyat, bahwa dengan pebluciet itu kita tidak akan merdeka. Mengoreksi segala pendapat semua pegawai Republik Indonesia Mengadakan Perhubungan ke seluruh Indonesia khususnya, untuk melancarkan segala usaha. Mengoreksi orang-orang Islam yang bekerja pada Pemerintah pendudukan Belanda. Mengusahakan secepat mungkin agar kepala-kepala desa yang berjiwa Islam, baik yang masih republiken ataupun kepala-kepala desa di daerah pendudukan Belanda. Di daerah pendudukan Belanda supaya mengadakan gerakan satia-graha. Mengobar-ngobarkan (memperhebat) penerangan tentang tauhid, amal saleh dan semangat berkorban. Mendidik rakyat untuk membiasakan hidup sehari-hari berdiri di atas dasar Islam hingga patut menjadi warga negara Islam (Islamiticche Burgenschap). Dengan segala daya upaya memperdalam dan mempertinggi faham jihad dan amal saleh di tiap-tiap lapangan dan keadaan. Menanam benih keadilan dalam masyarakat Islam Indonesia.

Konferensi Bantarudjeg, juga menata kembali seluruh ketentaraan, dalam rangka mempertahankan Majelis Islam. Pengorganisasian tersebut adalah pertama, Mengadakan kesatuan Ketentaraan Ummat Islam dari Hizbullah dan Sabilillah

didjadikan Tentara Negara Islam dan diberi nama "Tentara Islam Indonesia". Kedua, Di seluruh daerah dibelakang "Demarkasi Van Mook" (Jawa sebelah Barat) dijadiakan 1 Divisi Tentara Islam Indonesia dengan bersendjata lengkap (1: 1).

Selanjutnya ditetapkan pula, pertama, Kamran sebagai Panglima Divisi, sedang stafnja diambil dari daerah Priangan dan Cirebon. Sementara yang menjadi koordinator dari dua daaerah tersebut. Sebelum tergabungnya Resimen yang lain; Kedua, daerah Priangan dan Cirebon bersedia membantu usaha untuk menyelenggarakannya. Ketiga, mengadakan Gestapo, Barisan-barisan, Mahkamah Tentara di masing-masing Resimen, Markas Alim Ulama yang merupakan bantuan bathin. Keempat, Panglima Divisi harus masuk salah satu staf dari Majelis Islam. Selain itu dibuat siasat dengan komando akan diberikan langsung dari Panglima Divisi sendiri dan gerakan pertama akan segera dilakukan.

Untuk itu dilakukan usaha dalam menyusun ketentaraan diantaranya pertama, Mengadakan pemusatan tenaga bersenjata disatu tempat di tiap-tiap Resimen, supaya memudahkan segala usaha dan mengadakan gerakan. Kedua, memberikan tugas-tugas kepada Pemimpin-pemimpin Ummat Islam di tiap-tiap daerah, supaya dengan jalan kebijaksanaan memberikan kepada tentara dan/atau orang yang mempunyai senjata supaya dengan segera menggabungkan diri dan/atau memasrahkan senjatanya kepada Tentara Islam Indonesia. Ketiga, dengan jalan bijaksana mengambil kekayaan dan hasil-hasil bekas kekayaan Negara Republik Indonesia, dimasukkan kekayaan Negara Islam. Keempat, segala pendapatan-pendapatan dari pertempuran, kecuali

alat perang, akan diserahkan kepada Pemerintah Islam untuk diaturnya sepanjang ajaran Agama Islam. Adapun alat perang yang didapat dengan koordinasi dari beberapa kesatuan akan dibagi tiga: 1/3 untuk bezettingstroep; 1/3 untuk yang mempunyai daerah; 1/3 untuk kesatuan yang membantu. Kelima, Panglima Divisi akan segera; Mengadakan perhubungan dengan Resimen-resimen yang ada diseluruh Jawa Sebelah Barat (Bogor, Jakarta, Pekalongan dan Banyumas); Mengadakan Konferensi kedua kali dari seluruh Resimen-resimen untuk menentukan sikap bersama.

Konferensi tersebut juga mempertimbangkan keadaan dan masyarakat di Jawa sebelah Barat, setelah Naskah Renville ditandatangani dan daerah tersebut menjadi daerah Belanda. Kemudian menetapkan Keadaan yang demikian itu tidak memungkinkan Ummat Islam melakukan organisasi sebagai biasa. Maka diambil keputusan Perjuangan harus dilakukan dengan jalan lain dan Harus ada satu Pimpinan Ummat Islam seluruh Jawa sebelah Barat. Akhirnya dalam rangka konsolidasi seluruh kekuatan yang diorganisir Majelis Islam. Diputuskan bahwa Masyumi dengan segala Cabang usahanya di Jawa sebelah Barat menghentikan segala usahanya sampai waktu yang tertentu, bila keadaan telah mengizinkan kembali, terutama kalau perundingan politik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda telah selesai. Membentuk sebuah Majelis Islam dengan seorang sebagai kepala (Imam) yang dapat bertanggung jawab kepada Allah dan Masyarakat. Majelis tersebut, harus merupakan sebuah Pemerintah Islam sementara di Jawa

sebelah Barat yang harus ditaati oleh seluruh Umat Islam di daerah tersebut. Untuk Kepala (Imam) ditetapkan S.M. Kartosoewirjo.

Keputusan lain yang diambil pada Konferensi Bantarudjeg ialah: Mengangkat Kamran sebagai panglima Divisi; Membentuk Pusat Pimpinan yang dibagi dalam 3 bagian: Bagian Agama : dipimpin oleh K. Abdoel Halim dan K.H. Gozali Toesi; Bagian Politik dipimpin oleh Sanoesi Partawidjaja dan Toha Arsjad; Bagian Kemiliteran dipimpin Kamran dan R. Oni I. Qital³²

Keputusan tersebut ditandatangani oleh Kartosoewirjo sebagai wakil Masyumi untuk Jawa Barat, Kamran sebagai wakil Sabilillah, begitu juga Toha Arjad sebagai wakil GPII³³. Sebagai pengganti Masyumi kini dibentuk Madjlis Islam Pusat (MIP) yang dipimpin oleh Kartosoewirjo sebagai Imam. Skema organisasi Majelis Islam Pusat tersebut dari pusat sampai ke ranting-ranting di tingkat desa adalah sama dengan skema organisasi Masyumi semula. Dengan cara demikian Kartosoewirjo dapat terus menjaga keutuhan struktur organisasi partainya dan juga membuat segala persiapan untuk dapat mengisi vakum kekuasaan dengan "pemerintah bayangannya" dari Madjlis Islam tersebut, apabila pemerintah RI di Yogyakarta jatuh.

Konferensi Cipeundeuy merupakan kelanjutan dari Konferensi Cisayong, yang telah menetapkan S.M. Kartosoewirjo sebagai Imam dan membentuk Majelis Islam yang merupakan Pemerintahan Islam Sementara di Jawa Barat, hal ini disebabkan karena kekosongan pemerintahan di Jawa Barat akibat ditinggalkannya

³²Dokumentasi Sedjarah Militer AD, *Darul Islam*, 1952. hal 7-8.

³³Lampiran

oleh Divisi Siliwangi. Disini dikukuhkan keputusan-keputusan yang telah dicapai di Pamedusan Cisayong, selanjutnya ditekankan perlunya bersiap menciptakan suatu negara Islam. Hal ini dianggap perlu agar siap siaga sekiranya Belanda melanjutkan rencananya menciptakan Negara Pasundan yang merdeka di Jawa Barat, atau bila Pemerintah Republik harus bubar³⁴. Negara Islam sendiri belumlah terbentuk. Hanya ditekankan, pada suatu hari, bila Pemerintah Republik umpamanya digulingkan Belanda dan tidak lagi ada ataupun kehilangan legitimasinya, negara yang demikian mungkin jadi kenyataan.³⁵

Konferensi yang ketiga diadakan di Cijoho, Kecamatan Bantarujeg, Kawedanaan Telaga, Kabupaten Majalengka. Konferensi ini di dearah yang diduduki oleh Belanda.. Konferensi berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Mei 1948, Konferensi yang ketiga ini merupakan sidang kabinet pertama atau sidang Dewan Imamah pertama. Keputusan yang diambil dalam konferensi ini adalah:

Semua sidang dihadiri oleh: S.M. Kartosoewirjo, K.H. Gozali Toesi, Kamran, R. Oni I Qital, Sanoesi Partawidjaja, Toha Arsjad. Sidang dipimpin oleh S.M. Kartosoewirjo selaku Imam Pemerintah Islam sementara (Majelis Islam)

Keputusan yang diambil dalam konferensi ini adalah:

1. Mendirikan dan menguasai suatu Ibu Dacrah Islam ialah daerah-daerah dimana berlaku kekuasaan dan hukum-hukum Islam (D I)
2. Daerah-daerah di Djawa sebelah Barat diluar daerah-daerah Ibu Negara Islam (D.I) dibagi dua:
 - a. Dacrah jang setengah dikuasai oleh Ummat Islam (D II)
 - b. Daerah-daerah jang dikuasai oleh bukan filak Islam (D III)
3. Bentuk organisasi menurut Schema jang ditentukan
4. a. Hubungan antara D I dan D II merupakan ikatan dalam negara jang Merdeka

³⁴Dokumentasi Sedjarah Militer AD. *Darul Islam*, 1952, hal. 8.

³⁵Sejarah Militer AD, Tentara & Teritorium III, 1951.

- b. Hubungan antara D I dan D II dan atau D III sebagai ikatan Ummat
5. Urgensi program D I diarahkan kepada mobilisasi dan militerisasi rakyat, sehingga tiap-tiap warga negara pandai mempertahankan Negeranya (lihat lampiran)
6. Program D II dan D III tetap program Tjipcundey (lihat lamp II)
7. Pembagian pekerjaan dalam Madjelis Imamah diatur seperti berikut:
 - a. Penerangan Sdr. Toha Arsad
 - b. Keuangan Sdr. Sanoesi Partawidjaja
 - c. Kehakiman Sdr. K.H. Gozali Toesi
 - d. Pertahanan Sdr. S.M. Kartosoewirjo
 - e. Dalam Negeri Sdr. Sanoesi Partawidjaja
8. Pembentukan Bataljon . II/II
9. Naskah Bai' at (lihat lampiran)
10. Bai'at berlaku di D I, D II dan D III
11. Rentjana Keuangan.³⁶

Pada tanggal 9 sampai dengan 10 Mei 1948 ditempat yang sama rapat kembali yang memutuskan bahwa Majelis Imamah diganti menjadi Dewan Imamah dengan susunan: S.M. Kartosoewirjo sebagai Imam merangkap Kepala Majelis Pertahanan, Sanoesi Partawidjaja sebagai Kepala Majelis Dalam Negeri dan Merangkap Majelis Keuangan. Kepala Majelis Kehakiman dipegang K.H. Gozali Toesi. Kepala Majelis Penerangan dipimpin oleh Toha Arsjad, sedangkan R. Oni. I Qital dan Kamran sebagai anggota.

Anggota-anggota Majelis Islam memang tidak menyebut dirinya menteri karena kepala majelis memiliki pengertian sama dengan menteri dalam sudut pandang Tata Negara Islam. Pemerintahan yang dibentuk merupakan pemerintahan persiapan yang sudah beroperasi Tugas pokok Dewan Imamah adalah melanjutkan dan memimpin perang gerilya melawan Belanda di daerah-daerah yang telah dilepaskan kepada pengawasan Belanda oleh Tentara dan Pemerintah Republik. R.

³⁶Dokumentasi Sedjarah Militer AD, *Darul Islam*, 1952, hal. 7-12

Oni I. Qital dengan tugas merencanakan suatu struktur yang kongkret bagi Tentara Islam Indonesia yang akan segera didirikan.

Tetapi Kartosoewirjo tidak segera memproklamasikan negara Islamnya karena dia menunggu saat "vacum of power" yang memang telah diprediksinya. Langkah yang harus dilakukannya adalah melengkapi struktur Pemerintah Islam. Mereka berkeyakinan perjuangannya adalah kelanjutan dari revolusi nasional bukan menentang Pemerintah Republik. Proklamasi yang akan dilakukan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Dengan demikian Majelis Islam Pusat itu adalah sebuah pemerintah sementara untuk Jawa Barat, yang sesungguhnya memiliki banyak ciri suatu negara merdeka. Namun, mereka tidak secara resmi menentang Republik selama kira-kira satu tahun berikutnya. Dalam teori, tindakan-tindakan mereka semata-mata direncanakan untuk menghadapi pembentukan Negara Pasundan. Karena itu, hanya Belanda dan Negara Pasundan, dan bukan Republik, yang merupakan musuh nyata Tentara Islam Indonesia³⁷.

Walaupun tidak diucapkan secara terang-terangan, cita-cita suatu negara Islam Indonesia tidak pernah lenyap dari pikiran S.M. Kartosoewirjo. Struktur militer dan pemerintah yang disusun S. M. Kartosoewirjo dan R. Oni I. Qital, yang secara resmi terbatas pada Jawa Barat, jelas dimaksudkan sebagai pemerintah bayangan, yang akan berfungsi jika Pemerintah Republik kalah dalam perang melawan Belanda.³⁸ Tanda rencana-rencana mereka ke arah ini adalah keputusan Cipeundeuy

³⁷Dokumentasi Sedjarah Militer AD, *Darul Islam*, 1952, hal. 6.

³⁸Dinas Sejarah Militer AD, *Tentara & Teritorium III*, 1951, hal. 44.

untuk membagi daerah operasi gerakan ini dalam tiga bagian, menjadi D.I, D.II, dan D.III.

Daerah Satu artinya daerah yang akan menjadi daerah yang didalamnya hukum Islam dan kekuasaan Islam sepenuhnya terlaksana". Daerah kedua dan ketiga masing-masing berarti "daerah yang hanya sebagian didominasi masyarakat Islam" dan "daerah-daerah yang belum dikuasai masyarakat Islam"³⁹.

Kartosoewirjo menahan diri selama lebih dari setahun untuk secara terang-terangan menolak menentang kekuasaan Republik dengan secara resmi memproklamasikan Negara Islam Indonesia. Ia menanggukkan hal ini sampai Agustus 1949. Antara Februari 1948 dan Agustus 1949 dan telah menjadi pemimpin gerilya anti-Belanda, setelah Pemerintah Republik menyerahkan daerah itu kepada Belanda dan setelah pasukan Republik meninggalkannya sebagian besar. Berdasarkan keadaan ini dia menyatakan berhak menuntut bahwa semua pasukan gerilya yang beroperasi di Jawa Barat mengakui kekuasaannya. Bila menolak, mereka akan ditaklukkannya dengan kekerasan.

Kesan bahwa Kartosoewirjo telah memisahkan diri dari Republik diperkuat sejumlah pengumuman yang dilakukan atas nama Negara Islam Indonesia. Sebagai contoh dikemukakan, sesudah dilancarkan aksi militer Belanda yang kedua, 20 Desember 1948, Kartosoewirjo sebagai Imam Pemerintah Negara Islam Indonesia⁴⁰. Ini dilakukan sesudah penangkapan Pemerintah Republik Indonesia oleh tentara

³⁹Dinas Sejarah Militer AD, Tentara & Teritorium III, 1951, hal 15..

Belanda dan penahanan anggota-anggotanya. Hal ini dilihat Kartosoewirjo sebagai realisasi keadaan yang telah diharapkannya ketika membentuk Dewan Imamah. Jatuhnya Pemerintah Republik, entah akibat perselisihan politik intern atau karena penangkapan yang dilakukan Belanda, memberikannya peluang besar untuk mengajukan pemerintah negara Islam sebagai pemerintah Indonesia yang sah. Sebenarnya, dia malahan sampai-sampai menafsirkan penangkapan atas pemimpin-pemimpin Republik yang terpenting, seperti "jatuhnya Republik sebagai negara"⁴¹. Kemudian, dalam seruannya untuk melakukan perang suci, ia mendesak Tentara Islam Indonesia yang kali ini disebutnya Angkatan Perang Islam Indonesia- "membimbing dan membantu rakyat dengan pandangan untuk menyelesaikan Revolusi Islam dan mengusahakan agar Negara Islam Indonesia ditegakkan di seluruh Indonesia".⁴²

VI.4. Peristiwa Antralina

Setelah Pemimpin Republik di tangkap oleh Belanda pada akhir tahun 1948 dan kembalinya Tentara Republik ke Jawa Barat. Dewan Imamah sudah memperkirakan kemungkinan-kemungkinan terburuk. Rapat Dewan Imamah yang ke-6 dilaksanakan ada tanggal 17 Januari 1949 bertempat di Cigaloma Kecamatan

⁴⁰Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid 1, 1960, Maklumat No. 5, Negara Islam Indonesia 20-12-1948, hal. 10-11.

⁴¹Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid 1, 1960, Maklumat No. 6, Negara Islam Indonesia 21-12-1948, hal. 12-15.

⁴²Salinan Pedoman Darma Bakti, Jilid 1, 1960, Maklumat No. 5, Negara Islam Indonesia 20-12-1948, hal. 11.

Cigalontang. Dalam rapat tersebut dibahas situasi politik pada saat itu dan rencana menghadapi kembalinya tentara Republik yang telah disusupi oleh sayap kiri. Keputusan lainnya adalah memperhebat dan mempercepat revolusi Islam dengan pemusatan seluruh kekuatan militer.

Semua usaha dari pihak TNI yang mencoba untuk mengarahkan TII ke arah kerja sama untuk bersama-sama melawan Belanda, pada umumnya berakhir tanpa hasil. Kepada kesatuan TNI diberitahukan bahwa mereka sebaiknya menempatkan diri di bawah komando Tentara Islam Indonesia. Dalam usaha-usaha serupa Mayor Tobing dan Mayor Utarja terbunuh. Pada kejadian itu Mayor Utarja didampingi oleh Kadar Solihat yang waktu itu belum berpihak pada gerakan Darul Islam.⁴³ Mereka berusaha untuk menemui Kamran dan Kartosoewirjo di Cipaganten dan mengajaknya untuk bersama-sama melawan Belanda. Namun R. Oni menjawab Utarja, apakah dia tidak tahu, bahwa Jawa Barat kini telah menjadi sebuah Negara Islam dan dengan demikian untuk kaum Republik tidak ada lagi tempat di daerah ini.⁴⁴

Pada tanggal 25 Januari 1949, terjadi peristiwa yang dicatat sebagai awal dari pertikaian yang berlangsung lebih dari 13 tahun antara pasukan pemerintah dengan gerakan Darul Islam.⁴⁵ Sehari sebelumnya, pada tanggal 24 Januari 1949, ketika setelah apa yang disebut Long March pasukan-pasukan Siliwangi akhirnya kembali ke Jawa Barat, mereka disambut dengan meriah, walaupun berbeda dengan sambutan

⁴³C. Van Dijk. 1983, Wawancara dengan Affandi Ridhwan pada tanggal 27 Juni 2001 di Jakarta, Wawancara dengan Lukman Dahlan pada tanggal 12 Juni 2001 di Bekasi, Wawancara dengan H. Maskur pada tanggal 16 Juli 2001 di Singapura.

⁴⁴Sedjarah Militer Kodam VI Siliwangi, 1968, hal. 138.

yang telah diduga mereka. Alasannya, mereka disambut dengan pamflet-pamflet yang mendesak mereka turut bersama-sama Tentara Islam Indonesia, dan ketika mereka menolak, mereka dianggap sebagai pengacau dan menjadi anggota “tentara pemberontak” ilegal ⁴⁵. Insiden penting pertama antara Divisi Siliwangi dan Tentara Islam Indonesia terjadi pada 25 Januari 1949 di Antralina dekat Malangbong. Resminya yang disalahkan karena terjadinya insiden itu serta kekerasan adalah Darul Islam. Tetapi, seluruh jalannya peristiwa menunjukkan, pemimpin-pemimpin Darul Islam masih punya keyakinan bisa membujuk dengan baik agar pasukan Republik mengikuti perjuangan mereka.

Oleh suatu sebab staf Brigade Keempat Belas, pada perjalanan pulang ke Jawa Barat, sempat terpisah dari pasukan yang mengawal mereka selama Long March ketika mereka sampai di Antralina. Kemudian mereka ditangkap pasukan Tentara Islam Indonesia dan dilucuti. Pasukan Republik –dalam hal ini khusus Batalyon III- ketika mendengar hal ini, berbalik kembali dan berhasil membebaskan mereka yang ditangkap. Kemudian, salah seorang pemimpin TII, Kamran, mengusulkan pertemuan dengan Mohammad Rivai, komandan Batalyon III, temannya bersama-sama bertempur melawan Belanda pada masa mula perjuangan kemerdekaan. Tetapi, Mohammad Rivai menolak usul ini karena, katanya, dia mempertanyakan motif pemimpin-pemimpin Darul Islam, dan sebagai gantinya dua

⁴⁵Dinas TNI AD, *Penumpasan pemberontakan DI-TII/SMK di Jawa Barat*, 1974, hal. 56.

⁴⁶Sedjarah Militer Kodam VI/Siliwangi, 1968, hal. 522-526

orang bawahannya Letnan Sueb dan Aang Kunaefi. Mereka diberi perintah meminta kembali senjata yang dirampas TII dari tawanan itu. Ketika menjadi jelas bahwa Kartosoewirjo dan Kamran bagaimanapun tidak mau memberikan senjata itu, disampaikanlah ultimatum. Ketika lewat batas waktunya dan tidak terjadi apa-apa, posisi-posisi TII pun diserang.

Kejadian ini bagi Kartosoewirjo merupakan “pernyataan permusuhan” dari pihak TNI kepada Negara Islam Indonesia, dan masih pada hari yang sama dia mengeluarkan sebuah Maklumat Militer tentang “tentara liar, gerombolan serta golongan jang ada di Djawa Barat”.⁴⁷ Kejadian ini sekaligus merupakan awal dari permusuhan antara TNI, TII dan Belanda yang oleh Kartosoewirjo disebut sebagai “Perang Segi Tiga Pertama”. Kartosoewirjo menyatakan dalam Maklumat Militer itu, bahwa kesatuan TNI yang kembali ke Jawa Barat, dan yang dia sebut sebagai “tentara liar” tidak menghargai dirinya sebagai tamu, melainkan ingin menguasai daerah dan rakyat Negara Islam Indonesia. Menurut Kartosoewirjo, “Waktu mereka (ja’ni R.I. dlorurot dan komunis gadungan) itu masuk di daerah de facto Madjilis Islam, maka dengan sombong dan tjongkaknja mereka mengindjak-indjak hak dan memperkosa keadilan “tuan rumah”, sehingga terjadilah insiden pertama dengan menggunakan sendjata, jang terkenal dengan nama “Pertempuran Antralina” dan terjadi pada tanggal 25 Januari 1949. Dengan peristiwa ini, maka berkobarlah dengan

⁴⁷Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid I, Maklumat Militer No. 1. 25-1-1949, hal. 178-179, A. H. Nasution, *Sekitar perang Kemerdekaan Indonesia. Jilid 11, Periode Konferensi meja Bundar*, 1979, hal. 275, A. H. Nasution, *Pokok-pokok Gerilya dan Pertahanan Republik Indonesia di masa lalu dan yang akan datang*, 1980, hal. 167.

hebatnja “Perang Segi Tiga Pertama” di Indonesia”.⁴⁸ Dia juga mewajibkan seluruh anggota TII, PADI, BKN dan organisasi Negara Islam Indonesia yang lainnya untuk memperlakukan tentara liar, gerombolan/golongan jang serupa itu dianggap dan diperlakukan sebagai penghalang revolusi ‘Islam dan musuh Negara Islam Indonesia”. “Bahwa segala sendjata dan alat kelengkapan perang serta harta benda mereka wadjib dirampas bagi kepentingan Negara Islam Indonesia.”⁴⁹

Menurut Kartosoewirjo di Jawa Barat sejak didirikannya negara Islam tahun 1948 hanya terdapat dua golongan yang saling mengadu kekuatan, yaitu Belanda dan Negara Islam Indonesia. Semua golongan-golongan lainnya, dan kesatuan lainnya tidak diizinkan untuk menduduki sebuah daerah di Jawa Barat. Bila kesatuan-kesatuan tersebut memberikan perlawanan pada waktu mereka dilucuti, maka mereka dianggap sebagai musuh Negara Islam Indonesia dan musuh Islam.⁵⁰

Kartosoewirjo telah menganggap daerah Priangan Timur sebagai daerah *de facto* Negara Islam. Sejak dia mengumumkan keadaan perang untuk NII pada bulan Desember 1948, sejak itu semua Maklumat militer dia tandatangani sebagai pemimpin “Komandemen Tertinggi Angkatan Perang Negara Islam Indonesia”. Dalam sebuah Maklumat yang dikeluarkan Kartosoewirjo pada akhir Desember dan

⁴⁸Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid 1, 1960, Maklumat Militer No. 1, 25-1-1949, hal. 178-182.

⁴⁹Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid 1, 1960, Maklumat Militer No. 1, 25-1-1949, hal. 178-182.

⁵⁰Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid 1, 1960, Maklumat Militer No. 1, 25-1-1949, hal. 178-182.

yang langsung ditujukan kepada rakyat di daerah Republik,⁵¹ dia memberitahukan, bahwa di daerah Republik dia telah mengangkat Anwar Tjokroaminoto dan Abikoesno sebagai wakil Negara Islam Indonesia. Namun kedua tokoh ini, seperti mereka terangkan kemudian tidak pernah mengetahui tentang jawaban itu.

Kartosowirjo sekarang tidak lagi mengizinkan di daerahnya ada kesatuan-kesatuan militer yang tidak menempatkan diri di bawah komandonya. Termasuk juga divisi Siliwangi yang dianggapnya telah menyerahkan Jawa Barat kepada Belanda. Karena itu menurut Kartosowirjo, kesatuan-kesatuan ini tidak lagi punya hak untuk menduduki kembali daerah ini. Kini Kartosowirjo memusatkan perhatiannya terutama pada permusuhan dengan TNI, sementara itu dengan pasukan Belanda jarang terjadi pertempuran lagi.

Beban utama perang sekarang dipikul oleh TNI yang melanjutkan perang melawan Belanda, tetapi bersamaan dengan itu juga harus mempertahankan diri terhadap Darul Islam. Aksi militer Belanda kedua yang dilancarkan pada 19 Desember 1948 punya akibat-akibat lain lagi. Tentara Republik menganggap ini sebagai pelanggaran persetujuan Renville. Karena itu, Pemimpin Tentara tidak lagi merasa terikat pada Renville, dan memberikan perintah kepada Divisi Siliwangi yang telah mengungsi untuk kembali ke pangkalan asalnya, Jawa Barat.

Kedua pihak menganggap tanggal 25 sebagai hari ketika tampak maksud pengkhianatan yang hendak dilakukan masing-masing pihak. Kartosowirjo menganggap serangan Batalyon III sebagai awal "perang segitiga pertama di

⁵¹Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid 1, 1960, Maklumat No. 6, 21-12-1948, hal. 12.

Indonesia”, yaitu antara pasukannya, Tentara Republik, dan Tentara Pendudukan Belanda. Menurut Kartorsuwirjo, insiden ini disundut Divisi Siliwangi, sesudah menyeberangi perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat ketika memasuki “wilayah de facto Majelis Islam”, “dengan angkuh dan sombong mengabaikan hukum serta melanggar hak-hak sah “tuan rumah” mereka, “Majelis Islam”⁵². Sebagai akibat insiden Antralina, Darul Islam mengeluarkan pengumuman militernya yang pertama, tertanggal 25 Januari, tentang “Gerombolan-gerombolan dan Kelompok-kelompok Tentara Pemberontak di Jawa Barat”.⁵³ Di samping itu, tanggal 25 Januari dinyatakan sebagai hari khusus yang akan diperingati setiap tahun di daerah yang berada di bawah kekuasaannya.

⁵²Pedoman Dharma Bakti, Jilid 2, 1960, Statement Pemerintah Negara Islam Indonesia No. IV/7. 7-8-1952, hal. 116-117,

⁵³Sedjarah Militer Kodam VI/Siliwangi, 1968, hal. 280.

BAB VII

NEGARA ISLAM INDONESIA

VII.1. Proklamasi Negara Islam Indonesia

Pada awal tahun 1949 akibat-akibat persetujuan Renville sudah mulai terasa. Salah satu akibatnya adalah penarikan mundur pasukan TNI dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Karena persetujuan ini antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik, Divisi Siliwangi sebagai Tentara Republik mematuhi ketentuan-ketentuannya. Ini berbeda dengan pasukan-pasukan gerilya lain yang tidak tergabung dalam Tentara Republik resmi. Demikianlah bagian yang cukup besar dari kedua organisasi gerilya Islam di Jawa Barat, Hizbullah dan Sabilillah, menolak untuk mematuhi.

Langkah pertama menuju persetujuan terakhir antara Pemerintah Republik dan Belanda terjadi pada Mei 1949, dengan tercapainya apa yang disebut "Roem-Rojen Statement". Kartosoewirjo tidak menyetujui statmen ini dan menggunakannya sebagai alasan untuk memproklamasikan Negara Islam Indonesia. Pelanggaran persetujuan Renville dan serangan Belanda terhadap wilayah Republik pada bulan Desember 1948, menimbulkan protes dari dunia internasional dan membuat Belanda semakin terisolir di bidang politik. Wakil Indonesia di PBB, Palar menyebutkan pelanggaran – pelanggaran persetujuan itu pada sidang dewan keamanan PBB sebagai negosiasi cara Belanda. Dan wakil delegasi Asustralia Hodgson menyebut

agresi militer Belanda lebih parah dari apa yang dilakukan Hitler pada Belanda pada tahun 1940.¹

Karena tekanan internasional, terutama dari pihak Amerika Serikat yang akan mengancam bantuan Marshall plan, akhirnya Belanda bersedia berunding dengan Indonesia pada tanggal 7 Mei 1949, ditandatangani persetujuan Roem - Roijen. Dalam persetujuan itu tersebut Belanda menjanjikan untuk mendirikan kembali pemerintahan Republik Indonesia dan menghentikan semua permusuhan. Sebaliknya pihak Indonesia harus menghentikan aksi-aksi gerilya dan harus bersedia untuk mengikuti Konferensi Meja Bundar. Dalam konferensi tersebut akan dibicarakan penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS).²

Kartosoewirjo memang tidak pernah setuju dengan kedua persetujuan sebelumnya, menolak juga hasil perundingan Roem-Roijen. Melalui perundingan ini³ Kartosoewirjo yakin bahwa dengan penyerahan kedaulatan dari tangan Belanda, Republik Indonesia Serikat menjadi sebuah negara atas belas kasihan Belanda dan angkatan bersenjata negara ini menjadi alat Belanda. Kartosoewirjo yang telah memisahkan diri dari Masyumi yang turut berpartisipasi dalam perundingan yang sedang berlangsung itu dan dia mencap sikap para politisi seperti Moh. Hatta dan Moh. Roem sebagai sikap yang memalukan: "Roem dan Hatta yang dewasa akhir-akhir ini memang sudah tak tahu malu lagi, menjual negara sampai habis obral

¹Moh. Roem, *Bunga Rampai dari sedjarah*, Jilid 3, 1983, hal. 215.

²S.A. Djamhari, *Ihtisar sedjarah perjuangan TNI (1945- sekarang)*, 1979, hal. 39.

³Pedoman Dharma Bakti, Jilid 2, 1960, Manifest Politik Negara Islam Indonesia No. I/7., hal. 199.

besar-besaran". Atau : sungguh memalukan sekali.⁴ Baginya Indonesia kini kembali kepada derajat sebelum proklamasi, yaitu nul besar.⁵ Dan Konferensi Meja Bundar dia namakan sebagai konferensi Kolonial⁶

Kartosoewirjo juga menentang pendapat, bahwa setelah pembentukan sebuah negara basis yang disebut "Madinah Indonesia"⁷ maka berakhirilah revolusi. Revolusi masih harus dilanjutkan hingga negara kurnia Allah, Negara Islam Indonesia didirikan di atas bumi Indonesia.⁸

"seperti air dengan kopi tidak begitu sadja menjadi air kopi, sehingga tiap-tiap anasir air bersatu dengan anasir kopi, melainkan airnya dimasak hingga 100 deradjad Celcius. Maka tidak lupa mungkin Negara dan Agama, Manusia dan Agama, dapat bersatu dalam arti kata jang seluas-luas dan sesempurna-sempurnanya, melainkan apabila Negara dan Masyarakat serta segenap anasir jang terdapat didalamnya dapat dipanaskan sampai tingkatan jang setinggi-tingginya." Djadi untuk untuk membina dan menggalang Negara Kurnia Allah itu perlu dan wadjablah bergcloranj Revolusi, lebih-lebih lagi Revolusi Islam jang akan memasak masyarakat sampai kepada tingkatan matang jang baik dalam arti kata politis, militer, agama maupun dalam arti kata jang lainnja. Djadi kalau kita menghendaki berdirnja Negara Kurnia Allah itu djangan sekali-sekali takut terdjilat api revolusi. "Tiada baji jang lahir, melainkan disertai tjurahan daerah!" Inilah satu-satunya djalan, menuju kepada mardlotillah dunia dan mardlotillah ahirat, kelak".⁹

⁴Pedoman Dharma Bakti, Jilid 2, 1960, Manifest Politik Negara Islam Indonesia No. I/7, hal. 204.

⁵Pedoman Dharma Bakti, Jilid 2, 1960, Manifest Politik Negara Islam Indonesia No. I/7, hal. 217.

⁶Pedoman Dharma Bakti, Jilid 2, 1960, Manifest Politik Negara Islam Indonesia No. I/7, hal. 219.

⁷Kartosoewirjo tidak mengubah nama Cisayong menjadi Madinah seperti yang disebutkan van Dijk, van Dijk, 1983, hal. 83, melainkan Madinah baginya adalah Daerah I, Sebab meskipun dia telah berulang kali berpindah tempat di di daerah pegunungan Jawa Barat, Kartosocwirjo hampir selalu menggunakan kata "Madinah" sebagai tempat dikeluarkannya Maklumat-maklumat NII.

⁸Pedoman Dharma Bakti, Jilid 2, 1960, Manifest Politik Negara Islam Indonesia No. I/7, hal. 234.

⁹Pedoman Dharma Bakti, Jilid 2, 1960, Manifest Politik Negara Islam Indonesia No. I/7, hal.235.

Kartosowirjo yang berdasarkan tafsirannya atas peristiwa-peristiwa dunia, seperti perang dingin antara timur dan barat begitu juga perkembangan di daratan Asia, telah memperhitungkan bahwa perang dunia ketiga akan terjadi,¹⁰ dan dia masih mengharapkan perang ini akan terjadi, karena dia telah memasukan perang ini dalam perhitungan rencana-rencananya. Namun kini Kartosowirjo mulai sangsi atas kebenaran ramalan Jayabaya, karena "Brata Yudha Jaya Binangun",¹¹ perang besar yang akan merubah dunia dan oleh perang ini akan dapat dihindarkan pembentukan Republik Indonesia Serikat, tidak kunjung terjadi.¹² Kartosowirjo yakin, bahwa kalau terjadi Perang Dunia ketiga, Belanda tak dapat melaksanakan pembentukan RIS, karena mereka sendiri sudah terlalu lemah sebagai akibat perang tersebut, dan juga situasi dunia internasional sudah berubah secara total.

Tak lama setelah sidang Kabinet pertama RI pada bulan Juli, Moh. Hatta menulis surat kepada Kartosowirjo. Dalam surat itu Moh. Hatta meminta agar Kartosowirjo menghentikan semua permusuhan terhadap TNI. Namun

¹⁰Alam pikiran saat itu di kalangan KPK-PSII bahwa kemungkinan Perang Dunia III meletus tidak akan lama lagi, mengingat perseteruan Blok Barat dan Blok Timur, demikian pula kepercayaan ini di kalangan santri.

¹¹Pedoman Dharma Bakti, Jilid 3, 1961, Ramalan Djojoberjo Tentang Ratu Adil atau Heru Tjokro, hal. 95-192, Menurut Kartosowirjo yang dimaksud Ratu Adil itu adalah Negara Islam Indonesia.; Brata Yudha Jaya Binangun adalah istilah dari dunia pewayangan dan dari "Kakawin Bharata Yudha" yang dikarang oleh Empu Seddah atas perintah Raja Jayabaya dari Kediri tahun 1157. Kakawin Bharata Yudha adalah salah satu dari empat Epos Jawa Kuno dan merupakan apologi dari raja Jayabaya untuk membenarkan penaklukan Janggala yang dilakukan raja itu, S. Wirjosuparto, *Kakawin Bharata Yudha*, 1968, hal. 46.

¹²Pedoman Dharma Bakti, Jilid 2, 1960, Manifest Politik Negara Islam Indonesia No. 1/7, hal. 223.

Kartosowirjo hanya tulis dalam buku hariannya, bahwa Hatta telah menuntut untuk menghentikan permusuhan melawan "Pasukan liar".¹³

Pada tanggal 4 Agustus disusun Delegasi Indonesia yang akan mengikuti perundingan-perundingan dengan Belanda di Den Haag selama KMB. Kira-kira pada waktu yang bersamaan M. Natsir, yang dalam kabinet sebelumnya sebagai menteri penerangan, ditugaskan oleh Moh. Hatta untuk mengadakan hubungan dengan Kartosowirjo, agar Kartosowirjo menghentikan semua permusuhan terhadap TNI.

M. Natsir di Bandung menginap di Hotel Homann dan menulis surat pada Kartosowirjo dengan menggunakan kertas surat hotel tersebut, yang kemudian dia serahkan kepada A. Hasan, seorang pemimpin *Persis* yang juga mengenal Kartosowirjo.¹⁴ Natsir menugaskan Hassan untuk menyampaikan surat tersebut secara pribadi kepada Kartosowirjo. Namun kenyataannya, menurut M. Natsir, karena surat itu ditulis menggunakan kertas surat hotel, surat tersebut tidak dianggap surat resmi, dan ditahan selama 3 hari sebelum diteruskan kepada Kartosowirjo.¹⁵ Sementara itu pada tanggal 6 Agustus Moh Hatta berangkat ke Den Haag untuk mengikuti KMB yang dimulai 12 hari kemudian, Kejadian ini bagi Kartosowirjo merupakan pertanda untuk bertindak, karena dengan keberangkatan Moh. Hatta ke

¹³Komando Dacrah Militer VI Siliwangi, Team Pemeriksa. *Berita Atjara Ineterogasi V*, 25 Juni 1962, hal. 2

¹⁴Tentang Hasan Bandung, S.A. Mugni. *Hasan Bandung, Pemikir Islam Radikal*, 1980.

¹⁵*Muhammad Natsir 70 tahun. Kenang-kenangan kehidupan dan perjuangan*. Redaksi pelaksana: Yusuf Abdullah Puar dengan direvisi oleh panitya. Panitya Buku Peringatan Muhammad Natsir/Muh. Roem 70 tahun, 1978, hal. 185.

Belanda baginya kini terdapat "Vakum Kekuasaan"¹⁶. Tetapi tentunya Kartosoewirjo juga bermaksud untuk menghadapkan Hatta terhadap pada suatu *fait accompli* sebelum KMB di Den Haag dimulai.

Pada tanggal 7 Agustus 1949/ 12 Sjawal 1368, S.M. Kartosoewirjo memproklamirkan *Negara Islam Indonesia* di Cisampang, desa Cidugeleun Kecamatan Cigalontang, yang dihadiri segenap anggota Komandemen Tertinggi APNII¹⁷, yang ditanda-tangani oleh Kartosoewirjo sendiri atas nama Umat Islam Bangsa Indonesia.

Bagi masyarakat Darul Islam lahirnya Negara Islam Indonesia sesungguhnya bukanlah hasil rekayasa manusia dalam hal ini adalah S.M. Kartosoewirjo, melainkan a'falullah. Yaitu perbuatan serta program langsung dari Allah SWT. Mereka beranggapan bahwa manusia hanyalah sebagai fa'il atau pelaksana program dari keinginan Allah tersebut. Pada saat proklamasi NII diikrarkan, sejak saat itulah Umat Islam di seluruh Indonesia khususnya, telah memperoleh kemerdekaannya secara hakiki (de yure). Mereka telah memiliki negara dan pemerintahan yang akan melaksanakan syari'at Islam. Karena sesungguhnya Islam datang untuk memerdekakan seluruh umat manusia. Jika kaum muslimin berada di suatu negara, di manapun di seluruh muka bumi ini, baik mereka menjadi penduduk mayoritas ataupun minoritas. Sementara mereka tidak bebas melaksanakan syari'at Islam dan

¹⁶Komando Daerah Militer VI Siliwangi, ... Team Pemeriksa. *Berita Atjara Interogasi I*, 16 Juni 1962, hal. 2

¹⁷Dokumentasi Sedjarah Militer AD, *Darul Islam*, 1952, hal. 33

tidak pula diperintah oleh aturan serta undang-undang Islam. Hakekatnya mereka belum merdeka, tidak akan pernah ada kebebasan. Apalagi kemerdekaan dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam di sebuah negara yang menolak berlakunya hukum Allah berdasarkan Al-Qur'an¹ dan Hadits shahih. Maka menjadi kewajiban setiap muslim untuk memperjuangkan kemerdekaannya bebas dari segala bentuk belenggu jahiliyah demi kemanusiaan, keadilan, serta kebebasan melaksanakan syari'at Islam. Sebesar apapun aktivitas yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam di negara yang bukan negara Islam. Dan betapapun barangkali menguntungkannya, segala itu tidak akan dapat menghapus kewajiban mereka untuk berjuang menegakkan Negara Islam, yang menjamin terlaksananya hukum Allah dan Rasul-Nya di muka bumi ini. Alam pikiran inilah yang berkembang di kalangan Darul Islam atau kelompok fundamentalisme Islam.¹⁸

VII.2. Kanun Asasy dan Kitab Undang-Undang Pidana NII

Walaupun Kartosoewirjo telah membuat Kontitusi Negara Islam Indonesia yang disebut dengan "Kanun Azasy", namun karena suasana perang lebih mendominasi keadaan pada waktu itu maka secara riil yang berfungsi menjalankan roda pemerintahan negaranya adalah, lebih kurang, pemerintahan militer yang lebih banyak beroperasi dengan disiplin dan ketentuan-ketentuan militer. Jadi pola kepemimpinan dan struktur organisasi Darul Islam di masa itu benar-benar sepenuhnya bersifat kombatif. Hal ini dapat dilihat pada Dewan Imamah Negara

¹⁸Wawancara dengan Talmid Rahmat Basuki pada tanggal 7 Juni 2000 di Bandung.

Islam Indonesia (NII), kelengkapan aparat pertahanan NII, pembagian atau klasifikasi teritorial kekuasaannya, dan Hukum Pidana NII yang dibuat bersamaan waktunya dengan Kanun Asasy.

Undang-Undang Dasar Negara Islam, yaitu Kanun Asasy, konsepnya sudah disusun pada bulan Agustus 1948. Kanun Asasy ini diawali oleh sebuah Muqaddimah yang diawali dengan Basmalah dan satu ayat Al Quran dari Surat Al Fath ayat pertama yang menyatakan bahwa Tuhan memberi kemenangan yang nyata. Dalam muqaddimah tersebut disebutkan, perjuangan ummat Islam harus melewati kemerdekaan Kebangsaan sebagai batu loncatan kemerdekaan Islam dan wajib mendirikan negara Islam. Dengan jalan melakukan revolusi kedua yaitu Revolusi Islam sebagai kelanjutan Revolusi Nasional. Dalam Mukadimah Konstitusi Negara Islam Indonesia dijelaskan juga, bahwa umat Islam Indonesia akan meneruskan Revolusi Indonesia dan telah mendirikan sebuah negara Islam yang berdaulat, yaitu sebuah “kerajaan Allah di dunia”.¹⁹

Menurut konstitusi itu, Negara Islam Indonesia adalah “karunia Ilahi”, yaitu “Negara Karunia Allah Subhanahu wa Ta’ala” yang dilimpahkan kepada bangsa Indonesia (pasal 1 ayat 1). Negara menjamin berlakunya syariat Islam dalam masyarakat Islam serta menjamin kepada para pemeluk agama-agama lain kebebasan

Wawancara dengan Endang Ahmad Komaludin pada tanggal 6 September 2000 di Cianjur.

¹⁹Dokumentasi Sedjarah Militer AD, 1952, hal.33.

untuk beribadat (pasal 1 ayat 4). Islam adalah landasan dan dasar hukum Negara Islam Indonesia, Hukum yang tertinggi Quran dan Hadis sahih (pasal 2, ayat 1-2).²⁰

Bentuk pemerintahannya adalah Jumahuriyah (pasal 1 ayat 3). Imam Negara Islam Indonesia ialah orang Indonesia asli, beragama Islam, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya (pasal 12 ayat 1). Dewan Imamah terdiri dari Imam dan Kepala-kepala Majelis, Anggota Dewan Imamah diangkat dan diberhentikan oleh Imam dan bertanggung jawab kepada Imam dan Majelis Syuro (pasal 22). Disamping Dewan Imamah ini terdapat tiga lembaga konstitusional lainnya: Majelis Syuro, Dewan Syuro, dan Dewan Fatwa. Majelis Syuro disebut juga Parlemen dalam konstitusi, memiliki kekuasaan yang berdaulat, terkecuali, seperti dinyatakan, bila keadaan memaksa, hak Majelis Syuro beralih kepada Imam dan Dewan Imamah (pasal 3, ayat 1-2). Majelis Syuro ini akan bersidang sedikitnya sekali dalam setahun, dan keputusan-keputusannya harus diambil dengan suara mayoritas. Lembaga ini menyusun Kanun Asasy dan menetapkan garis-garis besar haluan Negara (pasal 4 ayat 3, dan pasal 5). Majelis juga memilih Imam, yang pemilihannya memerlukan sedikit-sedikitnya dua pertiga mayoritas. Bila mayoritas yang demikian tidak mungkin tercapai, juga pada pemungutan suara yang kedua, Imam akan dipilih dengan mayoritas sederhana pada pemungutan suara yang ketiga (pasal 12, ayat 2-3).

Dewan Syuro dinyatakan dalam konstitusi sebagai Eksekutif Majelis Syuro. Beberapa kekuasaan Majelis tidak dimiliki Dewan –anggota-anggota Dewan Imamah bertanggung jawab kepada Imam dan Majelis Syuro, tidak kepada Dewan Syuro

²⁰Tentang masing-masing pasal Kanun Azazi. Pedoman Dharma Bakti, Jilid 3.

umpamanya- tetapi secara keseluruhan Dewan Syuro dimaksudkan berfungsi sebagai parlemen biasa. Lembaga ini harus bersidang sedikitnya sekali dalam tiap tiga bulan untuk melaksanakan keputusan-keputusan Majelis Syuro dan kecuali dalam soal-soal yang sangat penting, mewakili Majelis Syuro vis-a-vis Pemerintah (pasal 6). Konstitusi memberikan Dewan Syuro kekuasaan legislatif yang jauh jangkauannya. Setiap undang-undang memerlukan persetujuannya, dan anggota-anggotanya mempunyai hak mengajukan undang-undang (pasal 7; pasal 8 ayat 1). Dalam keadaan darurat, Imam mempunyai hak mengeluarkan dekrit pengganti undang-undang, tetapi harus menariknya kembali jika ditolak Dewan Syuro dalam sidang berikutnya. Sebaliknya, bila Dewan Syuro mengesahkan rancangan undang-undang yang tidak mendapat persetujuan Imam, rancangan tersebut tidak boleh diajukan selama sidang yang sama (pasal 9; pasal 8 ayat 3).

Kecuali dalam kedudukannya sebagai ketua Dewan Imamah, Imam memegang pimpinan tertinggi Angkatan Bersenjata, Angkatan Perang Negara Islam Indonesia. Imam memiliki kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi dan syariat Islam. Kekuasaan-kekuasaan lain yang diberikan kepadanya –yang harus mendapat persetujuan Majelis Syuro adalah untuk memaklumkan perang, merundingkan perdamaian, dan membuat persetujuan dengan negara-negara lain menyatakan berlakunya keadaan darurat, yang syarat-syaratnya masih akan ditentukan undang-undang; dan berdasarkan pertimbangan Dewan Imamah memaklumkan dekret-

dekret. Selanjutnya Imam mempunyai hak mengangkat duta besar dan memberikan amnesti dan lain-lain (pasal 10; pasal 11, ayat 2; pasal 13-20).

Dewan Fatwa yang disebut dalam konstitusi akan merupakan dewan penasihat, yang memberi nasihat kepada Imam dan Pemerintahnya, baik atas kebijaksanaan sendiri maupun atas permintaan Imam. Paling banyak anggotanya tujuh orang, dan diketuai Mufli Agung. Anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan Imam (pasal 21).

Bagian utama dan yang paling terperinci dari konstitusi adalah mengenai struktur negara resmi seperti yang diuraikan di atas. Bagian-bagian lain yang membicarakan pembagian wilayah negara, keuangan, dan sistem peradilan, singkat saja, dan menyebutkan undang-undang yang masih akan disusun membuat ketentuan-ketentuan yang lebih terperinci tentang hal-hal yang relevan. Namun, keadaan ini sendiri merupakan petunjuk, para pendiri Negara Islam Indonesia memusatkan perhatian mereka pada struktur formal, pemerintah dan tentaranya. Atau sistem hukum dianggap jelas dengan sendirinya dan tidak memerlukan perincian serta kodifikasi, atau hal itu dianggap tidak begitu penting bagi keperluan melakukan perjuangan terhadap Republik mula-mula.

Selain perbedaan dalam peristilahan dan pengakuan akan syariah, atau hukum Islam, sebagai sistem hukum yang dominan, *Kanun Azasy* mirip sekali dengan UUD 1945, yang sesungguhnya dipakai sebagai contoh, dengan beberapa perubahan. *Kanun Azasy* juga membuat perbedaan antara umat Muslim dan bukan Muslim

dalam bidang pertahanan, dan menekankan pentingnya sistem pendidikan Islam. Selanjutnya ia menghilangkan pajak-pajak, dan menggantikannya dengan apa yang disebut dengan *infaq*.³⁰ Mengenai semua hal ini dinyatakan, semuanya akan diatur lebih terperinci dalam undang-undang.

Selain itu, Darul Islam sendiri membuat suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersendiri sebagai tafsiran dari ayat-ayat al-Qur'an. Hukum Pidana ini merupakan suatu kemajuan pemikiran yang luar biasa untuk waktu itu. Organisasi Darul Islam dalam masa perang tersebut adalah organisasi yang darurat, namun masih menjalankan fungsi-fungsi organisasi secara sangat mantap. Gerakan ini merupakan gerakan yang sangat rapi dalam hal dokumentasi, birokrasi dan administrasinya. Pelaksanaan hukum (termasuk hukum pidana), mulai tahun 1949 adalah hukum Islam dalam masa perang sesuai dengan Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 216. Oleh karenanya Negara Islam Indonesia ketika itu masih disebut sebagai Darul Islam *fi waqitil Harbi*. Dalam masa pembentukan struktur pertama pun, struktur organisasi Darul Islam bermula dari sebuah titik kekuasaan dan manajemen, baru kemudian terbagi dalam komandemen.

Organisasi Darul Islam merupakan organisasi yang kaku dengan perubahan-perubahan yang mirip sebuah metamorfosa yang pada akhirnya menuju pada suatu konvergensi "sebuah negara" dengan luas wilayah meliputi seluruh Indonesia. Sejak

³⁰Menurut Boland, 1985, hal.59, kata *infaq* asalnya dari Al Quran, Surat 17 : 100, yang artinya "memberi sumbangan". Negara Islam Indonesia menelapkan *infaq* sebagai "kewajiban setiap warga negara kepada negara dalam bentuk tanah milik maupun barang-barang, yang harus dibayar a) dalam masa perang maupun damai (*infaquddin*) dan b) hanya dalam masa perang (*infaq fi sabilillah*)", Pinardi, 1964, hal. 86.

dari awal Kartosoewirjo merencanakan agar negara Islam yang dia dirikan suatu waktu akan meliputi seluruh wilayah Indonesia. Juga seluruh skema organisasi kenegaraan dan administrasi dicocokkan dengan rencana tersebut sehingga gerakan DI Kartosoewirjo merupakan gerakan Darul Islam dengan organisasi dan administrasi yang paling baik.

Secara tegas, gerakan Darul Islam menggolongkan tahap-tahap perjuangannya ke dalam periode-periode waktu tertentu yang refleksinya sangat kontinum dengan yang tersurat dalam kitab suci al-Qur'an. Tahap-tahap perjuangan itu merupakan tafsiran atas ayat-ayat Qur'an yang selama ini susah dipahami atau sama sekali tidak pernah ditafsirkan oleh para mufassir sebelumnya apalagi oleh orang umum.

Fase-fase dalam gerakan Darul Islam merupakan sebuah proses metamorfosis yang sangat progresif. Hal ini tercermin dari proses restrukturisasi atau reorganisasi baik militer maupun sipil, baik teritorial maupun strategis yang senantiasa berubah mengikuti perkembangan dan kemajuan waktu. Dari awalnya, meski konsep Kanun Asasy dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah teratur sempurna, akan tetapi belum terpakai efektif. Saat itu, fasenya adalah fase perang, sehingga mulai tahun 1949 hukum hanya dijalankan dengan pertimbangan perang dan belum ada yang sah untuk dilakukan berdasarkan hukum positif.²¹

21

VII.3. Struktur Pemerintahan NII

Kartosowiryo sudah satu tahun sebelumnya telah merealisasikan gambarnya tentang sebuah negara Islam, ketika dia pada bulan Mei 1948 membentuk Dewan Imamah (Kabinet) yang dia pimpin sebagai Imam dan dengan demikian secara formal telah mendirikan negara Islam. Undang-Undang Dasar Negara Islam, yaitu Kanun Azasi, konsepnya sudah disusun pada bulan Agustus 1948.

Dengan demikian secara formal telah mendirikan Negara Islam. Susunan organisasi kenegaraan dari Negara Islam Indonesia pada hakekatnya hanyalah sederhana saja, namun cukup praktis. Bahkan dalam kesederhanaan tersebut tampak adanya originalitas pemikiran Kartosowirjo dalam mengatur administrasi "pemerintahan" dan "kenegaraan" serta "ketentaraan" yang sedang tumbuh. Ketika Negara Islam Indonesia masih dalam prototype, yaitu pengaturan kekuasaan sebelum proklamasi, pada tanggal 25 Agustus 1948 dikeluarkan apa yang disebut "Maklumat Imam No 1", yang berisi peraturan-peraturan yang menyangkut bidang pemerintahan baik pemerintahan sipil maupun militer. Dalam Maklumat No. 1 itu disebutkan juga antara lain bahwa seluruh pimpinan pemerintahan sipil diberi tugas sebagai "Komandan pertahanan" di daerahnya masing-masing, sedang pemimpin ketentaraan diberi tugas sebagai "komandan pertempuran". Dalam mengatur kekuasaan yang sedang tumbuh ini Kartosowirjo mengerahkan potensi yang berada di bawah kekuasaannya

Berhubung belum ada Dewan Syuro semua peraturan Negara Islam Indonesia dikeluarkan oleh Komandemen Tertinggi, dalam bentuk maklumat yang ditandatangani oleh Imam dan kemudian dibagi-bagikan. Menurut keterangan Kartosoewirjo, Komandemen Tertinggi setelah proklamasi NII pada bulan Agustus 1949, terdiri dari anggota-anggota sebagai berikut:

Imam dan Panglima Tertinggi	:	S. M. Kartosoewirjo
Wakil Imam dan Komandan Divisi	:	Kamran
Madjelis Keuangan	:	Oedin Kartasasmita
Madjelis Penerangan	:	Toha Arsjad.
Madjelis Pertahanan	:	R. Oni
Madjelis Luar Negeri	:	Sanoesi Partawidjaja
Madjelis Dalam Negeri	:	Sanoesi Partawidjaja ²²

Pada tanggal 7 Oktober 1949 Keluar Maklumat Komandemen Tertinggi Angkatan Perang Negara Islam Indonesia No. 1 (MKT-APNII NO.1)²³, dimana dijelaskan susunan NII di masa perang. Dalam MKT-APNII ini diberitahukan bahwa pimpinan sipil dan militer telah dipersatukan, karena cara demikian akan menjamin pemerintahan yang lebih efisien untuk sebuah negara yang sedang berada dalam perang. Juga semua kepentingan Negara Islam Indonesia sejak saat itu harus disesuaikan dengan keadaan politik dan militer pada masa itu. Kartosoewirjo

²²Komando Dacrah Militer VI Siliwangi. Team Pemeriksa. *Berita Ajjara Interogasi IV*, 24 Juni 1962, hal. 3.

²³Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid 1, 1960, Maklumat Komandemen Tertinggi No.1., 7-10-1949, hal. 19-22.

memerintahkannya supaya "Ahli politik harus di-permiliterkan. Sebaliknya, ahli militer harus di-per-politikkan"²⁴

Kepada para komandan APNII disampaikan pesan untuk "membawa umat Islam bangsa Indonesia ke arah Mardlotillah. Kalau perlu dengan paksa".²⁵ Dalam hal keadaan yang yang mudharat sekali bisa saja dilakukan demikian, walaupun dalam ajaran agama Islam tidak terdapat kata-kata paksaan itu, begitu pendapat Kartosoewirjo.

Reorganisasi Negara Islam Indonesia terutama membawa penyederhanaan sistem administrasi secara menyeluruh, yang hanya terdiri dari 5 Komandemen.

Skema reorganisasi NII menurut MKT-APNII No.1 adalah sebagai berikut:

1. Dewan Imamah (Kabinet) di bawah Imam diubah menjadi: Komandemen tertinggi (KT) di bawah pimpinan Panglima Tertinggi (Plm.) Pimpinan harian dilakukan oleh Kepala Staf Umum (KSU).
2. Divisi dan Wilayah yang dipimpin oleh Komandan Divisi dan Gubernur diubah menjadi: Komandemen Wilayah (KW) dibawah pimpinan Panglima Komandemen wilayah (Plm. KW). Pimpinan harian dilakukan oleh Kepala Staf Komandemen Wilayah (KSW).
3. Resimen dan Karesidenan yang dipimpin oleh seorang Komanda Resimen dan seorang Residen diubah menjadi: Komandemen Daerah (KD). Dalam daerah yang demikian pimpinan militer dan politik berada ditangan Komandan Komandemen Daerah (Kmd. KD). Pimpinan harian dilakukan oleh Kepala Staf Komandemen Daerah. (KSKD).
4. Batalyon dan Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Komandan Batalyon dan Seorang Bupati diubah menjadi: Komandemen Kabupaten (KK) di sini pimpinan militer dan politik dipegang oleh Komandan Komandemen Kabupaten (Kmd. KK). Pimpinan harian dilakukan oleh Seorang Kepala Staf Komandemen Kabupaten (KSKK).
5. PADI dan Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Komanan PADI dan seorang Camat diubah menjadi: Komandemen Ketjamatan (K.Kt.) Di sini pimpinan militer dan politik dipegang oleh Komandan Komandemen Ketjamatan (Kmd K.Kt) Pimpinan harian dilakukan oleh seorang Kepala Staf Komandemen Ketjamatan (KSKKT).²⁶

²⁴Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid 1, Lampiran No.4, hal. 26-31.

²⁵Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid 1, Lampiran No.4, hal. 26-31

²⁶Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid 1, 1960, Lampiran No.3, hal.25-26

Kelima wilayah administrasi ini masing-masing berhak untuk mendapat 20% dari pendapatan negara.²⁷ Selain itu PADI dilebur ke dalam Tentara Islam Indonesia (TII), Badan Keamanan Negara (BKN) diubah namanya menjadi Polisi Islam Indonesia (PII), dan Gestapo serta kesatuan-kesatuan istimewa lainnya digabungkan ke dalam masing-masing komando wilayah.²⁸

Tugas kepolisian BKN kini dijalankan oleh Polisi Islam Indonesia, disamping itu masih didirikan sebuah pasukan pembantu yang dibentuk di tingkat kecamatan dan desa. Pasukan ini disebut BARIS (Barisan Rakjat Islam) dan disetiap kecamatan harus terdiri dari satu Brigade.²⁹

Dengan demikian di dalam Negara Islam Indonesia telah terjamin pengawasan total hingga ke tingkatan desa. Juga sistem lama tentang perluasan daerah (D.I, D.II, D.III) dan semua kewajiban penduduk di masing-masing daerah tersebut, seperti pembayaran pajak, wajib kerja dan wajib militer tetap berlaku.

Maklumat Komandemen Tertinggi No. 1 tersebut dalam batas-batas tertentu juga dapat memberikan gambaran sampai di mana dinamika cara berpikir Kartosoewirjo dalam usahanya untuk mengemudikan dan menguasai NII yang sedang tumbuh dalam masa pancaroba itu. Pemisahan kekuasaan politik dan militer sebagaimana dipraktekkan oleh RI dan yang ternyata banyak merugikan gerakannya itu telah memberikan pelajaran bagi Kartosoewirjo untuk mengeluarkan MKT No 1

²⁷Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid 1, 1960, Lampiran No.7, hal.32

²⁸Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid I, 1960, Lampiran No 2., hal.24

²⁹Dokumentasi Sedjarah Militer AD, 1952, hal. 35

tersebut. Dengan demikian maka pimpinan pemerintahan dan kenegaraan dapat dipersatukan dan tidak akan terjadi dualisme dalam pimpinan.

Terutama untuk mencegah dualisme dan pertentangan yang mungkin disebabkan oleh perasaan superior antara satu golongan dengan golongan lainnya. Misalnya golongan militer yang merasa lebih tinggi daripada golongan sipil atau sebaliknya. Program yang telah dirancang oleh Kartosoewirjo tersebut pada hakekatnya memang baik untuk dipraktekkan dalam negara yang sedang masa bergolak atau dalam keadaan perang. Kepentingannya terutama terletak pada penyatuan pimpinan dan potensi yang ada dalam negara tersebut. Masing-masing pemimpin dari suatu daerah, baik ia militer maupun sipil dapat dengan mudah dan lancar menggerakkan alat-alat kekuasaan yang ada pada mereka. Seorang komandan sipil yang telah dimiliterisir kalau perlu dapat memberikan perintah kepada anggota-anggota pasukan bersenjata untuk menghadapi suatu keadaan yang timbulnya secara tiba-tiba. Demikian pula seorang Komandan militer yang telah diperpolitisir dapat memerintahkan alat-alat kekuasaan sipil, sekiranya memang diperlukan.

Jika di suatu daerah DI antara pimpinan militer dan sipil tidak ada persesuaian paham dalam menghadapi sesuatu persoalan, maka pimpinan yang lebih tinggi akan mengambil kebijaksanaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan mendamaikan perselisihan yang terjadi antara kedua pimpinan daerah tersebut. Dan apabila usaha dari pimpinan yang lebih tinggi tersebut tidak berhasil maka diadakanlah mutasi atau pemindahan dari salah seorang pimpinan daerah tersebut

sampai kedua pimpinan dalam suatu daerah tersebut benar-benar merupakan dwitunggal. Demikianlah salah satu dari segi kebaikan dari sistim penyatuan pimpinan yang pernah dipraktekkan oleh Kartosoewirjo untuk mengatur kekuasaan dalam Negara Islam Indonesia.

Karena Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, bukan hanya yang berhubungan dengan keakhiratan, melainkan juga yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka secara teoritis di dalam sebuah negara Islam tidak terdapat pemisahan antara negara dan pemerintah, antara politik dan agama.³⁰

Ini juga merupakan gambaran “Negara Kurnia Allah” yang dijelaskan Kartosoewirjo dalam manifest politikanya. Menurut Kartosoewirjo ada dua anasir yang harus disatukan, pertama: “Satu negara yang berdaulat penuh 100% keluar dan kedalam, de facto dan de jure. Kedua: harus ada peraturan Allah, yang merupakan agama Allah, atau agama Islam. Kedua anasir ini harus bersatu atau dipersatukan. Bukan sebagai minjak dan air yang ada di sebuah periuk”.³¹

Jangka waktu hingga seluruh Indonesia menjadi sebuah negara Islam oleh Kartosoewirjo dibagi menjadi 4 fase. Pecahnya revolusi Islam pada bulan Februari 1948, disebut sebagai fase pertama, saat proklamasi Negara Islam Indonesia adalah

³⁰Dalam Mukhtamar NU XX di Surabaya K.A.H Wahab menerangkan bahwa dalam kata Islam telah terkandung didalamnya soal-soal politik dan hukum tata negara. “Kalau orang dapat memisahkan antara gula dengan manisnya, maka dapatlah ia memisahkan antara agama Islam dengan politik”. Z. A. Ahmad, *Membentuk Negara Islam*, 2001, hal. 6.

³¹Pedoman Dharma Bakti, Jilid 2, 1960, Manifest Politik Negara Islam Indonesia No. 1/7., 26-8-1949, hal. 235.

fase kedua. Fase ketiga tiba dengan pecahnya perang dunia ketiga dan revolusi dunia sebagai akibat perang itu.

Pada fase tersebut kedaulatan NII baru diakui di beberapa daerah di Indonesia. Apabila sebuah perang dunia ketiga terjadi, perang itu pasti akan lebih dahsyat dari semua perang dunia sebelumnya. Maka kelak situasi internasional akan berubah secara total.³²

Setelah perang ini berakhir, begitulah ramalan Kartosoewirjo, akan dilangsungkan persetujuan perdamaian dimana ditentukan nasibnya tiap-tiap bangsa dan negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. "Jika perhitungan kami tertera di atas dibenarkan Allah, maka di atas Peta Dunia Baru juga akan dibuat nanti Indonesia akan merupakan Daerah Negara Islam Indonesia".³³, dan dengan demikian akan tercapailah fase terakhir.

Pada akhir bulan Oktober rancangan Undang-Undang Dasar RIS selesai disusun, dan pada tanggal 27 Desember dilaksanakan "penyerahan" kedaulatan oleh Belanda kepada RIS. Sehari kemudian Soekarno diangkat sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia Serikat di Jakarta, kota yang telah dia tinggalkan dia 4 tahun yang lalu, ketika pemerintahan RI dipindahkan ke Yogyakarta.³⁴

Pada bulan Desember diadakan sebuah usaha baru untuk membujuk atau menyadarkan Kartosoewirjo supaya dia kembali ke dalam pengkuan Republik. Oleh

³²Pedoman Dharma Bakti, Jilid 2, 1960, Manifest Politik Negara Islam Indonesia No. I/7., 26-8-1949, hal. 232.

³³Pedoman Dharma Bakti, Jilid 2, 1960, Manifest Politik Negara Islam Indonesia No. V/7., 7.9.1952, hal. 341.

Kabinet RIS ditugaskan menteri agama K.H.Masjkur untuk berangkat ke Jawa Barat mengadakan pembicaraan dengan Kartosoewirjo. Tapi karena K.H. Masjkur tidak bertemu dengan Kartosoewirjo, dia menugaskan seorang Kiai yang lain yang ditemuinya dalam perjalanan pulang ke Yogyakarta untuk memberitahukan Kartosoewirjo, agar dia datang ke Yogyakarta.³⁵

Pada tanggal 1 Januari 1950 Kartosoewirjo mengeluarkan Maklumat Komandemen Tertinggi yang melarang semua organisasi, partai, perhimpunan, perkumpulan dan gerakan. Semua organisasi yang ada dan semua partai diperintahkan agar membubarkan diri dan dilebur dalam satu bagian daripada organisasi Negara Islam Indonesia.³⁶

Pada tanggal 17 Agustus 1950 setelah 5 tahun berlangsung perundingan-perundingan diplomatis dan perang gerilya, tercapailah tujuan utama perjuangan kemerdekaan, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁷

Dalam suatu statemen Negara Islam Indonesia bulan Januari, Kartosoewirjo menjelaskan pandangan-pandangannya tentang perkembangan internasional pada masa yang akan datang dan masa depan Negara Islam Indonesia. Menurut pendapatnya, pecahnya perang ketiga telah diambang pintu:

“Situasi dunia pada dewasa ini merupakan minjak dalam periuk, jang sekelilingnja penuh dengan api jang menjala-njala jang setiap sa’at dapat menjilat kepadanya. Praktis, perang dunia

³⁴Sejarah peralihan Pemerintah RIS ke RI, 1986, hal.41.

³⁵Soebagio I. N., K. H. Maskijur. Sebuah biografi, 1982, hal. 83.

³⁶Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid 1, 1960, Maklumat Komandemen Tertinggi No. 5, 1-1-1950, hal .40.

³⁷Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid 1, 1960, Maklumat Komandemen Tertinggi No. 5, 1-1-1950, hal. 260.

ketiga sudahlah dimulai, sedjak mulai petjah perang Korea, 25 Djuni 1950. Hanjalah baru sampai pada tingkatan pertama. Sedikit lagi, djika perang telah diumumkan oleh salah satu pihak –blok Amerika atau blok Rusia-maka pada sa’at itu pula seluruh dunia terlibat dan terseret dalam api peperangan jang malia dasjat, jang orang belum dapat mengira-ngirakan”³⁸

Menurut Kartosoewirjo, Indonesia tidak dapat bersikap netral dalam sebuah konflik yang sedemikian rupa, dan RIS akan berpihak pada Amerika. Dia meramalkan perang segitiga yang baru, kali ini antara “Islamisme, Nasionalisme, dan Komunisme” dimana pihak Komunis akan mencoba mengadakan kup. Usaha para ahli politik, para ahli filsafat dan orang-orang yang cinta damai akan sia-sia saja. Menurut Kartosoewirjo, perang dunia ketiga pasti akan terjadi karena:

“Kiranya belum tjukup kotoran-kotoran dunia itu dibasmi dan dijenahkan selama Perang Dunia ke I dan II. Melainkan sepanjang perhitungan sjariat, maka perlulah... bahkan “wadjib”...tumbuhnja Perang Dunia ke III dan Revolusi Dunia itu. Pendek –pandjangnja: selama keadilan Allah dengan wujud “Kerajaan Allah” belum lahir di dunia damai, aman dan tenteram.”³⁹

Karena itu menurut Kartosoewirjo, setiap orang hanya mempunyai satu pilihan: “Membasmi segala kafirin dan kekufuran hingga habis/musnah, dan Negara Karunia Allah berdiri dengan tegak teguhnya, di bumi Indonesia, atau mati sjahid dalam Perang Sutji.”⁴⁰

Tampaknya Kartosoewirjo sangat yakin sekali akan ramalannya, sebab 4 hari kemudian dia memerintahkan dalam Maklumat Tertinggi, bahwa semua kekuatan

³⁸Pedoman Dharma Bakti, Jilid 2, 1960, Statement Pemerintah Negara Islam Indonesia No. IV/7, 7-9-1950. hal. 253.

³⁹Pedoman Dharma Bakti, Jilid 2, 1960, Statement Pemerintah Ncgara Islam Indonesia No. IV/7, 7-9-1950, hal. 255.

⁴⁰Pedoman Dharma Bakti, Jilid 2, 1960, Statement Pemerintah Negara Islam Indonesia No. IV/7, 7-9-1950, hal. 258.

harus dimobilisasi, untuk menghadapi tiap-tiap kemungkinan bila tahap ketiga tiba, yaitu pecahnya perang dunia ketiga, dan setiap orang harus siap untuk perang.⁴¹

Selain mengatur peraturan perundang-undangan, Kartosoewirjo juga mengatur peambagian pemasukan pajak Negara Islam Indonesia yang terdiri dari pajak biasa (infaq) dan pajak istimewa (infaq fi sabilillah) yang diberikan pada masing-masing Komandemen, dari Komando tertinggi hingga ke daerah-daerah. Dengan demikian dari pungutan infaq Komandemen Tertinggi menerima 10%, Komandemen Wilayah 15% dan Desa 25%. Sebuah sumber pemasukan lainnya adalah fai, yaitu barang-barang yang dirampas dari musuh, tidak dengan jalan pertempuran dan barang-barang yang berasal dari musuh, penghianat, dari orang yang murtad dan dari kafir (dzimi) yang hidup di bawah Negara Islam Indonesia, yang pada waktu meninggalnya tidak ada ahli warisnya. Sebaliknya, barang-barang yang didapat dalam pertempuran disebut ghanimah, sementara semua barang-barang yang terdapat pada tubuh musuh yang gugur disebut harta shalab. Juga pemasukan dari fai dan ghanimah dibagi menurut presentasi kepada instansi masing-masing dan kepada mereka yang berhak menerimanya, fakir miskin dan yatim piatu masing-masing memperoleh 4%, tentara mendapat 25% dari masing-masing Komandemen mendapat 10%.⁴² Kartosoewirjo juga menerangkan pada waktu dia diinterogasi pada

⁴¹Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid I, 1960, Maklumat Komandemen Tertinggi No. 6, 11-9-1950, hal. 42-48.

⁴²Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid I, (1960), Maklumat Komandemen Tertinggi No. 6., 11-9-1950, hal. 42-48, Penetapan Komandemen Tertinggi No. I., 17-10-1950, hal., 186-196, Angkatan Perang Negara Islam Indonesia KW 2&3/DIV. 2 S.H. Peraturan Komandemen Wilayah 2&3 No. 006/O/MW/2&3 tentang: Petempuran PKT No. 1. (31-7-1955), hal. 6.

tahun 1962, bahwa Negara Islam Indonesia tidak pernah menerima bantuan keuangan dari pihak manapun dan pemasukan yang utama berasal dari setoran wajib infaq begitu juga dari fai dan ghanimah. Seandainya pemasukan tidak mencukupi, bila dianggap perlu, maka dilakukan pemungutan secara paksa atau melalui perampokan. Sebab Kartosoewirjo berpendapat, bahwa rakyat yang tidak mendukung Negara Islam Indonesia harus dianggap sebagai musuh dan karena itu cara penagihan yang demikian dianggap legal. Keputusan untuk melakukan tindakan tersebut,. Menurut Kartosoewirjo adalah urusan dan tanggung jawab komandan masing-masing komandemen.⁴³

Setelah Belanda tidak lagi merupakan musuh langsung Negara Islam Indonesia, dalam Maklumat-Maklumat NII Kartosoewirjo makin sering mulai menyerang Komunisme yang dia nyatakan sebagai musuh utamanya. Dalam sebuah nota rahasia pada bulan Oktober 1950 yang dikirim kepada Sukarno, Kartosoewirjo menawarkan kepada Sukarno agar bersama-sama dengan Negara Islam Indonesia membasmi komunisme dan meninggalkan politik netral yang dipraktekan selama itu. Apabila RI mengakui NII, Kartosoewirjo menjamin bahwa RI akan mempunyai "sahabat sehidup-semati" dalam menghadapi segala kemungkinan, terutama

⁴³Komando Daerah Militer VI Siliwangi, Team Penceriksa. *Berita Atjara Interogasi IV*, 24. Juni 1962, hal. 6.

menghadapi komunisme, menurut Kartosoewirjo hanya dimiliki Islam, karena itu RI secepatnya membuat Islam sebagai dasar negara.⁴⁴

Sebuah nota rahasia berikutnya yang isinya mirip seperti nota di atas, dikirimkan Kartosoewirjo kepada Soekarno pada bulan Pebruari 1951. Nota tersebut merupakan penjelasan nota sebelumnya. Kata Kartosoewirjo, pemimpin RI mempunyai tanggung jawab untuk membendung “ arus merah ” dan sekaligus harus siap untuk menghadapi “ Perang Bharata Juda Djaja Binangun ”. Dia meramalkan dalam notanya ini, bahwa nasionalisme Indonesia akan mengalami perpecahan, sebagian akan mengikuti komunis dan sebagian lagi menggabungkan diri dengan golongan Islam.⁴⁵

Kedua nota tersebut tidak pernah dijawab oleh Soekarno, namun pada waktu itu, oleh Perdana Menteri M. Natsir diusahakan untuk menyelesaikan masalah Darul Islam dengan cara damai, tetapi usaha-usaha ini tidak berhasil. Setelah kabinet Natsir berakhir pada bulan April 1951, Kartosoewirjo selanjutnya menamakan Republik Indonesia sebagai “ Republik Indonesia Komunis ” (RIK) dan angkatan perangnya sebagai “ Tentara Republik Indonesia Komunis (TRIK) ”. Dalam sebuah manifesto politik yang berikutnya pada bulan Agustus 1952, Kartosoewirjo memberikan restrospeksi pada perkembangan politik Indonesia secara menyeluruh sejak tahun 1905, dan dia menjelaskan pandangan-pandangannya tentang masa depan negara ini.

⁴⁴Pedoman Dharma Bakti, Jilid 2, 1960, Nota Rahasia 22-10-1950, hal. 345-252

⁴⁵Pedoman Dharma Bakti, Jilid 2, 1960, Nota Rahasia 17-2-1951, hal. 353-360

Dengan judul manifesto ini: "Heru Tjokro bersabda: Indonesia kini dan kelak" Kartosoewirjo dengan jelas memanfaatkan mitos Ratu Adil untuk agitasi politiknya. Menurut Kartosoewirjo, "Heru Tjokro" menggambarkan satu makhluk Allah yang menguasai dan memutarakan roda dunia menuju Mardlotillah sejati, yaitu Negara Islam Indonesia. Heru Tjokro Kartosoewirjo artikan sebagai : "Penjapu masjarakat Djahiliyah, pembela gelap gulita. Pembasmi barang siapa jang chianat dan murtad, kufur, dan munafiq tjurang dan serong, pendjual Agama dan Negara. Tegasnja segala anak-tjutju iblis la'natullah jang kini masih leluasa berkeliaran di tengah-tengah masjarakat dan rakjat Indonesia". Dan sebagai: "Pelepas dan pembebas bagi segenap perikemanusiaan, daripada bentjana dan malapetaka, dlohir dan batin, di dunia dan di akhirat kelak"⁴⁶. Dia juga menyinggung pemberontakan komunis tahun 1926/27 yang menurut Kartosoewirjo meletus karena provokasi pihak pemerintah kolonial Belanda dan dia juga menunjuk pada nasib pamannya Marco Kartodikromo yang meninggal di kamp konsentrasi Boven Digul. Menurut Kartosoewirjo pemimpin Islam selama masa revolusi oleh pihak komunis dan nasionalis "dianggap dan diperbuatnja sebagai kuda-tunggang dan kuda penarik grobak, sedang Umat Islam dianggap dan diberlakukannja oleh kedua anasir tersebut sebagai sapi peras, jang saban hari harus memberikan air susunja kepada komunis-pengchianat dan nasionalis-djahil itu."⁴⁷

⁴⁶Pedoman Dharma Bakti, Jilid 2, 1960, Manifes Negara Islam Indonesia No. V/7, 7-8-1952, hal. 344-260.

⁴⁷Menurut Kartosoewirjo pemberontakan Komunis tahun 1926/27 disebabkan karena provokasi Belanda, yang sebelumnya berhasil menyusupkan seorang agen mereka, Sanusi, ke dalam tubuh PKI, Pedoman Dharma Bakti, Jilid 2, 1960, Manifes Politik Negara Islam Indonesia No. V/7, hal. 279

Kartosoewiryo juga sekali lagi mengingatkan akan kejadian bulan April 1949, ketika kesatuan TNI di bawah pimpinan Ahmad Wiranatakusuma dan Sudarman menyerah kepada Belanda. Dia juga bertanya, menyerah pada Madjlis Islam atau pada Tentara Islam Indonesia, dan dia juga segera memberi jawaban atas pertanyaannya sendiri : "Madjlis Islam beserta Tentara Islam Indonesia tahu dan yakin akan isi djantung-hati dan kedok pemerintah R.I. dlorurot beserta tentara liarnja, ialah : sarang daripada kutu-kutu komunis Indonesia, mereka memakai nama R.I. dan seragam tentara, hanjalah untuk menutupi dan menjelimuti maksud dan tudjuan mereka jang djahanam itu."⁴⁸

Kartosoewirjo menerangkan, bahwa di Indonesia sejak tiga tahun berdirilah dua negara yang berbeda dalam hukum dan pendirinya, berlainan sikap dan haluan politiknya, bertentangan maksud dan tujuannya ; pendek kata berselisih dalam setiap hal. Filsafat Pancasila dinamakannya sebagai satu campuran masakan yang terdiri daripada Sintoisme, Hokko Itciu, Islam-syirik dan Nasionalisme jahil yang kemerah-merahan.⁴⁹

Kartosoewirjo menyesalkan, bahwa pemerintah RI tidak menjawab kedua nota rahasianya, melainkan mencap negaranya sebagai "gerombolan Darul Islam", pemberontak, perampok dan lain-lain, dan menyerang negaranya dengan kekuatan senjata. Semua usaha pemerintah RI untuk menyelesaikan masalah DI secara damai

⁴⁸Pedoman Dharma Bakti, Jilid 2, 1960, Manifes Politik Negara Islam Indonesia No. V/7, hal. 309

⁴⁹Pedoman Dharma Bakti, Jilid 2, 1960, Manifes Politik Negara Islam Indonesia No. V/7, hal. 272.

dinamakannya sebagai perbuatan khianat dan sebagai penipuan. Yang sangat memalukan menurut Kartosoewirjo adalah, bahwa dalam usaha-usaha itu ikut serta alim ulama yang terkenal di dalam kalangan Islam. Misi Wali Al-Fatah yang pada pertengahan tahun 1950 dikirim ke daerah DI sebagai penghubung dan pengantara, oleh Kartosoewirjo dicap sebagai "tipuan fi hak iblis la'natullah semata'. Dia kini meramalkan pecahnya sebuah perang saudara, sebuah konflik ideologis antara Islam dan Komunisme. Sejarah akan membuktikan, apakah ramalan-ramalan tersebut akan menjadi kenyataan, demikian tulis Kartosoewirjo.⁵⁰

Menurut versi Kartosoewirjo tentang peristiwa tersebut, Kartosoewirjo telah tiba di tempat pertemuan, tetapi Wali Al-Fatah tidak ada lagi disana. Mungkin seorang bawahannya menyabot pertemuan tersebut, demikian keterangan Kartosoewirjo pada waktu di interogasi, sebab juga di pihak gerakan Darul Islam rencana untuk berunding dengan pemerintah di Jakarta tidak populer. Selain itu kata Kartosoewirjo, dalam serangan dan kanonade yang dilakukan oleh pasukan pemerintah terhadap gerakannya, ia tidak melihat adanya kesediaan Republik untuk berunding.⁵¹

Wali al-Fatah yang beberapa waktu dinyatakan hilang, karena menjadi tawanan gerakan Darul Islam, kemudian ditemukan oleh pasukan pemerintah pada tanggal 22 Juni dalam keadaan sakit Malaria dan benar-benar putus asa. Di depan

⁵⁰Pedoman Dharma Bakti, Jilid 2, 1960. Manifest Politik Negara Islam Indonesia No. V/7, hal. 334. Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid 1, 1960, Maklumat Komandemen Tertinggi No.8. 12-10-1952, hal. 55-63.

Pers kelak dia menerangkan, bahwa satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah DI adalah dengan jalan kekerasan meskipun pasti akan meminta banyak korban.⁵² Kemudian PM Natsir mengadakan usaha berikutnya, ketika pada tanggal 14 Nopember 1950 menawarkan amnesti bagi semua kelompok bersenjata yang belum menggabungkan diri dengan Republik dan masih memusuhi pemerintah RI⁵³. Dalam rangka tawaran amnesti ini, PM Natsir menugaskan Kiai Muslich, kepala Kantor Urusan Agama Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan pesan pemerintah kepada Amir Fatah, pemimpin gerakan Darul Islam di Jawa Tengah.⁵⁴ Pada prinsipnya Amir Fatah setuju untuk kembali ke pangkuan Republik, namun sebelumnya dia masih ingin bertemu dengan Kartosoewirjo di Jawa Barat untuk mengadakan pembicaraan dengan dia dan mungkin juga untuk mengajak Kartosoewirjo turun gunung. Dalam perjalanan menuju Jawa Barat Amir Fatah dan pasukannya selalu diikuti pasukan pemerintah hingga dia akhirnya menyerah di Jawa Barat tanpa bertemu dengan Kartosoewirjo.⁵⁵

Pada akhir bulan Desember PM Natsir menugaskan lagi Kiai Muslich lagi untuk menyampaikan amanat pemerintah RI juga kepada "Tuan Kartosoewirjo". Muslich dibawa ke Markasnya Kartosoewirjo di Gunung Galunggung oleh seorang penghubung gerakan Darul Islam yang hidup di Bandung yang harus mengorganisasi

⁵¹ Komando Daerah Militer VI.Siliwangi, Team Pemeriksa. Berita Atjara Interogasi V., op.cit., hal.3.

⁵² Merdeka, 24.6.1950.

⁵³ M. Natsir, *Capita Selecta*. Jilid II. Bandung & The Hague: W. van Hoeve 1945., hal.8.

⁵⁴ Lampiran

⁵⁵ Kiblat XVIII, No. 24, 19 8 I.. hal. 13.

pembelian senjata, pangan dll, di kota itu. Sebelum keberangkatannya, Kiai Muslich masih menemui Panglima Territorium III/Siliwangi, Kol. Sadikin dan kemudian mendapat disposisi yang ditandatangani oleh Kepala Staf Letkol Soetoko yang berbunyi: "Berikan bantuan seperlunya, supaya Order YM Perdana Menteri dapat dilaksanakan dalam tempat dekat. Setelah tiba di tempat tujuan Kiai Muslich tidak bertemu muka dengan Kartosoewirjo yang sudah dia kenal sejak tahun tigapuluhan ketika sama-sama menjadi anggota PSII. Lewat ajudannya Kartosoewirjo menyampaikan pesan, bahwa sebenarnya dia ingin bertemu dengan Kiai Muslich, namun sebagai Imam dan Panglima Tertinggi NII dia tidak dapat menerima seorang kurir dan kedudukannya serendah Kiai Muslich. Sebaiknya pemerintah di Jakarta mengirimkan seorang utusan yang resmi, maka dia akan menerimanya. Tetapi sebelumnya, pemerintah RI harus mengakui Negara Islam Indonesia dulu. Menurut Kiai Muslich, dia dititipi 2 sarat untuk PM. Natsir, yang satu katanya untuk Natsir pribadi. Dalam surat tersebut Kartosoewirjo menulis pada Natsir, bahwa sebagai perdana Menteri, Natsir punya kekuasaan untuk menambah huruf "I" berikutnya di belakang RI, menjadi "Republik Islam Indonesia".

Sekiranya Natsir berbuat demikian maka dia akan mempunyai dukungan sepenuhnya dari pihak NII dalam segala hal.⁵⁶

Dalam surat berikutnya yang ditujukan kepada M. Natsir sebagai Perdana Menteri, Kartosoewirjo menamakan amanat pemerintah RI sebagai "panggilan daun

⁵⁶ Lampiran I..

nyieur" karena semua anggota kelompok bersenjata yang menyerah harus membawa daun nyieur sebagai tanda tekad mereka yang damai.⁵⁷

Tetapi ternyata selama masa berlakunya amnesti tersebut, hanya sedikit sekali anggota kelompok bersenjata yang turun gunung. Lagi pula, pada tanggal 8 Desember sementara amnesti tersebut masih berlaku, Panglima Teritorium III Jawa Barat mengeluarkan instruksi yang menyatakan 16 organisasi sebagai organisasi terlarang, termasuk Gerakan Darul Islam, NII dan TII⁵⁸. Sebagai akibat kegagalan himbauan pemerintah RI, maka pada akhir bulan Desember pihak militer mengambil langkah-langkah yang lebih keras dan mengadakan penangkapan massal. Banyak dari mereka yang tertangkap adalah politisi dari kalangan Masyumi.⁵⁹ PM Natsir masih tetap berharap bahwa Kartosoewirjo akhirnya insjaf dan menyerah, namun dia, seperti juga banyak politisi lainnya, rupanya sejak dari awal menganggap enteng Kartosoewirjo dan salah menafsirkan wataknya yang keras. Moh Natsir juga menyesalkan, bahwa dia dikecam, tidak cukup tegas bertindak terhadap gerakan Darul Islam dan dia bertanya, apakah keadaan semakin bertambah baik, bila jumlah tawanan naik menjadi 100.000, desa dibakar menjadi abu, kota-kota dipenuhi dengan pengungsi-pengungsi dan sekolah-sekolah diubah menjadi penjara.⁶⁰

Tetapi tentara republik mencapai suksesnya yang terbesar juli 1951, ketika beberapa puncak pimpinan Darul Islam ditangkap atau dibunuh pada waktu yang

⁵⁷ Holk H. Dengel, 1995

⁵⁸ Republik Indonesia, *Propinsi Djawa Barat*, 1953, hal. 211.

⁵⁹ H. Feith, 1979, hal. 210.

⁶⁰ M. Natsir, *Capita Selecta*, 1973, hal. 198.

bersamaan. Yang belakangan ini, karena dikejar satuan tentara, mencari perlindungan dalam sebuah gua yang tersembunyi dari pandangan oleh sebuah air terjun di Gunung Galunggung, di sekitar Cisayong. Dalam tembak-menembak yang terjadi setelah mereka ditemukan Oni, komandan TII, tewas dan K.H. Gozali Toesi, ditangkap.⁶¹

Pada bulan Oktober 1952, Kartosoewirjo memerintahkan untuk mempercepat dan memperhebat semua usaha menyelenggarakan persiapan perang totaliter dan memperbaiki organisasi Polisi dan BARIS begitu juga sistem komandemen.⁶² Badan-badan ini harus membentuk sebuah "Benteng Islam" agar apabila dalam memasuki tahap ketiga dapat menyelenggarakan negara basis atau "Madinah Indonesia" yang mana : "Kedalam, berlaku sebagai alat-alat pembersih dan penjapu segala matjam kutu-kutu masjarakat, dan obat penjembut beraneka warna penjangkit, pemelihara kedaulatan Negara Islam Indonesia dan kesutjian Agama Islam. Keluar, merupakan Benteng Islam jang kuat sentausa, jang sanggup menghadapi tiap-tiap musuh Allah (Islam), dari djurusan manapun djuga."⁶³

Juga penganugerahan pangkat militer dan penggunaan lencana kepangkatan, serta bentuk dan pembuatan lencana tersebut kini diatur oleh sebuah Maklumat

⁶¹ Wawancara dengan H. Maskur pada tanggal 15 Juli 2001 di Singapura. Kepala R. Oni dipenggal dan diarak keliling kota Tasikmalaya.

⁶² Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid 1, 1960, Maklumat Komandemen Tertinggi No.8, 12-10-1952, hal. 55-63.

⁶³ Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid 1, 1960, Maklumat Komandemen Tertinggi No .8, 12-10-1952, hal. 55-63.

Komandemen Tertinggi.⁶⁴ Selanjutnya ditetapkan konsolidasi militer dan aparatur Negara Islam Indonesia, agar dalam pandangan internasional sesuai dengan negara yang bebas merdeka. Konsolidasi ini terutama mencakup kekuatan tentara dan persenjataan kesatuan militer Tentara Islam Indonesia yang masih tetap jauh tertinggal dari standar seharusnya. Sebuah batalyon Tentara Islam Indonesia harus terdiri dari 4 kompi masing-masing dengan 290 tentara dan masing-masing kompi harus mempunyai 12 senjata otomatis berat dan ringan, 3 mortir, 189 pucuk senapan dan 12 pucuk pistol. Namun, standar persenjataan yang ideal ini tidak pernah tercapai, karena selalu kekurangan senjata berat. Di samping Bai'at yang harus diucapkan anggota TII, sekarang ditambah lagi dengan janji tentara yang dinamakan "Septa-Subaya" yang terdiri atas tujuh janji. Pada waktu pengucapan Septa Subaya ini, seorang anggota TII harus berjanji tetap berdisiplin, berani, membela pemimpin, jujur dan hemat, bijaksana, mencintai sesama mujahid dan pantang menyerah.⁶⁵

Dalam sebuah keterangan pemerintah Negara Islam Indonesia pada bulan Mei 1955, yang dianggap Kartosoewirjo sebagai jawaban atas "permakluman perang resmi oleh RIK terhadap Negara Islam Indonesia", dan yang juga merupakan sebuah jawaban atas sikap kabinet Ali Sastroamidjojo, Kartosoewirjo kembali lagi mengingatkan bentrokan senjata yang pertama antara TNI dan TII di Antralina. Pada saat itu umat Islam merasa haknya diperkosa, karena TNI "melanggar batas-batas

⁶⁴Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid 1, 1960, Maklumat Komandemen Tertinggi No. 9, 17-10-1952, hal. 64-111.

⁶⁵Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid 1, 1960, Maklumat Komandemen Tertinggi No. 10, 21-10-1952, hal. 112-127.

daerah de facto Negara Islam Indonesia”, demikian keterangan Kartosoewirjo.⁶⁶ Dia juga membenarkan aksi-aksi teror terhadap penduduk : “Pembunuhan dilakukan atas pengkhianat-pengkhianat Negara Islam Indonesia, pengkhianat Agama (Islam) dan pengkhianat Allah beserta kaki tangannya, sedang pembakaran dilakukan atas serangan serdadu TRIK dan hak milik anak tjtju iblis la-natullah, jang haram mutlak itu. Merampas hak milik pengkhianat bukanlah barang baru. Semua itu berlaku atas sendi-sendi tegasnya hukum perang”.⁶⁷

Sistem komandemen tetap bertahan pada bentuknya yang lama selama 7 tahun, dan juga semua peraturan dan perundang-undangan Negara Islam Indonesia terus berlaku. Maklumat yang berikutnya dari komandemen Tertinggi APNII baru dikeluarkan pada bulan Agustus 1959, ketika diadakan reorganisasi militer dan aparatur Negara Islam Indonesia secara menyeluruh namun pada saat itu titik klimaks Negara Islam Indonesia telah berlalu. Sementara itu Kartosoewirjo mungkin sudah menyadari, bahwa perang Korea tidak akan berkembang menjadi perang dunia ketiga, walau dia begitu yakin akan pecahnya perang tersebut, sehingga dia memasukkan perletusan perang itu ke dalam rencana-rencananya. Menurut keterangannya sendiri, Kartosoewirjo beserta keluarganya antara tahun 1954-1959 pindah ke daerah pegunungan selatan Jawa Barat di sekitar Karangnunggal (hutan

⁶⁶Pedoman Dharma Bakti, Jilid 2, 1960, Statement Pemerintah Negara Islam Indonesia No. VII/7, 25-5-1955.

⁶⁷Pedoman Dharma Bakti, Jilid 2, 1960, Statement Pemerintah Negara Islam Indonesia No. VII/7, 25-5-1955. Kartosoewirjo menyebut Republik Indonesia dengan istilah Republik Indonesia Komunis (RIK) dan Tentaranya disebut Tentara Republik Indonesia Komunis (TRIK), hal ini ia lakukan seperti ketika konflik dengan Parada Harahap pada tahun 1929.

Denuh). Sementara itu dia mengangkat Sanoesi Partawidjaja sebagai wakilnya.⁶⁸ Namun selama tahun-tahun itu semua Maklumat NII masih tetap ditandatangani Kartosoewirjo sendiri.

Baru ketika Kartosoewirjo mendengar, bahwa Sanoesi Partawidjaja bersama-sama dengan van Kleef, seorang Belanda yang berperang di pihak Negara Islam Indonesia dan dulu pernah menjadi anggota pasukan Westerling membuat kebijaksanaan organisasi yang menyalahi Maklumat-maklumat terdahulu, salah satunya adalah membuat pasukan khusus yang anggotanya dari masing-masing Komandemen Daerah, yang mengakibatkan keresahan di seluruh jajaran NII, maka Kartosoewirjo mengambil alih kembali pimpinan NII dan pada bulan Juli 1959, dia berangkat kembali ke daerah pusat Gerakan Darul Islam.⁶⁹ Sebagai taktik untuk mengelabui, Kartosoewirjo menyuruh menyebarluaskan berita-seperti yang pernah dia lakukan, bahwa selama dia tidak ada di pusat gerakan DI, dia berada di luar negeri untuk mewakili kepentingan Negara Islam Indonesia.⁷⁰

Untuk dapat kembali mengendalikan secara menyeluruh gerakan yang telah didirikannya tersebut, Kartosoewirjo kini mengadakan reorganisasi dan pengetatan seluruh pimpinan militer, begitu juga mengadakan peraturan baru atas tanggung jawab para komandan terhadap Kartosoewirjo sebagai Imam dan Panglima Tertinggi.

⁶⁸Wawancara dengan Ules Sudjai pada tanggal 16 Juni 2001 di Cianjur, Wawancara dengan Tahmid Rahmat Basuki pada tanggal 7 Juni 2001, di Bandung, Komandan Daerah Militer VI Siliwangi, Team Pemeriksa *Berita Atjara Interogasi IV*, 24 Djuni 1962, hal. 7

⁶⁹Wawancara dengan Toha Mahfid pada tanggal 10 Agustus 2002 di Sukabumi.

⁷⁰Komandan Daerah Militer VI Siliwangi, Team Pemeriksa *Berita Atjara Interogasi IV*, 24 Djuni 1962, hal. 7.

Tampaknya selama Kartosoewirjo diwakili oleh Sanoesi Partawidjaja telah terjadi beberapa perkembangan dalam gerakan DI yang tidak dapat ditolerir oleh Kartosoewirjo. Seruannya akan tanggung jawab setiap orang terhadapnya dan terhadap tujuan-tujuan gerakannya, terhadap solidaritas Islam dan kewajiban untuk menegakkan hukum Islam adalah petunjuk, bahwa Kartosoewirjo sangat khawatir tentang keadaan gerakannya pada waktu itu.

Maka segera dibentuk komando perang yang lebih kuat dan juga sistem Komandemen diefektifkan, supaya peperangan “bergelora lebih hebat” sehingga “tertajapailah dengan tolong dan karunia Allah djua kemenangan terachir, tegasnja kemenangan Islam dan Negara Islam Indonesia, ialah satu-satunja pintu gerbang menudju dan memasuki negara Madinah Indonesia”, demikian dijelaskan Kartosoewirjo dalam Maklumat Komandemen Tertinggi APNII No.11.⁷¹ Susunan pimpinan perang dalam bentuk baru itu harus diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya, supaya sudah selessai pada saat-saat dikeluarkannya Komando Perang Semesta atau Komando Perang Totaliter : “Ialah komando Allah langsung, melalui Imam Panglima Tertinggi Angkatan Perang NII, selaku Chalifatullah dan Chalifatun – Nabi di Nusantara Indonesia.”⁷²

Perang semesta itu akan menentukan nasibnya Negara Islam Indonesia dan hari depan umat Islam bangsa Indonesia di masa mendatang, kata Kartosoewirjo.

⁷¹Salinan Pedoman Darma Bakti, Jilid 1, 1960, Maklumat Komandemen Tertinggi No. II, 7-8-1959, hal.128.

⁷²Salinan Pedoman Darma Bakti, Jilid 1, 1960, Maklumat Komandemen Tertinggi No. II, 7-8-1959, hal. 129.

Reorganisasi struktur militer menetapkan, bahwa selama NII terlibat dalam peperangan, selama itu di seluruh Indonesia berlaku hukum Islam dimasa perang atau Hukum Jihad fi-Sabilillah.

Untuk menjamin berlakunya Hukum Perang, seluruh Indonesia oleh Kartosoewirjo dibagi menjadi tujuh Daerah Perang atau "Sapta Palagan", dimana Daerah Perang yang paling kecil adalah sebesar desa.⁷³

1. Daerah perang pertama meliputi seluruh Indonesia dan disebut "Komando Perang Seluruh Indonesia" (KPSI) yang dipimpin langsung oleh Imam dan Panglima Besar APNII, yang juga berwenang untuk mengeluarkan "Komando Umum". KPSI tersebut adalah identik dengan Dewan Imamah yang dulu dan Komandemen Tertinggi.
2. Daerah perang kedua meliputi beberapa wilayah NII dan disebut sebagai "Komando Perang Wilayah Besar" (KPWB). KPWB ini dibagi lagi menjadi 3 wilayah yang masing-masing dipimpin oleh seorang Panglima Perang KPWB.
 - a. KPWB I. Terdiri atas pulau Jawa dan Madura dan dipimpin oleh Agus Abdullah.
 - b. KPWB II. Terdiri atas seluruh Indonesia Timur termasuk Sulawesi, Nusantara, Maluku, Irian Barat dan Kalimantan dan dipimpin oleh Abduul Qahhar Muzakkar.
 - c. KPWB III. Terdiri atas seluruh Sumatera dan kepulauan sekitarnya dibawah pimpinan Daud Beureuh.
3. Daerah perang ketiga hanya meliputi satu wilayah NII dan disebut sebagai "Komando Perang Wilayah (KPW). Dengan demikian beberapa KPW merupakan satu KPWB. Juga setiap KPW dipimpin oleh seorang Panglima Perang KPW. Seluruhnya terdapat 7 KPW di Indonesia.

KPW I.
Terdiri dari daerah Karesidenan Jakarta, Purwakarta, Cirebon dan Priangan Timur.

KPW II.
Hanya terdiri dari Jawa Tengah, namun wilayah ini dihapus, karena Gerakan-DI yang dipimpin oleh Amir Fattah telah lama gagal.

KPW III.
Direncanakan Jawa Timur di bawah pimpinan Masduki.

KPW IV.
Sulawesi Selatan dan daerah sekitarnya yang dipimpin oleh Abdul Qahhar Muzakkar.

KPW V.

⁷³Semua keterangan tentang pembagian wilayah Indonesia ke dalam 7 daerah perang (Sapta Palagan) berasal dari dokumen-dokumen berikut ini: Komando Daerah Militer VI Siliwangi, Team Pemeriksa, *Berita Atjara Ilerogasi IV*, 24. Juni 1962, hal. 3, Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid 1, 1960, Maklumat Komandemen Tertinggi No. 11, 7-8-1959, hal. 128-138.

Sumatera dipimpin oleh Daud Beureuh.

KPW VI.

Direncanakan daerah Kalimantan, tapi gagal.

KPW VII.

Keresidenan Bogor, Kabupaten/ Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten

Sumedang dan Karesidenan Banten dipimpin oleh Ateng Djaelani Setiawan.

4. Daerah perang keempat meliputi satu Karesidenan / Resimen dan disebut "Komando Militer Pangkalan Setempat" atau disingkat "Kompas". Dengan Demikian, istilah Korps (Komando Operasi Resimen Pertempuran Setempat) juga diubah menjadi "Kompas" yang hanya mempunyai fungsi taktis dan tidak boleh lagi mencampuri administrasi negara. Setia Kompas dipimpin oleh seorang Komandan Pertempuran Kompas.
5. Daerah perang kelima hanyalah meliputi satu Kabupaten / Batalyon dan disebut "Sub-Kompas" dan dipimpin oleh seorang Komandan Pertempuran Sub-Kompas.
6. Daerah perang keenam hanyalah meliputi satu desa atau lebih dan disebut "Sektor". Setiap Sektor dipimpin oleh seorang Komandan Pertempuran Sektor.
7. Daerah perang ketujuh meliputi satu desa atau lebih dan disebut sebagai "Subsektor" yang dipimpin oleh seorang Komandan Pertempuran Subsektor.

Kepada seluruh Komandan dan Komandemen diperintahkan supaya susunan pimpinan perang bentuk baru selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1960 sudah harus selesai dilaksanakan. Kartosoewirjo mengingatkan sekali lagi dengan tegas, bahwa setiap anggota APNII harus menaati maklumat-maklumat, penetapan, peraturan dan lain-lain ketentuan NII.⁷⁴

Menurut struktur komando yang baru hampir semua gerakan militer dan komandonya kini dipertanggungjawabkan kepada Komandan Pertempuran Kompas, yang mengatur langsung setiap pasukan yang ada dibawah pimpinannya. Juga Komandan Kompas adalah pengantara terakhir untuk menyalurkan dan melanjutkan segala instruksi atasannya kepada bawahannya. Sebagai komandan lapangan, Komandan Kompas juga harus menentukan siasat dan strategi militer. Kartosoewirjo

⁷⁴Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid I, 1960, Maklumat Komandemen Tertinggi No. 11, 7-8-1959, hal.142.

berharap, bahwa dengan pelaksanaan penyusunan struktur komando yang baru, Negara Islam Indonesia terhindar dari pada “setiap jenis, sifat dan bentuk dualisme,” dalam bidang dan lapangan apa dan manapun” sehingga di lingkungan NII hanya dikenal satu pimpinan negara yang juga bertugas memegang pimpinan perang dan pimpinan umat berperang.⁷⁵

Dia menegaskan supaya semua Mujahid tetap tertib, teliti dan hati-hati dalam melakukan hukum-hukum jihad, dan itu juga berlaku untuk ketentuan-ketentuan militer. Setiap mujahid harus menggunakan setiap detik sepanjang umurnya “hanja bagi djihad mentegakkan Kalimatillah, mendlohirkan Keradjaan Allah, mewujudkan kebesaran dan ke’adilan Allah di dunia, chusus di permukaan bumi Allah Indonesia”. Dalam pada itu segala hal yang membawa kepada “lengah dan lalai, tjeroboh dan sembrono, harus dijauhkan dan dijenahkan, tegasnja sikap tawakal’alallah secara mutlak harus dipersatu-padukan dengan perbuatan-perbuatan taqwa”.⁷⁶

Sebagai tindakan berikutnya Kartosoewirjo menjuruh menyalin dan menyusun kembali “Pedoman Dharma Bakti” yang mengandung semua maklumat-maklumat, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan pemerintah NII. Setelah

⁷⁵Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid 1, 1960, Maklumat Komandemen Tertinggi No. 11, 7-8-1959, hal.143.

⁷⁶Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid 1, 1960, Maklumat Komandemen Tertinggi No. 11, 7-8-1959, hal.152.

selesai disalin dan disusun kembali buku pedoman ini harus dibagi-bagikan kepada para komandan APNII.⁷⁷

Dalam dua Maklumat Komandemen Tertinggi yang dikeluarkan pada bulan September 1959, Kartosoewirjo menetapkan tugas dari masing-masing Komandemen dan tugas-tugas para komandannya untuk menghindarkan segala jenis salah paham, salah tafsir dan salah guna atasnya. Selain itu dia menyempurnakan pemberian pangkat dan pemakaian tanda pangkat dan lencana. Sebutan TII (Tentara Islam Indonesia) dihapus dan diganti dengan sebutan APNII (Angkatan Perang Negara Islam Indonesia).⁷⁸

Kekuatan gerakan yang didirikan Kartosoewirjo terletak dalam kemampuan untuk mengatur, menyusun dan menyelenggarakan susunan ketentaraan dan susunan organisasi kenegaraan NII. Kartosoewirjo juga sangat pandai menggunakan situasi kondisi politik dan militer dalam menyusun dan mengatur administrasi pemerintah NII yang dia selalu sesuaikan dengan keadaan yang berlaku atau dengan perubahan-perubahan keadaan di dalam maupun di luar negeri. Setiap perubahan dan perkembangan politik telah dijadikan dasar pertimbangannya dalam mengatur dan menyempurnakan susunan pemerintahan. Dengan demikian reorganisasi yang telah dilakukan Kartosoewirjo juga harus dilihat sebagai reaksi atas.

⁷⁷Wawancara dengan Jamhur Sudrajat pada tanggal 19 Juni 2000 di Garut, Wawancara dengan Mohammad Talunid pada tanggal 7 Juni 2000 di Bandung, Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid 1, 1960, hal. 178.

⁷⁸Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid 1, 1960, Maklumat Komandemen Tertinggi No. 12.1-9-1959, hal. 153-165, Maklumat Komandemen Tertinggi No.13, 22-9-1959, hal. 165-178.

VII.4. Runtuhnya Negara Islam Indonesia

Kartosowirjo sebenarnya masih memperluas pengaruhnya, ke daerah-daerah Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan, Tapi baiklah kita telusuri sejauh mana sesungguhnya kekuatan NII Kartosowirjo yang berusaha untuk terus mendirikan negara Islam di Indonesia tanpa menghiraukan imbauan-imbauan pemerintah Indonesia agar kembali ke pangkuan ibu pertiwi itu.

Seorang Muslim yang pertama kali menghadapi persoalan yang ditimbulkan oleh gerakan Darul Islam ini adalah Muhammad Natsir. Dia adalah seorang pemimpin Islam terkemuka Indonesia dan rekan seperjuangan Kartosowirjo juga di Masyumi yang didirikan bulan November 1945, Hanya saja, Natsir waktu itu dan untuk beberapa waktu secara terus-menerus menjadi pemimpin partai Islam modernis itu, Kartosowirjo menjabat sebagai salah seorang sekretaris partai. Tatkala pengakuan kedaulatan Indonesia diberikan oleh Belanda tanggal 27 Desember 1949 dan Indonesia secara resmi masuk ke dalam negara Republik Indonesia Serikat, selama waktu awal tahun 1950 hingga pertengahan tahun itu, Muhammad Natsir dengan gencarnya melakukan apa yang dikenal dengan istilah "mosi integral"⁷⁹ yang bertujuan untuk mempersatukan wilayah-wilayah Indonesia yang terpecah-pecah dan terkotak-kotak sebagai akibat dan didirikannya Republik Indonesia Serikat itu. Missi M. Natsir berhasil, dan secara resmi Republik Indonesia Serikat bergabung dengan

⁷⁹Panitia Natsir-Rocin 70 Tahun, *Muhammad Natsir, 70 tahun kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan*, 1978. hal. 105

Republik Indonesia “Jogjakarta” kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1950. Hadiah untuk organisator dan konseptor “mosi integral” ini adalah berupa jabatan sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia yang baru itu.

Demikianlah, Muhammad Natsir menerima amanat sebagai Perdana Menteri Indonesia pertama semenjak RIS bubar dan berdirilah NKRI. Dia memerintah Indonesia antara September 1950-Maret 1951, dan sebagai mana di muka, dia langsung berhadapan dengan gerakan Darul Islam itu, Sebenarnya, pada tanggal 5 Agustus 1949, dua hari sebelum proklamasi NII oleh Kartosoewirjo dikumandangkan, ia telah mengirim surat kepada Kartosoewirjo untuk “mencegah timbulnya keadaan berpatah arang.” Tetapi, sebagaimana terjadi bahwa NII akhirnya diproklamasikan Kartosoewirjo, usaha Natsir berarti gagal.

M. Natsir mulai jabatannya sebagai Perdana Menteri, dijalankan operasi Merdeka untuk memulihkan keamanan. Namun, Natsir yang telah memasukkan penyelesaian soal Darul Islam dalam program kabinetnya, selanjutnya berusaha untuk memecahkan masalah DI secara damai. Tetapi pihak militer kurang memberikan simpati kepada rencana PM Natsir ini dan mereka juga belum melupakan kejadian-kejadian, ketika stengah tahun yang lalu kesatuan-kesatuan TNI tiba kembali di Jawa Barat dan mendapat penyambutan yang sangat bermusuhan dari pihak gerakan Darul Islam. Juga pada 1950 inisiatif masih di pihak pasukan

pemerintahan dan karena itu dalam kalangan Angkatan Bersenjata terdapat kecondongan untuk menyelesaikan masalah DI dengan cara militer.⁸⁰

M. Natsir mengutus Wali Al-Fatah, seorang teman dekat Kartosoewirjo, untuk membicarakan masalah penyelesaian Darul Islam ini pada tanggal 14 Mei 1950. Wali Al Fatah dari bagian politik Departemen dalam Negeri yang sebelumnya telah memimpin Kongres Muslimin pada bulan Desember di Yogyakarta, dengan didampingi dua orang berangkat ke Priangan, pusat markas Kartosoewirjo berada. Rombongan ini tiba pada tanggal 24 Mei di Cipanguruyan di lereng Gunung Cakrabuana dimana Wali Al-Fatah diberlakukan sebagai tamu istimewa Gerakan Darul Islam yang menjamin keamanannya, asal tidak terjadi serangan dari pasukan RIS. Menurut rencana, Kartosoewirjo akan bertemu dengan Wali Al-Fatah di Slawi yang waktu itu berada dalam kekuasaan DI. Tentang apa yang selanjutnya terjadi, terdapat laporan-laporan yang berbeda-beda. Yang nampak pasti adalah, sementara Wali Al-Fatah menunggu pertemuan dengan Kartosoewirjo, pasukan APRIS mengepung sebuah kesatuan TII yang terdiri dari kira-kira 100 tentara yang ditugaskan untuk menjamin keamanan pertemuan antara Wali Al-Fatah dan Kartosoewirjo. Kesatuan APRIS tersebut berada dibawah perintah kolonel Nasuhi yang sebelumnya telah membuat perencanaan pertemuan antara Wali Al-Fatah dan Kartosoewirjo. Dalam pertemuan yang selanjutnya terjadi, gugur Toha Arsjad Menteri Penerangan NII.⁸¹

⁸⁰ Holk H. Dengel, 1995.

⁸¹ Merdeka 26.5.1950/ Merdeka 20.6.1950.

Tetapi Kartosoewirjo menolak perundingan yang dilakukan oleh utusan M. Natsir ini, dan menyatakan bahwa ia hanya bersedia berunding dengan pihak pemerintah Indonesia bila utusan pemerintah Indonesia terdiri dari delegasi tingkat atas Usaha M. Natsir untuk yang kesekian kalinya gagal lagi, tapi Ia tidak berhenti di situ saja.

Pada tanggal 14 November 1950, Natsir berpidato di radio yang ditujukan kepada "para pejuang kemerdekaan yang belum kembali ke kehidupan normal" untuk "meninggalkan cara-cara gerilya yang mereka pergunakan, dan mengabdikan dirinya untuk pembangunan negara baru Indonesia." Dengan berbuat demikian, mereka akan "mempunyai banyak kesempatan memperjuangkan cita-citanya dengan cara yang tertib." Apa tanggapan Kartosoewirjo terhadap upaya penyelesaian secara damai dari Muhammad Natsir ini? Tidak ada tanggapan sedikitpun, kecuali dua pucuk surat tertanggal 22 Oktober 1950 dan 17 Februari 1951 yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia agar bersedia "bersahabat sehidup semati dengan NII." Karena Kartosoewirjo memang tidak bisa diajak kembali ke pangkuan ibu pertiwi, akhirnya kabinet Soekiman, yang menggantikan kabinet, menjanjikan "kebijaksanaan militer yang lebih keras terhadap para pemberontak sampai dapat dipulihkannya kembali keamanan dalam negeri, seperti yang berulang-ulang dituntut oleh para perwira militer." Dengan reaksi seperti ini, nyata benar bahwa baik M. Natsir maupun Dr. Soekiman, dan tentu saja rekan-rekan Muslim yang berjuang di Masyumi, tak memiliki simpati sedikitpun terhadap Darul Islam. Apalagi pidato M. Natsir tanggal

14 November yang secara jelas mengajak gerakan Darul Islam ini meninggalkan cara-cara gerilya dalam memperjuangkan cita-citanya dan sebaliknya berjuang dengan cara yang tertib, ini berarti memang secara logis para elit Islam ini tidak menyukai gaya perjuangan Darul Islam. Dengan demikian, jelas pula bahwa kepentingan Islam menurut pandangan M. Natsir yang dapat diperjuangkan lewat parlemen tidak ditanggapi sama sekali. Bukti untuk itu adalah, bahwa Kartosoewirjo bersedia berunding dengan pemerintah Indonesia hanya jika pemerintah Indonesia “mengakui keabsahan NII terlebih dahulu.”⁸²

Manuver Kartosoewirjo ini secara kongkrit menyiratkan pandangannya tentang Islam: Ia tidak mau melakukan perjuangan politik di parlemen yang diperkirakannya bakal mengecilkan kedudukan Islam karena masih harus berembug dengan kekuatan non Islam yang sudah pasti tidak akan menerima Islam sebagai dasar negaranya. Itulah sebabnya, ia tetap berpegang teguh kepada keyakinannya, kendati ia tahu bahwa para elit Muslim yang memegang posisi kunci di dalam percaturan politik nasional itu tidak mendukungnya. Tidak ada waktu lagi bagi kedua belah pihak untuk menentukan pilihan-pilihan damai oleh sebab itu konflik adalah jalan penyelesaian akhir yang dapat ditempuh agar suatu “permainan zero sum” dapat terjadi dengan tuntas.

Pada akhirnya untuk menyelesaikan masalah Darul Islam dibuat konsep Perang Wilayah dengan dasar pemikiran, bahwa tanpa adanya bantuan aktif dari

⁸²C. van Dijk, 1983, hal. 105.

rakyat, pemberontakan tidak akan dapat ditumpas.⁸³ Konsep Perang Wilayah dibuat oleh Letnan Kolonel Saleh Cakradipura sebagai Pimpinan Korem II Priangan Timur. Juga pada waktu mobilisasi sarana bantuan, kehidupan rakyat sebaiknya jangan diberatkan dengan beban tambahan. Menurut konsep tersebut, Angkatan Bersenjata harus menjalin hubungan yang erat dengan rakyat setempat dan di antara TNI dan rakyat tidak boleh diadakan perbedaan dalam bidang pangan, akomodasi dan pelayanan kesehatan. Semua rencana tersebut diharapkan akan mengakibatkan isolasi total dari gerakan Darul Islam dan akan memperkuat juga daya perlawanan rakyat.⁸⁴

Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Konsep Perang Wilayah adalah Pangdam Siliwangi, Ibrahim Adjie. Konsep Perang Wilayah kemudian disahkan oleh Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960.⁸⁵

Tetapi sebelumnya, pada bulan Pebruari 1959 telah disusun "Petunjuk Pokok Pelaksanaan Pemulihan Keamanan" (P4K) yang bersandar pada konsep Perang Wilayah dan merupakan suatu petunjuk untuk penggunaan seluruh sarana militer seefisien mungkin.⁸⁶ Kemudian dibuat "Rentjana Pokok 2.1." (RP 2.1.) untuk membatasi kebebasan bergerak lawan sehingga lawan terdorong ke dalam daerah-daerah tertentu yang kemudian diselesaikan satu per satu.⁸⁷ Untuk melaksanakan

⁸³Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, Sejarah TNI, Jilid 2, 2000, hal 86. N.Asmara, *Perang Rakjat Semesta*, 1964, hal. 38. Wawancara dengan Dodo Mohammad Darda tanggal 16 April 2002 di Malangbong.

⁸⁴Doktrin Perang Wilayah BP 61-771, hal. 4.

⁸⁵Sedjarah Militer Kodam VI Siliwangi, 1968, hal.306.

⁸⁶Petunjuk Pokok Pelaksanaan Pemulihan Keamanan (P4K). SU-2, Tentara & Territorium III Siliwangi, 26-2-1959, hal. 1.

⁸⁷Ibid, hal. 3.

rencana tersebut, pada bulan Desember 1959 disusun “Rentjana Operasi 2.1.2.” dan kemudian pada bulan Pebruari 1961 dikeluarkan R.O 2.1.2.1. yang merupakan percepatan dari “Rentjana Operasi 2.1.2.” Kalau dalam RO 2.1.2. pemulihan keamanan wilayah Jawa Barat direncanakan dalam waktu 5 tahun, yaitu sampai tahun 1965, dalam RO 2.1.2.1. waktu itu dipercepat sampai akhir tahun 1962.

Sesuai dengan “Rentjana Pokok 2.1.2.” wilayah Jawa Barat dibagi menjadi tiga daerah operasi, Daerah Operasi A (DO-A), di mana telah tercapai normalisasi keadaan, Daerah Operasi B (DO-B) yang sudah dikontrol oleh TNI tetapi belum 100% bersih dari pemberontak Darul Islam dan Daerah Operasi C (DO-C) yang masih sepenuhnya dikontrol oleh gerakan Darul-Islam.⁸⁸ Pihak militer dengan demikian menggunakan suatu sistem yang mirip dengan sistem D.I/D.II/D.III yang dulu dipraktekan gerakan Darul Islam, misalnya DO-C wilayahnya harus disempitkan sehingga berkembang menjadi DO-B dan seterusnya menjadi DO-A sehingga seluruh wilayah Jawa Barat akhirnya kembali berada di bawah kekuasaan pemerintah pusat.

Penumpasan dan pengisolasian gerakan Darul Islam dimulai pada pertengahan tahun 1960, untuk pertama kali penduduk setempat diikutsertakan dalam operasi militer yang mula-mula dinamakan sebagai sistem “Pagar Betis” yaitu gerakan isolasi total. Tetapi pada mulanya sistem ini kurang berhasil,⁸⁹ dan baru setelah keamanan untuk semua partisipan diperbaiki, sistem Pagar Betis merupakan

⁸⁸Sedjarah Kodam VI Siliwangi, 1968, hal. 307.

⁸⁹A.H.Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas*, Jilid 4, hal. 390.

salah satu syarat untuk berhasil dalam peningkatan dan pengisolasian gerakan Darul Islam, terutama di daerah Banten dan Priangan.

Dalam praktek sistem Pagar Betis berfungsi sebagai berikut: setelah pemberontak didorong ke suatu daerah tertentu, daerah tersebut dilingkari dengan garis pertahanan Pagar Betis di mana setiap 5 meter terdapat satu "Saung pos rakyat"⁹⁰ yang terdiri dari 5 orang yang tidak bersenjata. Setiap 5-10 saung pos rakyat itu, artinya setiap 20-40 meter, terdapat satu pos militer yang berkekuatan 3 pucuk senjata. Antara satu gubuk dengan saung yang lainnya dipasang rintangan berupa tali setinggi betis dengan digantungkan kaleng-kaleng kosong yang dapat berbunyi ketika disentuh.

Garis peningkaran yang berupa saung-saung itu diamankan oleh sejumlah satuan-satuan tempur yang terus-menerus beroperasi mencari kontak senjata dengan lawan untuk menghancurkannya dan juga untuk menghalangi lawan dapat menerobos garis pertahanan Pagar Betis.⁹¹ Menurut Pihak Darul Islam sendiri selain "pager betis" yang dilakukan oleh TNI dengan "pager bedil", dengan jumlah orang seperti pada pager betis tetapi tiap saung itu satu orang TNI bersenjata⁹²

Karena sudah terlihat hasilnya kemudian direncanakan tiga operasi militer, yaitu Operasi Tjepat I-XII dari tanggal 1 Januari 1961 sampai 31 Januari 1962, Operasi Brata Yudha I-IV dari bulan Maret sampai bulan Juni 1962 dan Operasi

⁹⁰Saung di Jawa Barat merupakan sebuah gubuk kecil yang terdapat di pinggiran sawah biasa disebut dengan saung..

⁹¹Sejarah TNI-AD 1945-1973, hal.220.

⁹²Wawancara dengan Tahnid Rahmat Basuki pada tanggal 7 Juni 2000 di Bandung.

Pamungkas dari bulan Agustus 1962 sampai bulan Januari 1963, yang merupakan operasi militer terakhir.⁹³ Sementara itu kesatuan-kesatuan DI yang bermarkas di Gunung Cakrabuana dan Gunung Galunggung, yang diperkirakan terdapat markas Kartosoewirjo, menghadapi pengepungan total. .

Pada tanggal 1 April 1962 mulai dilancarkan Operasi Barata Yudha I., namun ini bukanlah perang "Brotoyudo Joyobinangun" yang oleh Kartosuwiryo sejak tahun duapuluhan diramalkan akan terjadi. Operasi militer ini dilancarkan terhadap dirinya dan terhadap gerakan yang didirikannya. Dalam operasi Brata Yudha daerah-daerah operasi dibagi menjadi Kuru-Setra, suatu istilah yang diambil dari epos Brata Yudha. Seluruhnya terdapat empat "Kuru Setra" , Yakni: Kuru Setra I (DO-C-5) yang meliputi seluruh kompleks Gunung Galunggung; Kuru Setra II (DO-C 8-9) meliputi kompleks Gunung Guntur dan Gunung Batara Guru; dalam Kuru Setra III (DO-C 6) termasuk Rangas dan Baroko dan Kuru Setra IV (DO-C 12) meliputi kompleks Cimarame.

Menurut Dodo Mohammad Darda semenjak Februari 1962 Pasukan yang ada di Markas Besar sudah mulai kekurangan makan, akibat isolasi total "pager betis" karena hampir seluruh rakyat di wilayah Darul Islam pun ikut dimobilisasi untuk melakukan pager betis, secara teoritis pager betis itu tidak ada tanah yang tidak diinjak. Lamanya pager betis biasanya 2 minggu dengan dua lapisan. Suplai logistik

⁹³Sedjarah Kodam VI Siliwangi, 1968, hal.319

dari anggota maupun simpatisan Darul Islam ke gunung tidak sampai, hingga makan pun apa saja yang bisa dimakan.⁹⁴

Empat puluh hari menjelang tertangkapnya Kartosoewirjo, tepat tanggal 24 April 1962 terjadi peristiwa pertempuran dengan banyak jatuh korban dari pihak pasukan pengawal Kartosoewirjo (MBS), yang disebut banyak korban itu artinya mereka yang tidak bisa menolong dirinya. Yang banyak tertembak yang berada di MBS⁹⁵, maksudnya Gubuk Kartosoewirjo. Sebelumnya seseorang berbaju putih menyusup ke markas dan dilaporkan, perintah Dodo, bila orang itu tidak bisa ditanya tembak saja. Kemudian dari pinggir gubuk tembakan beruntun jaraknya tidak lebih dari 10 meter. Dodo sendiri melompat ke arah parit bersama seorang pengawal namanya Uyuh, sambil menembak dengan jungle rifle hingga habis empat magazin, beberapa saat kemudian, Atjeng Kurnia membawa Kartosoewirjo yang tertembak dan tidak sadarkan, bersama-sama pengawalnya Hasan Anwar, Ihak, dan Ahmad. Dalam pertempuran itu di markas terdapat pula istri Kartosewirjo dan anaknya yang masih kecil Kokom. Akhirnya hujan rintik-rintik turun yang kemudian menyelamatkan seluruh Markas Besar dan pasukan pengawal pindah lagi.

Pada hari Raya Idul Adha bulan Maret tahun 1962 terjadi percobaan pembunuhan atas diri Presiden Soekarno, sewaktu dia berada di halaman Mesjid Baitur Rahim untuk mengikuti sholat Idul Adha. Salah seorang yang hadir

⁹⁴ Makanan di gunung biasanya sejenis buah misalnya saninten.

⁹⁵ MBS singkatan dari Markas Bantala Seta yang artinya Markas Besar NII dimana Kartosowirjo selalu berada beserta pasukan pengawalnya.

menembak beberapa kali ke arah Soekarno, namun tidak mengenai sasarannya,⁹⁶ karena pengawal pribadi Soekarno⁹⁷ pada rakaat kedua mengganti posisi tempat shalat Soekarno oleh Zainal Arifin sehingga yang dia tertembak. Gagasan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno berasal dari Mardjuk yang menjabat Komandan KK Tasikmalaya, Kartosoewirjo sendiri tidak melarang. Menurut H. Maskur pelaku-pelaku percobaan pembunuhan tersebut merupakan hal yang luar biasa, karena pelaku itu belum pernah ke Jakarta dan membawa senjata dari gunung dan bisa sampai duduk persis di belakang Soekarno di Masjid Baiturrahim, dengan tembakan yang tepat. Menurut keterangan lain bahwa untuk mendapat akses ke Masjid Baiturrahim didapat dari Kiai Bahrum yang berasal dari Bogor⁹⁸

Akhir bulan Mei Adah Djaelani Tirtapradja, seorang Komandan Wilayah dari gerakan DI, menyerahkan diri kepada Pos Pagar Betis di Gunung Cibitung. Maka dengan menyerahnya Adah Djaelani, tokoh-tokoh gerakan DI yang masih tinggal di hutan hanyalah Kartosoewirjo dan Agus Abdullah, "Panglima APNII untuk Jawa dan Madura".⁹⁹

Peristiwa 4 Juni 1962 menurut Dodo terjadi siang hari ada laporan dari seorang Kopral NII ada musuh yang masuk, Dodo sendiri sudah siap dengan senjata dan amunisinya. Kartosoewirjo sendiri sedang sakit, akibat peristiwa 24 April dengan satu peluru ke pangkal pahanya tertembak hingga ke lubang pelepasan (anus).

⁹⁶Merdeka. 15-5-1962.

⁹⁷Pengawal pribadi Soekarno waktu itu adalah AKP Suhadi, masih pamannya Dodo Mohamud Darda.

⁹⁸Wawancara dengan Haji Maskur pada tanggal 15 Juli 2001 di Singapura.

Ketika Dodo mau menembak TNI yang masuk menyerbu ke Markas NII dibawah pimpinan Suhanda, Kartosoewirjo melarang untuk menembak, "jika selalu mengikuti keinginan Emuh nama kecil Dodo, Mujahid habis', demikian Kartosoewirjo melarang anaknya. Menurut pengakuan Dodo setelah dilarang bapaknya itu, hilang perasaan "yuqtal au yaghlib", perasaan seorang mujahid, perasaan pemusuhan terhadap TNI, perasaan harga diri, perasaan tidak ingin ditangkap, perasaan ingin syahid. Perasaan ini masih terus ada sampai lebih satu minggu hingga ia turun¹⁰⁰.

Sedangkan menurut versi TNI, anggota pengintai dari pasukan Suhanda menemukan pada waktu turun hujan deras yang disertai angin kencang, sebuah tempat persembunyian pemberontak Darul Islam yang terdapat di sebuah lembah antara Gunung Sangkar dan Gunung Geber. Pos-pos penjagaan DI yang ditempatkan di bukit-bukit tidak dapat mendengar apa-apa karena hujan yang deras dan dengan demikian pasukan Suhanda dapat melangkah maju menuju sebuah pohon yang roboh. Dari tempat itu dalam kejauhan kurang- lebih 50 meter mereka dapat melihat sebuah gubuk yang dibangun secara darurat di bawah sebuah pohon rimba, yang cabang-cabangnya hampir menyentuh tanah. Ketika Suhanda memerintahkan pasukannya untuk melepaskan tembakan serbuan, kesatuannya juga ditembak dari arah bukit-bukit, namun anggota pasukannya yang lain dapat mematahkan perlawanan pasukan DI yang ditempatkan di situ. Setelah dari arah gubuk itu tidak ada lagi perlawanan, Suhanda mendekati gubuk itu dan bertanya, siapa komandannya di situ. Kepadanya

⁹⁹Sejarah TNI-AD 1945-1973, hal. 226.

¹⁰⁰Wawancara dengan Dodo Mohammad Darda pada tanggal 1 Februari 2001 di Bandung.

ditunjukkan sebuah gubuk berikutnya yang terletak di belakang gubuk pertama. Di gubuk tersebut mereka menemukan Kartosoewirjo, putranya Darda dan Atjeng Kurnia; seluruhnya yang menyerah berjumlah 46 orang.¹⁰¹

Mereka membawa Kartosoewirjo bersama putranya Dodo Mohammad Darda dan Atjeng Kurnia dibawa ke Pos TNI di daerah Cipanas Garut. Dari kota itu Kartosoewirjo dengan mobil ambulans dibawa ke hotel Bima Sakti Ciumbuleuit Bandung tempat karantina sementara tokoh-tokoh DI lainnya yang menyerah. Dengan demikian berakhirilah pertarungan Darul Islam/Kartosoewirjo dengan RI yang berlangsung hampir 14 tahun untuk mendirikan sebuah negara Islam, dan tepat pada hari ulang tahun proklamasi Negara Islam Indonesia ke 13, yaitu pada tanggal 7 Agustus, Kartosoewirjo dibawa dari Bandung ke Jakarta.

Kartosoewirjo segera disidang oleh Mahkamah Angkatan Darat untuk Peradilan Perang (MAHADPER) tanggal 14-16 Agustus 1962 dan segera divonis mati. Suatu eksekusi di depan sebuah regu tembak telah dijalankan oleh Kartosoewirjo pada tanggal 12 September 1962¹⁰²

¹⁰¹ Angkatan Darat Poskodam VI Siliwaangi, *Laporan khusus tentang penjerangan S.M.Kartosoewirjo. 4 Djuni 1962*, Pengumuman Panglima Daerah Militer VI Siliwangi berhubung telah turunka S.M.Kartosoewirjo pada tanggal 4 Djuni 1962.

¹⁰² Pinardi, 1964, hal. 12.

TABEL¹⁰³JUMLAH KORBAN DI/TII DI JAWA BARAT PERIODE 1959 -1962

<u>Tahun</u>	<u>Mati</u>	<u>Luka-Luka</u>	<u>Ditawan</u>	<u>Menyerah</u>	<u>Senjata</u>
1959	1138	76	151	262	445
1960	1035	66	213	281	342
1961	982	50	239	605	455
Jan '62	280	6	107	192	149
Feb '62	335	15	178	1.919	782
Juli '62	42	-	56	348	152
Agust '62	1	-	3	101	43
Jjumlah	3.813	213	947	3.708	2.368

TABEL

Jumlah Kerugian selama pembontakan DI/TII

<u>Tahun</u>	<u>Pembunuhan</u>	<u>Penculikan</u>	<u>Pembakaran</u>	<u>Penggarongan</u>	<u>Pengungsi</u>
1950	929	1931	30.663	1.158	-
1951	813	528	6.217	11.905	-
1952	1.008	608	4.706	14.905	-
1953	1.551	376	11.312	18.676	-
1954	1.096	308	8.713	13.480	-
1955	200*	90*	2.800*	4.000*	240.000
1956	200*	100*	2.200*	4.500*	250.000
1957	2.477	755*	17.673	102.984	287.949
1958	1.623	638	10.283	102.513	303.764
1959	1.860	882	13.868	77.254	256.617
1960	1.546	952	12.651	49.546	251.055
1961	548	227	18.336	17.943	228.200
1962	191	75	414	6.169	209.355

Keterangan:

- * Jumlah satu bulan
- Angka tahun 1950 - 1954 hanya meliputi daerah Kabupaten Priangan Timur,

¹⁰³ Data-data ini diambil dari dokumen DOKJARAH TNI AD

BAB VIII

KESIMPULAN

Gagasan Kartosoewirjo untuk mendirikan sebuah Negara Islam yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, sudah ada pada dirinya sejak zaman penjajahan Belanda. Dia merasa sebagai ahli waris pemikiran HOS Tjokroaminoto tentang gagasan Pan Islamisme, dengan perluasan pengertian tegaknya kembali Kekhalifahan Islam. Gagasan Darul Islam Kartosoewirjo sesungguhnya telah didahului oleh Diponegoro dengan gagasan Balad Islam dengan strategi perjuangan hijrah. Gagasan itu terus dikembangkan dan diaktualisasikan dalam bentuk gerakan Islam melalui organisasi KPK-PSII, Institut Suffah, Majelis Islam hingga terbentuknya Negara Islam Indonesia.

Ketika Kartosoewirjo terpilih menjadi wakil Ketua PSII dan masalah sikap koperasi dan non koperasi dengan pemerintah kolonial Belanda mengakibatkan terjadinya pertentangan dalam partai, Kartosoewirjo menentang segala bentuk kerja sama dengan penguasa kolonial. Pendirian yang tanpa kompromi ini tidak pernah dilepaskan oleh Kartosoewirjo, dan waktu dimasa perjuangan kemerdekaan diadakan perundingan-perundingan diplomatik dengan Belanda, dia selalu menolak segala perundingan dan persetujuan yang dicapai dengan Belanda.

Adalah wajar bahwa, Kartosoewirjo dengan politik Hijrah yang dijalankan secara konsekuen, dia menarik diri dari gelanggang percaturan politik nasional dan

dia tidak pernah ambil bagian lagi dalam proses pengambilan keputusan politik ditingkat nasional. Kartosoewirjo sendiri menganggap, bahwa “hijrah” merupakan strategi dasar untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Strategi “hijrah” merupakan prinsip dasar yang pernah dilakukan oleh para Nabi, sehingga menurut keyakinannya strategi hijrah tidak hanya berkaitan dengan politik tetapi juga berkaitan dengan aqidah. Dia berharap, bahwa di daerah ini dia dapat mewujudkan cita-citanya untuk mendirikan suatu Negara Basis (Negara Islam) yang akan merupakan inti dari suatu negara yang di kemudian hari akan meliputi seluruh Indonesia dan selanjutnya ke tahapan dunia, berbentuk pemerintahan kekhalifahan Islam. (Pemerintahan Islam tingkat Dunia).

Setelah persetujuan Renville berlaku pada awal tahun 1948, Kartosoewirjo dalam kedudukannya sebagai Wakil Pengurus Masyumi untuk Jawa Barat, menghentikan segala kegiatan Masyumi di Jawa Barat berdasarkan persetujuan Renville di daerah tersebut tidak boleh lagi ada partai politik. Langkah ini juga merupakan tindakan taktis, karena dia sebagai Wakil Masyumi tentu tidak dapat mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Kemudian Kartosoewirjo bersama-sama ummat Islam Jawa Barat mengubah Masyumi Jawa Barat menjadi Majelis Islam dengan mempertahankan struktur organisasi Masyumi. Kartosoewirjo menolak untuk ikut “hijrah” ke Yogyakarta dan bersama lasykar-lasykarnya dia mempertahankan daerah Jawa Barat yang dikosongkan pasukan Republik. Daerah yang berada dibawah kontrolnya.

Bagaimanapun juga Konferensi Cisayong tahun 1948 merupakan awal dari aksi kolektive dengan transformasi organisasi dari Partai Politik Masyumi Jawa Barat menjadi Majelis Islam yang merupakan pemerintahan sementara Negara Islam Indonesia, disebabkan adanya agresi Belanda dan tidak adanya kekuasaan di Jawa Barat. Hal ini merupakan respon masyarakat Jawa Barat terhadap persetujuan Renville dan keinginan untuk mempertahankan Jawa Barat dari pendudukan Belanda. Disamping itu juga adanya keinginan membentuk struktur masyarakat baru yang dilandasi cita-cita Islam, yang sudah terinternalisasi dalam batang tubuh KPK-PSII, yang pada saat itu hampir seluruh anggota KPK-PSII sekaligus menjadi anggota Masyumi Daerah Priangan. Dengan diangkatnya Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo menjadi Imam oleh perwakilan organisasi Islam Jawa bagian sebelah Barat dalam Konferensi Cisayong 1948. Hal ini terkait erat dengan budaya dalam artian mentalite, bahwa mereka rakyat Jawa Barat yang mati bisa dikategorikan mati syahid. Karena menurut keyakinan kalangan ulama/kiai di Jawa Barat seseorang dikatakan mati syahid itu harus ada yang mempertanggungjawabkan dunia akhirat, karena itu perlunya adanya Imam ummat Islam.

Faktor-faktor utama yang mendorong Peristiwa Konferensi Cisayong 1948 adalah situasi dan kondisi dalam negeri, yakni kekecewaan masyarakat Islam di Jawa Barat dan ketidakmampuan pemerintah RI menjamin keamanan, dengan diterimanya Persetujuan Renville dan ditinggalkannya Jawa Barat oleh Divisi Siliwangi, dan ancaman internasional baik sekutu maupun kembalinya kolonialisme Belanda yang mempengaruhi Republik dalam situasi Revolusi Nasional. Dengan

demikian Konferensi Cisayong 1948, sebagai awal dari aksi kolektif untuk mencapai kepentingan bersama yakni mempertahankan Jawa Barat dari Kolonialisme Belanda.

Selanjutnya Majelis Islam (MI) yang telah mampu mengorganisir diri, dan mampu memobilisasi kekuatan berupa dukungan rakyat Priangan, dana, dan senjata juga memperjuangkan kepentingan bersama yakni melawan kolonialisme yang kembali ke Priangan mampu mentransformasi menjadi organisasi berbentuk kenegaraan dan hampir bertahan selama 14 tahun.

Faktor kesempatan transformasi Organisasi Masyumi Jawa bagian sebelah Barat menjadi Majelis Islam yang kemudian menjadi NII, adalah keadaan vacuum of power Jawa Barat akibat ditinggalkan oleh Divisi Siliwangi, dan Belanda belum menguasai penuh wilayah Jawa Barat. Selain itu adanya keinginan rakyat Jawa Barat terutama kalangan ummat Islam untuk mempertahankan diri. (mentalite "syahid").

Ketika agresi militer Belanda kedua, pasukan Divisi Siliwangi tiba kembali di Jawa Barat, terjadilah konflik antara TNI dan Majelis Islam yang dipimpin Kartosoewirjo. Hal ini merupakan constrain dan sekaligus ancaman yang membatasi tumbuhnya Majelis Islam tetapi juga sekaligus sebagai faktor pendorong untuk berkembang melebarkan sayapnya ke wilayahdi luar Priangan sehingga menjadi lebih besar. Kartosoewirjo berpendapat bahwa pasukan Republik yang sebelumnya telah meninggalkan daerah ini tanpa perlawanan, dan tidak mempunyai hak lagi untuk menguasai daerah tersebut. Hak ini hanya dimiliki oleh Majelis Islam yang telah mempertahankan Jawa Barat terhadap Belanda dan dia menuntut supaya semua satuan militer harus ditempatkan dibawah komandonya. K

Kartosoewirjo menolak pernyataan Roem-Roijen, demikian pula Konferensi Meja Bundar oleh Kartosoewirjo dinamakan konferensi penjajahan dan revolusi Indonesia dinyatakan sebagai sudah kandas. Menurut pendapatnya Indonesia kini kembali ketingkat nol sebelum proklamasi. Sehari setelah Wakil Presiden Hatta berangkat ke Den Haag, Kartosoewirjo memproklamkan Negara Islam Indonesia, karena menurut dia dengan keberangkatan Hatta telah terdapat "vacuum of power". Tapi dengan proklamasi NII, yang telah selain ditulis dalam bahasa Indonesia, juga ditulis dalam bahasa Inggris dan Arab. Kondisi vakuum kekuasaan ini merupakan "sa'at yang ditunggu oleh Kartosoewirjo, karena menurut alam pemikirannya. Negara Islam itu berproses dari transformasi dari satu tahap ke tahap berikutnya mengikuti strategi dasar sebagaimana Nabi Muhammad SAW mewujudkan "Madinah Al Munawarah".

Dalam hal perang dunia ketiga yang berdasarkan perkembangan di Asia Timur, oleh Kartosoewirjo diramalkan akan meletus sekitar tahun 1952. Sesudah perang itu, begitu Kartosoewirjo, di Indonesia akan terjadi konflik antara Islam, nasionalisme dan komunisme, yang akan mengakibatkan Republik akan hancur dan hanya NII akan merupakan satu-satunya jaminan bagi kelanjutan Negara Indonesia. Dalam salah satu Maklumat Komademen Tertinggi yang dikeluarkan pada bulan Oktober 1952 Kartosoewirjo memerintahkan untuk mempercepat segala persiapan perang totaliter supaya semua sudah siap kalau perang dunia ketiga meletus. Dari bulan Oktober 1952 hingga bulan Agustus 1959, selama hampir tujuh tahun, tidak dikeluarkan lagi Maklumat Komandemen Tertinggi APNII

Menurut Kartosoewirjo ada tujuh tahap Perjuangan Jangka panjang bagi gerakan Islam. 1) Mengadakan "Negara Islam Indonesia" 2) Merebut Negara Basis 3) Membentuk Daulah Islamiyah 4) NII harus menjadi terkuat di Asia 5) Dakwah antara Negara, Koalisi dengan negara-negara Islam 6) Ekpor Revolusi Islam 7) Terbentuknya Khalifah Fil Ardhi (Pemerintahan Islam Dunia). Faktor-faktor yang sangat membantu Kartosoewirjo merealisasikan cita-citanya, dan yang juga memungkinkan gerakan Darul Islam dapat didirikan, ialah situasi politik dewasa itu, seperti sedang bergelornya revolusi nasional dan pertentangan dengan Belanda dan tentu juga factor agama. Yang tidak kalah penting juga adalah kepribadian Kartosoewirjo dan bakatnya dalam bidang organisatoris.

Kartosoewirjo tetap yakin suatu waktu cita-cita Islam akan terlaksana, walaupun lawannya tetap menentanginya. Namun mobilisasi dari seluruh kekuatan gerakan Darul Islam adanya ancaman dengan kembalinya Divisi Siliwangi ke Jawa Barat dan Pasukan Belanda sendiri dan juga tanpa adanya dukungan internasional maupun koalisi-koalisi dengan kekuatan lain. Hingga tahun 1959 pergerakan Darul Islam bisa bertahan tetapi dengan adanya upaya intensif dari Pemerintah Republik Indonesia dengan konsep Perang Wilayah revolusi Islam Darul Islam berakhir.

Selama memperjuangkan gagasannya Kartosoewirjo tidak menunjukkan konsepsi yang utuh tentang bentuk negara dan masyarakat yang dicita-citakannya tetapi lebih menunjukkan bagaimana proses terbentuknya negara Islam dari tahap ke tahap selanjutnya sesuai dengan tahapan yang pernah dilakukan Nabi Muhammad

SAW. Menurut dia pembentukan masyarakat adalah tahap demi tahap melalui pembentukan ummat dari tahap yang paling kecil, hingga tahap negara.

Konsistensi Kartosoewijo dalam memperjuangkan gagasannya terletak pada prinsip perjuangan dengan metoda 'Hijrah', dan tentunya berlawanan dengan cara parlementer. Karena perjuangan menegakkan Islam dengan cara parlementer tidak berhasil menetapkan Islam sebagai dasar negara. Dengan kata lain menegarakan Islam bukan mengislamkan negara. Tujuan akhir dari cita-citanya membentuk pemerintahan Islam tingkat dunia, yang diawali dengan negara basis tingkat Nasional.

DAFTAR SUMBER**Arsip**

Arsip Kabinet Perdana Menteri RI Yogyakarta 1949 – 1950. No. Map 67, 107, 108, 112, 129, 131, 137, 138, 150, 151, 155, 157, 170, 176, 270, ANRI

Arsip Kementerian Penerangan. 1945 – 1949. No. Map 133, 188, 190, 191, 192, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 244, 245. ANRI

Bahan Perang uraf syaraf terhadap gerombolan DI Kartosuwirjo. Komando Daerah Militer VII/Diponegoro, Staf Umum I

Berita Atjara Interogasi II, Bandung 17, Djuni 1962, Komando Daerah Militer VI, Team Pemeriksa

Berita Atjara Interogasi III, Bandung 20, Djuni 1962, Komando Daerah Militer VI, Team Pemeriksa

Berita Atjara Interogasi IV, Bandung 24, Djuni 1962, Komando Daerah Militer VI, Team Pemeriksa

Berita Atjara Interogasi V, Bandung 25, Djuni 1962, Komando Daerah Militer VI, Team Pemeriksa

Berita Atjara Interogasi VI, Bandung 27, Djuni 1962, Komando Daerah Militer VI, Team Pemeriksa

Berita Atjara Interogasi VII, Bandung 28, Djuni 1962, Komando Daerah Militer VI, Team Pemeriksa

Daftar Nama-nama Gerombolan DI/TII Jabar Bulan Juli/September 1962, Kode Map 48, Dinas Sejarah Militer AD

Darul Islam. Dokumentasi Sedjarah Militer A.D. (1. Djuli 1952)

Dokumen DI Jabar. Kode Map 3, Dinas Sejarah Militer AD,

Doktrin Perang Wilayah BP 61-771, Bandung: SESKOAD, 1962.

Evaluasi Psikologi terhadap S.M. Kartosuwirjo. Bandung: 1962, PSYDAM VI/SILIWANGI.

Evaluasi Psychologi terhadap ex Gerombolan Kartosuwiryo. Bandung: 1962, PSYDAM VI/SILIWANGI.

Instruksi Menteri Kemanan Nasional No. III/B/0048/1961. Tentang pelaksanaan kebidjaksanaan terhadap pemberontak dan gerombolan jang menjerah. (8.9.1961, A.H. Nasution) Staf Kemanan nasional

Instruksi Menteri Keamanan Nasional No. III/B/0056/61, Tentang petunjuk persoalan khusus dalam rangka pelaksanaan terhadap pemberontak dan gerombolan jang menjerah. (8.11.1961, A.H. Nasution) Staf Kemanan nasional

Inventaris Kementrian Pertahanan 1946 -1949, No Map 324, 876, 635, 1341, 1450, 1751. ANRI

Inventaris Arsip Sekretariat Negara RI.(1945-1949). Jakarta: 1995. No. Map 572, 814, 822, 831, 834, 861, 863, 936, 1015, 1048, 1053. ANRI

Inventaris Arsip Kepolisian Negara, 1947-1949, Jakarta: 1995. No. Map. 514, 534, 548, 556, 563, 565, 578, 1031, 1198, ANRI

Inventaris Arsip Nahdatul Ulama, No Map 181, 184, 252, 272, ANRI .

Kumpulan Dokumen mengenai S.M. Kartosuwirjo, JARAH DAM VI/SILIWANGI

Laporan kekuatan DI/TII, Kode Map 35, Dinas Sejarah Militer AD,

Laporan Khusus (rahasia), tanggal 24 Desember 1977, Departemen Pertahanan Keamanan Staf Intelijen

Laporan Tahunan 1957, KODAM VI Siliwangi.

Menyerahnya S.M. Kartosuwirjo, Kumpulan Dokumen No. 42. 1962, Dinas Sejarah Militer AD.

Perintah Operasi Tjepat. Angkatan Darat Komando Daerah Militer VI Siliwangi No. 212230. 1961

Pemupasan DI Jabar Bulan Oktober 1949. Kode Map 5, Dinas Sejarah Militer AD.

Pemupasan DI Jabar Bulan Juni – Agustus 1952, Kode Map 15, Dinas Sejarah Militer AD,

Penumpasan DI/TII Jabar Bulan Januari/Juni 1962 Kode Map 43, Dinas Sejarah Militer AD,

Perintah Operasi Tjepat. Angkatan Darat Komando Daerah Militer VI Siliwangi No. 212230. 1961

Perintah Operasi No. 7-2/Posk./8/61, Komando Daerah Militer VI Siliwangi. Komando Resor Militer Tjirebon Bataljon 525

Pedoman Dharma Bakti . Djilid II. Menggalang Negara Kurnia Allah- Negara Islam Indonesia. Oleh : T.J. Karma Yoga. Tjetakan kesepuluh, 5 Oktober 1960.

Pedoman Dharma Bakti . Djilid III. Menggalang Negara Kurnia Allah- Negara Islam Indonesia. Oleh : T.J Karma Yoga. Tjetakan keenam, 17 Februari 1961.

Rencana Operasi Pamungkas . Bandung , 1962, Komando Daerah Militer VI.

Riwayat Pembentukan Darul Islam, Dokumen No. 16, Dinas Sejarah

Salinan Pedoman Dharma Bakti. Djilid I. Menggalang Negara Kurnia Allah- Negara Islam Indonesia. Oleh : T.J. Karma Yoga. Tjetakan kelima, 15 Mei 1955, 1960 Kodam Siliwangi.

Sekretariat Negara RI Yogyakarta (Desember 1949 – September 1950). No. Map 230,232, ANRI

Tentara & Territorium III Staf Siliwangi Bagian I, Petikan dari Dokumen-dokumen Mengenai: Negara Islam Indonesia, (Jilid 1), (15 November 1951) Dinas Sejarah Militer AD,

Arsip yang diterbitkan

"Laporan-laporan tentang Gerakan Protes DI Jawa Pada Abad-XX", 1981, ANRI

"Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Barat)", 1976, ANRI

"Memori Serah Jabatan 1931-1940 (Jawa Barat)", 1980, ANRI

"Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Tengah)", 1977, ANRI

"Menelusuri Jejak Ayahku, Harsono Tjokroaminoto, 1983, ANRI

"*Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*", 1995, Sekretariat Negara Republik Indonesia.

"*Sarekat Islam Lokal*", 1975, ANRI

Buku

Abdullah, Taufik. (Ketua Pengarah), *Denyut Nadi Revolusi Indonesia*, Jakarta, 1997, Gramedia.

Abdullah, Taufik dan Sharon Siddique, Ed., *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta, 1989, LP3ES.

Abdulgani, Roeslan "*Fungsi Sejarah PETA*", (Tanpa Tempat), 1982, Yayasan Peta.

Agung, Ide Anak Agung Gde, *Renville*, Jakarta, 1991, Sinar Harapan.

Agung, Ide Anak Agung Gde, *Persetujuan Linggarjati : Prolog dan Epilog*, Yogyakarta, 1995, Yayasan Pustaka Nusantara.

Ahmad, Zainal Abidin, *Membangun Negara Islam*, Yogyakarta, 2000, Pustaka Iqra
Album peristiwa pemberontakan DI/TII di Indonesia, Bandung, 1981, Dinas Sejarah TNI- Angkatan Darat.

Al Chaidar, *Wacana Ideologi Negara Islam: Studi Harakah Darul Islam dan Moro National Liberation Front*, Jakarta, 1999, Darul Falah.

Al Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosuwirjo: Fakta dan Data Sejarah Darul Islam*, (Edisi lengkap) Jakarta, 1999, Darul Falah.

Al Chaidar, et.al., *Federasi atau Disintegrasi : Telaah Awal Wacana Unitaris versus Federalis Dalam Perspektif Islam Nasionalisme dan Sosial Demokrasi*, (Tanpa Tempat), 2000, Madani Press.

Ali, Moh, et. al., *Sejarah Jawa Barat: Suatu Tanggapan*, Bandung, 1972, Pemerintah Jawa Barat.

Al-Mawardi, Imam, *Al Hakam As Sulthaniyyah*, Jakarta, 2000, Penerbit Darul Falah.

Al-Mukaddasi, Sjech Abduldjalil, *Fatwa ti Mekkah tina hal" Darul Islam*", (Tanpa Tempat), 1950, Dewan Penerangan Islam.

- Amelz, H.O.S. *Tjokroaminoto: Hidup dan perjuangannya*, (2 Jilid)., Jakarta, 1952, Bulan Bintang.
- Amin, M. Mansyur, *Saham H.O.S Tjokroaminoto dalam kebangunan Islam dan Nasionalisme di Indonesia*, Yogyakarta, 1980, Nur Cahaya,.
- Anderson, Ben, *Revolusi Pemoeda : Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944 – 1946*, (terj.) Jakarta, 1988, Sinar Harapan.
- Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus antara Nasionalisme Islami dan Nasionalis "Sekular" Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, Bandung, 1988, Pustaka Perpustakaan Salman.
- Asmara, N., *Perang Rakjat Semesta*, Medan, 1964, BAPPIT
- Assad, Muhammad, *Sebuah kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam*, (terj. Afif Muhammad). Bandung, 1985, Penerbit Pustaka.
- Assad, Muhammad, *Ancaman Sekulerisme : Sebuah Antologi mengenai Islam dan Sekulerisme*, Yogyakarta, 1986, Shalahuddin Press.
- Atmodarminto, Babad Demak Dalam Tafsir Sosial Politik Keislaman dan kebangsaan, Jakarta, 2000, Millenium Publisher.
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam : Dari Fundamentalisme , Modernisme Hingga Post-Modernisme*, Jakarta, 1996, Paramadina.
- Azzam, Salim, *Beberapa Pandangan Pemerintahan Islam*, Bandung, 1983, Mizan.
- Badan-badan perjuangan*, Jakarta, 1983, Departemen Pertahanan-Kemanan, Pusat Sejarah ABRI.
- Bahrul Ulum, Sayid Muhammad Mahdi Thabatba'i, *As-Sair Wa As-Suluk, Perjalanan Menuju Alam Rohani*, Bandung, 2000, Mizan.
- Bemmelen, R.W. van, *The Geology of Indonesia*. The Hague, 1949, Martinus Nijhoff
- Benda, H.J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam di Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta , 1980, Pustaka Jaya.
- Bloch, Marc, *Pleidooi voor de Geschiedenis Als Ambacht*, Nederlandse vertaling, 1989, Nijmegen, SUN.
- Boland, B., *Pergumulan Islam di Indonesia 1945 – 1972*, (terj. Safruddin bahar), Jakarta, 1995, Grafiti.
- Congres Muslimin Indonesia 20-25 Desember 1949 di Jogjakarta*, Yogyakarta, 1950, Badan Usaha & Penerbitan Muslimin Indoensia.
- Cribb, Robert Bridson, *Gejolak Revolusi Di Jakarta 1945 – 1949 : Pergulatan Antara Otonomi dan Hegemoni*. Jakarta, 1990, Pustaka Utama Grafiti.

- Dasuki, H.A., *Purwaka Caruban Nagari*, Indramayu, 1978, Sudiam
- Dengel, Holk H., *Darul Islam dan Kartosuwirjo, Angan yang gagal*, (terj.), Jakarta, 1995, Pustaka Sinar Harapan.
- Depdikbud, , *Sejarah peralihan Pemerintah RIS ke RI.*, Jakarta, 1986, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta, 1994, LP3ES.
- Dijk, C. Van, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, (terj.) Jakarta, 1983, Pustaka UtamaGrafiti.
- Dinas Sedjarah TNI-Angkatan Darat, *Penumpasan Pemberontakan DI/TII S.M. Kartosuwirjo di Jawa Barat*, Bandung, 1982, Dinas Sedjarah TNI-Angkatan Darat.
- Djamhari, S.A., *Ihtisar sedjarah perjuangan TNI (1945- sekarang)* Jakarta, 1979, Departemen Pertahanan dan Keamanan Pusat Sedjarah.
- Effendi, Bachtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta, 1998, Paramadina.
- Ekadjati Edi S., *Kebudayaan Sunda, Suatu Pendekatan Sejarah*, Jakarta, 1995, Pustaka Jaya.
- Ekadjati, et. al., *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat*, Bandung, 1986, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Jawa Barat.
- Federspiel, Howard M., *Persatuan Islam Pembaharuan Islam Indoensia Abad XX*, Yogyakarta, 1996, Gadjah Mada University Press.
- Feith, Herbert, *The Decline Of Constitutional Democracy In Indonesia*, Ithaca, 1979, Cornell University Press.
- Fisher, David Hackett, *Historian's Fallacies, toward a Logic of Historical thought*, New York, San Fransisco, London, 1970, Harpers Colopjon Books.
- Frederick William H., *Pandangan dan Gejolak. Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1945)*, (terj.), Jakarta, 1989, Penerbit Gramedia.
- Gani, Muhammad Abdul, *Cita Dasar dan Pola Perjuangan Syarikat Islam*. Jakarta, 1984, Bulan Bintang.
- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, (terj.), Jakarta, 1981, Pustaka Jaya.
- Gonggong, Anhar, *Abdul Qahhar Muzakkar : dari patriot hingga pemberontak*, Jakarta, 1992, Grasindo.

- Hadisutjipto, S. Z., *Babad Cirebon*, Jakarta, 1989, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Harvey, Barbara Sillars, *Permesta : pemberontakan setengah hati*, (tej. Inkultra). Jakarta, 1984, Grafiti Press.
- Harvey, Barbara Sillars, *Pemberontakan Kahar Muzzakar dari Tradisi ke DI/TII*, Jakarta, 1989, Pustaka Utama Grafiti.
- Hayati, Chusnul, et.al., *Peranan Ratu Kalinyamat Di Jepara Pada Abad XVI*, Jakarta, 2000, Departemen Pendidikan Nasional.
- Hatta, Mohammad, *Memoir*, Jakarta, 2002, Yayasan Hatta.
- Haque, Ziaul, *Wahyu dan Revolusi*, Yogyakarta, 2000, LkIs
- Hiqmah, Nor, H.M. Misbach, *Sosok dan Kontroversi Pemikirannya*, Yogyakarta, 2000, Yayasan Litera Indonesia.
- Horikoshi, Hiroko, *Kyai Dan Perubahan Sosial*, Jakarta, 1987, P3M
- Huen, P. Lim Pui, James H. Morrison & Kwa Chong Guan, *Sejarah Lisan Di Asia Tenggara: Teori dan Metode*, (terj.), Jakarta, 2000, LP3ES.
- Huntington, Samuel P., *Tertib Politik, Ditengah Pergeseran Kepentingan Massa*, Jakarta, 2003, PT RajaGrafindo Persada.
- Imam AL-Ghazali, *Ilmu Laduni*, (Terjemahan dari Al-Risalat Al-Laduniyah), Jakarta, 2003, Penerbit Hikmah.
- Ingleson, John, *Jalan Ke Pengasingan : Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927 - 1934*, Jakarta, 1988, LP3ES.
- Iqbal, Mohammad, *Membangun Kembali Pikiran Agama dalam Islam*, (terj.). Jakarta, 1982, Tintamas.
- Jackson, Karl D., *Kewibawaan Tradisional, Islam dan pemberontakan: kasus Darul Islam Jawa Barat*. Jakarta, 1990, Pustaka Utama Grafiti.
- Ka'bah, Rifyal, *Islam dan Fundamentalisme*, Jakarta, 1984, Panjimas.
- Johnson, James Turner, *Perang Suci Atas Nama Tuhan Dalam Tradisi Barat dan Islam*, Bandung, 2002, Pustaka Hidayah.
- Kahin, Audrey R., *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, (terj.) Jakarta, 1990, Pustaka Utama Grafiti.
- Kahin, George Mc. Turnan, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia : Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik*, (terj.), Jakarta, 1995, Pustaka Sinar Harapan.
- Kartodirdjo, Sartono, *Ratu Adil*, Jakarta, 1984, Penerbit Sinar Harapan.

- Kartodirdjo, Sartono, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Jakarta, 1994, Pustaka Jaya.
- Kartodirdjo, Sartono, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*, Jakarta, 1999, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, Sartono, et. al. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid V. Jakarta, 1975, Balai Pustaka.
- Kartodirdjo, Sartono, et. al. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid VI. Jakarta, 1977, Balai Pustaka.
- Kartosuwirjo, S.M., *Daftar Oesaha Hidjrah*, Malangbong, 1940, Pustaka Darul Islam.
- Kartosuwirjo, S.M., *Haloean Politik Islam*, Malangbong, 1946, Dewan Penerangan Masyumi Daerah Priangan.
- Korver, A.P.E., *Sarekat Islam, Gerakan Ratu Adil ?*, Jakarta, 1985, Grafiti Press.
- Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen, *Perkembangan Fungsi dan Struktur Pamongpradja Ditinjau dari Segi Sejarah*, Bandung, 1978, Alumni.
- Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Ummat Islam Indonesia*, Jogjakarta, 1985, Shalahuddin Press.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Bandung, 1991, Mizan.
- Lapian, AB. & P.J. Drooglever (Peny.), *Menelusuri Jalur Linggarjati*, Jakarta, 1992, PT Pustaka Utama Grafiti.
- Legge, John D., *Sukarno, sebuah Biografi Politik* Jakarta, 1985, Sinar Harapan
- Leirissa, R.Z., *Sejarah Masyarakat Indonesia*, Jakarta, 1985, Akademika Presindo.
- Leirissa, R.Z., *PRRI-Permesta. Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*, Jakarta, 1990, Penerbit Grafitipers.
- Leirissa, R.Z., *Metodologi Sejarah*, Depok, 20001, PPS FS-UI.
- Lloyd, Christopher, *Explanation in Social History*, Oxford, 1986, Basil Blackwell Inc
- Lloyd, Chritopher, *The Structures of History*, Oxford, 1993, Blackwell Publishers
- Lubis, Nina H., *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800 – 1942*, Bandung, 1998, Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.
- Lubis, Nina H., *Sejarah Kota-Kota Lama Di Jawa Barat*, Bandung, 2000, Alqaprint Jatinangor.
- Lubis, Nina H., *Tradisi dan Transformasi Sejarah Sunda*, Bandung, 2000, Humaniora Press.

- Lucas. Anton E., *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi Dalam Revolusi*, Jakarta, 1989, Grafitipress.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan masalah kenegaraan*, Jakarta, 1985, LP3S.
- McCullagh, C. Behan, *The Truth of History*, London-New York, 1998, Routledge.
- Madjiah, Matia, *Tantangan dan Jawaban*, Jakarta, 1993, Balai Pustaka.
- Martha, Ahmaddani G., et.al., *Pemuda Indonesia Dalam Dimensi Sejarah perjuangan Bangsa*, Jakarta, 1984, Proyek Pengembangan dan Pengendalian/Kebijaksanaan dan Program Generasi Muda secara Terpadu.
- Mawardi, Sidi, *Bibit Perseteruan Nasionalisme Islam VS Nasionalisme Sekuler: Pengalaman Jong Islamieten Bond 1925 – 1942*, Jakarta, 2000, Sandi Kota.
- Moten, Abdul Rashid, *Ilmu Politik Islam*, Bandung, 2001, Penerbit Pustaka.
- Mrazek, Rudolf, *Sjahrir Politik dan Pengasingan di Indonesia*, Jakarta, 1996, Yayasan Obor Indoensia.
- Mugni, S.A. *Hasan Bandung, Pemikir Islam Radikal*, Surabaya, 1980, Bina Ilmu
- Nalenan, R. *Iskaq Tjokrohadisurjo, Alumni Desa Bersemangat Banteng*, Jakarta, 1982, Gunung Agung.
- Nagazumi, Akira, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia : Budi Utomo 1908 – 1918*, Jakarta, 1989, PT Pustaka Grafiti Utama.
- Nagazumi, Akira, (Peny.), *Pemberontakan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta, 1988, Yayasan Obor Indonesia.
- Nasution, A. H., *Sedjarah Perdjuaan Nasional dibidang Bersendjata*, Jakarta, 1966, Mega Bookstore
- Nasution, A. H., *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia: Agresi Militer Belanda I*, Jilid 5, Bandung, 1978, Disjarah-AD dan Angkasa.
- Nasution, A. H., *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia: Perang Gerilya Semesta II*, Jilid 10, Bandung, 1979, Disjarah-AD dan Angkasa.
- Nasution, A. H., *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia: Periode Konferensi Meja Bundar*, Jilid 11, Bandung, 1979, Disjarah-AD dan Angkasa.
- Nasution, A. H., *Pokok-Pokok Gerilya dan Pertahanan Republik Indonesia di masa lalu dan yang akan datang*, Bandung, 1980, Angkasa.
- Nasution, A. H., *Memenuhi panggilan Tugas. Jilid 1, Kenangan Masa Muda*, Jakarta, 1982, Gunung Agung
- Nasution, Harun dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern Dalam Islam*, Jakarta, 1985, Yayasan Obor Indoensia.

- Natsir, M., *Capita Selecta*, Jakarta, 1973, Bulan Bintang.
- Neil, Robert Van, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, Jakarta, 1984, Pustaka Jaya.
- Nieuwenhuijze, C.A.O. Van, "The Darul Islam Movement in Western Java Till 1949," Nieuwenhuijze, *Aspects of Islam in Post-Colonial Indonesia*, The Hague and Bandung, 1958, W. van Hoeve Ltd.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942*, Jakarta, 1996 LP3ES.
- Noer, Deliar, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945 – 1965*, Jakarta, 1987, Pustaka Utama Grafiti.
- Notosusanto, Nugroho, *Sejarah Nasional Indonesia, VI*, Jakarta, 1977, PN Balai Pustaka.
- Ozelsel, Michaela, *40 Hari Khalwat, Catatan Harian Seorang Psikolog dalam Pengasingan Diri Sufistik*, Bandung, 2002, Pustaka Hidayah.
- Panitia Peringatan 75 tahun Kasman, *Hidup itu Berjuang*, Jakarta, 1982, Bulan Bintang.
- Panitia Penerbitan Otobiografi Bapak H. Amirmachmud, *H. Amirmachmud, Prajurit Pejuang, Otobiografi*, Jakarta, 1987,
- Panitia Buku Peringatan, *Seratus Tahun Haji Agus Salim*, Jakarta, 1996, Pustaka Sinar Harapan
- Pijper, G.F., *Fragmenta Islamica: Beberapa Studi Sejarah Islam di Indonesia Awal Abad XX*, Jakarta, 1987, Universitas Indonesia Press.
- Pinardi, *Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo*, Djakarta, 1964, Aryaguna.
- Pringgogdido, A.K., *Sejarah Pergerakan Rakyat*, Jakarta, 1991, Dian Rakyat.
- Puar, Jusuf Abdullah, *Muhammad Natsir 70 tahun. Kenang-kenangan kehidupan*, Jakarta, 1978, Pustaka Antara.
- Reid. Anthony J.S., *Revolusi Nasional Indoensia*, Jakarta, 1996, Pustaka Sinar Harapan.
- Republik Indonesia,, *Propinsi Djawa Barat*, Jakarta, 1953, Kementrian Penerangan.
- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta, 1988, Gadjah Mada University Press.
- Roem, Mohammad, *Bunga Rampai dari Sejarah*, Jakarta, 1983, Bulan Bintang.
- Roem, Mohammad, "Pergerakan kesadaran dalam PSII", *Pemandangan* V, No. 24 (30-1-1937), No. 25 (1-2-1937), No.36, (2-2-1937).
- Purwoko, Dwi, *Negara Islam?*, Depok, 2001, Permata Aristika Kreasi.

- Santoso, Rochmani, *Djakarta Raya Pada Djaman Djepang (1942-1945)*., 1970, Prasaran pada Seminar Sedjarah Nasional II di Jogjakarta.
- Sastroamidjojo, Ali, *Tonggak-Tonggak di Perjalananku*, Jakarta, 1974, Kinta.
- Schuon, Frithjof, *Memahami Islam*, Bandung, 1983, Penerbit Pustaka.
- Sedjarah Militer Kodam VI Siliwangi, *Siliwangi dari masa ke masa*, Djakarta, 1968, Fakta Majuma.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi dan Pemupukannya*, Jakarta, 1994, Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Shiraisi, Takashi, *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Jakarta, 1977, Garfity
- Siddiqui, Kalim . Hamid Algar, et. al., *Gerbang kebangkitan: Revolusi Islam dan Khomeini dalam Perbincangan*. Yogyakarta, 1984, Shalahuddin Press.
- Siddiqui, Kalim, *Seruan-seruan Islam, Tangung Jawab Sosial dan Kewajiban Menegakkan Syariat*, Yogyakarta, 2002, Pustaka Pelajar.
- Sjamsudin, Nazaruddin, *Pemberontakan Kaum Republik : Kasus Darul Islam Aceh*, Jakarta, 1990, PT Pustaka Utama Grafiti.
- Sjarifuddin, Amak, *Kisah Kartosuwirjo dan Menjerahnja*. Surabaya, 1965, Grip.
- Skocpol, Theda, *Negara dan Revolusi Sosial: Suatu analisis Komparatif Tentang Perancis, Rusia dan Cina*, Jakarta, 1991, Penerbit Erlangga.
- Smail, John R.W., *Bandung in the early revolution 1945-1956: A. Study in the Social History of the Indonesian revolution*. Ithaca, New York, 1964, Modern Indonesian Project, Southeast Asia Program, Departemen of Asian Studies, Cornell University
- Smelser, Neil. J., *Theory of Collective Behavior*. New York, 1971, The Free Press.
- Soedarsono, N.P., *Poetera (Poesat Tenaga Rakyat): Wadah Perdjuangan Soekarno-Hatta beserta para perintis Kemerdekaan lainnya dalam zaman Jepang*. Jakarta, 1982, Tintamas.
- Soebagijo I.N., *Sumanang; Sebuah Biografi*, Jakarta, 1980, Gunung Agung.
- Soebagijo I.N., *K. H. Masjkur Sebuah biografi*, Jakarta, 1982, Gunung Agung
- Soebagijo I.N., *Harsono Tjokroaminoto, Mengikuti Jejak Perjuangan Sang Ayah*, Jakarta, 1985, Gunung Agung
- Suminto, H. A., *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta, 1984, LP3ES.
- Sundhaussen, Ulf, *Politik Militer Indonesia, 1945-67*, Jakarta, 1986, LP3ES.

- Suradi, *Haji Agus Salim dan Konflik Politik Dalam Sarekat Islam*, Jakarta, 1977, Pustaka Sinar Harapan.
- Suryanegara, Ahmad Mansur, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Bandung, 1988, Mizan.
- Sutomo, *Sebuah Himbauan*, Jakarta, 1977, U.P. Balapan.
- Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara*, Jilid II, Bukit Tinggi, Wakaf Republik.
- Tilly, Charles, *From Mobilization to Revolution*, Ontario – Sydney, 1978, Addison-Wesley Publishing Company.
- Tilly, Charles, *As Sociology Meets History. Studies in Social Discontinuity*. Orlando, San Diego, San Fransisco, New York, London, 1981, Academic Press Inc..
- Wertheim, W.F., *Gelombang Pasang Emansipasi*, (terj.), (Tanpa tempat, Tanpa tahun), ISAI
- Wild, Colind & Peter Carey, *Gelora Api Revolusi: Sebuah Antologi Sejarah*, Jakarta, 1986, PT Pustaka Gramedia.
- Wirjosuparto, S., *Kakawin Bharata Yudha*. Jakarta, 1968, Bharata.
- Yuliati, Dewi, *Semaoen Pers Bumiputera dan radikalisasi Sarekat Islam Semarang*, Semarang, 2000, Bendera.
- Zed, Mestika, *Pemerintah Darurat Republik Indonesia : Sebuah Mata Rantai Sejarah Yang terlupakan*, Jakarta, 1997, PT Pustaka Utama Grafiti.

Artikel

- Daftar kepoatoesan-kepoatoesan Majelis Tahkim (Congress) PSII XXV di Sriwidjaja (Palembang) pada tanggal 20-25 Januari 1940, *Soeara PSII IV*, No, 1-2-1940, hal. 7-9.
- Daftar kepoatoesan-kepoatoesan Majelis Tahkim (Congress) PSII XXV di Sriwidjaja (Palembang) pada tanggal 20-25 Januari 1940, *Soeara PSII IV*, No, 1-2-1940, hal. 9.
- Horikoshi, Hiroko, "The Darul Islam movement in West Java (1948-1962): An Experience in the historical process", *Indonesia* No. 20, 1975, hal. 58-86.
- Leirissa, R.Z., "PRRI – Permesta : Tinjauan Historiografis", *Jurnal Studi Amerika* Vol IV, Januari-Juli, 1999.
- Leirissa, R.Z., (1999), "Sebab Musabab Pembentukan PRRI", *Jurnal Studi Amerika* Vol IV, Januari-Juli, 1999.

Soebardi, Soebakin, "Kartosuwirjo and the Darul Islam Rebellion in Indonesia", *Journal of South East Asian Studies* XIV, No. 1, 1983, hal. 109-133.

Manuskrip

Djamhari, Saleh As'ad, *Stelsel Benteng Dalam Pemberontakan Diponegoro 1827 – 1830 Suatu Kajian Sejarah Perang*, Disertasi UI, Depok, 2002, Universitas Indonesia.

Jaylani, Anton Timur, "The Sarekat Islam Movement: Its Contribution to Indonesian Nationalism," tesis master, Montreal, 1959, McGill University.

Leirissa, R.Z., "*Historiografi: Suatu Tinjauan Kristis*", Pidato disampaikan pada upacara pengukuhan sebagai Gurubesar tetap pada Fakultas Satra Universitas Indonesia, Depok, 6 Juli 1996

Surat Kabar

Asia Raya, 18-5-2003.; 19-6-2003.;

Fadjar Asia. Januari s/d Desember 1929-1930

Kedaulatan Rakyat, 13 Februari 1952, 10,12 April 1952, 19,20 Oktober 1953.

Merdeka. 16 Januari 1962; 15 Mei 1962

Pandji Poestaka, XXI, 22 (15 Agustus 1943).

Pikiran Rakyat. 1956 – 1962: 11 Januari 1951, 6 Juni 1962; 11 Mei 1962 - 7 Juni 1962

Sipatahoenan 1949

Soeara Moeslimin Indonesia. Thn II. 15 Oktober 1944

Soeara MIAI I, No. 13, 1-7-2603,

Soeara MIAI I, No. 4 (15 Pebruari 1943).

Soeara MIAI I, 18-19 (1 Oktober 1943).

Soeara Moeslimin Indonesia. Thn II. 15 Oktober 1944

Soeara PSII. 1938 – 1940

Suara Masjumi. 1954

Majalah

Indonesia. 1975

Islam berdjuang. 1957

Prisma. 1977- 1990

Wawancara

Koleksi Wawancara

- Ateng Djaelani di Bandung, 12 Januari 1971, (Transkripsi), Dinas TNI AD Bandung
- Danu Mohammad Hasan di Bandung, 13 Juli 1962, (Transkripsi), Dinas TNI AD Bandung
- Harsono Tjokroaminoto, 1982, (Transkripsi) ANRI
- H. Zainal Abidin di Bandung , 18 Januari 1971, (Transkripsi), Dinas TNI AD Bandung
- Mohammad Natsir, 1982, 1983, (Transkripsi), ANRI
- Sjarif Hidajat di Bandung, 18 Januari 1971, (Transkripsi), Dinas TNI AD Bandung
- Wawancara dengan tokoh-tokoh DI Majalengka di Majalengka 13 Februari 1978, (Kaset), Dinas TNI AD Bandung

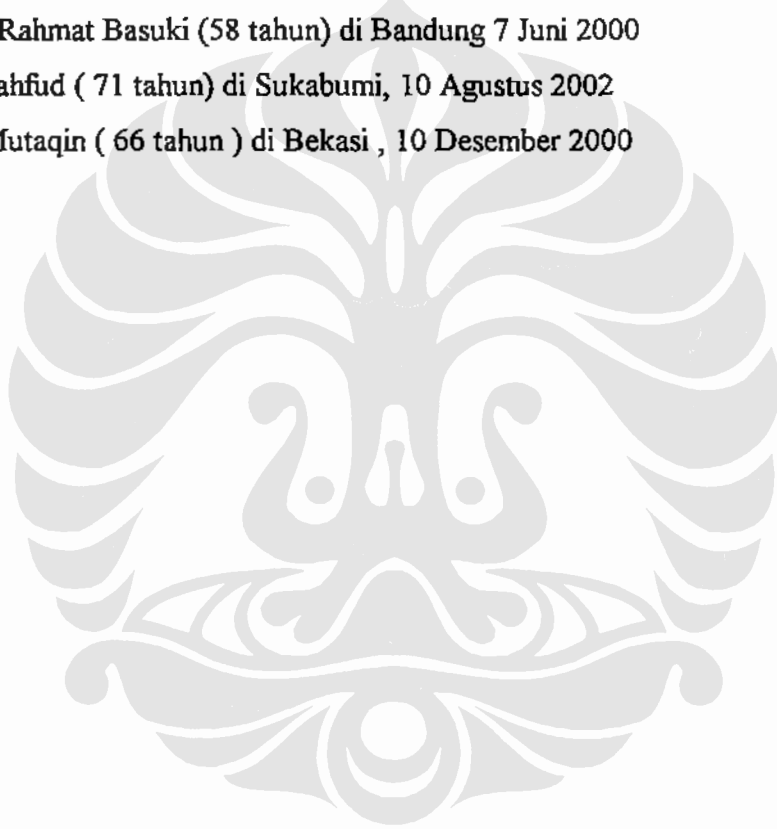
Wawancara dengan Pelaku Cisayong

- Affandi Ridhwan (79 tahun) di Jakarta, 27 Juni 2001
- Lukman Dahlan (80) di Bekasi, 12 Juni 2001
- Ules Sudjai (71 tahun) di Cianjur, 16 Juni 2001

Wawancara dengan Aktivis DI/TII

- Ansor (67 tahun) di Leles, 15 Juni 2000
- Endang Ahmad Komaludin (78 tahun) di Cianjur 6 September 2000
- Didi Danki (58 tahun) di Garut, 16 Juli 2001

- Dodo Mohammad Darda (68 tahun) di Bandung, 5 Juli 2001; 15 September 2001, di Malangbong 16 April 2002
- H. Maskur (72 tahun) di Singaparna, 15 Juli 2001
- Haji Sarif Muslim (77 tahun) di Tarogong Garut 14 Juni 2000
- Jamhur Sudrajat (75 tahun) di Garut 19 Januari 2000
- Ki Bahran (77 tahun) di Somalangu 5 Mei 2000
- Tahmid Rahmat Basuki (58 tahun) di Bandung 7 Juni 2000
- Toha Mahfud (71 tahun) di Sukabumi, 10 Agustus 2002
- Zainal Mutaqin (66 tahun) di Bekasi , 10 Desember 2000



DAFTAR ISTILAH

Ad Diin : Agama, yaitu hukum dan pengabdian. Artinya peraturan dan kepercayaan yang disampaikan Allah SWT kepada para nabi dan rasulnya, demi terjaminnya kebahagiaan hidup ummat manusia di dunia dan akhirat.

Ahl ibadah : Mereka yang paham benar dan sangat giat melakukan berbagai macam ibadah, baik yang wajib maupun yang sunat, muakada atau pun ghoiru muakad.

Ahl Suffah : Mereka orang-orang yang turut hijrah bersama nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Mereka tinggal di masjid Nabi dan mereka berhati baik dan mulia tidak mementingkan keduniawian.

Akhirat : Alam sesudah kehidupan di dunia ini.

Akhlak: Sikap mental atau watak, terjabarkan dalam bentuk berpikir dan berbicara, bertingkah laku.

Akidah : Keyakinan atau kepercayaan tentang adanya wujud Allah Yang Maha Esa, Tiada Tuhan selain Allah.

Amal Shaleh : Pekerjaan baik yang mendatangkan pahala bagi dirinya dan mendatangkan faedah bagi orang lain.

Amanah : Dipercaya, bersifat jujur dan terpelihara dari melakukan hal-hal yang dilarang Allah.

Anshar : Sebutan bagi orang-orang Islam Yastrib yang menolong orang-orang Islam Mekkah yang hijrah ke Yastrib..

Baitul Maal: Rumah harta, Gedung pembendaharaan milik pemerintah, tempat dimana disimpan sekalian harta kekayaan negara serta administrasi yang bersangkutan dengan harta kekayaan.

Beleid : Kebijaksanaan

Bughot : Orang-orang Islam yang tidak mematuhi/mengadakan perlawanan terhadap pemerintahan Islam.

Dakwah: Menyeru, mengajak, menyebarluaskan serta mengajarkan ajaran Islam untuk mengislamkan orang-orang kafir agar mereka meninggalkan kekeliruan dan kesesatannya, mengikuti jalan kebenaran, pada ajaran Islam.

Dar : rumah , tempat tinggal, daerah, wilayah

Darul al-Islam : Tempat Islam, tempat dimana hukum-hukum Islam berlaku.

Darul al-Harbi : Tempat perang, tempat dimana kaum Muslim berperang dengan kekuatan-kekuatan yang memusuhi orang-orang Islam. Negara yang memusuhi Islam atau menyakiti ummat Islam atau akan menghancurkan ajaran Islam. Negara tersebut boleh diperangi oleh ummat Islam.

Darus Salam : Tempat keselamatan.

De facto : Berdasar kenyataan

De jure : Berdasar hukum

Dhorurat : Keadaan terpaksa, keadaan kritis.

Do'a : Meminta sesuai dengan hajatnya atau memohon perlindungan kepada Allah SWT terhdap bencana, bala, malapetaka dsb. Dengan merendahkan diri dan tunduk kepada-Nya.

Dzikir : Mengingatn nikmat-nikmat Tuhan atau menyebut lafadh “Allah”, bertahlil, bertahmid, bertasbih, bertaqdis. Membaca Al-Quran termasuk dzikir.

Fa’i : Harta yang diperoleh kaum muslimin dari orang-orang kafir dengan tanpa melakukan peperangan atau tidak menyerbu ke daerah orang-orang kafir.

Gunseikan : Kepala Pemerintahan Militer di bawah Seiko Sikikan, Panlima Tentara

Gunseikanbu : Kantor Gunseikan

Ghaib : Sesuatu yang tidak nampak/tidak kelihatan

Ghanimah: Harta yang didapat dari musuh melalui peperangan, selain salab (pakaian, alat/senjata, alat/kendaraan, dan alat-alat lain yang ada di tangan musuh ketika ia dibunuh/ditangkap).

Hadits : Berita yang datang dari Rasulullah SAW mengenai ucapannya (qawl), perbuatannya (fi’il) atau perbuatan dan ucapan sahabat yang berhubungan dengan perkara agama yang disetujui atau dibenarkan Rasulullah SAW (taqrir).

Hadits Shahih : Hadits yang dapat dipercaya dan diyakini kebenarannya.

Hijrah : Penghindaran diri, pindah dari satu tempat ke tempat lain, pindah dari satu ideologi ke ideologi lain. Hijrahnya sebagian ummat Islam dari Kota Mekkah ke negeri Habsyah, atau ke Kota I’ts, atau pindah dari Mekah ke Yastrib (Madinah).

Hakko Ichi-u : Delapan Benang dibawah satu atap, Konsep kemakmuran bersama Asia Timur Raya di bawah Jepang.

Hukum Allah : Undang-undang Allah sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, untuk dipatuhi oleh setiap Muslim.

Ibadah : memperhambakan diri kepada Allah dengan metaati akan melaksanakan segala perintah dan anjuran-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya.

Ijma' : Kesepakatan, kebulatan pendapat para sahabat nabi atau ulama dalam berijtihad atas suatu hukum Islam.

Ijtihad : Suatu usaha yang dilakukan oleh para ahli dengan sungguh-sungguh, mengerahkan segala daya kemampuan rohani dan akal pikiran yang rasional, menggali masalah keislaman berdasarkan Al-Quran dan Hadits.

Ikrar : pengakuan yaitu memberikan pengakuan atau menerangkan suatu kebenaran.

Imam : Pemimpin atau ketua dan dalam fiqih imam adalah yang memimpin shalat.

Dalam arti politik imam adalah ketua pemerintahan atau kepala negara.

Iman : kepercayaan atau keyakinan.

Istighfar : permintaan ampu kepada Allah SWT, suatu jenis dzikir kepada Allah dengan mengucapkan "Astagfirullaah 'Azhim" artinya "Aku memohon ampun kepada-Mu, ya Allah Yang Maha Besar".

Jawa Hooko Kai : Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa, Organisasi masa bentukan Jepang.

Jihad : berjuang, yang dimaksud adalah berjuang untuk menegakkan kemurnian dan kesucian agama Allah.

Jihad fi sabilillah : Jihad di jalan Allah, peperangan untuk membela agama Allah.

Kafir : orang-orang yang mengingkari/tidak mempercayai ke-Esa-an Allah dan Ke-Rasul-an Nabi/Rasul, termasuk nabi Muhammad SAW.

Ken : Wilayah Kabupaten

Khalifah : penguasa atau pengganti. Khalifatul Rasul atau khalifah, mereka yang menggantikan kedudukan Rasul sebagai Kepala Negara/Pemerintahan.

Ku : Wilayah Kelurahan

Mufti : pemberi fatwa.

Syu : Wilayah Karesidenan

Syura : bermusyawarah, yaitu memusyawarahkan segala perkara urusan kaum Muslimin.

Tahajud : Shalat sunnat yang dikerjakan malam hari.

Tahlil : Sejenis dzikir kepada Allah mengucapkan kalimat “La Ilaha Illallah” artinya “Tidak ada tuhan selain Allah”.

Tahmid : Sejenis dzikir kepada Allah SWT dengan mengucapkan kalimat pujian kepada-Nya, yaitu “Alhamdulillah” artinya “Segala puji hanya bagi Allah”.

Ulil Amri : Yang memiliki kekuasaan atau penguasa yaitu pemimpin-pemimpin pemerintahan Islam yang mengurus kepentingan Islam dalam arti luas.

Wilayah : Kekuasaan

Wet : Undang-undang

Yaumul Akhir : Hari Akhir, kiamat.

Zakat : Bagian atau kadar harta tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.

Zuhud : Sikap hidup yang sederhana, tidak tamak terhadap harta dunia.

KEPUTUSAN

**Conferentie Masjumi dan Bagian2-nja pada
Tgl: 1-3-48 di Tjipeundeuj, Bantarudjeg (Daerah Tjirebon)
Jang diselenggarakan oleh
MASJUMI WILAJAH DJAWA- BARAT.**

PROGRAM POLITIEK UMMAT ISLAM

1. Membuat brochure tentang pemetjahan politiek pada dewasa ini, ja'ni perlunja lahir satu negara baru, ja'ni negara Islam. Pengarang Sdr. Kartosoewirjo (untuk disiarkan keseluruh Indonesia)
2. Mendesak kepada Pemerintah Pusat Republik Indonesia agar membatalkan semua perundingan dengan Belanda; kalau tidak mungkin, lebih baik Pemerintah dibubarkan seluruhnja dan dibentuk suatu Pemerintah baru dengan democratie jang sempurna (Islam).
3. Mengadakan persiapan untuk membentuk Negara Islam jang akan dilahirkan, bilamana Negara Djawa Barat ala Belanda lahir, atau Pemerintah Republik Indonesia bubar.
4. Tiap-tiap daerah jang telah kita kuasai sedapat-dapatnja kita atur dengan peraturan Islam, dengan seizin petundjuk Imam.

DAFTAR USAHA TJEPAT

1. Memberikan penerangan seluas-luasnja kepada rakjat, bahwa dengan pebluciet itu kita tidak akan merdeka
2. Mengorectie segala pendapat semua pegawai Republik Indonesia
3. Mengadakan Perhubungan ke seluruh Indonesia chususnja, Djawa sebelah Barat untuk melantjarkan segala usaha
4. Mengorectie orang-orang Islam jang bekerdja pada Pemerintah pendudukan Belanda
5. Mengusahakan setjepat mungkin agar Kepala-kepala Desa jang berdjiwa Islam, baik jang masih republikein ataupun Kepala-kepala Desa di daerah pendudukan Belanda.
6. Di daerah pendudukan Belanda supaja mengadakan gerakan satia-graha
7. Mengobar-ngobarkan (memperhebat) penerangan tentang tauhid, amal saleh dan semangat berkorban
8. Mendidik rakjat untuk membiasakan hidup sehari-hari berdiri di atas dasar Islam hingga patut mendjadi warga negara Islam (Islamiticche Burgenschap)
9. Dengan segala daja upaya memperdalam dan mempertinggi faham djihad dan amal saleh di tiap-tiap lapangan dan keadaan
10. Menanam benih keadilan dalam masjarakat Islam Indonesia.

Rentjana Ketentaraan Ummat Islam Indonesia

1. Mengadakan kesatuan Ketentaraan Ummat Islam dari Hizbullah dan Sabilillah dijadikan Tentara Negara Islam dan diberi nama "Tentara Islam Indonesia"

2. Di seluruh daerah dibelakang "Demarkasi Van Mook" (Djawa sebelah Barat) dijadikan 2 Divisi Tentara Islam Indonesia dengan bersendjata lengkap (1: 1)

Organisasi

1. Mengangkat sdr. Kamran sebagai Panglima Divisi, sedang stafnya diambil dari daerah Priangan dan Tjirebon. Sementara djadi coordinator dari dua daerah tersebut, sebelum tergabungnja beberapa Resimen jang lainnja.
2. Daerah Priangan dan Tjirebon bersedia membantu usaha untuk menyelenggarakanja.
3. Mengadakan:
 - a. Gestapo
 - b. Barisan-barisan
 - c. Mahkamah Tentara di masing-masing Resimen
 - d. Markas Alim Ulama yang merupakan bantuan bathin
4. Panglima Divisi harus masuk salah satu staf dari Madjelis Islam

Siasat:

1. Komando akan diberikan langsung dari Panglima Divisi sendiri
2. Gerakan pertama akan segera dilakukan.

Usaha:

1. Mengadakan pemusatan tenaga bersendjata disatu tempat di tiap2 Resimen, supaya memudahkan segala usaha dan mengadakan gerakan.
2. Memberikan tugas-tugas kepada Pemimpin Ummat Islam di tiap2 daerah, supaya dengan djalan kebidaksanaan memberikan kepada tentara dan/atau orang jang mempunyai sendjata supaya dengan segera menggabungkan diri dan/atau memasrahkan sendjatanja kepada Tentara Islam Indonesia.
3. Dengan djalan bidjaksana mengambil kekajaan dan hasil2 bekas kekajaan Negara R.I., dimasukkan kekajaan Negara Islam
4. Segala pendapatan2 dari pertempuran, ketjual alat perang, akan diserahkan kepada Pemerintah Islam untuk diaturnja sepanjang Peladjaran Agama Islam. Adapun alat perang jang didapat dengan Coordinatie dari beberapa kesatuan akan dibagi sebagai berikut:
 - a. 1/3 untuk bezettingstroep
 - b. 1/3 untuk jang mempunyai daerah
 - c. 1/3 untuk kesatuan jang membantu
5. Panglima Divisi akan segera;
 - a. Mengadakan hubungan dengan Resimen2 jang ada diseluruh Djawa Sebelah Barat (Bogor, Djakarta, Pekalongan dan Banjumas)
 - b. Mengadakan Coferentie kedua kali dari seluruh Resimen2 untuk menentukan sikap bersama.

Ketentaraan Pimpinan

Mengingat :

Keadaan dan masyarakat kita di Djawa sebelah Barat, setelah Naskah Renville ditandatangani dan daerah tersebut mendjadi daerah Belanda.

Bependapat :

Keadaan jang demikian itu tidak memungkinkan Ummat Islam melakukan organisatie sebagaimana biasa

Menimbang :

- a. Perdjoangan harus dilakukan dengan tjara lain
- b. Harus ada satu Pimpinan Ummat Islam seluruh Djawa sebelah Barat

Memutuskan:

- a. Masjumi dengan segala djabat usahanja di Djawa sebelah Barat menghentikan segala usahanja sampai waktu jang tertentu, bila keadaan telah mengidzinkan kembali, terutama kalau perundingan politiek antara Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda telah selesai
- b. Membentuk sebuah Madjelis Islam dengan seorang kepala (Imam) jang dapat bertanggung djawab kepada Allah dan Masjarakat.
- c. Madjelis tersebut, harus merupakan sebuah Pemerintah Islam sementara di Djawa sebelah Barat jang harus ditaati oleh seluruh Umat Islam di daerah tersebut.
- d. Untuk Kepala (Imam) ditetapkan: sdr. Kartosoewirjo.

Dunia Masjumi menghentikan susunannja.

Sementara keadaan belum mengidzinkan terutama bila perundingan politiek antara pemimpin RI dengan pemimpin Belanda selesai, selama itu Dunia Masjumi (Masjumi, GPII, Hizbullah, Sabilillah, Mualimat, GPII Putri, SDII, STH Fonds Sabil dan segala tjabang usahanja diseluruh Djawa Sebelah Barat mulai tanggal 1 Maart 1948 djam 14.00 setelah diperbintjangkan masak-masak dalam permusjawaratan bersama pada hari tanggal tersebut. Menghentikan segala usahanja.

Adapun orang-orang yang mengaku dirinja wakil Masjumi atau salah satu bagiannja dan salah satu Badan Perwakilan atau jang serupa itu mulai tanggal tersebut tidak lagi dapat atau bersuara atas nama Masjumi atau bagiannja.

Tjirebon Maart, tgl 1 – 1948

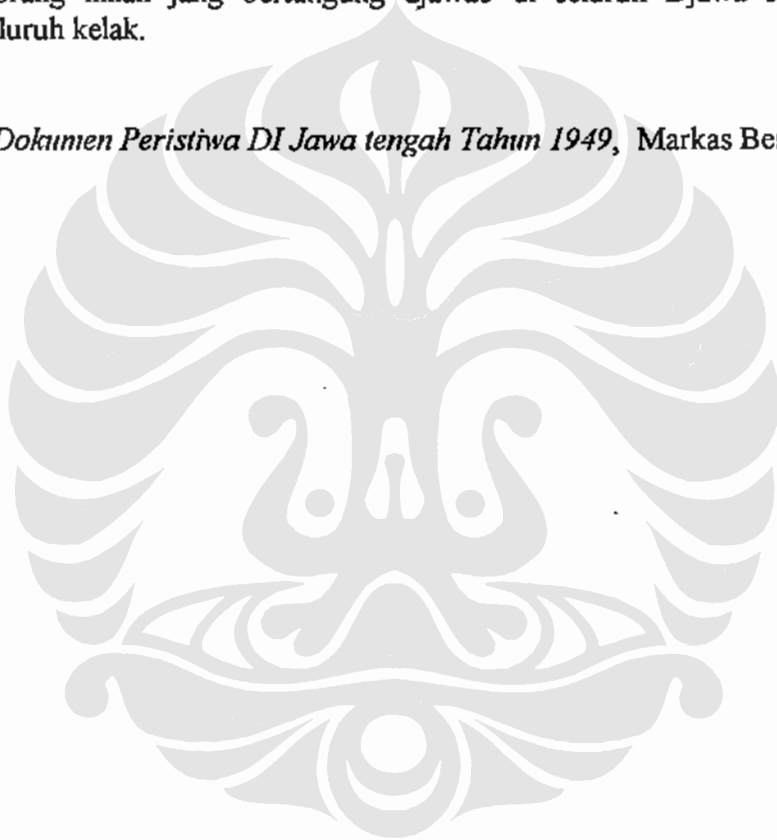
1. WPD Masjumi di Djawa Barat
ttd
S.M. Kartosoewirjo
2. WMT Sabillillah di Djawa Barat
ttd
Kamran
3. W. Putjuk Pimpinan GPII di Djawa Barat
Ttd
Toha Arsjad

Keputusan lain yang diambil pada Konperensi Tjirebon ialah:

1. Mengangkat Kamran sebagai panglima Divisi
2. Membentuk Pusat Pimpinan yang dibagi dalam 3 bagian:
 - a. Bagian Agama : dipimpin oleh K. Abdoel Halim dan K.H. Gozali Toesi;
 - b. Bagian Politik dipimpin oleh Sanoesi Partawidjaja dan Toha Arsjad
 - c. Bagian Kemiliteran dipimpin Kamran dan R. Oni

Ketudjuh orang inilah yang bertanggung djawab di seluruh Djawa sebelah Barat hingga diseluruh kelak.

Sumber : *Dokumen Peristiwa DI Jawa tengah Tahun 1949*, Markas Besar TNI-AD



TURUNAN dari TURUNAN

Dewan Pembelaan P.B.Masjumi.
di Tempat.

No. : 7/II/S.49.

Tgl. : 5 Juni 1949.

Kepada: Dewan Pembelaan Masjumi Daerah Kedu.

Dari : D.P.M. Pusat.

Hal : Salinan documenten.

Sifat : Rahasia/Penting.

Assalamu 'alaikum w.w.

Merdeka!

Untuk menghindarkan fitnah yang didesas-desuskan tentang D.I. maka kami kirim surat-menjurat kami yang berhubungan dengan D.I. kepada M.B.K.D. harap Sdr. memperhatikan hal itu.

Rapatkanlah hubungan d3. Tentara, Pemong Peradja dan Polisi didalam jalan jg ta' melanggar Agama dan Party. Bertindaklah tegas terhadap musuh.

Kami mengharap kepada sdr.2. Dewan Pembelaan Daerah, supaya Documen jg kami kirim ini, disalin jg banjak2 untuk diratakan tiap Tjang/Renting di tiap2 Daerah. Untuk melentjerkkan djalanja hubungan antara Pusat dg daerah seluruhnja, harap diusahakan mengadakan kurier jg tetap antara satu Daerah dg Daerah jg lain, hingga dapat bersambung dg D.P.M. Pusat.

Demikianlah, penuh pengharapan kami agar semuanya jg tersebut diatas it dapat sdr laksanakan dg setjepatnja, agar kita ta' putus hubungan dalam masa jg genting ini.

Kemudian haraga kasih kami utjapkan, dan semoga Tuhan menolong atas segala usaha kita itu. A M I E N !

Wassalam.

Dewan Pembelaan/Pertahanan

P.B.Masjumi

Kepala Staf II-Sec.

ttd. (Basir Maksum)

Turunan.

Markas Besar Komando Djawa.

no. : 594/XII/MOB/49. tgl. 25 Bulan III-49.

Kepada: Jang Mulja Dr.Sukiman, C.O.B.B. Masjumi d/a: K.P.P.D.

Dari : Panglima Komando Djawa.

Hal : Darul Islam.

Isi Surat.

Merdeka!

1. Berhubung sikap D.I. di Djawa Barat (Kartosuwirjo/Karman) belum sesuai dg kesatuan siasat perdjoangan R.I. sehingga timbul beberapa pertempuran diantara T.H.I. dan D.I. tsb. disekitar Prijangan Timur, disana seorang Opsir T.N.I. terbunuh, maka sudi apalah kiranja J.M. dan sdr.2 dari Pimpinan Masjumi menjampai surat kepada D.I. tsb. untuk menjusuaikan perdjoangan.

2. Divisi Siliwangi memegang instruksi tentang tenaga2 perdjoangan dalam Negara Pasundan dan diluarnja, supajadihimpun mendjadi satu potensi dibawah Pimpinan N.R.I. jg diproklamirkan oleh Rakjat sendiri. Negara jg telah mempunyai alat2 dan undang2 selengkapnja.

3. Sebelum dan sesudahnja kami menjampai surat diperbanjak terimakasih.

Tambusan/
P.T.W.Ksap.

Panglima Komando Djawa
ttd. (A.H.Nasution)

(2)

Turunan.
 P.B. Masjumi.
 Dalam Perdjajanan
 Hal: Darul Islam.
 Lamp: 1.

Kepada
 Jth. P.T. Panglima Komando Djawa
 di Tempat.

Mordoka!

1. Surat P.T. No. 594/XII/MOB/49 ttg. 25 Maart 1949 Hal: tsb diatas dengan lampiran2nja telah kami terima, atas kesemuanja itu kami utjapkan trima kasih.
2. Bersama ini kami kirimkan sehelai Instruksi dari Party kami-agar Paduka Tuan dapat mengetahui sikap resmi dari Masjumi dlm mengha dapi keadaan perang sekarang ini.
3. Besar pengharapan kami paduka tuan, suka memberi taukan sikap kami itukepada Instansi2 dibawah perintah Paduka Tuan, agar dg demikian dapat ditjapai kerdja sama jg sangat di hadjatkan oleh suasana
4. Mengenai Darul Islam di Djawa Barat kami kemukakan disini, bahwa gerakan tsb organisatorisch berada diluar Masjumi. Sungguhpun demikian, akan kami tjoba untuk memenuhi permintaan Paduka Tuan.
5. Selain dari itu menurut kabar belum positif jang kami trima, letak kesulitan antara T.N.I. dan D.I. itu disebabkan semula oleh sikap Achmad Wiranatekusuma (perundingan dg pihak Pacundan) jang konon djuga tidak disetudjui oleh Batalion lainnja dari Div. Siliwangi. Untuk mengetahui benar situasi disana, jang dapat di pergunakan sebagai pangkal bertindak makasangat kami hargakan djuga P. Tuan suka memberi kan gegevens jg ada pada P. Tuan kepada kami.
6. Selandjutnja pengalaman kami memberi peladjaran, bahwa tidak djarang hubungan T.N.I. dg penduduk jg kuat memegang sjarat Agama Islam mandjadi renggang, malah kalanja bersifat bertentangan, oleh karena penduduk tersinggung perasaannja oleh sikap dan tingkah laku satu dua orang T.N.I.
7. Maka dari itu kami pertimbangkan kepada P. Tuan, alangkah baiknja djika daerah2 jg penduduknja kuat memegang sjarat Agama itu ditempatkan Pasukan T.N.I.2 (sjujur) dibawah Komando opsir2 jg tahu benar tentang desupti Verhouding dalam masjarakat Islam, hingga dapat terpelihara suasana baik antara tentara dan Rakjat. Oleh opsir2 jg demikian itu dg mudah dapat dipetjahkan matjam2 hal dalam hubungannja dg masjarakat, jg oleh lain orang dianggapnja sebagai kesulitan besar
8. Sebelum dan sesudahnja kami menjampaikan diperbanjak trima kasih.

Ditempat, tgl 9 April 1949

A/n. Pengurus Besar Masjumi
 Kepala Departement Organisasi
 ttd. (Prawoto Mangkusasmito)

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

No. 210 TAHUN 1950.

RAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Membatja : surat Menteri Agama Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Mei 1950 No. A II/4/1348;

Menimbang : bahwa perlu membentuk suatu Panitia untuk menyelesaikan segala hal ichwal yang bersangkutan dengan penangkapan-penangkapan militer dan politik;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk sebuah "Panitia Penyelesaian Tangkapan Militer dan Politik" dengan tugas kewajiban menyelesaikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan penangkapan-penangkapan militer dan politik.

Kedua : Mengangkat :

1. K.H.A. Wahid Husjim Menteri Agama Republik Indonesia Serikat, sebagai Ketua.
2. Kapton Warsito, Wakil Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Serikat, sebagai Anggota.
3. Soenarjo, Wakil Kementerian Kehakiman Republik Indonesia Serikat, sebagai Anggota.
4. Suparto, Wakil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat, sebagai Anggota.
5. Mr. Susanto Tirtoprodjo, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, sebagai Anggota, dengan tjtatan bilamana berhalangan, boleh menundjuk wakilnya.
6. R.A.I. Suriadilaga, sebagai Sekretaris I.
7. A. Harjono, sebagai Sekretaris II.

Ketiga : Segala pengeluaran uang yang dilakukan untuk keperluan ini dibebankan pada Kabinet Perdana Menteri.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Kementerian Agama R.I.S.
2. Kementerian Pertahanan R.I.S.
3. Kementerian Kehakiman R.I.S.
4. Kementerian Dalam Negeri R.I.S.
5. Kementerian Dalam Negeri R.I.
6. Kabinet Perdana Menteri dan

PETIKAN kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Djuli 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
ttd. SUKARNO.

PERDANA MENTERI,
ttd. MOHAMMAD HATTA.

Sesuai dengan yang asoli,
KABINET PRESIDEN
Ketua Tita Usaha

(D.JAMIN).

SURAT KEPUTUSAN PERTAMA MENTERI REPUBLIK INDONESIA

No. 11/1950.-

PERTAMA MENTERI REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Keputusan Sidang Dewan Menteri pada tanggal 26 Djuli 1950;

Mengingat : bahwa telah banyak usaha-usaha dan panitia-panitia yang akan menyelesaikan segala hal-ichwal yang bersangkutan dengan peristiwa yang lazim dinamakan "Darul Islam",

Menimbang : perlu membentuk suatu panitia interdepartemental yang diberi tugas menyelesaikan segala hal-ichwal yang bersangkutan dengan peristiwa yang lazim dinamakan "Darul Islam" itu;

Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Djuli 1950 No. B 15/2/11;

M e m u t u s k a n :

Pertama : Membentuk sebuah panitia interdepartemental yang terdiri dari anggota-anggota:

1. Seorang wakil dari Kementerian Dalam Negeri merangkap Ketua,
2. Seorang wakil dari Kementerian Agama,
3. Seorang wakil dari Kementerian Penerangan dan
4. Seorang wakil dari Kementerian Sosial.

Kedua : Panitia tersebut diberi tugas:

- a. menjelidiki dan memajukan usul-usul yang lengkap kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri tentang apa yang harus didjalankan oleh Pemerintah untuk menyelesaikan segala hal-ichwal yang bersangkutan dengan peristiwa yang lazim dinamakan "Darul Islam".
- b. mengkoordinir dan kemudian membubarkan segala panitia-panitia dan usaha-usaha lain-lainnya yang tudjuannya juga kearah penyelesaian soal tersebut diatas.

Ketiga : Pengeluaran uang untuk keperluan panitia tersebut diberatkan atas mata anggaran 1. 11. 1. 5. tahun 1950 dan tjara menggunakan dan mempertanggung djawabkan uang itu akan diatur oleh Panitia tersebut bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Jogjakarta,
2. Semua Kementerian R.I.,
3. Semua Kementerian R.I.S.,
4. Ketua Pusat Perbendaharaan di Jogjakarta.

1 s/d 4 untuk dimaklum dan dipergunakan seperlunya.-

Agenda No.	3700/50
clerk	16/18
Disamping:	16/18

Jogjakarta , 8. Agustus 1950.-

PERTAMA MENTERI REPUBLIK INDONESIA

(Dr. A. HALIM)

P E R A T U R A N
PANGlima TENTARA DAN TERRITORIUM III
DJAWA BARAT.
No.25.

PANGlima TENTARA DAN TERRITORIUM III DJAWA BARAT:

- LENGINGAT:**
- a.) Fatsal-fatsal 6,36 dan 37 ayat 1 dari "Regeling op den staat van Oorlog en van Beleg" Subi.1950 No.582.
 - b.) Peraturan Pemerintah no.7/1950 dan Keputusan Menteri Pertahanan no.357/K.P./50.
 - c.) Peraturan Gubernur Militer IV Djawa Barat No.6 tanggal 19-1-1950, sebagaimana telah ditetapkan dan diubah dengan Peraturan Panglima Tentara dan Territorium III Djawa Barat No.16 tanggal 2/9-1950.
- MENSTAPKAN:** Peraturan tentang organisasi yang terlarang sebagai berikut:

Fatsal 1.

Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Militer IV No.6 tanggal 19/1-1950 sebagaimana telah ditetapkan dan diubah dengan Peraturan Panglima Tentara dan Territorium III Djawa Barat No.16 tanggal 2/9-1950, menunduk organisasi/gerombolan tersebut dibawah ini sebagai perkumpulan terlarang:

1. Negara Islam Indonesia Kartosuwirjo.
2. Darul Islam Kartosuwirjo.
3. Tentara Islam Indonesia (T.I.I.)
4. Angkatan Umat Islam (A.U.I.)
5. Pasukan Surjakentjana.
6. Pasukan Samiadji.
7. Pasukan Angling Darma.
8. Brigade Tjitarum.
9. Divisi Bambu Runtjing (B.R.)
10. Tentara Rakjat Indonesia.
11. Pasukan Benteng Wulung.
12. Ratu Adil Persatuan Indonesia (RAPI).
13. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA).
14. Bataljon Arends atau Bataljon Aren atau Bataljon "White Eagle".
15. Republik Maluku Selatan (R.M.S.)
16. Organisasi SP.88.
17. Lain2 gerakan dibawah tanah (subversieve activiteiten) seperti A.B.S.-plan.

Fatsal 2.

Instansi2 Militer, Polisi dan Sipil berkewajiban pengusutan, dengan menundukkan surat-tugasnja, diberi hak memasuki tempat2 dimana angga- ta2 dari perkumpulan terlarang tersebut berada, atau diduga berada, untuk mengadakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penjiidikan, pemeriksaan, pembeslahan, pensitaan, bilamana perlu dengan kekerasan.

Fatsal 3.

- 2 -

Paragraf 3.

Penundjukan ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan, ke daerah
Territorium III Djawa Barat, ketjuali daerah K.M.K.B. Djakarta-Raya.

Ditetapkan di Stafkwartier.
pada Tanggal: 8-12-1950.

Djam : 10

PANGlima TENTARA DAN TERRITORIUM III
DJAWA BARAT,
Kolonel:

(S. d. i. k. i. n.)

Diumumkan melalui
PERS dan RADIO
tanggal: 8-12-1950
djam : 13.00

Djurubitjara
Panglima Tentara dan Territorium III
Djawa Barat,
Kapten:

(M. Nawawi Alif.)



MADJLIS ISLAM

PUSAT

-----oCo-----

No. : 60/ P. / 48.

Sifat : Penting.

Hal : Panggilan

Dari : M.I. Pusat

Kepada : F. P. I.

Tanggal : .. 8. Juli 1948, djan R. T.

F. boj. A. M. Soetarto, bb, Anwar Tj.

61. Soedjono

~~62. Soetarto~~

62. Soemadhi

63. Hahjoei

64. Soemomo

65. Ramlan

Tosman untuk Bu I.
Sj. Hied.Bismillahirrahmanirrahim
Assalaqu'alaikum w.w.

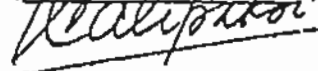
1. Sedjak ditanda tangeninja Reinville kami umat Islam di Djawa Barat telah menentukan sikap jang tegas.
2. Akibat daripada sikap itu, terdjadilah Perdjjuangan jang dahajet, sehingga darah sjuhada terus mengalir.
3. Tjita-tjita Perdjjuangan kami ini, tidak hanya merupakan Perdjjuangan regional akan tetapi hendaknja mereta keseluruh kepulauan Indonesia.
4. Dari itu untuk menestukan bentuk dan langkah Perdjjoangan kita, disamping keterangan2 jang disampaikan oleh ~~tuas~~ kami, diharap supaya diantara saudara2 jang bertanggung djewab kepada Perdjjuangan umat disini datang ketempat saja untuk membitjarakan bentuk dan langkah Perdjjuangan umat pada dewasa ini.
5. Semoga dengan djalan ini, kerunia Allah, labirnja Negara Islam jang Merdeka, akan datang dengan setjepat-tjepatnja.
6. Selesai.

Baarun cinallohi wafathun qorib wabssajiril mu'minin.

Wassalam.

PIKPINAN BUKU MADJLIS ISLAM PUSAT

(Djawa sebelah Barat)



(K a l i p a k s i)

= pembawa surat ini

Surat izin jalan.

Diizinkan kepada kiai H. Muslich,
Kepala Djawatan agama provinsi Jawa
tengah untuk menjangkau surat
dari pemerintah R.I. kepada Amir-
Fatah.

Pengikutnya:

1. kiai H. Asj'ari
2. M. Sunardi.

Diperintahkan kepada semua anggota
APRS dalam lingkungan Pangkalan N/III supaya
memberikan jaminan perlindungan, dan
menyediakan pertolongan dimana perlu.

Tg. 21 - 11 - 1950

Kend. Rge N/III

diangkatkan.
di Komandemen I. Sriwijaya.

H. Muslich
Kepala Djawatan
Agama Provinsi Jawa Tengah.

Berkas tidak perlu dipas.



[Signature]

Kol. Mh. Bachriem.

ANWAR TJOKROAMINOTO

Ditempat

-0-

Nomor : -----
 Tanggal : 30 Djuli 1948
 Djam : 03:30 (pagi)
 Dari : Anwar Tjokroaminoto
 Kepada : Kamran-Tjakrabuwana
 Via: Soe'oad Res 18
 ,,: Abd.Hamid res 12
 Hal : Menerima sdr. Mohd.Sidik
 dan kawan2nja.
 Lampiran: -----

Bismilla hirrahmanirrahim,
 wa'alaikoemoessalam WR.,WB.,

Saudara2 Nanggadipoera dan Soelaiman soedah sampai
 ditumah saja dengan selamat. Surat2 kanda Ka lipaksi dan
 sdr Kamran sudah pula disampaikan.
 lai diperhatikan dan diusahakan.

Pembawa surat ini adalah saudara Moehammad Sidik, dari
 kalangan saudara2 kita dan menudju daerah saudara, agar
 segala sesuatunja dapat diatur sebaik2nja, sesuai dengan
 isi surat saudara.

Saudara tersebut pun membawa kawan2 dan saudara2
 tunggal Azama.

Berita lain-lain menjusul kelak.
 rak Kadar mengusahakan kekurangan2 saudara.

Salam saja,

(Signature)
 (Anwar Tjokroaminoto)

utusan2 Kalipaksi:

Nanggadisoera:

(Signature)

Soelaiman:

(Signature)

REPUBLIK INDONESIA
PERDANA MENTERI

No. P.M./11./50

SURAT PERINTAH

Kepada Kiai H. MUSLICH ditugaskan untuk pergi
menjampaikan amanat Pemerintah Republik Indonesia tang-
gal 14 November 1950 kepada Tuan K a r t o s u w i r j o

Setelah menunaikan tugasnya K.H.Muslich dengan segera
harus kembali ke Djakarta untuk memberi laporan kepada
J.M. Perdana Menteri Republik Indonesia.

Djakarta, 23 Desember 1950.-

Kend. Lister II.
Berikan bantuan
seperlunya, agar
J.M. Perdana Menteri
dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik.

Pln 95 III

and

PMI II

Lis. L.



PERDANA MENTERI

Merangkap

MENTERI PERTAHANAN 2.1.

(M.Natoir)



KUTIPAN DAFTAR KEPUTUSAN
MENTERI AGAMA R.I.

No: 51/A/D/p.6.-

Jogjakarta, 22 Mei 1950.-

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Mengingat

Mendiang

Mendiang pula

1. bahwa masalah pergerakan "Darul Islam" yang menyebabkan keamanan dan ketertiban masyarakat begitu pula yang menimbulkan korban atas jiwa dan kekayaan rakyat yang begitu banyak, hingga sekarang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah Pusat.

2. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas perlu diadakan usaha oleh Kementerian kami untuk menyelesaikan masalah Darul Islam itu dan untuk kepentingan ini perlu didirikan suatu Panitia.

3. akan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1949 dan No. 8 tahun 1950 tentang susunan, lapangan pekerjaan dan tugas kewajiban Kementerian Agama R.I.

M E M U T U S K A N :

- I. Membentuk Panitia "Penyelesaian Darul Islam" yang berkedudukan di Jogjakarta dengan tugas kewajiban berusaha untuk mengurus dan menyelesaikan masalah Darul Islam ;
- II. Mengangkat Sdr. tab. dibawah ini dalam "Panitia Penyelesaian Darul Islam".
 1. K.H. Muchlis di Jogjakarta sebagai ketua ;
 2. Sdr. Mohammed Soleh di Jogjakarta (Kadil Istislah);
 3. Sdr. Sulaiman (K.A) di Jogjakarta sebagai Sekretaris ;
 4. K.H. Muslich (K.A) di Semarang sebagai anggota ;
 5. K.H. Munawar Cholil (K.A) di Semarang sebagai anggota ;
 6. Sdr. Notosudirjo (K.A) di Purwokerto sebagai anggota ;
 7. K.H. Saibani di Jogjakarta sebagai anggota ;
- III. Memberikan kepada masing-masing anggota Panitia tersebut, uang sidang sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) dan kepada Ketua dan Wakil Ketua sebesar Rp. 20,- (duapuluh rupiah) buat tiap-tiap rapat dengan pembatasan untuk masing-masing orang sebanyak-banyaknya Rp. 200,- (duaratus rupiah) untuk perjalanan, serta uang di jalan dan uang perantara menurut peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri ; buat anggota-2 yang bukan pegawai Negeri dimasukkan golongan I.
- IV. Pengeluaran uang rapat Panitia ini dibebankan kepada rata anggaran 5-12-1-2-5. dari anggaran belanda Kementerian Agama R.I. tahun 1950.

Turunan dikirimkan kepada :

1. Sdr. Aoting Presiden R.I.
2. Semua Kementerian R.I.
3. Badan Pemeriksa Keuangan Negara.
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara.
5. Kantor Perbendaharaan di Semarang dan Purwokerto.
6. Kantor Perbendaharaan Dinas di Jogjakarta, Semarang dan Purwokerto.
7. Kantor Sekretariat Negara.
8. Kantor Sekretariat Dewan Menteri.
9. Kantor Sekretariat D.P.K.R.I.P.
10. Kantor Urusan Pegawai Negeri.
11. Kementerian Agama R.I.S.
12. Dewan Pertimbangan Agung di Jogjakarta.

Kutipan surat putusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Kepada

Bambang Iman Era Respati Sabana, Lajur Kanan Sebuah FIBUI, 2003
di

JOGJAKARTA

Kementerian Agama R.I.
Sekretaris Jenderal,
(M. H. Soemarto).

STATEMENT MASJUMI

Tentang

PERISTIWA "DARUL ISLAM"

1. Masjumi sangat menjesalkan bahwa Komisi Negara Tentang Darul Islam yang telah dibentuk oleh Pemerintah R.I.S. pada beberapa bulan yang lalu, belum pernah menampakkan hasil pekerjaannya sampai sekarang.
2. Semendjak dari semula, Masjumi berusaha meyakinkan kepada Pemerintah supaya melalui jalan penyelesaian politis terhadap D.I., artinya - tidak akan menempuh jalan kekerasan sendjate dan penyelesaian militer. Usaha itu memuntjak kepada keputusan yang diambil dalam Mukhtar Masjumi ke IV di Djokja, yang menuntut terbentuknja suatu Komisi Negara Untuk menjelesaikan soal-2 sekitar D.I. dengan jalan yang sebaik-baiknya.
3. Putusan itu telah disetudjui dan telah diambil oper oleh Pemerintah R.I.S. dengan mendirikan Komisi Negara yang kita sebutkan diatas. Tetapi ternyata bahwa semendjak berdirinja itu, Komisi tersebut belum pernah memundjukkan usahanya, sehingga keadaan ditiarkan lalu begitu sadja.
4. Akibatnja, keadaan semakin kalut dan katjau, apalagi memberi kesempatan kepada pihak tentara untuk menjelesaikan segala kedjadian dengan jalan sendjata.
5. Peristiwa-2 dizaman yang achir-2 ini menundjukkan bahwa bahaya-2 baru timbul bertimpa disamping soal D.I. itu sendiri, bahaya-2 yang mengadjudu antara rakjat dengan tentara, yang korbannya setiap-hari bertambah banyak dan meluas.
6. Masih adanya Pemerintahan militer menjebabkan mudahnya diperalat untuk melakukan tindakan-2 terhadap rakjat, yang sungguh sukar dapat dipertanggung djawabkan.
7. Masjumi menuntut supaya:
 - a. Pemerintah R.I.S. memperkuat kembali Komisi Negara tentang D.I., dengan mengganti atau merubah anggota-anggotanya.
 - b. Menghapuskan dengan selekas-lekasnja Pemerintahan Militer sebagai yang sudah seringkali didjardjikan oleh Pemerintah.

Djakarta, 23 April 1950.-

DEWAN PIMPINAN PARTAI MASJUMI

Ketua,

ttd. Moh. MATSIR.

UTUSAN MASJUMI TIDAK.....(2).

Perkenaan dengan ini belum ada kepastian kapan lagi utusan2 ini dapat meneruskan perjalanannya, terutama pula mengingat bahwa permulaan Mei nanti menurut putusan akan ada konperensi Masjumi di Makassar.

Yang mengambil salinan:

Simfon des bindel

Al 7/11/6

I K R A R - B E R S A M A.Bismillahirrahmanirrahim

Allah Jang Maha Pengasih dan Penjagat telah membukakan mata-hati nurani kami, memberi kesadaran dan keinsafan kepada kami tentang kesesatan kami dan kemeluturan jang diakibatkan oleh perbuatan kami, maka kami bekas pimpinan apa jang dinamakan DI/TII/RII dengan ini menyatakan :

1. Bahwa gerakan kami dulu (DI/TII/RII dan segala sesuatu jang berhubungan kepadanya) adalah sesat, salah dan menyalahi hukum Islam, hukum Kenegaraan, norma kemanusiaan dan bertentangan dengan jalan jang seharusnya ditempuh untuk memperdjoangkan ideologi Islam menurut petunjuk Allah s.w.t. dalam Al-Qur'an dan Sabda Nabi Muhammad s.a.w.
2. Bahwa kami telah berbuat dosa terhadap Masyarakat Djawa-Barat khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya atas gerakan kami pada masa jang lalu, atas dosa mana kami mengharapkan ampun masyarakat dan kami sanggup menanggung dosa tersebut dengan jalan mewujudkan perbuatan jang berfaedah, demi kepentingan masyarakat dan Negara R.I.
3. Bahwa kami telah melepaskan diri lahir dan bathin dari ikatan apa jang dinamakan DI/TII dan RII seraja bertautat mencontoh punan Allah s.w.t. menjesal sebesar-besarnya atas perbuatan kami dulu dan berdjendji untuk tidak mengulangnya.
4. Bahwa jalan jang ditempuh oleh Pemerintah R.I. dengan segala dasar/haluan politik dan pembangunannya adalah jalan jang benar dan diridloi Allah s.w.t. dan oleh karenanya dalam pengabdian kepada Agama dan Negara, kami bersumpah :
Demi Allah :
 - Setia kepada Pemerintah R.I. dan tunduk kepada Undang2 Dasar R.I. 1945.
 - Setia kepada Manifesto Politik R.I., Uudak, Tjarek jang telah menjadi garis besar haluan Politik Negara R.I.
 - Sanggup menjtjurahkan tenaga dan pikiran kami guna membantu Pemerintah R.I. eq. alat2 Negara R.I.
 - Selalu berusaha menjadi Warga Negara R.I. jang taat, baik dan berguna dengan diwajibkan Pancasila.
5. Bahwa kami mempertjajakan serta akan menerima dan mentaati seluruh tjara penyelesaian nasib kami, jang meliputi lapangan hukum, politik dan sosial, kepada kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia.
6. Kami yakin bahwa Mudjahiddin lainnya mengikuti djedjek kami. Semoga pernjataan kami ini diberkahi Allah s.w.t. -
Amien Jau Robbal A'lsamien. -

Bandung, tgl. 1 Agustus 1962. -

Kami jang mengeluarkan Ikrar. -

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. Agus Abdullak Sukunari | 1.1.1. |
| 2. Djodjo Sudjati Widjaja | 1.1.2. |
| 3. Adah Djaelani Tirtopradja | 1.1.3. |
| 4. Hadji Zaenal Abidin | 1.1.4. |
| 5. Ateng Djaelani Kertawan | 1.1.5. |
| 6. Dama Mohamad Hassan | 1.1.6. |
| 7. FIBUN: 2009d Gofin | 1.1.7. |
| 8. Tono Mahfud | 1.1.8. |
| 9. Bodo Mohamad Darda | 1.1.9. |
| 10. Tachmid | 1.1.10. |

- 2 -

11. Cholil	t. t. d.
12. Hossen Anwar	t. t. d.
13. Atjeng Abdullah Mudjahid	t. t. d.
14. Koskun Sudermi	t. t. d.
15. Atjeng Hadjer	t. t. d.
16. Rachmat Slamet	t. t. d.
17. Ulen Sudjo'i	t. t. d.
18. Pengkar Rusbandi	t. t. d.
19. Hadji Jusuf Kamal	t. t. d.
20. Usman	t. t. d.
21. Sjarif Muslim	t. t. d.
22. Hadji Zakaria	t. t. d.
23. Bakar Misbah	t. t. d.
24. Emod Hosen Saputra	t. t. d.
25. Achmad Mustofa Hidayat	t. t. d.
26. Subir	t. t. d.
27. Huberoq	t. t. d.
28. Zainudin Rahman	t. t. d.
29. Hadji Djunaedi	t. t. d.
30. Tohir	t. t. d.
31. Salam	t. t. d.
32. O. Z. Mansjur	t. t. d.
33. Atjip Sudradjat Komora	t. t. d.
34. Respati	t. t. d.
35. M. Basjo	t. t. d.
36. Ma	t. t. d.
37. Toha Nawardi	t. t. d.
38. Abd. Rahab Bradjat (AEB)	t. t. d.
39. Utji Phong	t. t. d.
40. Gion	t. t. d.
41. R. o. K.	t. t. d.
42. Sjarif Hidayat	t. t. d.
43. Muhamad Tateng Setiawan (HTS)	t. t. d.
44. Ali Sa'ad Munawar b. Fatmah	t. t. d.
45. Sunjamin b. Kosasih	t. t. d.
46. Sahri Tasdikin b. Dahrodji	t. t. d.
47. Ach. Hawari b. Ab. Korim	t. t. d.
48. Mu'min b. H. Imam Fakih	t. t. d.
49. Hasduki b. K.H. Rusjadi	t. t. d.
50. N. Misbah b.	t. t. d.
51. Abdul Ranzid b. Madrusmi	t. t. d.
52. Sukana Pahrurodji b. Dahrum	t. t. d.
53. Ach. Salpudin Asqli b. Sukfi	t. t. d.
54. H. Haron b. H. Mansur	t. t. d.
55. Muhamad Nasuha b. Pedli	t. t. d.
56. Habib Abdul Mukti b. Abd. Mukti	t. t. d.
57. H.S. Mahmud Frajito Dn. Sirod	t. t. d.
58. H. Jahjo Bin Pnon	t. t. d.
59. Sutik Anwar Sipandi bn. Dihason	t. t. d.
60. Apandi Saeful Hojat b. Sarkasih	t. t. d.
61. Djadjo b. Notami	t. t. d.
62. Ubuh b. Hadji Abdullah	t. t. d.
63. Dadang Kurnia b. A. Sobandi	t. t. d.
64. Umar Junani b. Sumardjo	t. t. d.
65. M. Abas Hasybi b. Roemawi	t. t. d.
66. Sirodj b. Rumli	t. t. d.
67. M. Sohlen b. H. Abd. Hmaid	t. t. d.
68. Endjon Nawawi b. Emod	t. t. d.
69. Mursidin Muarif b. Miharto	t. t. d.
70. Basuni Mutearif b. Mutearif	t. t. d.
71. Hamad Rahmay b. Jahjo	t. t. d.
72. Mikdad b. Djo'i	t. t. d.
73. Mustaqin b. Marjan	t. t. d.
74. A.H. Mansur b. Kohir	t. t. d.
75. A.H. Amir b. Sabini	t. t. d.
76. Harfu b. H. Abdullah	t. t. d.
77. Kolil Rohman b. Hasanmahidi	t. t. d.
78. N. Sadjri b. Djakarsih	t. t. d.
79. N. Sadjri b. Djakarsih	t. t. d.
80. S. Kadar	t. t. d.
81.	t. t. d.

- 3 -

81.	A.A. Affundi	t. t. d.
82.	S. Djoeir	t. t. d.
83.	Djomburi	t. t. d.
84.	A.A. Ridjol	t. t. d.
85.	M.U.S: Effendie	t. t. d.
86.	D.H. Abdullah	t. t. d.
87.	Samod. R.	t. t. d.
88.	Tntju Taufiq	t. t. d.
89.	Toha Arifin	t. t. d.
90.	M. Subarna	t. t. d.
91.	Ali Rahmat	t. t. d.
92.	M.S. Muntar	t. t. d.
93.	Stawidendo	t. t. d.
94.	M.H. Hudojo	t. t. d.
95.	Madroji	t. t. d.
96.	E. Kostomon	t. t. d.
97.	Anshor.	t. t. d.
98.	Engkat Permana	t. t. d.
99.	Mahmud Fauzy	t. t. d.
100.	E.Z. Muttaqin	t. t. d.
101.	A. Djebidi	t. t. d.
102.	Zokaria Jahja	t. t. d.
103.	M. Salim	t. t. d.
104.	Saeffuddin	t. t. d.
105.	M.Hudi Siruloh	t. t. d.
106.	Udjo Mardjono	t. t. d.
107.	M.S. Gezi.	t. t. d.

Disalin sesuai dengan aslinya
oleh :
Kepala Bagian P.K.K. Kantor
Gubernur Mende Dinkes - Barat.

D. W. Ross Porter



Salinan.-

DAFTAR NAMA2 SEBAGIAN TOKOH GKS JG SUDAH MENJERAH

KOR.	N A M A	PANGKAT	DJADATAN	TGL. MENJERAH
1	Abd. Djamain	-	Dan Ki 3/142 IH.	29-6-62
2	Abd. Hakim Amir.	Kapten.	Wadan Kw. II/KDG.	1-7-62.
3	Abdul Wahab Dradjat.	-	Dan Jon Rec. 61.	16-7-62.
4	Adah Djaelani.	Kolonel.	Panglima I Kw 7.	29-5-62.
5	AFandi.	-	Dan Ki II/121.	26-6-62.
6	Agus Abdullah.	Brig.Djen.	Panglima Kw I Kmd. Djawa.	20-6-62.
7	Alfandi Abdul.	Lt.II.	Dan Ki 2/121.	1-7-62.
8	Alfandio.	-	Res. Militer.	-
9	Ali Rachmat.	-	Wadan Jon 187.	-
10	Alashor.	-	Kmd. Res. 81/T.A.	5-8-62.
11	Abbas Sjacudin.	-	Kmd. Ln. 121.	18-6-62.
12	Al Saeful Hajati.	-	Dan Jon 127/KP.	15-6-62.
13	Al Saefi Kidadjat.	-	-	5-6-62.
14	Amir Kidadjat.	-	Dan Ton Ki 5/441.	7-7-62.
15	Katjip Sudaradjat.	-	Kmd. Res. 27.	13-5-62.
16	Katjeng Kurnia.	Major.	Kmd. Pengawal SMK.	4-6-62.
17	Kasaelani Setiawan	Let.Kol.	Panglima III Kw. 7.	9-3-62.
18	Basbro.	-	Dan Ki XII/341.	25-6-62.
19	Bunjamin.	-	Bupati Kandangweol.	6-62.
20	Cholil Katri.	-	Penghubung.	5-62.
21	Cholil Katri.	-	Anak SMK.	4-6-62.
22	Ab. H. Abdullah.	-	Dan Jon 527.	26-6-62.
23	Djajawidjaja.	Kolonel.	M.K.U. Angg. KT.	16-6-62.
24	Djadjabetiawan.	-	Kmd. 3 KK.	10-6-62.
25	Djaenal Arifin.	-	Dan Jon 321/KH.	27-6-62.
26	Djahari.	-	Tjamat Telaga.	9-6-62.
27	Djalit.	-	Wadan Jon 321.	-7-62.
28	Djadjar.	-	Dan Ki 67/87.	-4-62.
29	Suparman.	-	Adj. Plm. 3/Kw. I.	27-6-62.
30	Dj. Rachmat.	-	Kmd. KH. Garut.	7-6-62.
31	Danu.	Kolonel.	Panglima II Kw. I.	17-2-62.
32	E. M. Nawawi.	-	Dan Jon 121.	26-6-62.
33	E. A. Kamaludin.	-	Dan Men 27.	-7-61.
34	Emod H.S.	-	Bupati Istana Djapura.	10-6-62.
35	Enggan.	-	Wakil Bupati.	27-6-62.
36	Endang Mitardo.	-	Kep. Perling./SMK.	-
37	Endut B. Arsad Rosadi.	-	Dan Ki II/527 KP.	20-7-62.
38	E. Rachmat.	-	Dan Ki IX/927	30-6-62.

- 2 -

2	3	4	5
39. Godlin, Al. Bachar.	Major.	Kmd. Res. 21.	20-6-62.
40. Hadjali.	-	KKT/Tehlong.	30-6-62.
41. Hadji, Djamha.	-	Tjabat I/KKT/Tjikatomas.	7-7-62.
42. Hadji, Jusuf, Kawal.	-	Angk. MKU.	-6-62.
43. Hasan Anwar.	-	Penghubung Kahar M.	4-6-62.
44. Harun.	-	Bupati Madja.	19-6-62.
45. Hasanardi.	Bat.	Det. PII. Kandangwesi.	-6-62.
46. H. Zainul Abidin.	Kolonel.	Panglima II Kw 7.	14-6-62.
47. Haidir, B. Masduki.	-	Ass. Res. Tegal/Djateng.	9-7-62.
48. Ido.	-	Kmd. PIC/KK Garut.	-
49. Ikom.	-	Tjabat KKF Waringin.	-
50. Junani.	-	Wadan Jon 927.	21-6-62.
51. Kadar, Permana.	-	Kmd. Res. 81/TA.	5-8-62.
52. Kamal Arifin.	-	Wadan Jon 431/IN.	10-5-62.
53. Kuedinar.	Letnan.	Ks. Staf Jon 121.	26-6-62.
54. Komar.	-	Dan KI I/141.	18-6-62.
55. Kasun.	-	Dan Sektor III.	22-6-62.
56. Kowin.	-	Dan KI 3/27227 KP.	10-5-62.
57. Laksa.	-	Wadan Jon 427.	5-6-62.
58. Idli, Nasuhi.	-	Dan KI 4/527.	2-7-62.
59. Idli, Sumantri.	-	Dan KI 927.	-6-62.
60. Mohamad Rubijat.	-	KSKD/PB/Bupati.	17-6-62.
61. Mubarak.	-	Kmd. III/KK.	1-7-62.
62. M. Hasan.	-	Dan Jon 927/KP.	29-6-62.
63. M. Nugraha.	-	Kmd. I. KK. Tasikmalaja.	1-7-62.
64. Muksin.	-	Dan KI 1/341 IN.	3-5-62.
65. Mardjuki.	Kapten.	KSKD/DB.	26-6-62.
66. Munarip.	-	Wadan Jon 321.	23-6-62.
67. Mubah Bahar.	-	Wadan Jon 507/KK Sumedang.	15-6-62.
68. M. Saleh.	-	Dan KI III/141.	10-6-62.
69. M. Gunawan/Asban Ali.	Major.	Wkl. Dan Men. 81/TA.	13-6-62.
70. Masduki.	-	Dan 3 KDP/Wkl. Res.	27-6-62.
71. M. Udi.	-	Dan Jon 841.	19-6-62.
72. M. I. A.	-	Dan Men. 61.	15-7-62.
73. Mus Effendi.	-	Dan KI	-7-62.
74. Mamad Tatang S.	-	Sekretaris Kw 7.	-3-62.
75. Nudi Surilah.	Kapten.	Dan Jon 681/TA.	18-6-62.
76. O. d. o.	-	Tjabat KKT Tjikalong.	8-7-62.
77. O. Zuhri Mansjur.	Let. Kol.	Kmd. Res. 57.	12-11-61.
78. Respati.	-	Kep. Rumah Angk. SMK.	-5-62.

- 3 -

1	2	3	4	5
79.	Puspandi.	Kapten.	MKU.	15-5-62.
80.	Saeful Bachri.	-	Dan Ki I/827.	5-6-62.
81.	S. Alan.	-	Dan Ki II/927.	9-5-62.
82.	S. n e p.	-	Dan Ki 37.	-6-62.
83.	S. M. Kartosuwirjo.	Plm. Ttg.	Imam.	4-6-62.
84.	Salim.	Wadan Jon	227.	19-6-62.
85.	Supandi.	-	Dan Ki III/827.	7-6-62.
86.	Supardi.	-	Dan Ki II/827.	7-6-62.
87.	S. Maskur.	-	Dan Jon 341/KH.	26-6-62.
88.	Sukana Fachridji.	Kapten.	Kep. Staf. Res. 81/TA.	18-6-62.
89.	Sodikmin.	-	Wadan Ki I/341.	29-6-62.
90.	Saloh.	-	Kmd. Ki 4/441.	4-6-62.
91.	S. Muchtar.	-	Dan Ki Jon 507.	-
92.	Suhafaohrodji.	-	Wkl. Dupati Madja.	10-6-62.
93.	Sjarif Hidayat	-	Res. Mil. Bogor. Kant.	-6-62.
94.	Suhada.	-	KS Jon 527.	-5-62.
95.	Taohmib B.	-	Anak SMK.	-7-62.
96.	Toha Mahfud.	Major.	Wkl. Res. 27.	9-5-62.
97.	Toha Mawardi.	-	Res. Mil. Jakarta.	16-7-62.
98.	Toto.	-	Dan Ki I/141.	21-6-62.
99.	Uhuh.	-	Det PII Garut.	-6-62.
100.	Udjo Mardjono.	-	Dan Jon 241.	-7-62.
101.	U. D. Wiramihardja.	-	Plm 3/Kw I.	29-6-62.
102.	Ules Sudjadi.	-	Ex. Adj. Sanusi P.	-5-62.
103.	Usup	-	Dan Ton 22/441.	11-7-62.
104.	Utom	-	Res. Mil. Bogor Timur.	-9-61.
105.	U. Subarna.	Major.	Dan Jon 587.	23-6-62.
106.	Utji Epang.	-	Dan Jon Men 87.	9-7-62.

A176
Lm

PROKLAMASI
BERDIRINJA
NEGARA ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله
Kami, Ummat Islam bangsa Indonesia

MENJATAKAN:

BERDIRINJA

, NEGARA ISLAM INDONESIA .

Maka hukum yang berlaku di atas Negara Islam Indonesia itu,
ialah:

HUKUM ISLAM .

Allahu Akbar ! Allahu Akbar ! Allahu Akbar !

Maas nama Ummat Islam bangsa Indonesia,
IMAM NEGARA ISLAM INDONESIA:

di Jakarta, Indonesia, 12 Syawal 1421 / 7 Agustus 1949.

Order No Or/28-15

BYLAGE: D.

PROKLAMASI

Berdirinya

NEGARA ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEGAN NAMA ALLAH, JANG MAHA HURAH DAN JANG MAHA ADIL.

اشهد ان لا اله الا الله. واشهد ان محمدا رسول الله

Kami, Umat Islam Bangsa Indonesia,

MENJATAKAN:

BERDIRINYANEGARA ISLAM INDONESIA

Negara hukum yang berlandaskan Negara Islam Indonesia itu,

ialah:

RUKUN ISLAM.

{ ALLAHU AKBAR : ALLAHU AKBAR : ALLAHU AKBAR }

Atas nama Umat Islam Bangsa Indonesia,

NEGARA ISLAM INDONESIAS.M. KARTASOEMIRJO.

Medan, Indonesia, 12 Syawal 1360/7 Agustus 1949.

Order Dg Or/28-16

- 2 -

PENDJELASAN SINGKAT:

1. Alhamdulillah, maka Allah telah berkenan mentjurehkan Kurnia-Nja yang maha-besar, atas Ummat Islam Bangsa Indonesia, ialah: NEGARA KURNIA ALLAH, yang meliputi SELURUH INDONESIA.
2. Negara Kurnia Allah itu adalah "NEGARA ISLAM INDONESIA", atau "DARUL-ISLAM", atau dengan singkatan yang sering dipakai orang "D.I." (ditulis dan dikatakannya "di - la"). Selanjutnya, hanya dipakai satu istilah resmi, ja'ni: NEGARA ISLAM INDONESIA.
3. Sedjak bulan September 1945, pada ketika turunnja Belanda ke/di Indonesia, khusus ke/di Pulau Jawa, atau sebulan kemudian dari-pada Proklamasi berdirinja "Negara Republik Indonesia" maka Revolusi Nasional yang mulai menjala pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, merupakan "PERANG", sehingga SEDJAK MASA ITU SELURUH INDONESIA DIDALAM KEADAAN PERANG.
4. NEGARA ISLAM INDONESIA tumbuh dimasa perang, ditengah-tengah Revolusi Nasional, yang pada akhir kemudiannya, setelah Natcha Ranville dan Ummat Islam Bangsa Indonesia bangun serta berbangkit melawan keganasan pendjadjahan dan perbudakan yang dilakukan oleh Belanda, beralih sifat dan wujudnja, mandjadih Revolusi Islam, atau Perang Suci.
5. ISRA ALLAH, Perang Suci atau Revolusi Islam itu akan berdjalan terus hingga:
 - a. Negara Islam Indonesia berdiri dengan sentausa dan tegak-teguhja, keluar dan kedalam, 100% de facto dan de jure, diseluruh Indonesia;
 - b. Lanjapja segala matjem pendjadjahan dan perbudakan;
 - c. Terusirnja segala musuh Allah, musuh Agama dan musuh Negara, dari Indonesia; dan
 - d. Hukum-hukum Islam berlaku dengan sempurnaja diseluruh Negara Islam Indonesia.
6. Selama itu, Negara Islam Indonesia merupakan: NEGARA ISLAM DIMASA PERANG atau DAR - UL - ISLAM FI VASTIL - MARE.
7. Maka segala hukum yang berlaku dalam masa itu, didalam lingkungan Negara Islam Indonesia, ialah: HUKUM ISLAM DIMASA PERANG.
8. Pada dewasa ini perdjjuangan Kemerdekaan Nasional, yang diusahakan selama hampir bulat 4 (empat) tahun itu, kandaslah sudah.
9. Proklamasi ini disaksikan keseluruh dunia, karena Ummat Islam Bangsa Indonesia berpendapat dan berkepercayaan, bahwa kini sudah lah tiba sa'atnya melakukan SADJIS SUCI yang serupa itu, bagi mandjaga keselamatan Negara Islam Indonesia dan segenap rakyatnja, serta bagi memelihara kesutjian Agama, terutama sekali bagi: MENDLOHIRKAN KE'ADILAN ALLAH DIDUNIA.
10. Semoga Allah membenarkan PROKLAMASI BERDIRINJA NEGARA ISLAM INDONESIA itu, djan adanja.

ISRA ALLAH, AMIN.

BISMILLAH.....ALLAHU AKBAR !

Order No Or/28- 6

BYLAGE: 3.

KATAUN ASASNEGARA ISLAM INDONESIA.

—000—

BISMILLAHIL RAHMANIL RAHIM.Inna fathaha laka fut-har nahina.Muqaddimah.

Sedjak mula partama Umat Islam berdjung, baik sedjak masa kolonial Belanda jang dulu, maupun pada zaman pendudukan Djepang, hingga pada zaman Republik Indonesia, sampai pada saat ini, selama itu mengandung suatu maksud jang satu, menadja suatu arah jang maha, ialah:

"Mentjari dan mendapatkan Mardlotillah, jang merupakan hidup didalam suatu ikatan dunia baru, ja'ni Negara Islam Indonesia jang Merdeka". Dalam masa Umat Islam melakukan wadjiabja jang satu itu, dengan beraneka djalan dan haluan jang diikuti, maka diketamadjulah beberapa djembatan yg. perlu dilintasi ialah djembatan pendudukan Djepang dan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia.

Hampir djuga kaki Umat Islam selesai melalui djembatan emu jang terakhir ini, maka badai baru mendampar baktera Umat Islam hingga keluar dari daerah Republik, terlepas dari tanggung djawab Pemerintah Republik Indonesia.

Alhamdulillah, pasang dan surutnja air digelombang samudra tidak sedikitpun mempengaruhi niat satu jang terkandung dalam tiap kalbu Muslim jang sedjati. Didalam keadaan jang demikian itu, Umat Islam bangkit dan bergerak mengangkat senjata, melanjutkan Revolusi Indonesia, menghadapi musuh, jang senantiasa hanya ingin mendjajah belaka.

Dalam masa Revolusi jang kedua ini, jang karena sifat dan tjeraknja merupakan revolusi Islam, keluar dan kedalam, maka Umat Islam tidak pula lupa kepada wadjiabja membangun dan menggalang suatu Negara Islam jang Merdeka, suatu Keradjaan Allah jang dididhirkannya diatas dunia, ialah sjarat dan tempat untuk mentjapai keselamatan tiap2 manusia dan seluruh Umat, diakhir maupun bathin, didunia hingga disakhirat kelak.

"Irinja dengan tolong dan Kurnia Ilahy, Kanun Asasy jang sementara ini mendjadi pedoman kita, melakukan bakti satu kepada 'Assa wa Djalla, dapatlah mewujudkan amal perbuatan jang njeat, daripada tiap2 warga negara didaerah2 dimana mulai dilaksanakan hukum2 Islam, ialah hukum2 Allah dan Sunnatil Nabi.

Mudah-mudahan Allah S.w.T. melimpahkan taufiq dan hidajat-Nja, serta tolong dan Kurnia-Nja, atas seluruh Negara dan Umat Islam Indonesia, sehingga terdjamilah keselamatan Umat dan Negara daripada tiap2 bencana jang manapun djuga. Amin.

"Laa huna shial Qaro amma wattaqau lafathah.. 'alaih barakatun minnada' i wal- ardi".

Galunggung, 22 Sjamal 1367.
27 Agustus 1948.

Order No Cr/28-7

-- halaman 2 --

BAB I**NEGARA, HUKUM dan Kekuasaan.****Pasal 1.**

1. Negara Islam Indonesia, adalah Negara Kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bangsa Indonesia.
2. Sifat Negara itu Djumhuriyah (Republik).
3. Negara menjamin berlakunya Sjari at Islam didalam kalangan kama Muslimin.
4. Negara memberi keleluasaan kepada pemeluk agama lainnya, didalam melakukan ibadatnya.

Pasal 2.

1. Dasar dan hukum yang berlaku di Negara Islam Indonesia, adalah Islam.
2. Hukum yang tertinggi adalah Qur'an dan Hadits sahih.

Pasal 3.

1. Kekuasaan yang tertinggi membuat hukum, dalam Negara Islam Indonesia, ialah Madjlis Sjuro (Parlemen).
2. Djika keadaan memaksa, hak Madjlis Sjuro boleh beralih kepada Imam dan Dewan Imamah.

BAB II**MADJLIS SJURO.****Pasal 4.**

1. Madjlis Sjuro terdiri atas wakil2 rakyat, ditambah dengan utusan golongan2 menurut aturan yang ditetapkan dengan undang2.
 2. Madjlis Sjuro beradung sedikitnja sekali dalam satu tahun.
 3. Sidang Madjlis Sjuro dianggap sah, djika 2/3 daripada jumlah anggota hadir.
 4. Keputusan Madjlis Sjuro, diambil dengan suara terbanyak.
 5. Djika forum (ketentuan) yang tersebut diatas (Bab II pasal 4 ayat 3) tidak mentjukupi, maka sidang Madjlis Sjuro yang berikutnya harus diadakan selambat-lambatnja 14 hari kemudian daripada sidang tsb.
- Den djika sidang Madjlis Sjuro yang kedua inipun tidak mentjukupi forum diatas (Bab II pasal 4 ayat 3), maka selambat-lambatnja 14 hari kemudian daripadanya harus diadakan lagi sidang Madjlis Sjuro yang ketiga yang dianggap sah, dengan tidak mengingati jumlah anggota yang hadir.

Pasal 5.

Madjlis Sjuro menetapkan KANUN ASASI dan garis2 besar hukum Negara.

BAB III**DEWAN SJURO.****Pasal 6.**

1. Susunan Dewan Sjuro ditetapkan dengan undang2.
2. Dewan Sjuro beradung sedikitnja sekali dalam 3 bulan.
3. Dewan Sjuro itu adalah Badan Pekerja daripada Madjlis Sjuro dan mempunyai tugas kewajibannya:
 - a. menjalankan segala keputusan Madjlis Sjuro,
 - b. melakukan segala sesuatu sebagai wakil Madjlis Sjuro menghadapi Pemerintah, sekiranya yang berkenaan dengan prinsip.

Pasal 7.

Temp2 undang2 mendapat persetujuan Dewan Sjuro.

Pasal 8.

1. Anggota Dewan Sjuro berhak mengajukan rentjana undang2.
2. Djika sesuatu rentjana undang2 tidak mendapat persetujuan Dewan Sjuro, maka rentjana tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam sidang Dewan Sjuro masa itu.
3. Djika rentjana itu meskipun disetujui oleh Dewan Sjuro tidak disahkan oleh Imam, maka rentjana tadi tidak boleh diajukan lagi dalam sidang Dewan Sjuro masa itu.

Order No Or/28-8

-- halaman 3 --

Pasal 9.

1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Imam berhak menetapkan peraturan "emerintah sebagai pengganti undang-undang.
2. Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Sjuro dalam sidang yang berikut.
3. Djika tidak mendapat persetujuan maka peraturan Pemerintah itu harus ditjebat.

B A B IV.KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA.Pasal 10.

Imam Negara Islam Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Konstitusi, sepanjang hukum Islam.

Pasal 11.

1. Imam memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Madjlis Sjuro.
2. Imam menetapkan peraturan Pemerintah, setelah berunding dengan Dewan Islam untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 12.

1. Imam Negara Islam Indonesia ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam dan tha'at kepada Allah dan Rasul-Nya.
2. Imam dipilih oleh Madjlis Sjuro dengan suara paling sedikit 2/3 dari pada seluruh anggota.
3. Djika hingga dua kali berturut-turut dilakukan pemilihan itu, dengan tidak mentjukupi ketentuan diatas (Bab IV pasal 12 ayat 2), maka keputusan diambil menurut suara yang terbanyak dalam pemilihan yang ketiga kalinya.

Pasal 13.

1. Imam melakukan wadjibaja sebagai:
 - a. mentjukupi bai'atnya,
 - b. tiada hal2 yang memaksa, sepanjang hukum Islam.
2. Djika karena sesuatu, Imam berhutang melakukan wadjibaja, maka Imam menunjuk salah seorang anggota Dewan Islam sebagai wakilnya sementara.
3. Didalam hal2 yang memaksa, maka Dewan Islam harus melaksanakannya mengadakan sidang untuk memutuskan wakil Imam sementara, daripada anggota Dewan Islam.

Pasal 14.

Sebelum melakukan wadjibaja, Imam menjatakan bai'at dihadapan Madjlis Sjuro sebagai berikut:

"Bismillahirrahmanirrahim.
Asjhadu an la ilaha illallah, wa Asjhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Wallahi (Demi Allah) !

Saja menjatakan bai'at saja, sebagai Imam Negara Islam Indonesia, dihadapan sidang Madjlis Sjuro ini, dengan iktikad dan outji hati dan tidak karena sesuatu diluar kepentingan Agama dan Negara.
Saja sanggup bernasabah melakukan kewadjiban saja sebagai Imam Negara Islam Indonesia, dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya sepanjang adjeran Agama Islam, bagi kepentingan Agama dan Negara."

Pasal 15.

Imam memegang kekuasaan yang tertinggi atas seluruh Angkatan Perang Negara Islam Indonesia.

Pasal 16.

Imam dengan persetujuan Madjlis Sjuro meniatkan perang, membuat perdamaian dan perdijadian dengan Negara lain.

Pasal 17.

Imam menjatakan keadaan bahaya.
Sjaret2 dan akibat bahaya, ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 18.

1. Imam mengangkat duta dan konsul.
2. Menerima duta Negara lain.

Pasal 19.

Imam memberikan amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi.

Order Lg Or/28 9

— halaman 4 —

Pasal 20.

Islam memberikan gelar, tanda jasa dan lain2 tanda kehormatan.

B A B V.DEWAN FATAWA.Pasal 21.

1. Dewan Fatawa terdiri dari seorang Mufti besar dan beberapa Mufti lainnya, sebanyak-banyaknya 7 orang.
2. Dewan ini berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Islam dan berhak memajukan usul kepada Pemerintah.
3. Angkutan dan pemberhentian anggota2 itu dilakukan oleh Islam.

B A B VI.DEWAN IMAMAH.Pasal 22.

1. Dewan Imamah terdiri dari Imam dan Kepala2 Madjlis.
2. Anggota2 Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Islam.
3. Tiap2 anggota Dewan Imamah bertanggung jawab atas kebaikan ber-lakunya pekerjaan Madjlis yang diserahkan kepadanya.
4. Dewan Imamah bertanggung jawab kepada Islam dan Madjlis Sjuro atas kewajibannya yang diserahkan kepadanya.

B A B VII.PEMBAGIAN DAERAH.Pasal 23.

Pembagian daerah dalam Negara Islam Indonesia ditentukan menurut undang2.

B A B VIII.KEUANGAN.Pasal 24.

1. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap2 tahun dengan undang2.
2. Apabila Dewan Sjuro tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
3. Pajak dikenakan dan diganti dengan infak.
4. Segala infak untuk kepentingan Negara berdasarkan undang-undang.
5. Matjem dan harga mata uang ditetapkan dengan undang2.
6. Hal keuangan Negara selanjutnya diatur dengan undang2.
7. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang2.
8. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Sjuro.

B A B IX.KEHAKIMAN.Pasal 25.

1. Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain2 badan Kehakiman menurut undang2.
2. Susunan dan kekuasaan badan Kehakiman itu diatur dengan undang2.

Pasal 26.

Sjuro2 untuk menjadi dan untuk dipernantikan sebagai Hakim ditetapkan dengan undang2.

B A B X.WARGA NEGARA.Pasal 27.

1. Yang menjadi warga negara ialah orang Indonesia asli dan orang2 bangsa lain yang disahkan dengan undang2 sebagai warga negara.
2. Sjuro2 yang mengenai warga negara ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28.

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemo-

Order No. 10

— b. 10 —

rintisan dan wadji orang-orang dan Pemerintah itu dengan
tindak itu kejuruan.

2. Tiap2 warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan.
3. Pekerjaan dan kedudukan yang penting dan bertanggung jawab didalam
pemerintahan, baik sipil maupun militer, hanya diberikan kepada mas-
lah.

Par 1 29.

Kemerdekaan berefekt dan ... meluhirkan fikiran dengan lisan
dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang2.

B A B XI.

PENGHAJIAN BANGSA.

Par 30.

1. Tiap2 warga negara berhak dan wadji ikut serta dalam usaha pembe-
lauan negara.
2. Tiap2 warga negara yang beragama Islam wadji ikut serta didalam
pertahanan negara.
3. Sjarat2 tentang pembelaan negara diatur dengan undang2.

B A B XII.

PENGHAJIAN.

Par 31.

1. Tiap2 warga negara berhak dan wadji mendapat pengadjaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengadjaran
Islam yang diatur dengan undang2.

B A B XIII.

PARI - KEMUDAHAN.

Par 32.

1. Peri-khidupan dan penghidupan rakyat diatur dengan dasar tolong-
menolong.
2. Tjubang2 produksi yang penting bagi negara, dan yang menguasai ha-
dajat orang banyak, dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rak-
jat.

B A B XIV.

BENDERA dan BAHASA.

Par 33.

Bendara negara Islam Indonesia ialah "Merah-Putih-ber-Bulan-Bintang".
Bahasa negara ialah "Bahasa Indonesia".

B A B XV.

PERUBAHAN KANUN ASASI.

Par 34.

1. Untuk mengubah Kanun Asasi harus sekurang2nja 2/3 daripada jumlah
anggota Majelis Sjaru hadir.
2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang2nja setengah daripada
jumlah seluruh anggota Majelis Sjaru.

Order No Or/28 - II

- halaman 6 -

MASA PERALIHAN.

1. Pada tanggal 17 Januari 1948 dilangsungkan perundingan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda disebuah kapal perang, sehingga perundingan itu terkenal dengan nama "Maakuh Konvillie".
2. Pada tanggal 10 Februari 1948 diulah suatu tempat di daerah Priangan telah dilakukan mesjuwarat diantara Permyin2 Islam yang bertanggungjawab, keputusan mesjuwarat itu ialah:
"Mendirikan suatu Madjlis Islam yang merupakan suatu gerakan nasional dalam kalangan Ummat Islam, bagi melanjutkan perjuangan kemerdekaan dan perjuangan Agama, melaksanakan tji. u2 yang tertinggi, ialah berdirinya Negara Islam yang Merdeka".
3. Pada tanggal 1 Maret 1948 diadakan suatu tempat di daerah Tjirebon dilangsungkan konferensi Jaripada pemimpin2 Islam yang ada di Djawa Barat. Keputusan Konferensi tab. adalah kelanjutan dan perluasan di Priangan, bagi menjempurnakan berlakunya perjuangan Ummat Islam.
4. Pada tanggal 1 hingga 5 Mei 1948, dilangsungkan rapat di salah suatu tempat di daerah pendudukan Belanda, dimana diambil keputusan, bahwa Ummat Islam akan memperjuangkan Agama dan Negeranya dengan tjara praktis sehingga daerah pendudukan Belanda di Djawa sebelah Barat dibagi menjadi 3 tingkatan:
a. Daerah yang masih berlaku kekuasaan Islam de facto 100%, baik politis maupun militer, dimana dengan berangsur-angsur dilakukan hukum Islam.
Didaerah2 yang serupa itu diadakan ketentaraan dan civil berlaku seperti dinagara yang Merdeka, dengan dasar2 Islam (Daerah I).
b. Daerah yang setengahnya terutama politis ada dalam pengaruh Islam, pertahanan Negara ditempat itu belum sempurna (Daerah II).
c. Daerah yang politis dan militer masih ditangan kekuasaan Belanda (Daerah III).
5. Sedjak masa itu, maka perjuangan Ummat Islam Indonesia dengan tjepet meningkat tinggi, terutama sekali karena dengan lahat-lamat daerah I makin hari makin bertambah meluas.
6. Sekarang, tanggal 27 Agustus 1948, sudahlah sampai kepada saatnya menaikkan lagi perjuangan Ummat Islam Indonesia kepada suatu tingkatan yang lebih tinggi, ialah:
"Membentukkan suatu hukum2 yang berlaku di daerah I dengan padaman "Taman Agasy Negara Islam Indonesia".
7. Proses perjuangan Ummat Islam Indonesia yang digambarkan tab. diatas, akan berlangsung terus-menerus, dengan tolong dan karunia Ilahy, sehingga didalam masa yang mendatang tidak lagi ada Daerah II dan Daerah III.
8. Tazmanja, pada saat itu berdirilah Negara Islam yang sempurna, yang mempunyai sjarat dan rukun sebagai Negara; suatu Negara yang Merdeka, disamping Negara2 diseluruh dunia.
"Bismillahi ar-raahman ar-raahim bil hada wadinil haqqi li-judahirah 'alad-dini kullihi walna karimul-musjrikun".

-000-

SCHEMA ORGANISASI AP. N.I.I.

DJAWA BARAT

ACHIR TAHUN 1953.

KOM. TERT. AP. N.I.I.

IMAMUL HUDA - I.H. : SUKARNADJI KARTOSUWIRJO
KEP SU. HMR : SANUSI PARTAWIDJAJADIVISI I/WILAJAH/SURAN KAKHAT
PLM. AGUS ABDULLAH
KS. T. BAKHRIDIVISI VII - HEDU TJOKRO
PLM. AD. TIRTAPRADA
KS. A.Z. ABIDIN

KD. PRIANGAN TIMUR/TJIREBON/KRAWANG.

RES. 41. CHALUD BIN KAHID	1800
KMD. 1. ATENG DJAELANI	760
2. KADAR SOLIHAT	2338
3. D. WIRMAHARDJA	

RES. 21. S.F.	1100
KMD. 1. A. ABDULLAH	250
2. DAZIH	3358
3. A. HAKIEM	

RES. 61. A.A.S.	1200
KMD. 1. HA. SIAFZILAH	340
2. T. MAWARBI	4358
3. Z. MOTTAQIN	

RES. 27. SAPUDJAGAT	2300
KMD. 1. A.Z. ABIDIN	970
2. R. ENOCH	4458
3. RS. M. SAID	

RES. 87. THARIGULHADA	1630
KMD. 1. AS. SUNGKAWA	400
2. U. BUSTOMI	5038

RES. 77.	250
KMD. 1. H. ENGGAR	60
	838

KD. PRIANGAN TIMUR

BH. 241. KALI RASA	200
KMD. R. IBRAHIM	200
	4

KD. TJIREBON

BH. 421. GIRILAJA	400
KMD. ADAMADI - A. KADIR	150
	15

KD. KRAWANG

BH. 161. RUIQ	350
KMD. K. KOMARUDIN	80
	10

KD. PRIANGAN TENGAH

BH. 227. KALI PAKSI	450
KMD. KACHPUD	200
	20

KD. PRIANGAN BARAT

BH. 287. IBNU RAHMAT	500
KMD. OJON HIDAJAT	120
	30

KD. BOGOR

BH. 177. KIASANTANG	250
KMD. A. SANUSI	50
	9

BH. 441. IDHARUL HUDA	450
KMD. M. GHAIR	150
	5

BH. 221. ARJA KEMAHING	300
KMD. Y. UDJANG	?

BH. 261. SURJA MEDAL	300
KMD. H. BAKRI	90
	10

BH. 477. DARMASUMAH	600
KMD. O. Z. MANSJUR	150
	20

BH. 487. ABA	400
KMD. M. HAMZAH	90
	10

BH. 277. GADJAHMUKJANE	?
KMD. H. FARUL	?

BH. 641. WALANGSUNGANG	450
KMD. D. EFFENDI	200
	4

BH. 671. SUNAHUTIPUR	400
KMD. MAKOLIDIN	50
	15

BH. 461. SANDJAJA	350
KMD. AG. MUJAHID	70
	10

BH. 627. BINTANGBULAN	500
KMD. L. MUJAHANA	200
	5

BH. 687. AMIR HAMZAH	350
KMD. H. KOMAR	90
	10

BH. 887. TARIK B. ZAHN	400
KMD. MAKOLIDIN	100
	10

BH. 841. SUNAH KALIDJAGA	500
KMD. SUMARNO	200
	10

BH. STOOT CIE	200
KMD. M. ZAKARIA	100
	8

BH. 727. BERUANGSUMAER	300
KMD. KOSJIM	120
	6

BH. 627. BINTANGBULAN	500
KMD. L. MUJAHANA	200
	5

BH. 687. AMIR HAMZAH	350
KMD. H. KOMAR	90
	10

BH. 887. TARIK B. ZAHN	400
KMD. MAKOLIDIN	100
	10

BH. 827. HARZUMAH	450
KMD. A. SUHADJAT	200
	20

Mendjelang

DUNIA – BARU

DARUL – ISLAM

Atau

NEGARA ISLAM INDONESIA

Dirawaikan

Oleh

HURU- HARA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'Alaikum w.w.!

Sjahdan, dengan ini kami lajangkan sebuah bisikan djiwa perjuangan, djiwa-merdeka, djiwa-revolusioner jang berapi-api, djiwa jang dengan hasrat memperjuangkan kemerdekaan Agamanja, kemerdekaan negaranja, dan kemerdekaan bangsanja.

Alangkah tinggi nilainja seorang mudjahid jang lagi menghadapi wadjib sutji itu!

Kiranja tindjauan selajang pandang itu didjadikan Allah sebagai bakti hamba-Nja kepada Azza wa Djalla, Tuhan semesta 'Alam mumkin ini.

Insja Allah.

Kepada sekalian pembatja jang budiman diharapkan "karena Allah"-nja dalam menemukan sesuatu jang dianggap salah atau keliru, sudi apalah kiranja suka menegor langsung kepada kami.

Sedang djika sebaliknja terdapat kebenaran dan kebaikan didalamnja, hendaklah – karena Allah pula – menjiankan sebanjak mumkin dan seluas mumkin kepada sekalian ra'jat jang ada disekelilingnja.

Dan kepada Allah djua, kami serta sekalian Ummat Islam Bangsa Indonesia berlindung diri.

12 Maulud 1368

Margantara

11 Djanuari 1949

Wassalam,

Huru-Hara

I. TINDJAUAN KEDALAM.

Sedjak mula kemerdekaan Indonesia diproklamlirkan (17 Agustus 1945), maka tiap-tiap golongan, lapisan dan party bangun dan bangkit serentak, mempertahankan dan menggalang negara baru, ialah negara Republik Indonesia.

Dalam pada itu, masing-masing golongan dan party selalu mengandung maksudnja yang tersembunji, ja'ni: idiologi masing2 party atau golongan.

Kalau kaum komunis — yang pada waktu itu merupakan Party Sosialis, Pesindo, Beruang Merah dan lain2 — menganggap, bahwa kemerdekaan Indonesia hanya merupakan tangga menudju "Republik Sovjet di Indonesia", maka dalam kalbu kaum Muslimin selalu tertanam kejakinan yang menjala-njala dan ta' kundjung padam, bahwa kemerdekaan Indonesia hanjalah merupakan "Djembatan mas menudju kearah Darul Islam dan Darus-Salam".

Belum terhitung banyaknya djumlah kaum pengchijanat bangsa dan pendjual Agama, yang pada dewasa itu djuga ikut berdjuaug

Masa itu adalah masa gelap-gulita. Orang ta' dapat membedakan antara pengchijanat bangsa dan djuaug nasional. Tidak pula orang kenal perbedaan antara pemimpin Islam yang tulen dan munafiqin yang palsu, Semuanja itu tertutup dan terliputi oleh 'alam gelap yang tebal, merupakan revolusi nasional yang lagi tengah menggelora itu.

II. BELANDA MELAKUKAN-TIPU MUSLIHAT.

Seinendjak masa pendudukan Djepang tiada berhentinja pihak Belanda melakukan tipu-muslihatnja diseluruh daerah kepulauan kita.

Ribuan agen2 serta mata2 Belanda ditinggalkan disini, ketika mereka meninggalkan Indonesia. Lebih banjak lagi djumlahnja mata-mata serta agen2 yang dikirimkan ke Indonesia. Mereka itu masuk atau dimasukkan dalam kalangan sivil, militer dan berbagai-bagai lapang usaha.

Djuga dimasa Republik telah diperdirikan dan dibangun hingga sampai akhir2 ini, mata2 Belanda itu beralih tempat dan lapangan, dari pemerintah pendudukan Djepang ke pemerintah Republik Indonesia. Itulah sebabnja, maka selama perdjuaugan Revolusi Nasional berlaku, senantiasalah kita merasakan "tarikan tari dari atas", yang maksudnja hendak menghambat dan menekan djalannja revolusi.

Maka tidak mengherankan, bahwa segala ichtiar bangsa Indonesia dalam menuntut kemerdekaannja, terhenti dan kandaslah!

Anasir2 dan kutu2 masjrat yang serupa itu diketemukan dalam tiap2 lapisan masjrat, terutama dalam kalangan militer dan sivil, bahkan sampai ke pusat dan djantungja pemerintah Republik sekalipun.

Oleh karenanja, maka semangat pemerintah pendudukan Djepang terhadap ra'jat — romusha.....

Kalau ra'jat masih keras keras hati dan ingin berontak untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia, maka pemerintah main2 dengan pembangunan negara (staats-opbouw) dan diplomasi ke luar negeri. Kesudahan daripada semuanja itu mendjadi "ratjun revolusi" yang bersifat anti-revolusioner dan reaksioner 100%.

Pemerintah Soekarno, Kabinet Sjahrir dan Kabinet Amir Sjarifuddin harus dan wadjib bertanggung djawab sepenuh-penuhja atas semuanja itu!!!

Tegasnja, Ra'jat tetap revolusioner, tapi pemerintah bersikap dan bertindak kontra-revolusioner. Mereka harus bertanggung djawab dihadapan mahkamah sedjarah Indonesia!!!

Terutama dihadlirat Allah S.w.T.....!!!!

Hendaklah lembaran sedjarah Indonesia yang amatpahit itu kita tjatat baik2 dalam buku ketjil kita agar tersimpan selama-lamnja, bagi persaksian iwajat dunia yang lagi berputar ini.

Pendek-pandjangnja, Belnada berhasil melakukan tipu-dajanja terhadap kepada ra'jat, bahkan djuga kepada Pemerintah Republik Indonesia. Sehingga tidak segan2 dan tidak malu2 lagi Pemerintah Republik sendiri menadjadi alat Belanda dan ikut memasukkan djaring-pendjadjahan di Indonesia.....!!!

Setapak demi setapak, tanah air kita dipotong2 sematjam kueh-kueh, didjual mentah2 kepada sdiurdjana Belanda, tengkulak kapitalis, dan agen imperialis, ialah si-kafir djahanam Belanda.....!!!!

Alangkah murahnya harga kemerdekaan nasional kita ! Sungguh Semuanya itu kita 'alami dan derita dengan pilu hati!

Wahai sekalian golongan pengchijanat, nantikanlah perhitungan atas perbuatanmu!

Alhamdulillah, ra'jat Indonesia telah didjual oleh Pemerintahnya kepada dadjdjal. Seperti tahmidnja Nabi Jusuf a.s. kepada Allah, semasa didjual hidup2 kepada saudagar di Mesir.

III. POLITIK BELANDA.

Seribu satu akal bulus dipergunakan oleh Belanda untuk melangsungkan nafsunja jang hram muthlak itu. Kalau perlu dengan kedjam, kedji, buas atau apapun djuga!

Pada suatu ketika seorang politikus Belanda pernah berkata, bahwa pendjadjahan Belanda di Indonesia terbagi tiga 'anasir: (1) Commerce, (2) Military, dan (3) Religion.

Kalau dikupas dengan ringkas, maka maksudnja Belanda mendjadjah di Indonesia, ialah: untuk memerah (memeras) segala hasil Indonesia bagi kepentingan Belanda, ialah Kapitalisme.

Djadi "commerce" (1) disini bukanlah berarti perdagangan, tapi berma'na "pendjadjahan ekonomi" (economische uitbuiting).

Sepanjang hukum 'alam "struggle for life" (perjuangan hidup), maka haruslah Belanda mempunyai "sapi susu" sematjam indonesia ini, sebab sapi susu jang gemuk itu mendjadi njawanja bangsa dan pemerintah Belanda.

Untuk menjtjukupkan maksud djahat itu, maka mereka berlaku dengan keras dan kedjam dengan alat2 jang merupakan tentara, pemerintahan, polisi dan lain2.

Djadi jang dimaksudkan "military" (2) bukanlah hanya tentara belaka, melainkan segala alat2 dan kelengkapan untuk memerintah dan menguasai sesuatu daerah dengan paksa.

Inilah benih2, jang djika nanti tumbuh dan mendjadi besar akan mewujudkan imperalisme. Rupanja dengan kekuatan alat sendjata itu sadja, sepanjang persaksian riwayat jang njata, tidak djuga ra'jat Indonesia, terutama sekali jang ber Agama Islam, dapat dikalahkan dan dita'lukkan. Oleh sebab itu, maka mereka selalu memakai kata2 manis, laksana manisan lebah, dan senantiasa mempergunakan tipu-muslihat jang lemah lembut, diantaranya: dengan tjara menjiarkan Agama Kristen (Kersteningspolitiek), dengan politik netralisasi dengan dongeng2 palsu, dengan faham2 jang keliru, dengan daja-uapaja memperdjajak Agama Islam dan Ummat Islam. Dengan tjara ini (3), maka lambat laun Agama Islam kehilangan isinja, sehingga 'amal Agama tjukuplah dilakukan hanya sampai dibibir dan I'tikad belaka.

Tetapi..... disamping semua tipu-muslihat Belanda jang amat berbahaya itu, jang diatas hanya kita uraikan dengan sepatah dua patah perkataan sadja, adalah satu sendjata politik Belanda jang amat tadjam, ialah politik "Divide et Impera", politik memetjah-belah dan memerintah, politik memantjing ikan di air jang keruh.....!!!

Selain daripada itu salah satu djalan jang achir2 ini banjak dipergunakannya, ialah politik menjelunduo" (infiltrasi).

Seluruh riwayat Indonesia menjaksikan. Tjobalah kita kupas satu dua peristiwa jang terdjadi achir2 ini:

1. Siapakah gerangan Amir Sjarifussin itu?

Bung Amir berlaga sebagai pahlawan bangsa, sebagai pemimpin negara jang paling ulung.....! Kalau waktu itu hingga ditanda-tangani Naskah Renville, orang tidak sefaham dengan Bung Amir terpaksa tutup mulut, walaupun menurut dokumentasi memang ia agen Belanda.

Disekeliling kita selalu terdpat agen2 ketjil daripada tengkulak Amir jang selalu memasukkan laporan2 kepada "tuannya". Tidak sedikit djumlahnja orang2 jang ditawan, dianiaja, dibui, bahkan dibunuh..... karena tidak setudju dengan Amir dan politiknya jang haram dan berbahaya itu. Met of zonder vorm van proces.....!!!

Wal-hasil, baru beberapa bulan jang lalu Pemerintah Republik tahu dan jakin, bahwa aadalah penghijanat bangsa dan Negra!

Sajang, Bung Karno dan Bung Hatta agak siang bangunnja; sehingga ra'jat dan ncgara mndjadi korban.....!!

Mau tak mau, Pmerintah Republik harus tanggung-djawab dlohir-bathin dalam hal ini!

2. Siapakah gerangan Muso itu?

Mulai zaman kolonial Belanda dulu, meniang Muso masuk golongan penghijanat bangsa ala Belanda, dengan kedok Komunisme. Kalau ingin lebih djelas, periksalah dokumentasi-rahasia tentang Digul.

Rupanja memang kehendak Allah, maka sebelum Muso mati, anak tjutjunja perlu mengetahui, siapakah gerangan dia itu. Dan pada bulan Oktober 1948 jang lalu ternjata, bahwa dibelakang Palu-Arit itu tampaklah bendera Belanda.....!!!

3. Apakah gerangan "negara" pasundan dan "negara" Indonesia Timur.....?

Semuanja itu adalah "negara" binaan – Belanda, "negara-boneka", salah-satu politik untuk menina bobokan bangsa Indonesia, terutama Ummat Islam.

Lagunja amat merdu..... tutur katanja halus2 , naik turun laksana gelombang samudra.tapi semuanja itu mengandung ratjun.

Ratjun djadjahan, ratjun-djahanam, ratjun jang menjorong tiap-tiap pemakannja kerah neraka dunia dan nerak akhirat!

Hai pemimpin rakjat gadungan jang menghamba kepada Belanda!

Hai pemimpin Islam palsu jang beribadah untuk kepentingan si-kafir!

Insallah! Insallah! Insallah!

Ingatlah roda revolusi Islam berputar terus.

Kian hari kian tjepat, hebat dan dasjat!!!! Ingatlah, bahwa segala 'amal-perbuatanmu akan diperhitungkan didunia ini djuga dihadapan malikamah sedjarah. Selain diakhirat kelak, dihadlirat Allah A.w.T.....!!! Kamu hendak membela "negara" Pasundan???!! "Negara" jang tidak berkuasa dan tidak berdaulat; "negara" jang timbul, karena tipu muslihat Belanda.....!!!

Masih banjak lagi bukti-bukti jang menundjukkan tadjamnja "politik Divide et Impera" Belanda, dengan tjara infiltrasi (menjelundup).

Djuga dikalangan 'alaim-'ulama jang masih "buta politik", ada beberapa orang jang mndjadi korban politik Belanda jang amat djhat itu.....!!!

IV. PERANG ANTARA REPUBLIK DENGAN BELANDA

Sudah agak lama kita memperhitungkan, bahwa pada suatu sa'at akan terdjadi pertikaian dan bentrokan, perkelahian dan perang, antara pihak Republik dengan pihak Belanda. Lebih njata lagi, setelah Van Mook minta berhenti dan Beel didjadikan "radja ketjil, jang hendak menguasai seluruh Indonesia.

Kalau Van Mook bagi rakjat Indonesia sudah tjukup litjin dan djahatnja, maka Beel sebagai wakil Party katolik jang reaksioner dan kontra-revolusioner itu akan selekas mumkin mentegakkan ke mentegakkan kedaulatan Belanda di Indonesia, dengan djalan memusnahkan Republik dan mengenjahkan tiap2 anasir jang hendak menolak pendjadjahan.

Tetapi Beel bukan Allah!

Beel bukan malaikat!!!

Beel hanjalah scorang manusia jang ditakdirkan Allah mndjadi anak-tjtu dadjdjal la'natullah!

Alhamdulillah, ramalan dan perhitungan kita itu agaknya dibenarkan Allah kiranja.

Disamping itu, ada peristiwa jang amat mentertjengangkan dan luar daripada dugaan.

Kita tidak sangka, bahwa didalam waktu sehari ramalan pemerintah Republik praktis relah djatuh di tangan musuh.

Walaupun demikian, kita yakin dengan sepenuh2 kejakinan, bahwa perlawanan akan dilakukan terus menerus, hingga sampai..... Wallahu a'alam.

V. NASKAH KETIGA.

Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Belanda ingin memperkosa kedaulatan Republik, dan menurunkannya kepada derajat "neraka boneka", sedjajar dengan "negara2" lain, yang telah dibentuk oleh Belanda, sedjak beberapa waktu yang silam.

Walaupun kita senantiasa berichthar dan berusaha untuk mentegah terdjadnja sebuah naskah Ketiga jg. Serupa itu, tetapi rupanya bahtera Republik akan terhampar pula dipantai yang amat dangkal itu. Adapun djalan satu-satunya untuk mentegah berlangsungnya naskah yang amat djahat itu tiadalah lain, melainkan didaerah Republik harus terus menerus dilakukan perlawanan dan pemberontakan, yang ta' kenal damai dan ta' kundjung padam.

Suatu bukti kenjataan kepada seluruh dunia, bahwa Bangsa Indonesia sungguh2 berdjaja merdeka dan menghendaki kemerdekaan yang sempurna.

Lagi pula api revolusi yang serupa itu menundjukkan kepada mata si-buta, bahwa Indonesia bukan lagi mendjadi "kuda-beban" yang boleh ditunggangi oleh siapapun djuga.

Hai, Pemimpin2 Negara dan Nasional didaerah Republik, terutama Pemimpin2 Islam!

Sungguh berat tanggung-djawabmu terhadap kepada mahkamah sedjarah maupun dihadlirat Allah Yang Maha Esa, atas segala peristiwa yang terdjadi sedjak achir bulan Desember 1948 hingga kini.

Tundjukkanlah, bahwa di Indonesia masih ada pahlawan2 yang sanggup memperdjuangkan kemerdekaan bangsa. Bukan dengan tjerita, tapi dengan bukti yang njata. Tjamkanlah!

VI. PERANG DUNIA KETIGA

Tidak lama lagi kemudian daripada berhentinja Perang Dunia Kedua, maka tampaklah awal tebal meliputi angkasa seluruh dunia.

Disana-sini bisul2 ketjil sudah mulai meletus.....!!!

Api peperangan di Palestina berkobar terus. Dipandang dari sudut kebangsaan merupakan pertentangan antara bangsa Jahudi dan bangsa Arab, sedang dilihat dari dusut Agama, merupakan perang antara Kafir dan Islam.

Tetapi, djika kita suka menjeladjah lebih dalam lagi, maka tampaklah dengan tjongkaknja dua raksasa yang lagi main anggar dari djauh, ialah Blok Rusia (Komunis) dan Blok Inggeris-Amerika (imperialis-kapitalis).

Perang di Tiongkok pun tidak pula berhentinja..... Bahkan pada achir2 ini "perang- saudara" itu berdiri 2 raksasa yang tersebut tadi.

Keributan di Malaka merupakan pemberontakan Komunis melawan Imperialis-Kapitalis.

Junani, Viet Nam tidak pula sepi dari huru-hara.....!!!

Bahkan di daerah Republik yang amat terkenal "Ijinta-damai" itu, mulai bulan September 1948 tidak djuga mau ketinggalan.

Kangmas Muso naik panggung di Madiun dab bikin lakon "republik sovjet di Madiun" selama sepuluh hari sepuluh malam..... Kemudian tammat.

Peristiwa di Madiun itu merupakan pertentangan antara Blok Komunis dan Blok Islam-Nasionalis.

Belum djuga soal itu selesai, maka Belanda sudah memulaikan "aksi polisionilnja" yang kedua dengan serbuan besar-besaran kedacrah Republik (18/19 Desember 1948).

Semestinja itu, soal Berlin belum djuga terurai.....Bahkan rupanya lebih mendjadi sukar dan sulit, serta tetap hangat dan amat mengandung bahaya, yang tiap-tiap sa'at bisa meledak!

Pihak Komunis (Rusia) dab Blok Kapitalis-Imperialis (Inggeris-Amerika) masing2 keras kepala dan tidak mau mengalah. Mereka itu masing2 sudah siap sedia. Latihan angkatan udara, angkatan laut dan angkatan darat (manouvre), dilakukan untuk memperlihatkan kekuatan dan kekuasaannja, dihadapan mata musuhnja.....!

walaupun hanya sebagai pembantu dan pelajan (kenek) daripada keradjaan2 besar, ialah: Inggeris dan Amerika.

Kalau Belanda ikut serta dalam peperangan yang akan datang, maka mau atau tidak mau tenaga kekuatannya, politis dan militer, harus dibagi dua. Sebagian menghadapi Eropah – ialah perang dunia langsung – dan sebagian menghadapi segala matjam kemungkinan di Indonesia – ialah : perang kolonial, pemberontakan, revolusi, perusahan dll. –

Selain daripada itu, politici dan tentara yang akan dikirimkan ke Eropah itu, nistajalah bukan politici “odion” dan tentara “sinjo2 Kemajoran”, “ouweheren” (invaliden) yang sudah bernapas “senin-kemis”, tetapi politici yang patut memperjuangkan negara di medan gelanggang internasional dan tentara yang tjukup kuat, sepanjang ukuran internasional (internasional minded).

Sehingga untuk mengendalikan “kuda-beban” Indonesia, begitulah istilah Belanda kolonial, tjukuplah kiranya dengan “kusir kelas dua”, sinjo2 Kemajoran yang nakal atau oleh tukang2 sja’ir dan penjanji-penjanji yang melagukan “Indonesia Srikat”, yang tetap “terapung ta’ hanjut, terendam ta’ basah”.

Zaman Perang Dunia Pertama lagu2 sematjam itu masih laku dan Idenburg sebagai “kapelmeester” (GG) boleh mendapat nama untuk ketjakapannya mendjadjah dengan tjara amat halus sekali.

Pada waktu itu, bila orang ingin naik pangkat, “ibarat beli “pisang-goreng” dipasar malam dan kalau hendak menjari uang, seperti mengambil air dari laut

Wal hasil, Pemerintah Hindia –Belanda pada waktu seakan2 tampak seperti widadari didunia, menampakkan kasih sajangnya atas hamba rakjat Indonesia

Perang Dunia Pertama selesailah sudah; tonil dunia menutup lajarnya.....!!!! Lagu2 diperhentikan..... Dunia sunji-senja.....”Tangan besi datang.....!!!!

Waktu permainan sudah selesai, barulah rakjat dan pemimpin rakjat sadar bahwa Belanda menipu mereka dengan pangkat, uang, duurtetoeslag, volksraad, November-beloofte dan lain2 “omong kosong” lagi.

Tetapi sudah terlambat.

Sekali ditipu, sudahlah tjukup kiranya.

Ketika Perang Dunia kedua bukan Belanda yang menipu rakjat, melainkan Djepang.

Selama datu dua bulan sikapnya Djepang di Indonesia laksana “malaikat penolong” yang hendak membantu dan memerdekakan Bangsa Indonesia. Tapi setelah Belanda tekuk-lutut, maka dengan segera Bangsa Indonesia dilutjuti djuga.....!!!!

Dilutjuti dalam erti kata “politis”, tegasnya :semua pergerakan politik dibubarkan. Dengan itu kesadaran politik, kesadaran bernegara, kesadaran menjari kemerdekaan lenyap-musnah, ibarat debu ditiup angin.....!

Dilutjuti dalam erti kata “Agama” (religieus), pada waktu rakjat Indonesia harus pindah daripada kesutjian Wahdaniyah (berbakti kepada Allah) kepada penjembahan berhala (Sjirik) dan kepada manusia yang diperdewakan.

Begitulah pelutjutan selanjutnya.

Djadi, dalam Perang Dunia Kedua, kita pun ditipu pula buat kedua kalinya oleh suatu bangsa, yang menamakan dirinya “saudara-tua”.....!!!!

Sekarang kita mendjelang Perang Dunia Ketiga.

Belanda sudah mulai gelisah, ia ingin menyelesaikan soal Indonesia secepat mungkin. Indonesia didjadjah kembali, walaupun dengan bentuk dan bangun yang agak modern.....!

Djdjahan baru, mempunyai bentuk istimewa, agak ke-demokrasi-demokrasian.....!

Merdeka, tetapi tidak berdaulat.....!

Kuasa, tetapi tidak mempunyai tentara.....!

Sekarang apa yang hendak diperbuat oleh Belanda?

Waktu petjah revolusi pertama (17 Agustus 1945), hingga “aksi-polisionil” pertama (21 Djuli 1947), korban Belanda amat sedikit sekali, djika di-bandingkan dengan hasilnya, sepanjang Naskah Linggardjati.

Sedjak “aksi polisionil” pertama hingga Naskah Renville (17 Djanuari 1948) hampir2 tidak ada korban dipihak Belanda.

Sungguh amat murah harganya: negara dan rakyat Indonesia!

Tetapi sesudah itu, timbullah perlaanan dari Ummat Islam, tampaknya "ketjil", lunak dan tidak berdaja, tetapi barangkali Djendral Spoor sendiri terperandjat, djika ia memerikas Stamboek tentaranja dan gudang2 mesiuja serta alat2 perlengkapannya.....!!!

Berapakah djumlah serdadu Belanda jang sudah dikirim langsung keneraka???

Berapa djumlah peluru meriam, mortir, senapan dll. Jang sudah dihambur-hamburkan diangkasa.....???

Wal-hasil, seluruh tenaga Belanda dikerahkan. Tentara Darat dan Udara dipersatukan, untuk membasmi Tentara islam dan Pemimpin2 Islam.

Tiap2 kali dilakukan siasat itu (model benteng stelsel), dengan dibantu oleh serangan udara dan meriam. Alhamdulillah, selalu gagal. Bukan karena kepandaian Pemimpin2 Islam menghilang; lenjap dari pandangan musuh.

Bukan pula karena ketjakapan dan ketangkasan Tentara Islam melakukan pertempuran, tetapi segala kemenangan Islam dan terpeliharanya Pemimpin2 Islam hanjalah karena Tolong, Perlindungan dan Kurnia Allah semata2.

Lepas daripada tiap2 ichtijar dan usaha manusia!

Apa amksudnja Belanda menapis tenaganja?

Tiada lain, melainkan hanjalah untuk mengedjar waktu.

Agar supaja, bilamana setiap detik Perang Dunia Ketiga petjah, maka segala urusan jang berhubungan dengan Indonesia sudahlah selesai, dalam erti kata: Pemberontakan telah dibasmi sampai akar-akarnja, Republik Indonesia diserbu sampai habis, danNegara Indonesia Srikat itu akan berdiri dengan megah tjongkaknja, serta subur dan ma'murnja, dibawah lindungan Bendera Belanda.....

Tetapi, apa katanja? Segala usaha itu, insja Allah tidak akan berhasil, sebagaimana jang diharapkan-harapannja, bahkan sebaliknya!

Maka orang tidak boleh lagi heran, djika Van Mook minta berhenti.....

Rupanja "sopir" ini dianggap terlalu hati2 dalam mengendarai alat2 dan pesawatnja.

Kemudian Beel maju kedepan..... Pegang "Stuur", banting kanan banting kiri , tubruk sana Tubruk sinidan Beel dengan seluruh kesadarannja akan terpelanting dan bunuh diri, terkubur kedalam debu revolusi Islam, jang kian hari kian bertambah meluas dan menghebat, di seluruh pendjuru Indonesia.

Alhamdulillah! Belanda salah faaham dan keliru menghitung.....!

Rupanja memang sudaah mendjadi nasibnja, bahwa Belanda harus dikubur di Indonesia dan Negara Belanda akan hilang musna dari peta dunia!

Mudah-mudahan ! Insja Allah!

Kalau Beel dengan kawannja tidak sengadja menutup matanja menjumbat telingannja, saja pun ingin sekali memberi pertimbangan kepada bangsa Belanda agar supaja selamat, lepas dari bahaya hantjur lebur dan tumpur sama sekali, lenjap dari riwayat dunia dimasa jang akan datang.

Adapun djalan selmat untuk Bangsa dan Pemerintah Belanda adalah 3 (tiga) bagai:

1. belanda harus masuk Islam, hidup dengan aman dan sentausa dibawah Merah-Putih-ber-Bulan Bintang.
2. Belanda harus berhenti mendjadi kafir harbi (kafir jang memerangi Islam, sehingga wadjib diperangi oleh Islam), melainkan mendjadi kafir dzimi, ialah kafir jang hidup dengan djaminan keselamatan dari negara Islam, dengan perlindungan Pemerintah Negara Islam.
3. Kalau salah satu daripada dua djalan itu tidak dapat masuk dalam otaknja bangsa Belanda jang sudah "mata-gelap" itu, maka saja pertimbangkan: baiklah lekas2 pulang ke negeri Belanda atau bersedia dibasmi oleh Tentara Allah, Tentara Islam.

Saja njatakan semuanya itu terus terang, kalau2 masih ada orang diantara bangsa Belanda jang bertanggung djawab atas keselamatan negeri dan bangsanja, dan amsih schat pikirannja serta masih terbuka mata-hatinja.

Wallahu a'lam!

Tersilah!

IX. PERANG SAUDARA

Didalam riwayat dunia, djuga didalam riwayat Indonesia, hal "perang saudara" bukanlah barang sesuatu jang aneh.

Melainkan hal itu masuk pula salah satu peristiwa jang boleh terdjadi disetiap masa dan lingkungan tiap2 bangsa.

Adapun sebab-musababnja amat berbagai-bagai sekali. Adakalanya karena tachtu atau harta dunia dan kemegahan2 dunia, dalam ma'na dahriyah (materialistis). Sebaliknja, dalam abad ke-20 ini, atjap kali timbul perang saudara karena perbedaan ideologi, perbedaan tjita2, perbedaan kejakinan dan djuga perbedaan Agama.

Beberapa tahun j.l., kita masih ingat, bahwa Spanyol menjadi medan pertempuran, antara Komunis dan Fasisisme (Nazi).

Tiongkok dipakai lapang latihan adu tenaga diantar pihak Komunis (jang dibantu oleh Russia) dan pihak Nasional (jang dibantu oleh Amerika).

Hindustan selama beberapa tahun dipergunakan oleh Inggeris sebagai lapang pertentangan antara Hindu dan Islam (hasil daripada politik "divide et impera" dari Inggeris), Jerusalem dipakai lapang pertempuran antara Bangsa Jahudi dan Bangsa Arab jang pada hakekatnja adalah perang tanding perniagaan antara "djago" Russia dan "djago" Inggeris - Amerika. Bahkan Republik pun pada beberapa bulan j.l., dibuat lapang adu-tenaga antara Komunis jang diperalat oleh Belanda dan dipimpin oleh agen Russia, melawan pemerintah Republik (Gabungan Nasional- Islam). Selain daripada itu., ditengah2 masjrakat kita sendiri didaerah2 pendudukan Belanda, sedjak mula petjah revolusi Islam tampak benih2 perang saudara itu. Didaerah pendudukan Belanda, pihak "sajap-Kiri" terang2an mendjelma menjadi alat Belanda, seperti C.P., M.P., mata2, penunjuk djalan dll, sehingga sejjalan dan sebulu dengan Belanda.

Sedang didaerah Republik, sebelum penjerbuan Belanda, "sajap-Kiri" seolah2 menampakkan dirinya sebagai golongan jang tersendiri. Padahal sesungguhnya mereka itu alat Belanda djuga.

Djadi, perang saudara tidak hanya mungkin terdjadi melainkan sudah mulai berlaku ditengah2 masjrakat kita. Malah, djika Perang Dunia Ketiga atau revolusi dunia itu meletus, maka agaknya perang saudara itu akan lebih menghebat daripada jang sudah2.

Dengan keterangan singkat itu, sudahlah kita mengerti, bahwa perang jang akan datang itu tidak hanya mewujudkan perang totaliter antara negara dengan negara, tetapi djuga antara golongan dengan golongan, antara ideologi dengan ideologi, hampir didalam tiap2 negara diseluruh dunia.

X. PERANG SEGI-TIGA

Dengan keterangan jang tertera di atas, maka mudalah kita memfahamkan, bahwa bersamaan dengan waktu meletusnya perang dunia dan revolusi dunia itu akan terdjadi pula perang segi-tiga, ialah perang ideologi atau perang Brata Juda Djaja Binangun, perang habis-habisan.

Sjahkan, maka asas dan dasr ideologi manusia pad garis besarnya hanya terbagi dua bagian.

Pertama: Kejakinan dahriyah (materialisme), ialah sandaran dan dasar dari tiap2 orang jang tidak bertuhan.

Dalam hal ini, maka dasarnya Komunisme, demokrasi, sosialisme dan imperialisme dll. Isme jang serupa itu, sama dan tidak berbeda.

Oleh sebab itu, maka sewaktu2 menghadapi kepentingan jang sama, terutam asekali bila menghadapi musuh bersama, maka komunisme dan kapitalisme, sosialisme dan imperialisme, mereka itu dapatlah bergaul dan berdjabatan tangan, bahkan berdjuaung bersama2 bagaikan saudara kandung.

Tetapi kalau sewaktu2 kepentingan bersama dan musuh berasama itu lenjap, maka pada waktu itu pulalah timbul persaingan, permusuhan dan pertikaian. Ditilik daripada sudut ini, maka tidak mengherankan, djika dimasa mendatang blok Komunis (Russia) dan blok demokrasi alias Imperialis-

Kapitalis (Inggeris, Anerikaa dan sekutunja), akan bertemu di medan peperangan sebagai musuh dan lawan jang ta'kenal damai.

Kedua: Kepertjajaan ke-Tuhanan (Agama) dengan dasar kesutjian, hendaknja diarahkan kepada maksud dan tudjuan jang sutji pula, baik dalam pandangan Allah maupun dalam pandangan manusia. Tetapi kita djangan lupa, bahwa didalam perdjalanannya riwayat manusia dan tarich Agama, kita ketemukan beberapa kegandjilan. Umpamanja, bahwa pada suatu masa oleh desakan suatu keadaan, Agama mendjadi "alat" negara ta'luk kepada nafsu manusia, dan ingkar daripada djalan jang semula. Satu mitsal : Agama Kristen sedjak mula beberapa abda lamanja mendjadi alat imperialis dan perkakas kapitalis. Sehingga Agama itu tidak lagi murni, bahkan mendjadi alat tipu-daja dan alat tipu-muslihat, bagi kepentingan sesuatu golongan manusia.

Penjakit jang serupa itu pun hampir2 menghinggapi Agama Islam.

Tapi untung, alhamdulillah, pedoman2 Agama Islam tetap dan tentu, tidak dapat diubah2 oleh nafsu manusia, dan pada hakekatnja hanya karena perilaku Allah semata2lah, maka Agama Islam tetap dalam kesutjiannya semula.

XI WADJIBNJA LAHIR KE'ADILAN ALLAH

Maka aliran Agama jang masih tetap asli-murni todak lain, melainkan hanya aliran Agama Islam sadjalah. Di dalam pertentangan dan peperangan jang menghebat dab mendahsjat antara blok Russia dan blok Amerika, maka blok Islam seakan2 terdjepit ditengah2nja, laksana si-pelanduk jang ketjil terdjepit ditengah2 pertempuran antara "Beruang-Merah dan "Singa-Raksasa"

Kita tidak chawatir, bahwa blok Islam tidak akan lapang. Sebab selainnja kita pertjaja dengan sepenuh2 kepertjajaan, bahwa Allah akan mendlohrkan Ke'adilanNja dan mentegakkan Agama-Nja serta membangkitkan KeradjaanNja, pun kita mempunjai banjak peladjaran sedjarah Agama. Dimana Keradjaan Rum dan Parsi berperang mati2-an berebut-rebutan lapang djadjahan jang luas bagi kepentingan masing2, maka geraknja Agama Islam massih terbatas di Djaziratul-'Arab, menghadapi serangan Quraisj Kafirin dan munafiqin jang chijanat. Djika nisbat itu boleh kita pakai, maka gambarannya adalah sebagai berikut:

Rum nisbat Amerika, Inggeris dan sekutunja.

Persi nisbat Rusia dan kawan2nja.

Quraisj kafirin nisbat Belanda djahannam,

Munafiqin chijanat nisbat Sjap kiri dan komplotannya.

Oleh sebab itu, maka kita tidak usah memikirkan, betapa duduknja perkara dan 'akibatnja peperangan antara Rum dan Parsi. Djuga sementara itu rupanja belum ada sikap apa2 terhadap kepada Rum dan Persi: "Ikut salah satu, menentang, atau netral". Itu urusan nanti! Urusan kemudian! Bukan urusan sekarang!

Apa jang perlu sekarang? Kita tjuma perlu menghadapi Quraisj kafirin alias Belanda dan alat2nja. Dan disamping itu kita boleh menggunakan beberpa tenaga untuk menghadapi kaum mudzabdzab alias kaum munafiqin jang chijanat, dalam pandangan Ideologi dan Agama.

Bilaman dengan Tolong Tuhan lekas didapat penjelesaian kedalam – Ad-Daulat-ul-Islamiyah bulat 100% – maka keluar ("de facto" maupun "de jure" dalam pandangan internasional) rupanja agak mudah. Sementara itu , kedua raksasa jang sedikit waktu lagi akan mulai adu tenaga itu akan sampai kepada batas kelemahan jang serendah-rendahnja.

XII SA'AT.

Maka pada sa'at itulah kiranja Allah akan menurunkan Kurnia-Nja dan menentukan nasibnja tiap2 Urumat dan Bangsa. Pada waktu itu rakjat Indonesia, Ummat Islam bangsa Indonesia, mempunjai kesempatan jang seluas-luasnja naik sampai ke tingkatan jang setinggi-tingginja, baik dalam pandangan Allah maupun dalam pandangan manusia.

Insja Allah.

Sebaliknja, pada waktu itu kita menderita nasib-malang, djatuh dalam lembah kehinaan dan kesengsaraan dlohir dan batin, hingga terdampar didalamnja neraka djahanam, neraka dunia dan neraka acherat.

Na'udzu billahi min dzalik.

XIII. KEWADJIBAN UMMAT ISLAM INDONESIA

1. Tiada tudjuan hidup jang paling mulia, melainkan djika Allah menjampai kita kepada mardlotillah.
2. Tiada djalan untuk mentjari dan mendapatkan Mardlotillah itu, ketjuali djika kita dapat menerima Kurnia Tuhan, berwudjudkan:

“KERADJAAAN ALLAH DI DUNIA”

Adapun sifat2nja ialah:

- a. Kemerdekaan Agama;
 - b. Kemerdekaan Negara ;
 - c. Kemerdekaan Bangsa dan Ummat,
3. Bagi mentjapai Kurnia Tuhan jang merupakan kemerdekaan sedjati itu, sependjang adjaran Kitabullah dan Sunnah nabi, tidaklah tjukup dengan melakukan diplomasi dan menantikan belas-kasihan daripada golongan lain atau bangsa lain (internasional), tetapi harus ditjapai dengan tenaga sendiri dan usaha sendiri.
 4. Oleh sebab itu, maka diletakkanlah atas pundak tiap2 Muslim suatu wadjib-sutji, wadjib djihad fi sabilillah.
 5. Dihihad dalam ma'na qital, perang maati2an mengenjahkan musuh Agama, musuh Negara, musuh Islam, musuh Allah.
Sebab, selama masih ada pendjadjahan, serakah dan angkara murka, maka selama itu, kemerdekaan sedjati tidak akan tertjapai dan selama itu pula tiap Muslim jang mukallaf menanggung dosa jang sebesar2nja.
 6. Djidad itu merupakan perang, revolusi atau pemberontakan. Tapi oleh karena kewadjiban sutji itu mendjadi tanggungan tiap2 Muslim, maka perang sutji itu, merupakan perang rakjat seluruhnja, atau perang totaliter.

Oleh sebab itu, hai rakjat bangsa Indonesia seluruhnja, terutama Ummat Islam! Persiapkanlah dirimu untuk menghadapi wadjib sutji itu! Ketahuilah, bahwa lebih baik mati dalam Islam (sjahid) daripada hidup dalam kekufuran (didjadjah oleh siapapun djuga)!

Siapkanlah tenaga, harta dan djiwa untuk membela Agama, untuk menegakkan Kalimatillah (li I'lai Kalimatillah)!

Persediakanlah segala alat apapun djuga untuk membasmi musuh dan mematahkan sajak2 musuh! Haramkanlah segala harta benda , fikiran, tenaga dan djiwa kita jang dapat memberi kekuatan bagi musuh, baik dlohir maupun bathin!

Adakan blokadde politik, ekonomi dan lain2 sebagainya, untuk memerah (memeras) darah musuh!

XIV. PENUTUP

Kiranjajukuplah sudah, rawaian ringkai termaktub diatas, sekadar untuk memberi gambaran ata perdjalanann riwayat Ummat Islam bangsa Indonesia dihari2 jang mendatang.

Hendaklah mulai s'at ini kita sekalian suka siap sedia dan memperlengkapkan segala sesuatu untuk mendjadi sjarat akan turunnja Kurnia Tuhan, berwudjudkan Keradjaan Allah di dunia ini, atau dengan kata2 lain : “Lahirnja Negara Islam Indonesia”.

Dalam pada itu, kita yakin pula, bahwa turunnja Kurnia Ilahy dan lahirnja Keradjaan Allah itu, insja Allah akan terdjadi di tengah2 revolusi dunia, ditengah2 Perang Dunia Ketiga jang akan datang. Tiada scorang baji jang lahir, ketjuali dengan tjurahan darah!!!

Pun tiada pula Ke'adilan Tuhan diturunkan di dunia melainkan dalam waktu jang amat dahsjat dan hebat. Maka pada waktu itulah Allah memperhitungkan tiap 'amal manusia dan 'amal sesuatu bangsa. Njatalah sudah, bahwa untuk menumbuhkan dunia baru maupun membarukan dunia lama diperlukan adanya perang dunia dan revolusi dunia.

Achirulkalan! maka untuk mentjukupkan dan melengkapi pemandangan ringkas ini, perlulah kiranya disudahi dengan peringatan2:

1. Bahwa kita tidak boleh hanja menanti – nantikan sa'at itu, bahkan sebaliknja.
2. Bahwa mulai sa'at ini djuga kita mempersiapkan masjarakat dan Negar kita untuk melakukan Perang Totaliter, Perang Rakjat seluruhnja, sesuai dengan Ma'lumat Imam Negara Islam Indonesia dan perintah2 daripada Pemimpin2 Negara Islam Indonesia.
Walhamdu lillahi rabbil-'alamin

Wallahu a'lam biccawab.

Sumber : Pedoman Dharma Bakti, Djilid III, hlm. 2-26

**KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA
NEGARA ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohmanirohiim

Wa idza hakamtum bainannasi an tahkumu bil 'ad li

Bismillaahirrohmanirrohiim

TUNTUNAN NO. 1

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Wa idza hakamtum bainannasi an tahkumu bil'adli

Artinja

Djika kamu mendjatuhkan hukuman diantara manusia (masarakat), maka sesuaikanlah dengan hukuman jang adil.

Artinja adil itu, ialah hukum-hukum yang sesuai dengan Al-qur'an dan hadist shahih.

TUNTUNAN NO. II

"STRAF - RECH"

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Wa idza hakamtum bainannasi an tahkumu bil'adli

BAB I

Fatsal 1

Negara Indonesia

1. Negara Indonesia adalah Negara Islam Indonesia.
2. Negara Islam Indonesia pada waktu ini (tahun 1949, sampai.....) ada dalam masa perang.
3. Segala hukum-hukum Negara pada waktu ini hendaklah disesuaikan dengan hukum Sjariat Islam dalam masa perang.

Fatsal 2

Hukum Islam dalam Masa Perang

1. Barang siapa tidak tunduk pada peraturan Pemerintah Negara Islam Indonesia adalah BUGHOT.
2. Barang siapa telah kedatangan dakwah (pencerangan) dari Pemerintah Negara Islam Indonesia, kemudian ia baik ke sini, bagus ke sana, adalah ia hukumnja MUNAFIQ.
3. Barang siapa yang mendjadi alat pendjadjah (musuh) baik jang mendjadi civil, Pegawai militer maupun hanja membantu sadja (ketjual orang2 yang mendjadi infiltratie dari kita) seperti mata2, hukumnja ia musuh Negara.
4. Barang siapa jang mengaku mendjadi Umat Islam, kemudian tidak mendjalankan Hukum2 sjari'at Islam jg. telah maklum. Hukumnya ia FASIQ.
5. Di dalam masa perang dalam Negara Islam Indonesia, hanja ada dua golongan ummat, ialah :
 1. Umat (ra'jat) Negara Islam (Ummat Muslimin), dan
 2. Umat (ra'jat) pendjadjah (Ummat Kafirin)

Fatsal 3

Penetapan Hukum

1. Barang siapa jang mendjalankan jang tersebut dalam Bab I, fatsal 2, ayat 1, setelah Da'wah (Penerangan, adjakan) telah sampai kepada mercka, didjatuhkan Hukuman BERAT (Hukum dibuang atau mati). Menurut Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 58.
2. Barang siapa mengerdjakan perbuatan jang termaktub dalam Bab. I ,fatsal 2, ayat 2 didjatuhkan hukuman Berat (Hukum mati). Menurut Al-qur'an surat Al-Muntahinah ayat 1, dan surat At-Taubat ayat 73, dan surat At-Tachriem ayat 9.
3. Barang siapa jang mendjalankan jang termaktub dalam Bab. I, fatsal 2 , ayat 3, didjatuhkan Hukuman: Diperintah taubat (disuruh mendjalankan agama dg. sempurna). Apabila ia tidak mau tunduk, didjatuhkan Hukuman musuh Negara.

4. Barang siapa mengerdjakan pekerdjaan tersebut dalam Bab. I, fatsal 2 , ajat 4 hukunnja dibagi dua:
 - a. Orang jang membantu Pendjadjah (musuh), seperti Rekkomba atau sebagainja, ia harus diperiksa apabila ia tidak menguntungkan kepada Negara Islam Indonesia, Hukunnja: harus disuruh keluar dari pekerdjaannya. Apabila ia tidak menguntungkan kepada kita dan tak mau keluar dari pekerdjaannya (tidak mau meninggalkan pekerdjaannya), didjatohkan hukuman : ia mendjadi Musuli Negara.
 - b. Orang yang mendjadi mata2 militer pendjadjah (musuh), didjatohkan hukuman Berat : di hukum mati. Menurut Al-Qura'an surat An-Nisaa ajat 89.

TUNTUNAN NO. III

"STRAF - RECH"

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Wa idza hakamtum bainannaasi tahkumu bila'dli

BAB I atau II

Fatsal

Djihad

Hukum djihad dibagi mendjadi lima:

1. Hukum perang
2. Hukum jang diperangi
3. Hukum tangkapan (boleh ditangkap)
4. Hukum bolch mundur waktu perang; dan
5. Hukum tawanan (jang boleh ditawan)

Fatsal 2

Hukum Perang

1. Hukum perang pada masa ini (tahun 1949 sampai....) adalah fadlu 'ain. Menurut Al-Qur'an surat Al-Baqarah ajat 216
2. Orang jang diperbolehkan tidak mengikuti perang ialah karena sebab2:
 - a. Karena buta;
 - b. Karena pintjang ;
 - c. Karena sakit;
 - d. Karena tidak mempunjai kekuatan (lemah);
 - e. Karena mempunjai penjakit menular;
 Menurut Al-Qur'an surat At- taubah ajat 91.

Fatsal 3

Orang jang harus diperangi

Orang jang harus diperangi adalah :

1. Orang jang musrik (ber-Tuhan selain Allah);
2. Orang jang melanggar bai'at (inuharrab);
3. Orang jang tak mengharamkan barang jang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nja (agama) dengan keterangan yang njata (dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 29).
4. Orang yang tak mengerti agama yang sebenarnja (agama Islam);
5. Orang yang munafik (orang jang merintangi berlakunja agama Islam dengan berkedok Islam); Menurut Al-Qur'an surat At-Taubah ajat 12;
6. Orang yang bughat , ialah orang jang tak mau taat kepada Imam dengan alasan pendapat akal sendiri membatalkan yang haq, jang keluar dari Imam dengan djalan sangka-sangka .Orang

itu mempunyai kekuatan dan pengaruh di belakangnya, dan ia menolak Imam setelah ditetapkan oleh rakyat negara.

7. Quthitha-u'th-thariq (penyamun) ialah orang yang merampok dengan kawan-kawan.

Fatsal 4

Orang yang Boleh Ditangkap

1. Orang yang mendjalankan propaganda luar Agama Islam
2. Orang yang mendjalankan propaganda merusak keamanan, ketertiban dan kesedjahteraan negara;
3. Orang yang mengatjau dan mengetarkan rakyat;
4. Orang yang memberi kekuatan pada musuh (yang berbagai rupa pekerjaan), ketjuali yang menjadi alat kita dengan disertai keterangan yang sah;
5. Orang yang menurut penyelidikan yang seksama ditjuri akan membahayakan negara menurut penyelidikan yang seksama.

Menurut hadist yang diriwayatkan oleh S. Anas (dalam kitab Subulussalam Bab Muhadana Hadits No. 7)

Fatsal 5

Orang yang Boleh Mundur

1. Waktu perang kalah siasat oleh musuh, ia akan melebarkan siasatnya;
2. Kalah kekuatan oleh musuh ;
3. Boleh mundur karena mengingat kemashlahatan umum; Menurut Al- Qur'an surat Al-Anfal ayat 15 dan 16. Menurut Ushul Fiqh: Daf 'ul Mafasid, muqaddamun'ala djalbil mashalih.
4. Ukuran tandingan dalam Umat Islam dengan kafirin menurut ajaran dalam Al- Qur'an surat Al-Anfal ayat 65 dan 66 demikian:
 - a. Bila kekuatan itu perimbangannya 1 lawan 10
 - b. Bila tidak, kekuatannya 1 lawan 2.

Fatsal 6

Orang yang Boleh Ditahan

1. Orang yang mengikut bersama-sama dengan musuh, akan tetapi ia mempunyai niat akan melawan kepada kita.
2. Orang yang mempunyai siasat (taktik dan politik) akan melemahkan kekuatan Islam.

BAB II atau III

Fatsal 7

Penetapan Hukum

1. Barang siapa melanggar Bab I, Fatsal 2, ayat 3, didjatuhi hukuman:
 - a. Ditangkap;
 - b. Diberi pengajaran;
 - c. Diberi perintah yang sepadan dengan keadaannya;
 - d. Jika membantah didjatuhi hukuman berat: Dibuang atau hukum mati
2. Orang yang kaja melanggar Bab I, Fatsal 2, ayat (tak suka memberikan kelebihan dari keperluannya) didjatuhi hukuman: kelebihan harta bendanya itu dirampas untuk kepentingan djihad dan harta-harta itu diserahkan kepada kas negara.
3. Orang yang melanggar Bab I, pasal 2, ayat 1,2 dan 3, didjatuhi hukuman dipendjara atau di ta'zir (denda) yang sepadan dengan keadaannya.
4. Orang yang melanggar Bab I, Fatsal 2, ayat 4, didjatuhi hukuman: dirampas (sesudah diberi peringatan).
5. Orang yang tersebut dalam Bab I, fatsal 4, ayat 5, didjatuhi hukuman seperti yang tersebut dalam Bab II, fatsal 7 ayat 3.

6. Orang yang mundur tak menuruti sjarat-sjarat jang tersebut dalam Bab I, futsal 5, ayat 1, 2, 3, dan 4, didjatuhi hukuman surat Al - Anfal , ayat 16.

BAB III atau IV

Fatsal 8

Djinayat

1. Djinajat dibagi mendjadi dua bagian
 - a. Qishas; dan
 - b. Dijat
2. Orang jang membunuh orang yang tak haq dibunuh, maka ia didjatuhi hukuman qishash.
3. Orang jang membunuh orang yang haq dibunuh, akan tetapi belum diputuskan oleh Imam atau wakilnja, didjatuhi hukuman kepadanja (orang jang membunuh) hukuman ta'zir (denda).
4. Orang membunuh, kemudian minta ampun kepada ahli - ahli warisnja, jika si ahli waris mengampuni si pembunuh itu didjatuhi hukuman : Dijat muqhalladhah (ganti rugi jang berat).
5. Orang yang melukai anggota dibagi menjadi dua matjam :
 - a. Melukai tak sampai mengurangi akal (orang jang dilukai) , didjatuhi hukuman : harus membayar Djiyat
 - b. Melukai sampai mengurangi akal (orang jang dilukai) , didjatuhi hukuman : Qishas. Menurut Al-Qur'an surat Al- Maidah ayat 45.

Fatsal 9

Barang rampasan dari musuh dibagi dua :

1. Ghanimah dan salab.
2. Fa'l.

Keterangan :

- a. Ghanimah: barang-barang jang didapat dari musuh dengan djalan pertempuran.
- b. Salab : barang -barang yang dipakai musuh pada waktu pertempuran.
- c. Fa'l : barang-barang jang dipakai musuh tidak dengan pertempuran.
- d. Tjaranja memberi barang-barang ghanimah.
 1. Ghanimah itu dibagi mendjadi dua bagian :
 - A. 1/5 (20 %) untuk :
 1. 4% _ Imam;
 2. 4% _ Fuqara dan masakin (=kaum fakir dan kaum miskin)
 3. 4% _ Mashalihul'l Muslimin (= untuk kemashlahatan kaum muslimin). Kekuasaan diserahkan pada Imam.
 4. 4% _ Ibnu'ssabil (=kaum jang berperang).
 5. 4% _ Jatama (=anak yatim).
 - B. 4/5 (80%) diserahkan bulat sebagai bagian Tentara Negara Islam Indonesia.
 2. Fa'l itu dibagi menjadi dua bagian :
 - A. 1/5 (20%)
 1. 4% _ Imam
 2. 4% _ Mushalihul'l-Muslimin (=untuk kemashlahatan kaum muslimin) Kekuasaan diserahkan kepada Imam.
 3. 4% _ Fuqara wa'l-masakin (=kaum fakir dan kaum miskin).
 4. 4% _ Ibnu'sabil (=mereka jang berperang).
 5. 4% _ Jatama (=anak-anak yatim)
 - B. 4/5 (80%): Diberikan bulat kepada keuangan negara untuk Mashalihul'l-Muslimin (=kemashlahatan kaum Muslimin).

3. Salab

Salab khususnja untuk tentara jang membunuhnja. Djika dalam membunuhnja bersama-sama (orang banyak), maka barang itu dibagi bersama-sama. Tambahan keterangan :
Semua ghanimah dan fa'i harus diserahkan kepada kas negara. Ongkos pengangkutan barang ghanimah dan fa'i diambil dari harga sebelumnya barang-barang itu dibagi-bagikan. Tjaranja diserahkan kepada kebidjikan Kepala Majelis Keuangan

Fatsal 10**Bojongan**

1. Bojongan dari orang kafir asli (orang jang ibu dan bapaknja kafir, yakni tak nikah setjara Islam). Jang perempuan hukumannja mendjadi Amat (budak). Jang laki-laki hukumannja mendjadi Abid (abid) Abid dan Amat adalah hak Negara. Ketetapan mendjadi Amat dan Abid adalah setelah diputuskan hukumannja oleh Imam dan wakilnja, Amat, apabila hendak diperistri Imam atau wakilnja. (Subulu'salam 46)
2. Bojongan (tawanan) dari orang murtad (orangtuanya telah bersjahadat dan menikah setjara Islam, tetapi menjalahi Undang - Undang Negara Islam), didjatuhi hukuman: harus bertaubat di dalam tempo 3 hari. Apabila ia tak mau bertaubat, kepadanya didjatuhi hukuman qishas (dibunuh mati). Perempuan bojongan orang murtad, apabila hendak dinikah, harus beridrah 3 kali haid (tiga bulan sepuluh hari), menurut biasanja. Idahnja mulai dihitug sedjak diputuskan oleh Imam atau wakilnja (hakim).

TUNTUNAN NO.IV**STRAF - RECH**

Bismillaahi rrahmaani rrahiiim

Wadza hakamtum bainan nasi an tahkuma bil'adli

BAB IV**Fatsal 11****Djinajat**

Pembunuhan itu ada tiga macam :

1. Sengadja membunuh ('amdun mahdun)
2. Salah membunuh (Khataun mahdun), seperti dimaksudkan membunuh hwan, terkena manusia terus mati.
3. Seakan-akan sengadja menurut ghalibnja tak membahayakan, karena memang tak bermaksud membunuh, lantas orang itu mati.

Fatsal 12**Qishash**

1. Siapa jang termasuk pasal 11, ayat 1 didjatuhi hukuman: 1 qishashi (dibunuh mati). Atau diwadjikan membajar dijat Mughallazhahi (jang diperberat) kalau dimaafkan oleh ahli-ahli waris orang jang dibunuh. Dan harus dibayar tunai kepunjaan sendiri.
2. Siapa jang termasuk fatsal 11, ayat 2 harus membajar Dijat Mukhaffafah (dijat enteng). Boleh ditijtil dalam tempo tiga tahun.
3. Siapa jang termasuk fatsal 11, ayat 3 harus membajar Dijat Mughallazhah sebagaimana jang termasuk pasal 11, ayat 1; hanya bolh ditijtil dalam tempo tiga tahun.

Fatsal 13**Kirafat**

1. Fatsal 12, ayat 1, 2 dan 3 harus dengan kifarat (memerdekakan Amat) .
2. Kalau ahli-ahli warisnja tak menutup ganti maka kepadanya didjatuhi hukuman: hanya wadjib membajar kirafat sadja.

Fatsal 14
Syarat Orang Diqishash

Syarat-syarat orang yang di-qishash itu ada empat:

1. Orang yang telah baligh;
2. Orang yang berakal;
3. Bukan bapaknja;
4. Orang yang membunuhnja tak lebih rendah daripada orang yang dibunuhnja, misalnja orang Islam membunuh orang kafir.

Fatsal 15
Qishash untuk Orang Banyak

1. Orang banyak diqishash sebab membunuh banyak orang
2. Barang siapa membunuh dengan sihir sama dengan membunuh orang dengan sendjata
3. Barang siapa (orang) yang mendjerumuskan orang ke dalam air atau api yang besar, sehingga orang itu mati karena tenggelam atau terbakar, dijatuhi hukuman seperti yang termaktub dalam fatsal 12, ayat 1.
4. Barang siapa (orang) yang mendjerumuskan orang ke dalam api atau air, yang menurut galibnja (biasanya) tak membahayakan, lantas orang itu mati karena sebab lain, seperti di dalamnja ada ular, kemudian orang itu digigit ular sehingga mati, maka orang yang mendjerumuskan itu, didjatuhi menurut Fatsal 2, ayat 3.

BAB V
Fatsal 16
Membunuh Kafir Dzimmi

1. Barang siapa orang membunuh kafir dzimmi dan sebagainya, atau membunuh orang yang belum diberi da'wah, didjatuhi hukuman menurut Fatsal 12, ayat 2.
2. Barang siapa (orang) yang membunuh orang yang dihukum mati, sebelum ada perintah dari Imam atau wakilnja, didjatuhkan kepadanja hukuman ta'zir (denda)

Fatsal 17
Merusak Anggota

1. Barang siapa yang merusak anggota orang lain, seperti memotong telinga satu (sebelah), didjatuhi hukuman qishash. Telinganja dipotong seperti ia telah memotong telinga orang.
2. Barang siapa yang merusak dua telinga atau dua mata atau menghilangkan salah satu panca indra, didjatuhi hukuman membajar Dijat Mughallazah.
3. Barang siapa yang melukai orang dikepalanja sehingga kelihatan tulangnja, didjatuhi hukuman : denda (menurut kebidjaksanaan hakim).
4. 'Abid (budak belia) yang membunuh atau merusak, didjatuhi hukuman setengahnja hukuman atas orang yang merdeka.

BAB VI
Fatsal 18
Hukum Orang yang Berzinah

Barangsiapa yang berbeuat zinah hukumannja :

1. Diradjam (dilempari batu sampai mati)
2. Diletjut 100 kali
3. Dita'zir
4. Dibuang paling lama satu tahun ke tempat yang paling dekat 1 Qashar (kira-kira 16 pos)

5. Dibandjara.

Keterangan:

1. Barang siapa yang berzina dengan mushhan (yang sudah merasakan djimak halal) didjatuhi hukuman menurut Fatsal 12, ayat 1.
2. Orang yang berzina dengan ghair mushhan (orang yang belum merasakan djimak halal) didjatuhi hukuman menurut Fatsal 18, ayat 2 dan 4.
3. Barang siapa melakukan zinah dengan chewan, didjatuhi hukuman ta'zir
4. Barangsiaapa (orang) yang mendubur dihad zina, ketjuali kepada bininja (istrinja) didjatohkan hukuman dita'zir.
5. Orang yang melakukan zina, tetapi kepada selain qubul atau dubur, didjatohkan hukuman di ta'zir .
6. Orang laki-laki atau perempuan sama hukumnja, ketjuali orang yang diduburnja.

Fatsal 19**Hadd Qadzhah (menuduh djinah)**

1. Sjarat orang menuduh djinah :
 - A. Harus jakin (kelihatan masuk dan keluarnya...)
 - B. Ada saksi empat orang laki-laki , kurang dari empat orang tidak sah;
 - C. Sengadja melihatnja karena akan menjaksikan
2. Siapa orang yang menuduh zinah dengan tidak memenuhi (tidak menepati) sjarat2 seperti di atas , didjatuhi hukuman didjilid (ditjambuk) 80 kali.

BAB VII**Fatsal 20****Minuman Keras**

1. Barang siapa yang sengadja meminum minuman keras, seperti arak dan lainnja yang biasanya memabokan (merusak akal), didjatuhi hukuman 40 kali djilid (tjambuk).
2. Orang yang minum arak atau selainnja, karena untuk obat sakit dengan sjarat mendapat adviceis dari dokter, hukumnja dibebaskan (tidak dihukum)

BAB VIII**Fatsal 21****Hukuman Begal dan Pencurian**

Orang yang membegal:

1. Dihukum mati dan disalib (dipantjer);
2. Dihukum mati biasa;
3. Dipotong tangan sebelah kanan dan kaki sebelah kiri;
4. Di-ta'zir dan dibandjara di tempat lain

Orang yang mentjuri:

Siapa orang yang mentjuri seharga ¼ dinar dari tempat yang tersimpan baik , untuk pertama kalinja dihukum; dipotong tangannya yang sebelah kanan dari pergelangannya; Kalau mentjuri lagi untuk kedua kalinja, dipotong kaki sebelah kiri , Kalau mentjuri yang ketiga kalinja, dipotong tangan kirinja; Kalau mentjuri yang keempat kalinja, dipotong kaki kanannya; Dan bila mentjuri lagi untuk kelima kalinja, dibuang ketempat yang paling dekat 1 qashar (16 pos) perdjalan.

Keterangan :

1. Siapa yang membegal dengan membunuh orangnja serta merampas hartanja, didjatuhi hukuman menurut Fatsal 21, ayat 1;
2. Siapa yang membegal dengan tidak merampas harta-bendanya (hanja membunuh saja), didjatuhi hukuman menurut Fatsal 21, ayat2;
3. Siapa yang membegal, hanja merampas barangnja (tidak merusak orangnja) , didjatuhi hukuman menurut fatsal 21, ayat 3;

4. Siapa yang menakut-nakuti orang yang lalu-lintas di jalan dengan tidak merusak apa-apa, didjatuhi hukuman futsal 21, ayat 4.

Fatsal 22

Dafu'shshil (Berdjaga-djaga terhadap Orang Djahat)

Barang siapa yang membunuh orang karena mendjaga dirinya atau harta-bendanya atau mendjaga kehormata istrinya, maka lantas sipendjahat terbunuh oleh orang lain, ia dibebaskan dari hukuman.

BAB IX

Fatsal 23

Murtad

1. Orang murtad, jaitu orang Islam yang mengganti ke-islamannya dengan l'tiqad (maksud, niat) atau dengan perkataan mengingkari iman sebagaimana ketcrangannya terdapat dalam kitab fiqh.
2. Maka orang itu oleh Imam atau hakim wadjib diperintah bertaubat,
3. Kalau orang itu setelah diperintah tidak mau bertaubat, maka orang itu didjatuhi hukuman berat (dibunuh mati).

Fatsal 24

Tarikh'sh – Shalah (T)

1. Siapa orang yang meninggalkan shalat dengan beriqad tidak mewadjibkan shalat, didjatuhi hukuman sebagaimana yang termaktub dalam futsal 23, ayat 1, 2, dan 3.
2. Siapa yang sengadja meninggalkan shalat dengan beri'tiqad bahwa shalat itu tidak wadjib, maka Imam wadjib memerintahkan shalat.
3. Kalau ia tidak mau menurut, ia didjatuhi hukuman berat (dibunuh mati).
4. Orang yang meninggalkan shalat karena lupa atau tertidur, tidak ada hukumannja, hanja diwadjibkan membajar shalatnja.
5. Orang 'abid (budak belia) hukumannja hanya setengah hukuman orang merdeka.

BAB X

Fatsal 25

Djihad

1. Orang yang wadjib berperang :
 - a. Orang Islam
 - b. Telah baligh;
 - c. Mempunyai ' akal;(tidak gila);
 - d. Merdeka;
 - e. Laki-laki
 - f. Sjehat dan
 - g. Lengkap anggotanja.
2. Orang2 yang dianggap musuh Islam :
 - a. Muharrieb (orang yang memerangi kita); namanja kafir harby.
 - b. Orang yang memihak musuh, menurut penyelidikan seksama dari orang Islam atau yang lain-lainnja, seperti mendjadi mata-mata atau kaki tangan musuh dan lain-lain.

Keterangan :

1. Fatsal 25 , ayat 2, sub a;

Kepada Iman dan Amir diperbolehkan mengambil satu diantara empat;

- a. Dihukum mati;
- b. Dipakai tukar atau ditebus dengan harta-benda;
- c. Didjadikan 'abid atau budak mendjadi ghanimah;

d. Dilepaskan.

2. Fatsal 25, ayat 2 dan sub b. Kepada Imam atau Amir diperbolehkan mengambil satu diantara tiga.

a. Dipakai sebagai penukar atau ditebus dengan harta benda;

b. Didjadikan budak atau ghanimah;

c. Dilepaskan.

Di dalam fatsal 25, ayat 1 dan 2, Imam dan Amir harus mengambil yang lebih menguntungkan kepada kaum Muslimin.

Fatsal 26

Tawanan

1. Tawanan itu ada dua bagian:
 - a. Laki-laki kafir yang berakal dan
 - b. Perempuan, anak-anak, orang gila dan bantji.
2. Barang-barang tinggalkan:
 - a. Barang-barang musuh yang ditinggalkan
 - b. Barang-barang yang diambil dari orang Musjrik;
 - c. Penjawa-penjawa tanah negara
 - d. Barang-barang kepunjaan orang murtad ketika dibunuh sewaktu murtad;
 - e. Barang-barang kepunjaan orang kafir aman yang tidak ada ahli-ahli warisnya;
 - f. Seper-puluhan harga dagangan orang - orang kafir yang berdagang di negara kita.

Keterangan :

Menurut Aimmatu'ttatsalasiijah semua yang bersangkutan diatas itu, termasuk menjadi harta Fa'I, semua itu dimasukkan ke dalam bagian Mashalihul-Muslimin (Kas Negara).

Menurut Imam Sjafie'I: 4/5 untuk nafakah (gadjih pegawai negara), sedangkan yang seper-lima lagi menurut seperti yang seper-limanya dalam bagian Ghanimah.

BAB XI

Fatsal 27

Pemeliharaan Mayat

1. Orang Islam jmendapat hukuman mati , majatnja wadajib dipelihara sebagaimana biasa.
2. Majat kafir harbi tidak diwadjibkan dipelihara sebagaimana mestinja, akan tetapi harus dikubur atau sebagainja, untuk menjaga keselatan umum.
3. Majat orang murtad diperlakukan seperti majat muharrah.
4. Orang yang dibunuh dengan membaca sjahadat , orang itu disebut orang Islam. Pemeliharaan majatnya dilakukan sebagaimana yang termaktub dalam fatsal 27, ayat 1.
5. Orang Islam yang gugur di dalam pertempuran atau terluka parah , kemudian meninggal seusai pertempuran di dalam tempo 24 djam, maka orang itu masuk golongan mati sjahid Dunia-Achirat haram diadusi (dimandikan) dan dishalatkan hanya wadajib dibungkus dengan pakaiannja.
6. Orang Islam yang dibunuh musuh bukan di Medan Pertempuran, pemeliharaannya menurut fatsal 27 ayat 1.
7. Barang kepunjaan orang Islam yang mati harus dikembalikan kepada ahli-wariestnja.

BAB XII

Fatsal 28

Keterangan Hukum

1. Sjarat terhadap Imam:
 - a. Imam terhadap Bughot harus mengadakan pemeriksaannya yang seksama.
 - b. Tidak boleh diperangi Bughot, sebelum Imam mengadakan da'wah.
2. Bughot boleh diperangi:
 - a. Orang Bughot boleh diperangi sesudah mengadakan sebagaimana yang termaktub dalam futsal 28 sub. a dan b.
 - b. Tawanan Bughot tidak boleh dihukum mati.
 - c. Kekajaannya tidak menjadi ghonimah, tetapi harus dikembalikan kepada ahli-waristnja.
3. Hukum itu ada dua:
 - a. Hukum yang bersangkutan dengan Allah semata-mata.
 - b. Hukum yang bersangkutan dengan manusia.
4. Tentang saksi Sub. I.
 - a. Saksi untuk dalam ayat 3 sub.a;
 - (1) harus empat orang laki2
 - (2) tidak boleh diganti dengan perempuan.
 - (3) Tidak boleh diganti dengan sumpah
 - b. Jang termasuk ayat 3 sub. (1), jaitu seperti djinah, mendubur mewati chewan.
 - c. Saksi kepada orang jang menuduh mengakui djinah (ikrar) tjukup dg. dua orang.
 - d. Orang jang mendubur dan mewati chewan, tjukup dengan saksi dua orang.
 - e. Jang menjaksikan mendjalankan hukuman ber-djinal, tjukup dengan dua orang saksi.
 - f. Saksi Ru'jat bulan Ramadhan tjukup dengan satu orang.
5. Tentang saksi Sub. II.
 - a. Tjukup dengan saksi laki2 dua orang, tidak boleh dengan satu orang laki2 dan dua orang perempuan, atau seorang laki2 dengan sumpah, jaitu saksi menolak, menikahi, menghukum orang meminum arak, mengishos, mena'zier.
 - b. Jang tjukup dengan saksi seorang laki2 dan dua orang perempuan, atau seorang laki2 dengan sumpah: jaitu dalam hukum Adam (manusia) jang mengenai harta benda seperti Muamalah dll.
 - c. Jang khusus dengan laki2 seorang dan dua orang perempuan, atau empat orang perempuan, jaitu dalam biasanja tidak diketahui oleh laki2 seperti haedl, nifas dan sebagainya.

BAB XIII

Fatsat 29

1. Adab-adaban Mendjalankan Hukum Qishosh.
 - a. Hakim harus hadir atau Wakilnja
 - b. Ada dua saksi
 - c. Menghadlirkan orang2 jang diperlukan mendjaga
 - d. Diperintahkan qodlo shalat, atau lainnja kalau ada wadjib jang ditinggalkan (terhadap orang Islam)
 - e. Diperintahkan berwasiat.
 - f. Diperintahkan bertaubat dari segala dosa2
 - g. Diambil ke tempat hukum-hukumannya, harus dngan ramah tamah, tidak boleh dengan perkataan keras.
 - h. Ditutup 'auratnya dan matanya dengan kain, djangan sampai melihat alat pembunuhan.
 - i. Dipandjangkan lehernja, dan dipukul dengan kelcwang jang sangat tadjam.

2. Ta'zir Pengadjaran selain dari Had:
 - a. Tjara mendjalankan menta'zier itu, ialah dengan pukulan menjamai pada admil-hudud 40 (empar puluh) pukulan, djadi pukulan ta'zir itu, dari mulai sembilan belas (19) (minimum) sampai tigapuluh sembilan (39) kali minimum.
 - b. Dipendjara atau siapa sadja sekiranya mendjadi pendjaraan kepada orang itu menurut idjtihadnja Imam.
3. Orang jang mendapatkan ta'dzir itu, orang2 jang mendjalankan dosa selain jang mengenai hukum kedua atau kifarati, seperti:
 - a. Mendubur kepada bininja atau djarijahuja.
 - b. Mubasjarah selain dari djinah, seperti mentjium dll.
 - c. Menjari kenang dari nisab, menuduh (selain dari menuduh djinah).

**Fatsal 30
Hukum Hudud**

Segala hukum Hudud berhubung pada masa ini. Negara Islam Indonesia di dalam perang, tidak didjalankan ketjuati hukum mati.

Undang2 ini mulai berlaku, pada hari mulai disebarkan

**Babul-Miftah 4 Juni 1949/6 Sjawal 1360
Madjlis Kehakiman
Negara Islam Indonesia
Kepala "P"**



Foto-1. Musholla di Cisayong yang dipakai Konferensi tahun 1948.



Foto-2 : Musholla Tampak depan.

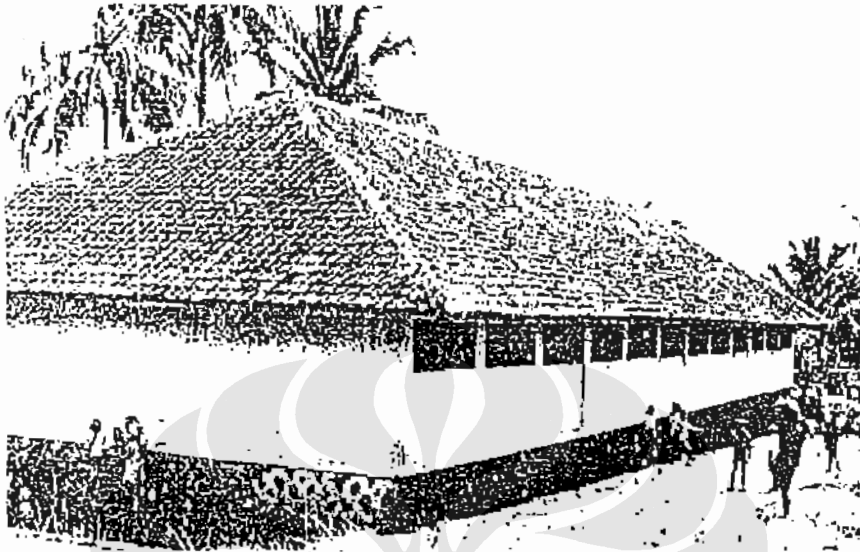


Foto-3. Gedung Madrasah Ibtidaiyah yang dipakai Konferensi Cipeundeuy.



Foto-4 : Soekarnadji Maridjan Kartosoewirjo



SM Kartosoewirjo beserta para pengikutnya yang terdapat bergambar kenka proklamasi "Negara Islam Indonesia".

(kine Bistang Timur)

Foto-5. Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo beserta anggota Dewan Imamah pada saat proklamasi Negara Islam Indonesia 7 Agustus 1949 di Cisampang Cidugaleun Kecamatan Cigalontang.

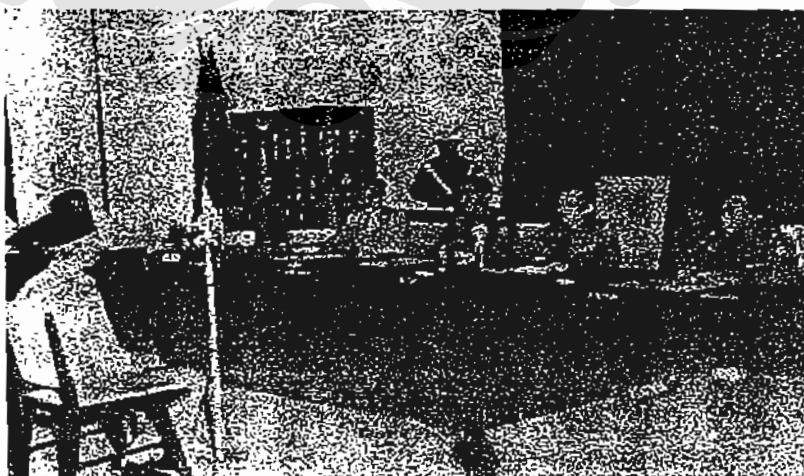


Foto-6: S.M. Kartosoewirjo dalam sidang Mahadper 1962



Foto-7: S.M. Kartosuwirjo dalam Sidang Mahadper 1962.



Foto-8: Warga NII ketika turun gunung tahun 1962.

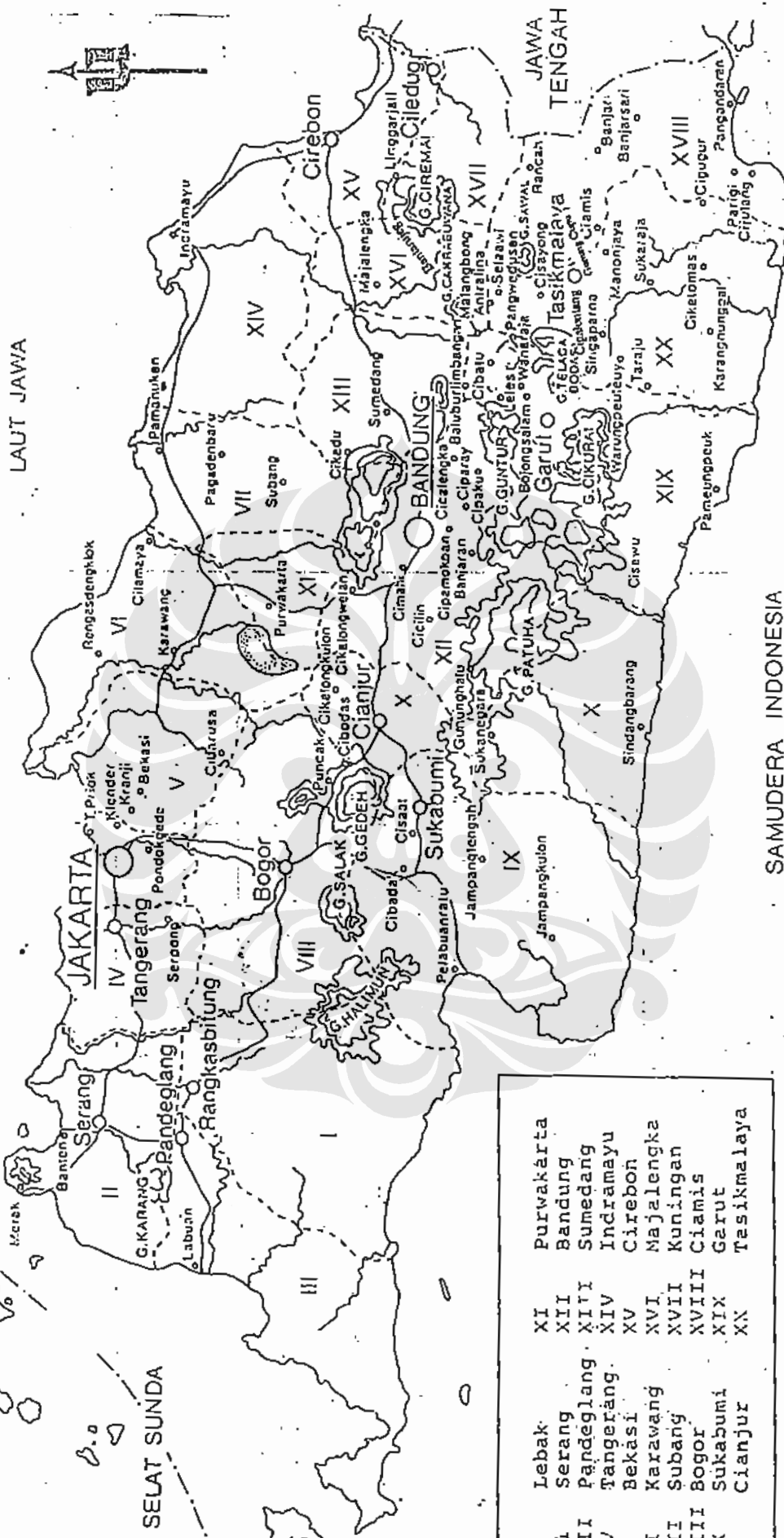
MARS T.I.I

**KITA TENTARA ISLAM INDONESIA
PEDANG KEADILAN PEMBELA KEBENARAN
BELA MENEGAKKAN SEMUA HUKUM ALLAH
MAJU BERPERANG JIHAD FI SABILILLAH
PEMBASMI PENJAJAH ANGKARA MURKA**

**SIAP TEGAK AWAS DAN WASPADA
MENGGEMPUR MUSUH
ITULAH KEWAJIBAN KITA
TENTARA ISLAM INDONESIA**

JAWA BARAT

LAUT JAWA



SAMUDERA INDONESIA

0 100 km

I	Lebak	XI	Purwakarta
II	Serang	XII	Bandung
III	Pandeglang	XIII	Sumedang
IV	Tangerang	XIV	Indramayu
V	Bekasi	XV	Cirebon
VI	Karawang	XVI	Majalengka
VII	Subang	XVII	Kuningan
VIII	Bogor	XVIII	Ciamis
IX	Sukabumi	XIX	Garut
X	Cianjur	XX	Tasikmalaya

Batas Provinsi

Batas Kabupaten

Jalan





Wawancara

Affandi Ridhwan

Lahir di Majalengka 26 Juni 1922, Sekolah di Darul Ulum, tahun 1945 aktif di Kepanduan Persatuan Ummat Islam (PUI), tahun 1948 aktif di Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPPI) dengan jabatan Sekertaris Umum Jawa Barat. Pada tanggal 10-11 Febuari 1948 mengikuti Konferensi Cisayong utusan dari GPII. Pada tahun 1952 dijatuhi hukuman di LP Suka Miskin dan Cipinang, karena keterlibatannya dengan Darul Islam. Mulai tahun 1999 ia menjabat Ketua pada Pengurus Pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)

Dodo Mohammad Darda

Lahir di Malangbong pada tahun 1934, Anak pertama Soekarmadji Maridjan Kartoseowirjo tidak pernah mengikuti sekolah formal, pada tahun 1948 ikut melihat Konferensi Cisayong 1948, terlibat aktif dalam Gerakan Darul Islam pada thun 1949. Kemudian pada tahun 1952 ditangkap oleh Pasukan TNI dan dipenjara. Bersama kakeknya yang bernama Ardiwisastra, aktivis Institut Suffah. Pada tahun 1958-1962 menjabat Komandan Markas, menggantikan Djaja Sudjadi, pangkat terakhir Kolonel TII. Membawahi Komadan Pengawal (Dan Wal) Atjeng Kurnia. Menikah dengan putri Sanoesi Partawidjaja memiliki anak satu. Pada tahun 1976 ditangkap dan dipenjarakan oleh Pemerintah Orde Baru, baru dikeluarkan tahun 1989.

Tachmid Rachmat Basuki.

Wawancara

Lahir tahun 1942 di Malangbong, pernah kuliah di FISIP UI 1964-1967. Jabatan pada tahun 1958-1962 Komandan Kala Karya Adilaga), Kesatuan khusus dalam Markas Bantala Seta (Markas besarnya NII), pangkat terakhir Letnan Kolonel TII

H. Masykur

Lahir di Singaparna, 4 April 1929. Mulai aktif di Hisbullah sebagai Sekertaris Seksi dibawah komandan Didi, kemudian masuk Tentara Islam Indonesia (TII) di Kesatuan Seksi II Kompi 3 Batalyon Khalid bin Walid Resimen I. Ketika peristiwa Gunung Cupu H. Maskur ikut terlibat. Pada tahun 1952 pindah ke tugas ke Ciamis Utara dalam kesatuan Batalyon 241 TII. Tahun 1980 dipenjarakan oleh Pemerintah Orde Baru, dituduh terlibat Komando Jihad.

Jamhur Sudrajat

Staf Sekertariat Kepala Staf Umum (KSU) NII, umur 75 tahun.